

**KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR)**

***EDUCATION PARTNERSHIP IN MAKASSAR
(CASE STUDY AT SMPN 8 MAKASSAR)***

ISLAHUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

DISERTASI
KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR)

Disusun dan Diajukan oleh
ISLAHUDDIN
Nomor Pokok: 11A17040

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada tanggal 5 Oktober 2016

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Ismail Tolla, M.Pd.
Promotor

Prof. Dr. Mansyur, M.Si.
Kopromotor

Mengetahui:

Ketua
Program Studi
Ilmu Pendidikan

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar

Prof.Dr.H.Muhammad Arifin Ahmad, M.A.
NIP. 19500212 197602 1 001

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
NIP. 19641222 199103 1 002

**KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR)**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Derajat

Doktor

Program Studi

ILMU PENDIDIKAN

Disusun dan Diajukan Oleh

ISLAHUDDIN

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PRAKATA



Subhaanallah ‘Maha Suci Allah’. *Alhamdulillah* ‘Segala puji bagi Allah’. *Laa ilaaha illallaah* ‘Tiada Tuhan selain Allah’. *Allahu Akbar* ‘Allah Maha Besar’. Kepada Allah SWT kuserahkan semua kelemahanku karena Dialah yang Maha Kuat. Kepada Allah SWT kuserahkan semua ketakberdayaanku karena Dialah yang Maha Perkasa. Kepada Allah SWT kuserahkan semua kebodohanku karena Dialah yang Maha Berilmu. Kepada Allah SWT kuserahkan kemiskinanku karena Dialah yang Maha Kaya. *Laa haula wa laa quwwataa illaa billaah* ‘tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah’ yang telah dipinjamkannya kepada diriku sehingga disertasi yang berjudul **“Kemitraan Pendidikan di Kota Makassar”** dapat diselesaikan.

Terima kasih buat ibu (Sitti Daera’ Daeng Te’ne) yang telah mengandungku 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Melahirkanku dengan menentang maut. Menyapihku selama 2 tahun dengan sabar. Membesarkanku sepenuh hati. Saya hanya bisa berharap balasan dari yang Maha Rahman untuk segala kebaikan-kebaikanmu.

Terima kasih kepada ayah (Muhammad Thahir Daeng Tiro) yang telah menyantuniku. Memberiku pakaian agar tak kedinginan. Menyekolahkanku hingga sarjana. Membuatkanku rumah sebagai tempat naungan dari terik matahari dan dari terpaan air hujan. Melindungiku dari gangguan kenakalan teman-temanku hingga aku

besar. Ayah yang memperkenalkanku dengan Tuhan lewat contoh ruku' dan sujudnya. Hanya kepada Allah kuserahkan untuk membalas pengorbananmu.

Terima kasih untuk mertuaku (H. Abdul Malik Daeng Gassing dan Hj. Baitsah Daeng Kanang) yang telah menerimaku sebagai suami dari anaknya yaitu isteriku tercinta Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. (Daeng Tanang). Isteriku inilah motivator yang handal bagi diriku. Seuntai kalimat motivasi yang tidak bisa kulupakan ketika terbersit godaan untuk berhenti kuliah di S3. Isteriku berkata, **“Kalau engkau berhenti sebelum doktor, maka selamanya dirimu dikenang sebagai pecundang oleh anak cucumu”**. Makhluk satu ini yang sering kusapa “cinta-cantikku” sengaja Tuhan kirim kepadaku sebagai teman curhat berbagi suka maupun duka.

Terima kasih kepada anak-anakku Fadhil Maliky Islah (Daeng Gassing) dan Yassir Sabily Islah (Daeng Naba). Merekalah pemicu semangatku yang selalu kujadikan alasan ketika orang lain bertanya kepada saya, “untuk apa kau sekolah S3?” Maka jawabku, “supaya anakku menjadikanku contoh inspirasi semangat dalam menuntut ilmu”.

Terima kasih kepada saudara-saudaraku Daeng Ngai, Daeng Rappo, Daeng Beta, Daeng So'na, Daeng Gassing, Daeng Buang, Daeng Baji' (Mama Indang), Daeng Ngugi, Bapak Kumis, Daeng Jimo' (Bunda), Daeng Nanring, Daeng Ruppaa, Daeng Ni'ni, Daeng Pali, Daeng Tasanna, Daeng Tulo, Daeng Kanang, Daeng Rannu, Daeng Jimo, Daeng Bantang, Daeng Ranti, Daeng Situju, Daeng Mimo, Daeng Tulung, dan kerabat handaitolan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.

Secara khusus terima kasih kepada Prof. Dr. H. Ismail Tolla, M.Pd. selaku promotor yang senantiasa menginspirasi saya dengan ide-ide kreatif, inovatif, dan menyiapkan waktu lama untuk mendiskusikan penelitian ini mulai dari awal hingga selesai. Terima kasih kepada Prof. Dr. Mansyur, M.Si. selaku kopromotor yang senantiasa berani melakukan pembelaan jika ada masalah yang tidak sesuai dengan prosedur ilmiah, kata beliau, “jalan saja, nanti saya yang tanggung jawab!”

Selesainya penelitian ini tidaklah berdiri sendiri tetapi berada dalam sebuah sistem kemitraan. Kemitraan yang melibatkan banyak elemen dengan fungsi yang diperankan masing-masing. Oleh karena itulah, sehubungan dengan penyelesaian laporan penelitian ini secara khusus pula saya sampaikan ucapan terima kasihku yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Arifin Ahmad, M.A. selaku penguji internal
2. Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. selaku penguji internal
3. Prof. Dr. Hj. Rabihatun, M.S. selaku penguji internal
4. Prof. Dr. H. Darman Manda, M.Hum. selaku penguji internal
5. Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M.A. (Ed). selaku penguji eksternal

Mereka adalah tim yang solid. Merekalah yang senantiasa mencurahkan pikiran-pikiran ilmiah, pikiran-pikiran inspiratif, kritikan-kritikan logis, motivasi, spirit, dan jalan keluar dalam penyempurnaan laporan penelitian ini.

Secara kelembagaan tentunya semua ini tidak akan mungkin tercapai apabila tidak didukung oleh pejabat, pegawai di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itulah terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar beserta keempat Wakil Rektor,
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar beserta ketiga Asisten Direktur,
3. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan yang selalu proaktif memantau dan mengingatkan penulis,
4. Dosen dan staf pegawai pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan pelayanan optimal kepada kepentingan mahasiswa,
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya,
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar beserta stafnya,
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar,
8. Terkhusus Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (Ahmad Hidayat, S.Pd., M.Pd.),
9. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (Dr. H. Muh. Hasbi, M.Pd.),
10. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar,

11. Terkhusus Kepala SMP Negeri 8 Makassar, Hikmah Manganni, S.Pd., M.Pd.,
12. Kepala SMA Negeri 9 Makassar beserta civitas akademika.

Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada para informan, teman seperjuangan Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Andi Saddia, Abd. Muis, Muh. Yusuf Hidayat, Thamrin Paelori, Dr. Muh. Syahrir, Dr. Saenab, Dr. Arafah, Dr. Musta'in Tahir, Dr. Cheri, Dr. Bungadara, Muh. Yusuf Mappiasse, Muhammad Amir Pada, Pariabti Palloan, Widya, Yul, Dr. Nadrah, dan lain-lain yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Secara khusus pula saya ucapkan jazaakallaahu khairal jazaa kepada teman-teman da'i ilallaah H. Arsyi Amin, Ustadz Hasbullah, H. Rivai, Hamka, H. Sudirman, Ustadz Abdullah, Arif, Akbar, Sudirman, Alam, Daeng Gassing, Umar Danto, Ustadz Abdul Rahman dan seluruh ahbab-ahbab pengurus dan pelanjut usaha Rasulullah SAW yang menjadi bahagian dari aktivitas keseharianku selama ini. Semoga semua yang telah kita lakukan diberkahi oleh Allah Yang Maha Mengetahui.

Makassar,

Juli 2016

Islahuddin

PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI

Saya, ISLAHUDDIN

Nomor Pokok: 11A17040

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul **Kemitraan Pendidikan di Kota Makassar** merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam disertasi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari disertasi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Tanda tangan,.....,

Tanggal, Juli 2016

ABSTRACT

ISLAHUDDIN. 2016. Educational Partnership in Makassar City (Case Study at SMPN 8 Makassar) (supervised by Ismail Tolla and Mansyur).

The study aims at answering and explaining (i) the roles of family in education in Makassar city, (ii) the roles of the school in education in Makassar city, (iii) the roles of society in education in Makassar city, (iv) the roles of government in education in Makassar city, (v) the educational partnership in Makassar city, and (vi) the model of educational partnership implementation in Makassar city.

The study employed qualitative approach with a case study. Data were collected through interview, observation, and documentation. The informants of the study were 19 people consisted of 5 students, 4 parents, 1 headmaster, 4 teachers, 3 prominent people in Office of Education and Culture in Makassar, and 2 society members. Data were analyzed by employing Spradley model.

The results of the study reveal that (i) the roles of family in education in Makassar city have positive aspects, namely parenting and learning to home; whereas, communicating, volunteering, decision making, and collaborating with community still need improvement, (ii) the roles of the school in education in Makassar city show great achievement. In general, the roles of education had been conducted well. The obstacles are related to partnership with parents and societies, (iii) the roles of society in education in Makassar city are various; some are supporting but many made the education outcomes biased; thus, the existence of school committee as the closest community with the school needs to be optimized both in its roles and authority, (iv) the roles of government in education in Makassar city are ideal conceptually, but it needs to be re-reviewed and optimized actually, (v) the educational partnership in Makassar city has yet to achieve the degree of totality (full collaboration). The type of educational partnership between the family and the school is coalition; the type of educational partnership between the family and the society is alliance; and the type of educational partnership between the school and the society is partnership, and (vi) the model of educational partnership implementation in Makassar city of the result of synthesis based on the roles of educational partnership analysis is named *Mitra Kemas Kelola Selamat* Model. The educational partnership can run effectively if all the elements are in integrative collaborative systems.

ABSTRAK

ISLAHUDDIN. 2016. *Kemitraan Pendidikan di Kota Makassar (Studi Kasus di SMP Negeri 8 Makassar)* (dibimbing oleh Ismail Tolla dan Mansyur).

Tujuan penelitian untuk menjawab dan menjelaskan (i) peran keluarga dalam pendidikan di Kota Makassar, (ii) peran sekolah dalam pendidikan di Kota Makassar, (iii) peran masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar, (iv) peran pemerintah dalam pendidikan di Kota Makassar, (v) kemitraan pendidikan di Kota Makassar, (vi) model implementasi kemitraan pendidikan di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan sebanyak 19 orang (5 anak didik, 4 orangtua, 1 kepala sekolah, 4 guru, 3 pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2 anggota masyarakat). Teknik analisis data menggunakan model Spradley.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) peran keluarga dalam pendidikan di Kota Makassar memiliki sisi positif pada fungsi *parenting*, dan *learning to home*, sedangkan pada fungsi *communicating*, *volunteering*, *decision making*, dan *collaborating with community* masih perlu perbaikan, (ii) peran sekolah dalam pendidikan di Kota Makassar menunjukkan prestasi yang membanggakan. Secara umum fungsi pendidikan telah dijalankan dengan baik. Adapun kekurangannya adalah hal-hal yang terkait kemitraan dengan orangtua dan masyarakat, (iii) peran masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar sangat beragam, ada yang mendukung tetapi banyak yang membiaskan hasil pendidikan, sehingga Komite Sekolah sebagai komunitas terdekat dengan sekolah perlu dioptimalkan, baik fungsi maupun kewenangannya, (iv) peran pemerintah dalam pendidikan di Kota Makassar secara konseptual sangat ideal namun secara aktual masih perlu ditinjau ulang dan dioptimalkan, (v) kemitraan pendidikan di Kota Makassar dalam tri pusat pendidikan belum mencapai peringkat totalitas (kolaborasi penuh). Tipe kemitraan keluarga dan sekolah adalah tipe koalisi, tipe kemitraan keluarga dan masyarakat adalah tipe aliansi, dan tipe kemitraan pendidikan antara sekolah dan masyarakat adalah tipe partnersip, (vi) Model implementasi kemitraan pendidikan di Kota Makassar hasil sintesis berdasarkan analisis peran kemitraan pendidikan dinamakan Model Mitra Kemas Kelola Selamat. Kemitraan pendidikan ini dapat berjalan efektif apabila semua elemen berada dalam sistem kolaborasi yang terintegrasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoretis	16
2. Manfaat Praktis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pendidikan dalam Perspektif Teoretis dan Praktis	18
1. Pendidikan	18
2. Makna Pendidikan	18
3. Hukum Dasar Pendidikan	23

4. Teori Pendidikan	27
5. Pendidikan dalam Tinjauan Psikologis	31
6. Pendidikan dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan	40
7. Pendidikan dalam Perspektif Politik	48
8. Kebijakan Pendidikan	57
B. Kemitraan dalam Pendidikan	67
1. Makna Kemitraan	67
2. Elemen Lembaga Kemitraan dalam Pendidikan	70
C. Mutu Pendidikan	115
1. Makna dari suatu Mutu	115
2. Mutu dan upaya Peningkatan Mutu Pendidikan	119
3. Karakteristik Pendidikan menurut <i>Total Quality Education</i>	121
D. Kerangka Pikir	124
BAB III METODE PENELITIAN	127
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	127
B. Subjek Penelitian	127
C. Fokus Penelitian	128
D. Deskripsi Subjek dan Fokus Penelitian	129
1. Deskripsi Subjek Penelitian	129
2. Deskripsi Fokus Penelitian	130
E. Instrumen Penelitian	134

F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data	135
1. Teknik Pengumpulan Data	135
2. Teknik Pengabsahan Data	137
G. Teknik Analisis Data	138
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	139
A. Kondisi Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar	139
1. Fungsi <i>Parenting</i>	139
2. Fungsi <i>Communcating</i>	153
3. Fungsi <i>Volunteering</i>	160
4. Fungsi <i>Learning to Home</i>	162
5. Fungsi <i>Decision Making</i>	167
6. Fungsi <i>Collaborating With Community</i>	171
B. Keberadaan Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar	173
1. Kondisi Fisik SMP Negeri 8 Makassar	173
2. Budaya SMP Negeri 8 Makassar	190
3. Keberadaan Fungsi Pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar	221
C. Keberadaan Masyarakat sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar	239
1. Fungsi Pemberdayaan	239
2. Fungsi Partisipasi	246
3. Fungsi Inklusi	251
4. Fungsi dalam Penentuan Nasib Sendiri	253

D. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Bidang Pendidikan	256
1. Penanggung Jawab Pendidikan	259
2. Pembuat, Pembina, dan Pengendali Kebijakan Pendidikan	263
3. Penjamin Dana Pendidikan	268
4. Penyelenggara Pendidikan Bermutu	273
E. Pembahasan	277
1. Peran Keluarga dalam Pendidikan di Kota Makassar	277
2. Peran Sekolah dalam Pendidikan di Kota Makassar	328
3. Peran Masyarakat dalam Pendidikan di Kota Makassar	354
4. Peran Pemerintah dalam Pendidikan di Kota Makassar	371
5. Kemitraan Pendidikan di Kota Makassar	397
6. Usulan Model Kemitraan Pendidikan di Kota Makassar	438
BAB V PENUTUP	453
A. Kesimpulan	453
B. Saran	455
DAFTAR PUSTAKA	457
LAMPIRAN	465

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1. Proses Perumusan Kebijakan	65
2.2. Fungsi-Fungsi Lembaga yang Bermitra dalam Pendidikan	112
2.3. Perbandingan antara Pendidikan Tradisional dan TQE	122
4.1. Perilaku Peserta Didik sebagai Hasil Pemberian Bimbingan	145
4.2. Perawatan Peserta Didik oleh Orangtua di SMP Negeri 8 Makassar	148
4.3. Daftar Perilaku Peserta Didik Hasil Motivasi	151
4.4. Sikap Peserta Didik Sebagai Cerminan Kedisiplinan	153
4.5. Masalah yang Membutuhkan Komunikasi Dua Arah	158
4.6. Daftar Kegiatan yang Memerlukan Kesukarelaan Orangtua	162
4.7. Kegiatan Pengembangan Diri	167
4.8. Partisipasi Orangtua dalam Pengambilan Keputusan Sekolah	170
4.9. Kepala SMP Negeri 8 Makassar sejak 1977	174
4.10. Data Profil Penting SMP Negeri 8 Makassar	175
4.11. Civitas Akademika SMP Negeri 8 Makassar	177
4.12. Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Status	177
4.13. Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Pendidikan Terakhir	178
4.14. Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Golongan	179
4.15. Guru Tetap SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Mata Pelajaran	180
4.16. Guru SMP Negeri 8 Berdasarkan Jenis Kelamin	181

4.17. Tenaga Administrasi dan Keamanan SMP Negeri 8 Makassar	182
4.18. Tenaga Tetap Administrasi Berdasarkan Golongan	183
4.19. Kondisi Jumlah Peserta Didik per Juli 2015	183
4.20. Kegiatan Ekstrakurikuler SMP Negeri 8 Makassar	184
4.21. Bangun Ruang SMP Negeri 8 Makassar	186
4.22. Ruang Terbuka SMP Negeri 8 Makassar	189
4.23. Fasilitas Khusus SMP Negeri 8 Makassar	189
4.24. Kegiatan dalam Rangka Fungsi Adaptasi	224
4.25. Daftar Mata Pelajaran	225
4.26. Kegiatan yang Berhubungan Fungsi Integrasi	227
4.27. Aktivitas yang Berhubungan Fungsi Diagnostik	231
4.28. Bentuk Upaya Pemetaan Potensi di SMP Negeri 8 Makassar	233
4.29. Fungsi Selektif yang Diperankan di SMP Negeri 8 Makassar	236
4.30. Kegiatan <i>Helping and Referral Function</i>	239
4.31. Fasilitas Fisik Pemberdayaan Masyarakat	244
4.32. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan	249
4.33. Peran Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Inklusi	252
4.34. Peran Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Penentuan Nasib Sendiri	255
4.35. Wadah Pendidikan di Masyarakat Kota Makassar	256
4.36. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	258
4.37. Kebijakan Populer Pemerintah Kota Makassar dalam Pendidikan	266

4.38. Masalah Pembiayaan Pendidikan yang Terjadi di Kota Makassar	270
4.39. Kinerja terhadap Layanan dan Luaran Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Seluruh Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar	275
4.40. Kondisi Pendukung Komunikasi Kemajuan Anak	302
4.41. Tiga Paradigma Kemitraan Pendidikan	339
4.42. Tipe Kemitraan dan Ciri-Cirinya	402
4.43. Sintesis Kemitraan Keluarga dan Sekolah (SI MITRA KELOLA)	414
4.44. Sintesis Kemitraan Keluarga dan Masyarakat (SI MITRA KEMAS)	426
4.45. Sintesis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat (SI MITRA SELAMAT)	435

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1. Hubungan antara Masyarakat dan Pendidikan	41
2.2. Hubungan antara Pendidikan dan Politik	57
2.3. Hubungan antar Persyaratan Fungsional	111
2.4. Pandangan Tradisional hubungan Biaya dan Mutu	117
2.5. Kerangka Pikir	125
4.1. Beranda SMP Negeri 8 Makassar	173
4.2. Peta Kecamatan Manggala tempat SMP Negeri 8 Makassar	174
4.3. Denah/Site Plan SMP Negeri 8 Makassar	188
4.4. Pintu Gerbang SMP Negeri 8 Makassar	191
4.5. Jalanan Masuk sekaligus Tempat Parkir Kendaraan	192
4.6. Tulisan Penyambutan Peserta Didik	193
4.7. Ajakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)	193
4.8. Ajakan sekaligus Motivasi	194
4.9. Tulisan Dukungan Sekolah terhadap Program Pemerintah Kota	195
4.10. Visi dan Misi SMP Negeri 8 Makassar	195
4.11. Tulisan Inspiratif dan Motivasi untuk Guru	197
4.12. Lepas Sambut Peserta Didik Orangtua dengan Guru	206
4.13. Guru Ramai-ramai menyambut Peserta Didik	207
4.14. Penyelesaian Masalah Peserta Didik dengan Komunikasi	209

4.15. Kepala Sekolah Menyalami Peserta Didik Satu Persatu	214
4.16. Tekad dan Dukungan kepada Program Pemerintah	218
4.17. Interaksi Alamiah di SMP Negeri 8 Makassar	219
4.18. Ajakan Mengawali semua Kegiatan dengan Do'a	225
4.19. Himbauan Menyikapi Penyalahgunaan Narkoba	245
4.20. Himbauan Pengelola Bioskop	246
4.21. Demonstrasi Guru di DPRD Kota Makassar	270
4.22. Unjuk Rasa Menuntut Pendidikan Gratis Total	272
4.23. Kebingungan Peserta Didik menyikapi Nilai Ganda	336
4.24. Siapa yang Saya Ikuti?	337
4.25. Penyambutan bagi Peserta Didik oleh Guru	342
4.26. Himbauan Moral yang Sebaiknya Ada di Tempat Rumah Bermain	360
4.27. Permainan Tempo Dulu yang hampir Punah	362
4.28. Usulan Model MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT	439

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Kisi-Kisi Instrumen Peran Keluarga dalam Pendidikan di Kota Makassar	466
2. Kisi-Kisi Instrumen Peran Sekolah dalam Pendidikan di Kota Makassar	477
3. Kisi-Kisi Instrumen Peran Masyarakat dalam Pendidikan di Kota Makassar	482
4. Kisi-Kisi Instrumen Peran Pemerintah dalam Pendidikan di Kota Makassar	488
5. Pedoman Observasi	492
6. Pedoman Catatan Hasil Wawancara	495
7. Buku Harian (<i>Log Book</i>) Pengalaman Lapangan	496
8. Surat Persetujuan Badan Kesbang dan Politik Kota Makassar	497
9. Surat Izin Penelitian Tahap I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	498
10. Surat Izin Penelitian Tahap II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	499
11. Tata Tertib dan Tata Krama SMP Negeri 8 Makassar	500
12. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	505
13. Riwayat Hidup Penulis	506

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki manusia. Berhasilnya manusia karena keberhasilan pendidikan. Berhasilnya pendidikan karena keberhasilan manusia. Manusia dan pendidikan memiliki hubungan *reciprocal* 'timbal-balik'. Pendidikan dan kehidupan manusia selalu beriringan. Dimana manusia berada di situ ada pendidikan. Pendidikan merupakan anugerah Tuhan yang khusus untuk manusia.

Hubungan *reciprocal* antara manusia dan pendidikan juga bermakna bahwa kegagalan pendidikan akibat dari kegagalan manusia. Kegagalan manusia disebabkan oleh gagalnya pendidikan. Pendidikan adalah upaya manusia yang dilakukan secara sadar. Tetapi tidak berarti bahwa ketika manusia rusak disebabkan oleh pendidikan yang sengaja dirancang untuk merusak. "Harimau saja tidak memakan anaknya sendiri", demikian pepatah menggambarkan tentang kasih sayang. Tetapi mengapa sering terjadi perilaku manusia yang justru menodai nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan adalah sebuah sistem, baik dalam proses maupun hasil. Dalam bentuk proses, pendidikan merupakan tanggung jawab orang dewasa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Pendidikan dalam bentuk hasil menjadi tanggung jawab orang dewasa untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan upaya perbaikan atau peningkatan.

Pendidikan dikelola oleh sebuah sistem yang melibatkan multi dimensi. *Dimensi aktor* sebagai pelaksana pendidikan terdiri dari orangtua (anggota keluarga), guru, anggota masyarakat, dan aparat pemerintah. *Dimensi ruang* tempat pendidikan itu dikelola yang terdiri atas rumah tangga, sekolah dan lingkungan. *Dimensi waktu* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan seperti; kapan dilaksanakan dan bagaimana kesesuaian usia manusia dengan pendidikan yang diberikan. Selain itu pula masih ada dimensi yang tak kalah pentingnya yakni *dimensi perlakuan* yang mencakup model, metode, pendekatan, dan strategi dalam melaksanakan pendidikan. Semua dimensi ini perlu terakomodasi dalam suatu kerjasama yang saling bersinergi positif. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan pendidikan dari para aktor utama yakni orangtua (anggota keluarga), guru, dan anggota masyarakat yang dilindungi oleh aparat pemerintah.

Pendidikan dikelola oleh sistem, sehingga hasil baik atau pun hasil buruknya merupakan produk sistem. Apabila hasilnya baik berarti sistem berjalan baik. Jika hasilnya di luar harapan berarti ada kesalahan dalam sistem. Efektivitas sistem sangat tergantung pada elemen-elemen sistem. Elemen sistem inilah yang harus mengondisikan agar anak didik atau peserta didik dapat teroptimalkan potensi-potensi baiknya dan terminimalkan kecenderungan untuk berbuat buruk.

Beberapa fakta telah menunjukkan adanya keberhasilan dan kesalahan dari suatu proses pendidikan. Berikut ini adalah fakta keberhasilan proses pendidikan yang terjadi di sekitar kita. Tim SMKN 5 Makassar berhasil membawa posisi Indonesia menduduki

peringkat ketiga dunia dalam *World Mobile Robotic Competition* 2011 (indonesiaproud.wordpress, 2011). Siswa SMAN 13 Makassar mewakili Indonesia ke turnamen futsal internasional *Hydro Coco Cup* di Thailand (Sindonews.com, 2013). Siswa SMA Negeri 9 Makassar meraih juara I lomba *fotographi* dan juara III menulis surat pada ajang *English Camp*. Melihat fenomena seperti ini maka orangtua manakah yang tidak merasa bahagia jika salah satu dari mereka yang berprestasi itu adalah anaknya? Kira-kira guru manakah yang tidak merasa senang jika dalam salah satu di antara mereka adalah peserta didiknya? Kira-kira masyarakat mana yang tidak gembira jika mendengar bahwa salah satu dari mereka adalah warga masyarakat tempat dimana dia tinggal? Pemerintah mana yang tidak bangga jika warga di bawah kepemimpinannya mengukir prestasi yang dapat mengharumkan nama daerahnya?

Berikut ini adalah fakta-fakta kesalahan proses pendidikan yang telah menghasilkan perilaku menyimpang. Perilaku anggota *geng* motor di Kota Makassar makin beringas (Koran Sindo, 2013). Dua pelajar pentolan *geng* motor *Mappakkoe* diringkus petugas Polsekta Makassar. Dua kelompok pemuda bentrok (tawuran) di Jalan Pampang Makassar (*news.okezone*, 2013). Aksi bentrokan mahasiswa dan pembakaran gedung di Kampus UNM kembali terulang (*news.okezone*, 2013). Puluhan anggota *geng* motor membunuh seorang mahasiswa di Tamalanrea (Fajar, 2014). Persoalan sampah yang melanda hampir semua sekolah di Makassar. Kebiasaan *menyontek* di kalangan siswa sebagai akibat dari rendahnya semangat belajar dan

hilangnya sikap mandiri. Ketidaktaatan menjalankan ibadah di kalangan siswa dan rendahnya perilaku santun di jalan raya.

Membaca fenomena ini maka apakah orangtua, guru, masyarakat, dan pemerintah tidak merasa miris dan prihatin melihatnya. Dimanakah semua anak itu berada? Kapanakah mereka melakukan perbuatan buruknya? Dimana orangtuanya? Dimana gurunya? Dimana masyarakat? Dimana pemerintah? Mana pendidikan? Pastilah keberadaan mereka tidak terlepas dari tiga tempat yaitu di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Pastilah mereka berada dalam kurun waktu yang sama dengan orangtuanya, gurunya, atau anggota masyarakatnya.

Menurut pendapat Abraham Maslow bahwa manusia bertindak karena ada yang kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Terdapat lima kebutuhan manusia menurut Maslow (id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow-online) yaitu: (1) kebutuhan *fisiologis* (udara, makanan, minuman dan kebutuhan fisik lainnya), (2) kebutuhan rasa aman, (3) kebutuhan dicintai dan disayangi, (4) kebutuhan harga diri, dan (5) kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan menggunakan kemampuan dan potensi diri agar tetap dianggap keberadaannya (eksistensi diri). Jika ada dari kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku.

Dua fakta yang berbeda di atas merupakan produk dari suatu proses pendidikan. Lalu apa yang salah jika manusia itu rusak? Jawabannya adalah pendidikan. Apakah itu direncanakan? Tentu saja tidak. Jawaban yang lebih tepat dan bijaksana adalah kelalaian. Dalam mengelola pendidikan manusia memiliki titik lemah. Lewat titik

lemah inilah kerusakan itu bermula. Titik lemah bisa terletak pada pola asuh orang tua, titik lemah bisa terjadi di sekolah, dan titik lemah bisa saja terletak pada kelengahan masyarakat, dan titik lemah ada karena pemerintah tidak tegas.

”Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bapak-bapaknyalah yang menjadikan dia berperilaku buruk.” Ini merupakan pernyataan agama (*hadits*) yang menyebutkan tentang siapa yang disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam pendidikan. Bapak-bapak berarti orangtua kandung atau bisa pula bermakna orangtua atau orang dewasa yang berada di sekitar kehidupan anak (di rumah dan lingkungan di luar rumah). Apabila bapak-bapak yang dimaksud itu memiliki perbedaan yang cukup ekstrim dalam hal sikap, semangat, tujuan, dan nilai dalam mendidik maka dapat berakibat pada buruknya kualitas jasmani dan rohani bagi anak.

Mendidik anak berhubungan pula dengan kebiasaan orangtua memperlakukan sejak anak masih kecil. Seorang ilmuwan pemerhati pendidikan bernama Dorothy Law Nolte (whywine.wordpress.com/tag/dorothy/online) mengatakan:

”Jika anak dibesarkan dengan celaan maka ia belajar memaki, jika anak dibesarkan dengan permusuhan maka ia belajar berkelahi, jika anak dibesarkan dengan cemoohan maka ia belajar rendah diri, jika anak dibesarkan dengan hinaan maka ia belajar menyesali diri, jika anak dibesarkan dengan toleransi maka ia belajar menahan diri, jika anak dibesarkan dengan motivasi maka ia belajar percaya diri, jika anak dibesarkan dengan pujian maka ia belajar menghargai, jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang baik maka ia belajar keadilan, jika anak dibesarkan dengan rasa aman maka ia belajar menambah kepercayaan, jika anak dibesarkan dengan dukungan maka ia belajar menyenangkan dirinya, dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan maka ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya.” (Nolte, 1972).

Menurut Kihajar Dewantara (N.N., 2015) terdapat tri pusat pendidikan yaitu; keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan ini memiliki masing-masing andil dalam membentuk jasmani dan rohani anak didik. Demikian pula andilnya (tri pusat pendidikan) dalam mengelola tiga ranah dari misi pendidikan yaitu pengetahuan (*kognisi*), keterampilan (*psikomotor*), dan sikap (*afeksi*).

Dalam keluarga, orangtua merupakan peletak pendidikan pertama. Dalam misi yang diembannya, orangtua bisa saja tepat dalam perannya namun tidak mustahil melakukan kesalahan praktik yang berakibat buruk pada anaknya. Atas nama kasih sayang, orangtua rela memanjakan anak dengan materi yang berlebihan tanpa melihat ketepatan fungsi materi dengan usia anaknya. Atas nama kedisiplinan, orang tua dapat melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Sebagai bahan pertimbangan bagi orangtua kiranya puisi bijak Kahlil Gibran (hannyhart.blogspot.com/online) dapat menjadi renungan:

”Anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut engkau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat engkau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu, sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Sang Pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasaNya, hingga anak panah itu melesat jauh dan tepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan Sang Pemanah, sebab Dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihi-Nya pula busur yang melesatkannya.”
(Gibran, 2012).

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak. Di sekolah, tata tertib dan aturan tidak tertulis dijadikan sebagai ”panglima”. Semua regulasi yang ditetapkan tujuannya adalah kebaikan. Tetapi yakinkah kita bahwa kesemuanya itu baik untuk pendidikan? Tentu saja tidak. Munculnya istilah ”sekolah robot” oleh Chatib (2012) merupakan temuan dari adanya *malpractice* (kesalahan praktik) yang terjadi di sekolah. Aturan dan perlakuan terhadap anak berada di luar ambang batas kewajaran sehingga mereka diperlakukan layaknya seperti robot.

Elemen ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan ”kota ramai” dalam sistem pendidikan. Selain di rumah dan di sekolah, di tempat inilah anak didik berinteraksi dengan keragaman situasi. Di masyarakatlah terdapat berbagai macam ragam latar belakang manusia. Ragam watak/karakter, ragam nilai, ragam prinsip, ragam adat, ragam strata ekonomi, ragam strata pendidikan, ragam usia, dan ragam profesi. Apakah masyarakat punya niat baik? Tentu saja punya. Oleh karena kebanyakan dari mereka adalah orang tua dari anak didik tersebut. Tetapi apakah mereka peduli? Inilah mungkin masalahnya. Ketidakpedulian menjadi inti masalah pendidikan anak di dalam masyarakat. Ketidakpedulian terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesibukan, kelalaian (faktor ketidaksengajaan), dan sikap apatis karena merasa bukan bagian dari kewajibannya (faktor kesengajaan).

Elemen keempat adalah pemerintah. Meskipun sekolah merupakan perpanjangan kebijakan pemerintah, namun tidaklah berarti bahwa pihak sekolah dapat menjangkau semua kebutuhan pendidikan. Apalagi dalam era otonomi daerah

ditemukan adanya kebijakan nasional yang tidak diterapkan oleh daerah otonomi. Demikian pula sebaliknya, ada daerah otonomi yang membuat kebijakan lokal yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Di Sulawesi Selatan diterapkan pendidikan dan kesehatan gratis (meskipun tidak secara total) yang pelaksanaannya mendahului kebijakan nasional. Kebijakan nasional tentang jumlah jam minimal bagi guru yaitu 24 jam setiap minggu berbeda penerapannya pada daerah otonomi (khususnya Kota Makassar). Kebijakan pemerintah dapat membantu pihak sekolah dalam melindungi kepentingan pelayanan peserta didik terutama jika berkaitan dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.

Pemerintah (khususnya pemerintah kota) merupakan unsur yang sangat besar potensinya untuk berperan dalam sistem pendidikan. Pemerintah memegang kewenangan yang dapat "memaksa" rakyatnya untuk mematuhi aturan tentang pendidikan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat memainkan peran di titik yang tidak terjangkau oleh rumah tangga (orangtua), sekolah (guru), dan masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa apabila terjadi penyimpangan pada hasil pendidikan maka keterlibatan pemerintah juga perlu dipertanyakan.

Kemitraan dari keempat elemen ini dapat saja terbentuk secara alamiah atau kemitraan mereka diatur oleh negara dalam bentuk kebijakan/regulasi. Banyaknya penyimpangan perilaku anak didik (peserta didik) yang terjadi memunculkan pertanyaan penting, bagaimana mereka (keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah) melakukan kemitraan dalam mengurus pendidikan?

Masalah kemitraan pendidikan yang dijumpai secara umum di Kota Makassar adalah sulitnya membangun komunikasi intensif antara guru dan orangtua. Salah satu di antaranya menghadirkan orangtua peserta didik di sekolah. Momen penting untuk dihadiri orangtua di sekolah seperti: (1) rapat komite sekolah, (2) penerimaan rapor peserta didik, dan (3) mengomunikasikan peserta didik yang bermasalah tidak dapat terealisasi secara baik karena berbagai macam alasan dari orangtua. Sebuah kisah nyata yang dituangkan dalam film berjudul "Sang Pemimpi" diceritakan bahwa seorang orangtua miskin (buruh pabrik) bahkan buta huruf latin (tetapi bisa huruf Arab), secara bersungguh-sungguh menghadiri acara penerimaan rapor anaknya. Orangtua tersebut sengaja mengambil cuti selama 2 hari di kantornya, menyiapkan baju "kebesarannya" yang dia sebut "safari empat saku" demi menghadiri undangan penerimaan rapor di sekolah anaknya. Baginya, penerimaan rapor adalah sebuah peristiwa penting, peristiwa besar, dan peristiwa bersejarah bagi diri dan anaknya. Kisah nyata ini mungkin dianggap berlebihan oleh sebagian orang. Namun dari sisi pendidikan anak sangat besar efek positif yang ditimbulkannya.

Setiap orangtua pasti menyayangi anaknya, meskipun tidak banyak dari orangtua yang mampu membuktikannya seperti menghadiri acara penerimaan rapor. Padahal, peristiwa penerimaan rapor adalah salah satu momentum bersejarah dalam kehidupan setiap anak didik. Dalam kenyataan banyak orangtua menganggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Orangtua pun akhirnya hanya menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya. Bahkan tidak sedikit orangtua yang berani untuk tidak hadir.

Pertanyaannya adalah; dimana bukti kasih sayang itu? dan bagaimana nasib kemitraan yang bisa dibangun antara sekolah dan keluarga?

Salah satu tanda dari kemitraan antara sekolah dan keluarga adalah adanya ikatan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang menyatukan visi dan misi mereka bahwa peserta didik itu adalah objek yang sangat penting. Oleh karenanya, baik sekolah (yang diwakili oleh guru) maupun keluarga (yang diwakili oleh orangtua) perlu menjalin hubungan yang harmonis. Bahkan sangat diharapkan terbinanya hubungan keakraban antara kedua belah pihak. Keduanya membina objek yang sama, keduanya mendidik orang yang sama-sama dicintai (orangtua cinta kepada anaknya dan guru cinta kepada peserta didiknya). Sehingga jika yang dibicarakan adalah kepentingan peserta didik maka musyawarah-mufakat dijadikan sebagai solusi yang bijaksana.

Pada saat ini kemitraan antara sekolah dan keluarga tercederai oleh beberapa peristiwa yang menyangkut kepentingan peserta didik. Kedua belah pihak saling menyulitkan bahkan kadang-kadang saling mempermalukan. Pihak sekolah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer misalnya dalam hal pembayaran sekolah untuk keperluan tertentu. Pembayaran sekolah biasa ditanggapi oleh orangtua secara emosional karena dianggap sebagai pelanggaran. Orangtua beralasan bahwa sudah ada dana pendidikan gratis dan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dikucurkan oleh pemerintah. Padahal dana pendidikan gratis dan dana BOS tidak mencakup semua yang dibutuhkan sekolah (contoh: insentif guru honorer). Karena ditanggapi secara terburu-buru, maka bukan jalan kekeluargaan yang ditempuh atau lewat musyawarah,

akan tetapi orangtua mengadukan masalahnya lewat media massa (surat kabar, televisi, *facebook, twitter*) atau ke DPRD. Media massa sebagai alat kontrol kadang-kadang bukan menjadi solusi tetapi justru dapat menjadikan suasana semakin tidak kondusif. Pihak sekolah merasa dipermalukan dan orangtua merasa bebannya semakin berat. Ujung-ujungnya peserta didiklah menjadi objek penderita. Lalu, kasih sayang itu dimana? dan kemitraan pendidikan itu bagaimana?

Masalah kemitraan pendidikan lainnya adalah dalam pendidikan di sekolah sering terjadi kompromi antara orangtua-guru, anggota masyarakat-guru, atau oknum aparat pemerintah-guru. Kompromi ini sepanjang tidak bersifat merusak nilai pendidikan maka dibolehkan bahkan sangat dianjurkan. Tetapi jika kompromi berdampak buruk bagi moral semua pihak, maka akibat buruknya sangat besar bagi proses pendidikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa kompromi-kompromi yang sering terjadi di sekolah seperti diuraikan berikut ini. *Pertama*, kompromi dalam pembagian program/jurusan (untuk SMA/SMK), yaitu ketika pihak orangtua tidak mau menerima dengan ikhlas pembagian jurusan yang diperoleh anaknya di sekolah. Orangtua kemudian melobi pihak sekolah agar anaknya ditempatkan sesuai jurusan yang diinginkannya. Keadaan seperti ini sebenarnya tidak boleh dikabulkan karena pembagian jurusan/program studi didasarkan pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah baku. Sehingga wajar bila ada pernyataan bahwa "peserta didik menjalani sekolah bukan karena potensinya tetapi karena keinginan dari orangtuanya." *Kedua*, kompromi "pindah naik", yaitu pada saat

orangtua tidak bisa menerima kenyataan anaknya yang tinggal kelas. Biasanya solusi yang dipilih adalah naik kelas, dengan syarat harus pindah ke sekolah lain. Kompromi ini sudah menjadi kebiasaan umum di beberapa sekolah di Makassar. Masalah yang ditinggalkan oleh kompromi ini adalah rusaknya kewibawaan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Tinggal kelas sebagai bagian dari sistem pendidikan yang masih diakui tidak dapat berfungsi sebagai hukuman yang mendidik. *Ketiga*, kompromi "nota sakti" atau "telepon keramat" pihak luar dalam penerimaan peserta didik baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada saat penerimaan peserta didik baru, pemerintah kota terlibat langsung dalam penentuan syarat kelulusan. Kejanggalan yang sering terjadi adalah syarat kelulusan tersebut hanya sakral di awal tetapi menjadi lumpuh di akhir. Campur tangan dari oknum yang memiliki pengaruh atau kekuasaan tidak mampu ditangkal oleh pihak sekolah. Akhirnya sistem yang dibangun tidak lagi diberlakukan. Sesungguhnya untuk aspek jangka panjang, sistem seperti ini telah merusak nilai pendidikan. Secara turun-temurun menjadi warisan buruk yang tidak ada ujungnya. Peserta didik akan menganggap bahwa di daerahnya atau di negaranya berlaku sistem "semua bisa diatur". Kompromi-kompromi yang kerap kali terjadi di sekolah dapat mengganggu independensi sekolah sebagai lembaga yang dibina secara profesional. Elemen "pengganggu" dalam kompromi ini bisa jadi berasal dari orangtua, guru, anggota masyarakat, ataupun aparat pemerintah.

Perofesionalisme dan independensi dalam pendidikan sekolah adalah dua hal yang sulit dikembangkan secara ideal di Kota Makassar. Hubungan emosional yang

dipengaruhi oleh ikatan darah, ikatan pertemanan, dan ikatan kepentingan menjadi sebuah ”arus kuat” yang dapat melabrak aturan yang telah dibuat sedemikian baik. Lalu pendidikan yang dibangun dengan tujuan yang mulia ini akankah dibiarkan bias dalam proses ataupun hasilnya? Sementara yang diharapkan berkembang dalam pribadi peserta didik bukan hanya kognitif dan psikomotor tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah afektif mereka atau moral mereka. Kondisi ini bertambah parah karena ranah yang menjadi pertimbangan keberhasilan peserta didik di sekolah lebih banyak ditentukan oleh aspek kognitif dan psikomotor. Sedangkan ranah afektif biasanya hanya menjadi pelengkap.

Pihak di luar sekolah idealnya menjadi mitra pendidikan yang baik bagi sekolah. Orangtua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting menganut sistem nilai yang padu. Sebuah contoh kemitraan melibatkan keempat elemen diuraikan sebagai berikut:

”Saat pembelajaran sekolah yang akan atau sementara berlangsung. Orangtua harus menjadi pihak yang proaktif agar anaknya tidak terlambat ke sekolah, pakaiannya tidak melanggar aturan, persiapan fisik (gizi, kesehatan prima) dan mental (shalat subuh bagi yang muslim dan pesan-pesan motivasi) dipersiapkan sebelum datang di sekolah. Di sekolah, guru menyambut penuh suka cita kedatangan peserta didik dengan sapaan kasih sayang dan rasa kekeluargaan, menanyakan sudah shalat subuh atau belum, berpamitan dengan orangtua atau tidak, sudah sarapan atau belum dan memeriksa kelengkapan pakaian mereka. Pihak masyarakat juga semestinya memberi dukungan positif, ketika jam persekolahan sementara berlangsung dan ada peserta didik berkeliaran di luar sekolah, maka sebaiknya menunjukkan perhatian dengan mengingatkan atau memberi laporan kepada pihak sekolah tentang keberadaan mereka. Demikian halnya dengan pemerintah setempat (pemerintah kota) dapat menggunakan kekuasaannya untuk membuat regulasi tentang larangan peserta didik berkeliaran secara tidak legal di luar sekolah pada saat jam belajar berlangsung. Regulasi ini teramat penting artinya karena berfungsi sebagai perintah sekaligus payung hukum yang melindungi tindakan bagi pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat.” (Hasil analisis kondisi objektif, 2015)

Contoh sederhana ini telah menunjukkan bahwa jika kemitraan seperti ini terwujud, maka ruang gerak peserta didik untuk melanggar dapat dipersempit. Tentu saja membutuhkan adanya kesatuan hati, kesatuan risau, kesatuan pikiran, kesatuan pendapat, kesatuan tujuan, dan kesatuan harapan dari pihak-pihak yang bermitra untuk mewujudkannya, meskipun dengan cara dan metode yang berbeda. Sebuah contoh kesatuan tujuan yang sangat penting adalah generasi muda harus diselamatkan tanpa syarat, karena wujud cinta adalah keselamatan.

SMP Negeri 8 Makassar adalah satu bagian dari semua situasi pendidikan di atas. Secara umum kondisi yang diuraikan di atas juga terdapat di SMP Negeri 8 Makassar. Alasan mendasar dalam menjatuhkan pilihan kepada SMP Negeri 8 Makassar sebagai kasus adalah; (1) asumsi bahwa SMP Negeri 8 Makassar adalah sekolah yang memiliki prestasi, dipavoritkan oleh pemerintah dan masyarakat, (2) sebagai sekolah yang berprestasi tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti, (3) sebagai kasus, SMP Negeri 8 Makassar bisa menjadi barometer bagi sekolah lain bila ditemukan hal-hal yang menjadi kendala kemitraan pendidikan, dan (4) ingin mengetahui perubahan SMP Negeri 8 Makassar setelah dua tahun terakhir diberlakukannya SPPDB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru) oleh Pemerintah Kota Makassar yang dikenal sebagai sistem berkeadilan dengan memiliki penerimaan jalur domisili, jalur prestasi, jalur kemitraan, dan jalur reguler. Menyikapi hal tersebut di atas maka penelitian ini telah mengungkap secara mendalam bagaimana

sesungguhnya kemitraan pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar yang dibangun selama ini serta tawaran solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

B. Fokus Masalah

Kemitraan merupakan keniscayaan sebagai jawaban dari akibat keterbatasan manusia. Manusia merupakan makhluk yang lemah tak berdaya jika sendirian. Akan tetapi, menjadi kuat jika bersatu. Setiap manusia dibekali kelebihan dan kelemahan berbeda. Sehingga, apabila mereka bersatu kelebihan dapat menutupi kelemahan satu sama lainnya. Sehingga muncul pertanyaan, ”mengapa pendidikan harus berproses kemitraan”? Jawabannya adalah: (1) karena kemitraan dalam pendidikan melibatkan berbagai elemen, (2) karena kemitraan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab bersama terhadap *output* dan *outcome* pendidikan, (3) untuk membantu *input* pendidikan sampai kepada titik tujuan yang diinginkan. Berdasarkan atas uraian ini maka fokus masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana peran keluarga dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?
2. Bagaimana peran sekolah dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?
5. Bagaimana kemitraan pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?
6. Bagaimana model kemitraan pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus masalah penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan:

1. Peran keluarga dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar.
2. Peran sekolah dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar.
3. Peran masyarakat dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar.
4. Peran pemerintah dalam pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar.
5. Kemitraan pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar.
6. Model kemitraan pendidikan di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan dapat memberikan efek positif atau manfaat yang cukup berarti bagi semua pihak yang menggunakannya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat teoretis

Manfaat ilmiah atau manfaat secara teoretis hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat dirasakan sebesar-besarnya sebagai:

- a. Temuan ilmiah penting yang dapat dikaji dan diteliti lebih lanjut pada tempat yang berbeda.

- b. Kekayaan intelektual yang bermanfaat untuk menambah referensi ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis atau kegunaan praktis hasil penelitian ini semoga menjadi:

- a. Temuan berharga yang dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan oleh semua pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang otoritas kebijakan untuk menata pendidikan dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahan pertimbangan yang harus ditanggapi secara serius bagi pengambil kebijakan yang lebih tinggi sehingga dapat diterapkan penggunaannya pada skala komunitas yang lebih besar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan dalam Perspektif Teoretis dan Praktis

1. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata dasar "didik", mendapatkan awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga menjadi kata benda yaitu "pe-didik-an" yang disesuaikan menurut kaidah bahasa Indonesia menjadi "pendidikan". Dalam kata "pendidikan" di dalamnya terkandung beberapa unsur yakni: (1) pendidik (yang melakukan pendidikan), (2) pedidik (yang menjadi objek pendidikan), (3) mendidik (perbuatan dalam pendidikan). Menurut Purwanto (2009: 3) bahwa mendidik dalam pendidikan adalah memimpin anak. Menurutnya memimpin anak bukanlah hal mudah karena di dalamnya banyak masalah yang dalam, luas, dan pelik.

Kedalaman, keluasan, dan kepelikan masalah dalam mendidik merupakan ungkapan yang menggambarkan bahwa pendidikan manusia itu misteri. Pendidikan hanya bisa diramalkan tetapi tidak dipastikan. Mengapa demikian? Oleh karena subjek dan objeknya adalah manusia. Manusia inilah yang dipenuhi oleh misteri, pepatah mengatakan "dalamnya laut dapat diduga, di dalam hati siapa yang tahu?"

2. Makna pendidikan

Pendidikan dari sudut pandang berbagai ahli memiliki makna yang bervariasi meskipun lebih banyak mengandung kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada

unsur-unsur penting dari pendidikan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pandangan ahli tentang makna pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah:

”Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” (Dewantara, 1977: 20).

Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa potensi (kekuatan kodrat) yang dimiliki oleh setiap manusia hanya dapat berkembang dengan baik jika dituntun lewat pendidikan. Dengan pendidikanlah maka kebahagiaan dan keselamatan dapat dicapai. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mampu menjadikan manusia diterima sebagai individu dalam masyarakat. Sebaliknya, dengan pendidikanlah seorang individu dapat beradaptasi dalam masyarakat. Secara tersurat Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam pendidikan terdapat unsur-unsur yaitu; objek (anak-anak), proses (menuntun), tujuan (menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu), dan manfaat (agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya). Sedangkan secara tersirat (tersembunyi) dari pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara terdapat satu unsur lain dalam pendidikan yaitu subjek (yang menuntun).

Pendapat berikut oleh M.J. Langeveld mengatakan bahwa pendidikan adalah:

”Setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.” (Langeveld, 1971).

Apa yang dikemukakan oleh Langeveld menggambarkan adanya lima unsur utama yang penting dalam pendidikan yaitu; objek/sasaran (manusia yang belum dewasa), proses (usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan), subjek (orang dewasa sebagai pelaksana), tujuan (pendewasaan anak itu), dan manfaat (agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri). Secara khusus Langeveld mengutarakan adanya target bahwa tujuan pendidikan sudah tercapai apabila objek didik sudah memiliki sifat kedewasaan. Langeveld secara tersirat mengemukakan bahwa pendidikan terhenti apabila sudah mencapai kedewasaan. Hal ini menurut Langeveld dapat pula diartikan bahwa orang dewasa sudah dianggap sanggup untuk mendidik atau membawa dirinya sendiri tanpa didikan dari orang lain.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dituliskan bahwa pendidikan adalah "Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang." Definisi pendidikan yang dikemukakan dalam hal ini menyuratkan adanya unsur-unsur pendidikan yakni; objek/sasaran (peserta didik), proses (pembimbingan, pengajaran, pelatihan), dan tujuan (menyiapkan peserta didik), dan manfaat (bagi peranannya di masa yang akan datang). Secara tersirat makna pendidikan dari definisi tersebut juga terdapat unsur pelaku (subjek) yaitu subjek yang menyiapkan. Hal yang cukup menarik dari definisi ini adalah adanya kata "usaha sadar". Usaha sadar bila dimaknai lebih dalam menunjukkan bahwa ketika pendidikan dilaksanakan maka tidak boleh hanya bersifat

insidental tetapi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang dan usaha yang sungguh-sungguh.

Dalam perkembangan kenegaraan selanjutnya lahir undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 Tahun 2003 dituliskan bahwa pendidikan adalah:

”Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” (UU No. 20 Tahun 2003).

Definisi pendidikan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 merupakan penyempurnaan dari definisi pendidikan sebelumnya. Uraian kata tentang pendidikan yang terdapat di dalamnya lebih terurai jelas dan teknis dibandingkan sebelumnya. Meskipun secara garis besar memiliki unsur yang sama yaitu; objek (peserta didik), proses (usaha sadar dan terencana), subjek (perencana dan pelaku usaha), tujuan (mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan), dan manfaat (diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara) namun definisi ini memiliki cakupan yang lebih jelas. Kata ”usaha sadar” ditambah dengan kata ”terencana” merupakan penyempurnaan dari definisi sebelumnya. Kata ”terencana” menekankan bahwa pendidikan yang dilaksanakan selain tidak bersifat *insidental* juga harus dikelola secara profesional yaitu dipersiapkan dengan baik dan matang. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2003 ini memiliki tujuan yang jelas dan tegas yang meliputi

aspek kognitif (kecerdasan), aspek psikomotor (keterampilan), dan aspek afektif (kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian). Selain itu pula dicantumkan aspek manfaat yaitu untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Definisi pendidikan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tertulis bahwa pendidikan adalah "suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan." Definisi mengandung makna bahwa pendidikan memiliki objek (seseorang atau kelompok orang), proses (proses pengubahan sikap dan perilaku melalui upaya pengajaran dan pelatihan), subjek (yang melakukan upaya), dan tujuan (mendewasakan manusia). Sedangkan unsur manfaat secara tersurat maupun tersirat tidak dikemukakan.

Berdasarkan makna pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa sumber di atas dapat dibuat sebuah *abstraksi* bahwa pendidikan secara umum mengandung unsur-unsur yang sama. Garis besar kelima definisi tersebut masing-masing menegaskan bahwa dalam pendidikan dapat terwujud apabila di dalamnya terdapat unsur objek, proses/cara, subjek, dan tujuan. Adapun unsur manfaat dapat terwujud sebagai dampak pengiring. Apabila dibuat dalam bentuk pertanyaan, maka pelaksanaan pendidikan dibangun oleh kalimat tanya; siapa yang dididik? siapa yang mendidik? bagaimana mendidik? dan untuk apa mendidik?

Sasaran pendidikan adalah manusia yang belum dewasa. Tujuannya adalah mendewasakan manusia. Dewasa dalam arti: (1) cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya, (2) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena sasarannya adalah manusia yang belum dewasa maka sasaran (objek) pendidikan tersebut berada dalam pengaruh dan pengawasan orang dewasa dalam: (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, maupun (4) pemerintah.

3. Hukum dasar pendidikan

Secara turun-temurun manusia telah mendidik generasinya berdasarkan budaya atau tradisi yang diwariskan. Tindakan pendidikan yang dilakukan adalah suatu bentuk keyakinan yang dipandang benar dan tepat dapat menghasilkan *outcome* yang baik. Menurut Danim (2010: 47) bahwa keyakinan yang dianut dapat berupa asumsi yang dijadikan sebagai landasan bertindak. Keyakinan berupa asumsi dalam pendidikan ini biasa disebut sebagai hukum dasar pendidikan atau teori dasar pendidikan. Adapun kebenarannya dapat berupa kebenaran *apriori* dan kebenaran yang berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya menurut (Danim, 2010: 47) munculnya hukum dasar ini merupakan hasil pemikiran yang kemudian diikuti hukum dasar lainnya karena alasan tandingan, sandingan, ataupun kompromi.

Dunia pendidikan adalah dunia manusia. Dalam pandangan ahli agama dan ahli pendidikan terdapat beberapa pendapat tentang ”kapan” awal mula pendidikan itu dimulai. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai saat manusia dilahirkan oleh ibunya. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan itu dimulai saat manusia masih berupa jabang bayi masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai pada saat manusia memilih pasangan hidup. Bahkan pendapat yang lebih

ketat lagi yakni pendidikan itu dimulai ketika manusia dipersiapkan orangtuanya atau mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon ayah dan calon ibu bagi anak-anaknya kelak. Pendapat ini sesungguhnya merupakan upaya antisipatif dari suatu kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak manusiawi yang dapat menimpa manusia. Berikut ini adalah beberapa hukum dasar yang memandang manusia dalam berbagai perspektif yang sangat besar manfaatnya untuk melaksanakan pendidikan.

a. Hukum *nativisme*

Dikemukakan oleh Schopenhauer. Hukum *nativisme* mengatakan bahwa setiap anak sejak dilahirkan sudah memiliki berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing (Purwanto, 2009: 16). Hukum *nativisme* berasumsi bahwa manusia lahir membawa kodratnya sendiri-sendiri.

Hukum *nativisme* juga sering disebut *pesimisme* dalam pendidikan, oleh karena berhasil tidaknya perkembangan anak sangat tergantung pada sedikit-banyaknya bekal bawaan yang dibawa dari lahir (Jalaluddin dan Idi, 2011: 154). Hukum *pesimisme* terkait dengan istilah nasib. Jika seseorang bernasib baik maka seterusnya baiklah ia. Jika seseorang bernasib buruk maka buruklah ia selamanya. *Pesimisme* tidak dapat lagi dipengaruhi dengan berbagai upaya setelah seseorang dilahirkan oleh ibunya termasuk pendidikan. Proses pendidikan tidak bakal memengaruhi perubahan dari baik menjadi jahat. Tidak pula perubahan dari jahat menjadi baik. Apabila seorang anak diberikan perlakuan yang tidak sesuai potensi kodratnya, maka hal demikian tidak

akan memberikan dampak apa-apa. Sehingga menurut hukum *nativisme* hanya akan baik jika perlakuan yang diberikan kepada anak didik sesuai dengan kodratnya.

b. Hukum *naturalisme*

Dikemukakan oleh J.J.Rousseau bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, tidak seorang pun anak dilahirkan dengan pembawaan yang buruk (Jalaluddin dan Idi, 2011: 154). Hukum ini disebut juga sebagai hukum *negativisme*, anak akan dibiarkan tumbuh secara alamiah oleh pendidik yang mendampinginya. Oleh karena telah membawa bekal kebaikan maka sang anak secara alamiah dapat berkembang secara baik pula. Disebut *negativisme* oleh karena pandangan ini tidak percaya kepada pengaruh didikan dari manusia karena dianggap bahwa manusia dapat merusak pembawaan kebaikan yang dibawa sejak lahir.

Menurut Rousseau (dalam Danim 2010: 50) anak dijauhkan dari aneka perilaku buruk masyarakat, termasuk guru yang serba tidak orisinal (*artificial*) sehingga dengan begitu anak akan memperoleh pendidikan dan pembelajaran secara alamiah. Selanjutnya, praksis pendidikan seharusnya memanfaatkan permainan bebas untuk diberikan kepada peserta didik dalam mengembangkan pembawaan baiknya.

c. Hukum *empirisme*

Dimotori oleh John Locke (1632-1704) bahwa perkembangan anak sejak lahir dan untuk selanjutnya secara mutlak dibentuk oleh lingkungan (Danim, 2010: 51). Menurut Purwanto (2009: 58) kaum *empirisme* berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh

pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Oleh karena itu manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam dunia pendidikan, pendapat kaum *empiris* ini terkenal dengan nama *optimisme pedagogis*.

Hukum *empirisme* banyak pula didukung oleh penganut *behaviorisme* (paham perilaku). Bahkan menurut Purwanto (2010: 59) ada penganut *behaviorisme* tulen yaitu Waston dari Amerika mengatakan:

”Berilah saya sejumlah anak yang baik keadaan badannya dan situasi yang saya butuhkan, dan dari setiap orang anak, entah yang mana, dapat saya jadikan dokter, seorang pedagang, seorang ahli hukum, atau jika memang dikehendaki, menjadi seorang pengemis atau seorang pencuri.” (Purwanto, 2010).

Mencermati apa yang dikemukakan oleh Waston di atas menunjukkan sebuah *optimisme* berlebihan. Paham ini mengesampingkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki karakteristik unik dan tidak bisa ditebak dengan mudah. *Empirisme* memandang manusia seperti benda mati yang dapat dibentuk dengan mudah sekehendak pemiliknya. Meskipun demikian *empirisme* juga memiliki unsur kebenaran dan sampai sekarang masih dipegang oleh sebagian elemen pendidikan yaitu orangtua, guru, serta manusia dewasa lainnya.

d. Hukum *konvergensi*

Hukum *konvergensi* berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik maupun buruk tetapi dapat dipengaruhi oleh lingkungannya (Jalaluddin dan Idi, 2011: 154). Hukum ini dikemukakan oleh William Stern. Berdasarkan cakupannya,

hukum konvergensi lebih luas dibandingkan dengan hukum *nativisme*, *naturalsime* dan *empirisme*.

Berdasarkan beberapa hukum dasar pendidikan yang dikemukakan di atas telah memberikan pencerahan bahwa asumsi yang diyakini oleh tokoh pemikir pendidikan ada yang memiliki kesamaan, pertentangan, dan juga antara satu teori merupakan *subset* (himpunan bagian) dengan teori pendidikan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan di atas pula bahwa lahirnya hukum dasar pendidikan didasari oleh motivasi sandingan, tandingan, dan atau kompromi.

Hukum *konvergensi* dianggap sebagai hukum yang lahir sebagai "kompromi" dari semua hukum dasar pendidikan yang ada. Tetapi apakah dengan lahirnya hukum *konvergensi* merupakan solusi ketepatan asumsi mengenai pendidikan? Purwanto (2009: 61) mengatakan belum, karena rupanya manusia bukanlah hasil pembawaan dan hasil lingkungan belaka sebagaimana maksud dari hukum *konvergensi*. Manusia tidak hanya dikembangkan, namun ia mampu mengembangkan dirinya sendiri. Menurutya, manusia adalah makhluk yang sanggup memilih dan menentukan sesuatu mengenai dirinya dengan bebas.

4. Teori pendidikan

Pendidikan adalah *insting* manusia. Potensi kodrati manusia akan menuntunnya untuk melakukan upaya pendidikan. Akal pikiran dan hati nurani akan menjadi penggerak utama bagi manusia untuk mendidik. Akal pikiran manusia akan senantiasa mencari jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Sementara hati nurani akan

bekerja ketika muncul persoalan yang membutuhkan simpati dan empati. Seperti inilah kodrat manusia.

Praktik pendidikan mendahului ilmu pendidikan (Dahlan, 2007: 39). Pengalaman hidup yang dilewati manusia banyak menyisakan bekal untuk digunakan menganalisis masalah yang selanjutnya dinamakan dengan teori. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena secara sistematis, dan bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena (Soetriono dan Hanafie, 2007: 142). Teori ditemukan oleh manusia kemudian menyebar ke berbagai disiplin ilmu yang ada. Dunia pendidikan pun tidak terkecuali berada dalam khazanah teori-teori tersebut, yakni teori tentang pendidikan. Teori-teori pendidikan yang muncul menjadi daya pikat bagi para ilmuwan dalam bidang pendidikan untuk mengkaji, merevisi, atau bahkan membantah isi dari teori itu.

a. Teori *funksionalis*

Teori *funksionalis* (*functionalist theory*) adalah teori pendidikan yang melihat fungsi pendidikan yang diperankan dalam kehidupan. Menurut Danim (2010: 97-98) teori ini menekankan pada beberapa hal yakni: (1) cara pendidikan dalam melayani kebutuhan masyarakat secara universal terutama peserta didik, (2) peran laten pendidikan seperti transmisi nilai-nilai inti dan kontrol sosial, (3) peran pendidikan dalam memilah peserta didik berdasarkan kepantasan (*sorting*), (4) peran pendidikan dalam pembentukan jaringan (*networking*) atau membuat koneksi interpersonal, (5)

peran ganda pendidikan yaitu melestarikan dan mengubah budaya, dan (6) peran utama pendidikan dalam melestarikan dan mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan mentransformasikannya.

b. Teori konflik

Teori konflik (*conflict theory*) senantiasa memandang pendidikan dari sisi yang berseberangan dengan teori *fungsi*ionalis. Danim (2010: 99) mengatakan bahwa teori konflik melihat tujuan pendidikan sebagai upaya menjaga kesenjangan sosial dan melestarikan kekuasaan orang-orang yang mendominasi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa teori konflik melihat bahwa: (1) sistem pendidikan bertujuan mengekalkan *status quo* dengan cara menumpulkan kelas bawah menjadi pekerja yang patuh, (2) sekolah merupakan kelas yang berbeda dan mengikuti alur garis etnis, (3) sekolah memposisikan anak dari kelas pekerja menerima posisi mereka sebagai "kelas yang lebih rendah" dari anggota masyarakat, (4) peran pendidikan merupakan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).

c. Teori *interaksionis simbolis*

Salah satu pengalaman penting dalam pendidikan adalah interaksi. Lewat interaksi manusia muda (peserta didik) dan pendidik dapat diamati hal-hal yang bersifat positif dan negatif. Melalui interaksi akan terlihat berbagai macam perilaku yang mewakili secara umum sifat-sifat manusia dalam berinteraksi. Sekolah dan lingkungannya atau ruang-ruang kelas menjadi tempat komunitas miniatur masyarakat sesungguhnya. Dalam interaksi ditemukan realitas sebagai suatu interaksi yang

dipenuhi berbagai macam simbol. Sebagai contoh; predikat ”rangking” sebagai simbol yang mewakili anak didik yang berprestasi.

Realitas interaksi sosial telah melahirkan teori. Teori interaksi yang begitu populer dikenal adalah teori *interaksionis simbolis*. Menurut Turner (Damsar, 2012) ada empat asumsi teori *interaksionis simbolis* yaitu: (1) manusia adalah makhluk yang bisa membuat dan menggunakan simbol, (2) manusia menggunakan simbol untuk berkomunikasi, (3) manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran dan (4) masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuannya dalam berpikir, mendefinisikan, merefleksi diri, dan melakukan evaluasi. Teori *interaksionis simbolis* (*symbolic interactionists theory*) membatasi analisis pendidikan dengan secara langsung mengamati kejadian dalam ruang-ruang kelas. Danim (2010: 100) mengatakan bahwa fokus teori ini adalah bagaimana ekspektasi guru memengaruhi kinerja, persepsi, dan sikap siswa.

d. Teori *rekonstruksionis*

Teori ini lahir sebagai jawaban dari peristiwa kerusakan yang dibuat oleh manusia. Theodore Brameld (1904-1987) adalah salah satu yang mencetuskan teori ini sebagai reaksi dari realitas Perang Dunia II demikian pula pendahulunya yang bernama George Count (1889-1974) (Danim, 2010: 101). Menurut Danim, keduanya memandang bahwa teknologi sebagai karya manusia telah menghancurkan manusia itu sendiri namun di sisi lain teknologi mampu menjadikan manusia hidup berbahagia. Baik Brameld ataupun Count mengakui bahwa dengan pendidikanlah sebagai cara

yang paling tepat mempersiapkan orang untuk membuat tatanan sosial baru (esensi teori *rekonstruksionis* sosial). Menurut Danim (2010: 102) bahwa teori *rekonstruksionis* sosial didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat dapat direkonstruksi melalui kontrol penuh dengan pendidikan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki kerusakan dan menata kehidupan manusia menurut kodratnya.

5. Pendidikan dalam tinjauan psikologis

Pendidikan baik dalam teori, konsep, dan aplikasi sangat memerlukan informasi dari kajian psikologi. Psikologi dalam pandangan pendidikan merupakan disiplin ilmu yang terkait langsung dengan praksis pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mendalami proses mental yang berpengaruh pada perilaku. Kompleksitas kajian psikologi menjadikan para pakar menemukan banyak cabang psikologi sebagai ilmu baru yang begitu penting peranannya dalam perkembangan ilmu pendidikan. Cabang psikologi banyak terkait dengan pendidikan teoretis maupun pendidikan praktis antara lain, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi sosial dan sebagainya.

a. Psikologi pendidikan

Definisi tentang psikologi pendidikan menurut para ahli memiliki rumusan yang berbeda. Adanya perbedaan dalam perumusan definisi tentang psikologi pendidikan dikarenakan oleh perbedaan tentang orientasi, pendekatan, dan fokus perhatian para ahli (Thalib, 2010:4). Sebagai sampel dari beberapa definisi psikologi pendidikan Thalib (2014) merumuskan secara terperinci sebagai berikut:

”Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi yang membahas psikologi yang bertalian dengan pendidikan, termasuk (a) tinjauan psikologis mengenai manusia dalam situasi pendidikan (sifat-sifat umum aktivitas manusia, sifat-sifat khas kepribadian manusia, sifat-sifat khas individu, dan perbedaan-perbedaan dalam bakat), dan (b) tinjauan psikologi mengenai manusia dalam proses pendidikan (masalah belajar, perkembangan individu, perubahan individu dalam proses belajar, pengukuran dan penilaian hasil pendidikan).” (Thalib, 2008).

Definisi ini menggambarkan bahwa dalam mengelola pendidikan tidak terpaku pada guru secara formal saja. Tetapi semua orang dewasa yang berada di sekeliling objek pendidikan (peserta didik) yakni orangtua, guru-guru, orang dewasa dalam lingkup pergaulan masyarakat. Idealnya, jika pendidikan ini dapat berjalan harmonis maka semua pendidik (orangtua, guru, orang dewasa) itu semestinya tahu tentang seluk-beluk manusia secara psikologis.

Berdasarkan definisi ini pula, menguatkan alasan bahwa pengelolaan pendidikan yang baik tidak dapat dikelola tanpa berbasis kemitraan. Kemitraan yang dibangun atas dasar kesatuan pandangan tentang pentingnya *transmisi* nilai-nilai pendidikan secara umum dan secara khusus. Masalahnya adalah tidak semua aktor pendidik tahu atau mau mengetahui tentang hal ini, sehingga pendidikan berbasis psikologi pendidikan nyaris hanya dilakukan oleh pendidik yang bernama guru dan pemerhati pendidikan.

Berdasarkan definisi psikologi pendidikan di atas juga menunjukkan bagian-bagian psikologi yang dapat dikaji secara khusus. Bagian psikologi yang juga dekat dengan psikologi pendidikan adalah: (1) psikologi perkembangan dan (2) psikologi sosial. Berbicara tentang kedua psikologi tersebut, maka berikut ini masing-masing akan dianalisis secara tersendiri.

b. Psikologi perkembangan

Psikologi perkembangan termasuk kategori ilmu pengetahuan perilaku murni. Adapun tugasnya adalah mengembangkan teori, konsep, metode, dan teknik melalui eksperimen (Prawitasari, 2012). Ruang lingkup psikologi perkembangan yaitu perkembangan rohani manusia yang dialami sejak dilahirkan sampai menjadi dewasa (Zulkifli, 2005). Dengan memperhatikan ruang lingkup ini ternyata banyak hasil pengamatan dan eksperimen penggiat psikologi perkembangan yang perlu menjadi pertimbangan akademisi dan praktisi pendidikan.

Beberapa ahli masa lalu telah banyak menyumbangkan hasil-hasil pengamatan dan eksperimen yang dapat diaplikasikan dalam memberikan perlakuan terhadap anak. Menurut Zulkifli (2005) ahli-ahli itu mencurahkan perhatian pada perilaku-perilaku yang terjadi pada seorang anak antara lain: (1) Clara dan William Stern mempelajari permainan dan perkembangan bahasa anak-anak, (2) Meuman mempelajari cara berpikir anak dan salah satu pendapat beliau bahwa "anak-anak bersifat *suggestibel* (mudah dipengaruhi) dan lekas malu", (3) Kerschensteiner mempelajari masa perkembangan menggambar anak, (4) Piaget mempelajari cara berpikir dan bahasa pada anak-anak, (5) Langeveld melalui hasil pengamatannya berkesimpulan bahwa masing-masing masa perkembangan itu tidak mutlak harus dialami setiap anak sampai ia menjadi dewasa, (6) Declory dan Schuyten mengemukakan bahwa bakat dan minat sangat penting diperhatikan dalam pendidikan dan pengajaran anak. Informasi dari hasil pengamatan dan eksperimen seperti inilah yang perlu diketahui oleh pendidik (orang dewasa) untuk dijadikan bekal dalam mendidik anak.

c. Psikologi sosial

Definisi psikologi sosial menurut pandangan ahli berlatar belakang disiplin psikologi seperti dikemukakan oleh Allport (dalam Rahman, 2013) bahwa psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Sedangkan psikologi sosial menurut ilmuwan berlatar belakang sosiologi mengatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kehidupan dan struktur sosial atau antara biografi dan masyarakat, Lindsmith, Strauss dan Denzim (dalam Rahman, 2013).

Menurut Rahman (2013) dari kedua definisi tentang psikologi sosial di atas menunjukkan adanya perbedaan penekanan. Pakar psikologi menekankan pada faktor-faktor individu sedangkan pakar sosiologi menekankan pada faktor-faktor sosial. Walaupun demikian dalam dua definisi ini mengisyaratkan bahwa psikologi sosial mempelajari bagaimana keterhubungan antara individu dengan masyarakat dan keduanya bisa saja saling memengaruhi (*reciprocal*).

Menjelaskan keterhubungan antara individu dan sosial, Santoso (2014: 15-24) mengemukakan dua pendekatan, yakni pendekatan menurut S. Stansfeld Sargend meliputi pendekatan *sosiologis*, pendekatan *psikologis*, pendekatan *integratif* sedangkan menurut David O. Scars meliputi pendekatan *biologis*, pendekatan belajar, pendekatan *insentif*, dan pendekatan *kognitif*. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis tentang keterhubungan individu dan sosial secara rinci dikemukakan oleh Park, Bargess, dan Bogerdus bahwa: (1) ada pengaruh kehidupan kelompok seperti kebiasaan, tingkah laku sosial terhadap kepribadian individu, (2) tidak ada dorongan dari dalam dan faktor biologis sebagai elemen yang menimbulkan tingkah laku sosial individu, (3) terbentuknya kepribadian individu menjadi penyebab dari individu itu memiliki tingkah laku sosial dan pada akhirnya menjadi makhluk sosial. Menurut pendekatan ini faktor sosial lebih memengaruhi perilaku individu.

2) Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis dikemukakan oleh Floyd H. Allport bahwa: (1) tingkah laku sosial individu hanya dapat dipelajari dari individu yang bersangkutan dan bukan dari lingkungan, (2) setiap kelompok memiliki jiwa kelompok yang berbeda dengan jiwa individu, (3) dasar tingkah laku sosial individu berasal dari *prepostent reflexes* atau semacam insting yang telah diubah oleh pengaruh kondisi sosial. Pendekatan psikologis menekankan bahwa tingkah laku sosial individu harus dipelajari sesuai kebutuhan dan potensi individu itu sendiri dalam proses belajar sosial.

3) Pendekatan *integratif*

Pendekatan ini merupakan langkah yang dinilai lebih lengkap dibanding dua pendekatan sebelumnya (sosiologis dan psikologis). Kelengkapan ini menurut Santoso (2014) oleh karena merupakan sumbangsih dari berbagai tinjauan yaitu: ahli antropologi, *psiko-analisis*, dan teori medan. Sumbangan ahli antropologi yang

dimotori oleh Luth Banedict dan Margaret Mend menyimpulkan bahwa kepribadian kebudayaan individu sangat dipengaruhi oleh pola kebudayaan tempat ia dibesarkan. Sumbangan ahli *psiko-analisis* yaitu, Sigmund Freud dan Karen Horney mengemukakan bahwa; (1) ada pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian yang menyimpang dari kebiasaan pada umumnya, (2) dasar-dasar kepribadian cenderung mengarah pada pola kebudayaan masyarakat yang sering kali membuat individu itu mengalami penderitaan dalam hidupnya. Sumbangan dari ahli teori medan (*field theory*) dengan tokohnya Kurt Lewin dan F.J.Brown. Teori medan berpendapat bahwa situasi sosial selalu memengaruhi individu sehingga yang penting adalah bagaimana individu tersebut menanggapi, menafsirkan, dan berbuat sesuai situasi sosialnya.

4) Pendekatan biologis

Pendekatan biologis menurut Santoso (2014: 18) dibagi atas dua yakni naluri dan perbedaan genetik. Tentang naluri Konrad Lorenz berpendapat bahwa dorongan agresif dalam diri individu ada sejak lahir dan tidak dapat lagi diubah sedangkan Sigmund Freud mengatakan bahwa dorongan bawaan mengarahkan individu melakukan aktivitas yang sifatnya benar atau merusak. Tentang perbedaan genetik dikatakan bahwa perbedaan susunan genetik menimbulkan tingkah laku masing-masing individu berbeda pula (Santoso, 2014).

5) Pendekatan belajar

Pendekatan belajar menjadi dasar teori perilaku dengan tokohnya Thorndike, Pavlov, Clark Hull, dan B.F. Skinner (Santoso, 2014). Berikut ini pendapat mereka.

a) Thorndike dengan teori *connexsionisme* mengatakan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara kesan pancaindra dengan kecenderungan bertindak laku. Salah satu hukum belajar yang diperkenalkannya adalah hukum *Skinner* yang terdiri dari: (1) *Law of readiweess* (hukum kesiapan) yang berbunyi; (a) jika ada kecenderungan bertindak dan dilakukan maka dapat menimbulkan kepuasan sehingga tidak melakukan tindakan lainnya, (b) jika ada kecenderungan bertindak dan tidak dilakukan maka dapat berakibat ketidakpuasan dan melakukan tindakan lain untuk mengurangi ketidakpuasan itu, (c) jika tidak ada kecenderungan bertindak dan melakukan tindakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan dilakukannya tindakan lain untuk mengurangi ketidakpuasannya. (2) *Law of exercise* (hukum pelatihan) yaitu apa yang dialami sebelumnya (latihan) menjadikan individu dapat bertindak laku secara benar dan tepat. (3) *Law of affect* (hukum akibat) yaitu jika tingkah laku itu mendatangkan kepuasan maka tingkah laku itu cenderung diulangi atau sebaliknya. Hukum ini berkaitan dengan pengaruh pemberian hadiah atau hukuman.

b) Pavlov dengan teori *classical conditioning* mengatakan bahwa tingkah laku individu akan terbentuk dengan pengaturan lingkungan. Pengaturan tingkah laku didasarkan pada: (1) perangsang tidak bersyarat yaitu perangsang yang secara alami dapat menimbulkan tingkah laku tertentu, (2) perangsang bersyarat yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan tingkah laku tertentu.

c) Clark Hull dengan teori *systematic behavior* mengatakan bahwa penguatan (*reinforcemen*) penting dalam proses belajar tingkah laku, namun dalam organisasi

belajar terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi respon. Sehingga dibutuhkan proses belajar sistematis agar proses belajar tidak mengalami hambatan. Sebagai contoh bila seorang anak sedang belajar dan tiba-tiba seorang temannya datang mengajak bermain, agar dia tidak terpengaruh meninggalkan pelajarannya maka sebelum anak belajar, sang anak perlu memberi tahu orangtuanya bahwa bila ada yang mencarinya katakan bahwa dia tidak bisa diganggu.

d) B.F. Skinner dengan teori *operant conditioning* mengatakan bahwa selain hasil hubungan antara ransangan dan respon yang memengaruhi tingkah laku, masih ada dua lagi respon yaitu: (1) *reinforcement response* yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu, (2) *operant response* yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu.

Berdasarkan empat pandangan tokoh tersebut maka menurut Santoso (2014) mekanisme belajar mengandung tiga unsur. Ketiga unsur tersebut yaitu: (1) ada asosiasi dalam belajar, (2) ada penguatan (*reinforcement*) dalam belajar, dan (3) ada institusi dalam belajar. Berdasarkan uraian pendekatan belajar di atas menekankan bahwa peran orangtua, guru, atau orang dewasa di sekitar anak didik/peserta didik amat dibutuhkan dalam mendesain suasana kondusif untuk perubahan tingkah laku.

6) Pendekatan *insentif*

Salah satu tokoh pendekatan *insentif* bernama Edward yang berpendapat bahwa tindakan individu ditentukan oleh *insentif* yang diperolehnya (Santoso, 2014). Individu

bertindak dengan berhitung keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang mungkin menyimpannya. Tingkah laku atau tindakan individu dengan pertimbangan *insentif* merupakan keumuman. Hal ini karena *insentif* terikat oleh kebutuhan materi dan nonmateri individu itu sendiri. Insentif berhubungan dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan manusia.

Pendekatan *insentif* didukung oleh tiga macam teori (Santoso, 2014). *Pertama*, teori keputusan rasional (*rational decision-marketing theory*) yang mengatakan bahwa seorang individu sangat memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari berbagai tingkah lakunya serta secara rasional memilih tingkah laku yang paling baik. *Kedua*, teori pertukaran (*axchange theory*) yang mengatakan bahwa tingkah laku individu yang dilakukan terhadap individu yang lain berdasarkan pertimbangan untung-rugi yang timbul akibat adanya interaksi (contoh: persetujuan antara penjual dan pembeli). *Ketiga*, teori pemuasan kebutuhan (*satisfaction of need theory*) menyatakan bahwa seorang individu akan bertingkah laku sedemikian rupa bila tingkah lakunya dapat memenuhi kebutuhannya.

7) Pendekatan kognitif

Pendekatan kognitif berdasar pada apa yang dikenali atau diketahui setiap individu pada situasi sosial (Santoso, 2014). Menurutny, pendekatan kognitif memunculkan teori *atribusi* (*attribution theory*) yaitu bagaimana individu melakukan interpretasi yang bersifat kualitas terhadap situasi sosial, sehingga individu dapat berperilaku dengan tepat sesuai situasi.

Mencermati apa yang dikemukakan oleh para ahli psikologi sosial di atas maka terungkaplah banyak hal yang semestinya menjadi perhatian oleh orang dewasa ketika mendidik anaknya atau mendidik muridnya. Dalam psikologi sosial terdapat banyak teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam kaitannya dengan pendidikan (kemitraan pendidikan). Teori-teori tersebut sangat membantu dalam menjelaskan (*eksplanasi*) gejala-gejala yang nampak sehingga dapat bermanfaat untuk meramalkan (*prediksi*) hasil dari proses pendidikan yang direncanakan atau sementara dilaksanakan.

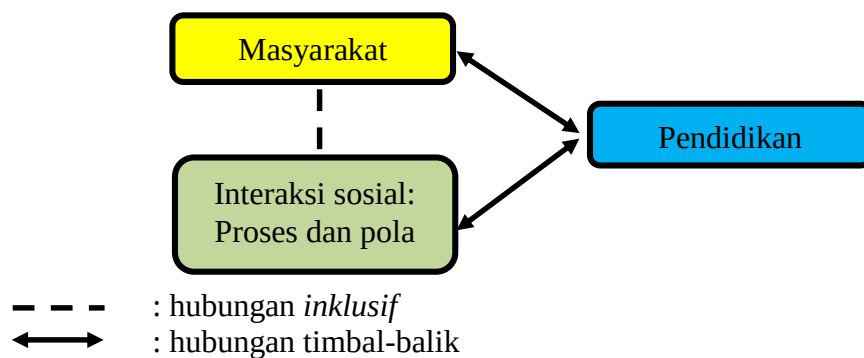
6. Pendidikan dalam tinjauan sosiologi pendidikan

Menurut Damsar (2011: 9-11) sosiologi pendidikan dapat didefinisikan dengan dua cara. *Pertama*, suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang ditandai adanya interaksi sosial dengan pendidikan. *Kedua*, suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan.

Pada definisi pertama terdapat kata "hubungan" yang bermakna timbal-balik yaitu masyarakat dapat memengaruhi pendidikan dan atau pendidikan yang memengaruhi masyarakat. Pada dewasa ini memang pengaruh-memengaruhi dari kedua unsur ini selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Besarnya bobot dari masing-masing pengaruh tidak selalu berimbang. Pernyataan-pernyataan yang muncul dari masyarakat seperti: "sistem pendidikan buruk, pendidikan di Indonesia tidak berkualitas, pendidikan masih diskriminatif", menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan masih jauh dari harapan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, ada yang

mengatakan bahwa: ”masyarakat sulit berpartisipasi dalam membangun pendidikan, masyarakat masih menganggap sekolah bukan hal yang menjanjikan”, menandakan bahwa pengaruh masyarakat terhadap pendidikan dianggap tidak signifikan.

Interaksi sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Sementara pendidikan adalah naluri setiap manusia, karena manusia adalah makhluk berpikir. Dalam proses interaksi sosial, adalah hal yang tak mungkin terelakkan adanya saling pengaruh-memengaruhi keduanya. Damsar (2011:10) menggambarkan hubungan ini sebagai berikut.



Gambar 2.1. Hubungan antara Masyarakat dan Pendidikan
 Sumber:Damsar (2011: 10)

Gambar 2.1. di atas dapat dijelaskan dengan tiga hubungan. *Pertama*, pendidikan dapat memengaruhi pendidikan dan atau masyarakat dapat memengaruhi pendidikan. *Kedua*, pendidikan dapat memengaruhi interaksi sosial dan atau interaksi sosial dapat memengaruhi pendidikan. *Ketiga*, masyarakat dan interaksi sosial memiliki hubungan yang *inklusif* yaitu banyak ragam proses maupun pola interaksi sosial yang dapat terjadi di dalam masyarakat, tidak hanya satu (*eksklusif*).

Interaksi sosial sebagai sebuah proses memunculkan ragam fenomena. Ada yang bersifat positif atau mendukung pendidikan dan ada pula yang menjadi kendala dalam pendidikan atau bersifat negatif. Kedua fenomena ini sudah pasti terjadi karena dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individu. Setiap individu memiliki pribadi unik yang menjadi pembeda dengan individu lainnya. Menurut Sigmund Freud (Natawidjaja, 2007: 62-63) bahwa dalam diri setiap individu terdapat tiga elemen yaitu: (1) *id* yang merupakan elemen biologis yang mendorong manusia untuk mendapatkan kenikmatan (dikuasai oleh prinsip kenikmatan), (2) *ego* yaitu struktur kepribadian yang berhubungan dengan realitas/logis (dikuasai oleh prinsip realitas, dan (3) *superego* yaitu tempat kesadaran dan keyakinan akan nilai-nilai berada (dikuasai oleh prinsip moral). Perbedaan pada individu dapat melahirkan sinergitas dengan baik namun tidak jarang pula menimbulkan terjadinya konflik sosial.

a. Interaksi sosial

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial lebih menonjol dari pada keberadaannya sebagai makhluk individu. Bahkan jika ditinjau dari kemandiriannya, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial dan bukan makhluk individu. Keberadaan manusia yang tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain merupakan alasan kuat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pendapat lain tentang manusia diungkapkan oleh Kuypers (dalam Santoso, 2014) bahwa hakikat manusia ada tiga. *Pertama*, manusia sebagai makhluk individu yang memiliki aktivitas bersifat individu seperti mempunyai indra, memiliki minat, dan

pengalaman. *Kedua*, manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling berhubungan. *Ketiga*, manusia sebagai makhluk berketuhanan yang membutuhkan hubungan dengan Tuhannya sesuai norma agama yang diyakini. Perbedaan-perbedaan individu dalam berbagai sifat dan potensi menjadi penyebab manusia "dipaksa" oleh keberadaannya untuk berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi menjadikan manusia dapat memenuhi kebutuhannya, dengan interaksi akan membuat manusia mampu menutupi kekurangannya. Jadi interaksi sosial adalah keniscayaan bagi seorang manusia atau individu.

Interaksi sosial yang terjadi disebabkan oleh adanya dorongan dari setiap individu. Dorongan itu disebut dorongan sosial (Santoso, 2014). Apa dorongan sosial itu? Secara rinci disebutkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya interaksi sosial. *Pertama*, perasaan lapar dan haus (*hunger and thirst*) yaitu dorongan yang memaksa individu untuk bertindak laku memenuhi sendiri kebutuhannya namun sering memaksa menjalin interaksi dengan individu lain. *Kedua*, tingkah laku karena jenis kelamin (*sex behavior*) yakni kodrat yang diterima, baik laki-laki maupun perempuan menyebabkan mereka melakukan interaksi guna memenuhi tugas manusia melestarikan jenisnya. *Ketiga* adalah penyerangan (*agression*) yaitu kondisi manusia yang tidak lepas dari ancaman agresi individu lain sehingga terjadi interaksi menyerang-bertahan. *Keempat* faktor ketergantungan (*dependency*) yang memaksa manusia berinteraksi dengan manusia lain karena kebutuhannya tergantung pada individu lain. Contoh: ketergantungan seorang bayi terhadap ibunya. *Kelima* adalah kekuasaan (*dominance*) yaitu keadaan yang mendorong manusia menguasai individu

lain. Contoh: seorang ibu yang menguasai bayinya dalam pengasuhan atau bayi dikuasai oleh orangtuanya.

Interaksi sosial yang terjadi antar individu mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ditandai dengan simbol-simbol. Seorang anak yang bermain perang-perangan dengan menggunakan kostum dengan meniru *super hero* dan meniru suara senjata yang meledak memperkenalkan dirinya sebagai *super hero* sungguhan kepada individu lain. Seorang remaja putri di Sleman Yogyakarta (sumber SCTV, 2015) dianiaya dengan sadis oleh sekelompok remaja putri teman sekolahnya hanya persoalan tatto *hello kitty*. Tatto *hello kitty* dianggap sebagai kebanggaan pribadi/kelompok sehingga ketika ada orang lain yang sebaya dengannya menggunakan tatto yang sama maka dianggap sebagai saingan yang harus dihukum atau disingkirkan.

Interaksi sosial juga terjadi di sekolah dan di dalam kelas. Interaksi sosial di sekolah ada yang disebut dengan interaksi edukasi. Interaksi edukasi merupakan interaksi yang dirancang dalam suasana pendidikan. Menurut Idi (2011:85) bahwa interaksi sesama peserta didik berbeda dengan interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan orang dewasa (pendidik). Lebih lanjut dijelaskan bahwa interaksi antara sesama peserta didik sama sekali tidak mempunyai kontribusi bagi pendidikan atau bukan interaksi edukasi. Alasannya *pertama*, peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain masih dalam posisi ketergantungan sosial, *kedua*, mereka satu sama lainnya belum ada tanggung jawab, dan *ketiga* antara mereka belum ada kewibawaan.

Oleh karena itulah interaksi edukasi hanya bisa terjadi apabila peserta didik berada dalam pembimbingan atau pengawasan pendidik/guru (orang dewasa). Menurut

Idi (2011:86) bahwa interaksi edukasi membawa banyak manfaat bagi peserta didik. *Pertama*, interaksi memungkinkan terjadinya pendidikan. *Kedua*, interaksi merupakan sarana untuk wawasan diri. *Ketiga*, interaksi menimbulkan cita-cita. *Keempat*, interaksi memberi pengaruh secara diam-diam.

Interaksi sosial dalam hal pendidikan kelihatan sederhana. Namun menurut Idi (2011:88) interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks. Menurutnya, interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor. *Pertama* adalah *imitasi* yaitu dorongan untuk meniru orang lain. Faktor imitasi bahkan disebut sebagai faktor satu-satunya yang melandasi interaksi sosial. *Kedua* adalah *sugesti* yaitu dorongan bagi seseorang untuk bersikap sebagaimana harapan oleh pemberi sugesti. Dengan sugesti orang dengan sengaja memberikan pandangan, saran, norma, atau pendapat agar orang yang diberi sugesti menerima dan bertindak sesuai arahan. *Ketiga* adalah *identifikasi*, yang merupakan faktor pendorong untuk menjadi *identik* atau sama dengan orang lain. Biasanya terjadi kecenderungan orang bertindak identik dengan orang yang terhormat, orang yang dikagumi, atau orang lain yang dianggap mulia. *Keempat* adalah *simpati*, yaitu faktor perasaan tertarik terhadap orang lain. Dengan adanya simpati maka akan terjalin saling pengertian yang mendalam sehingga menimbulkan rasa sosial untuk mendukung ataupun membantu.

b. Teori ruang kelas

Ruang kelas merupakan tempat interaksi sosial mini dalam arti yang sebenarnya. Di kelas terdiri dari berbagai individu dengan multi latar yang berbeda. Ada dua hal

besar yang membedakan peserta didik di kelas yaitu perbedaan fisik dan psikis. Di kelas peserta didik merupakan himpunan berbagai suku, warna kulit, raut muka, gaya berbusana, postur badan, bahasa tubuh, cara berkomunikasi yang dikelompokkan sebagai perbedaan fisik. Begitu pula dari segi psikis, di kelas merupakan himpunan berbagai macam watak, keinginan, kesukaan, kestabilan emosi, kemampuan kognisi, dan perbedaan psikis lainnya.

Menurut Damsar (2011:104-110) terdapat beberapa pendekatan sosiologi tentang ruang kelas. *Pertama*, pendekatan interaksi, yaitu pendekatan interaksi yang memberikan perhatian khusus terhadap pengamatan pada metode pembelajaran dalam mengelola ruang kelas yang efisien dan efektif. *Kedua*, pendekatan *interpretatif* yaitu pendekatan yang terjadi sebelum adanya respon dari sebuah stimulus. Dua orang yang bertemu muka kemudian salah satu dari keduanya tersenyum, maka senyum yang ia terima terlebih dahulu diinterpretasi "apa arti senyum itu" baru kemudian diberikan respon. Dalam pendekatan ini terjadi apa yang disebut dengan interaksi simbolik. Semua simbol yang dilakukan dalam berkomunikasi merupakan isyarat *stimulus* yang perlu diterjemahkan sebelum direspon. *Ketiga*, pendekatan *radikal*. Menurut Damsar (2011:108) salah satu teori yang terpenting dalam pendekatan radikal adalah teori pelabelan (*labelling theory*). Menurutnya, teori ini disebut radikal karena ia mempertanyakan sesuatu yang dipandang "memang seharusnya demikian." Lebih lanjut dikatakan oleh Damsar bahwa teori pelabelan menekankan pada signifikansi label (nama, reputasi) yang diberikan pada diri seseorang. Teori pelabelan ini berkaitan dengan konsep diri sehingga pertanyaan untuk pelabelan seseorang adalah "mengapa

seseorang dilabelkan seperti itu?” dan bukan ”bagaimana seseorang itu mendapatkan label tersebut?”

Masalah yang biasa terjadi di sekolah adalah konflik antar kelas. Banyak motif yang menjadi alasan terjadinya konflik antar kelas atau kelompok dalam sebuah sekolah. Seperti dijelaskan di atas, bahwa interaksi simbolik yang terjadi menjadi salah satu pemicu masalah. Sekelompok peserta didik yang menyatu karena alasan simbolik sering merasa disaingi oleh seseorang atau kelompok meniru apa yang menjadi simbol kebanggaannya. Persaingan seperti ini dapat saja meluas menjadi konflik kekerasan atau tindakan kriminal. Menurut Idi (2011:128) jika ada masalah antar kelas/kelompok dalam sebuah sekolah setidaknya ada beberapa cara untuk mengatasinya. *Pertama*, pemberian informasi, diskusi kelompok, atau hubungan pribadi. Seorang guru bisa memberikain informasi tentang hakikat perbedaan, dan bagaimana keberadaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. *Kedua*, guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat berpengaruh terhadap kelompok lain. *Ketiga*, menanamkan nilai-nilai toleransi antar peserta didik. *Keempat*, guru membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang luas dapat dilakukan dengan melibatkan keluarga peserta didik sehingga terjalin ikatan batin yang lebih kondusif. *Kelima*, guru dapat menggunakan teknik bermain peran atau *sosiodrama*. Peristiwa dalam kehidupan masyarakat dapat diambil sebagai tema dari pementasan *sosiodrama*. *Keenam*, guru memanfaatkan kegiatan *ekstra kurikuler* secara optimal.

Menguatkan apa yang telah diuraikan pada interaksi sosial, ditemukan fakta-fakta pendukung bahwa banyak peristiwa yang tidak manusiawi dan tidak sesuai

dengan status seseorang sebagai pelajar atau peserta didik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krneta dan Šević (2015), bahwa di sekolah pun banyak terjadi perilaku anti sosial, perilaku tidak pantas di sekolah, dan kisah-kisah kekerasan seperti yang disebutkan berikut:

“Results of the study showed that the most common forms were: (1) Antisocial behaviour: stealing, lying for personal gain, smoking, drinking and gambling; (2) Inappropriate behaviour in school: bored during classes; coming to school without adequate accessories and books for classes; not paying attention in classes and disturbing others in doing so; being late for school and coming to classes after the teacher; (3) Acts of violence: conflicts with peers; insulting others; cursing and yelling in public areas; being involved in group fights; intentionally physically assaulted others.” (Krneta dan Šević, 2015)

Hasil temuan penelitian di atas dikatakan bahwa perilaku anti sosial yang terjadi pada komunitas pelajar seperti; mencuri, berbohong, merokok, minum minuman keras dan berjudi. Perilaku yang tidak pantas di sekolah seperti; rasa bosan selama di kelas; datang ke sekolah tanpa aksesoris yang memadai dan tidak membawa buku di kelas, tidak ada perhatian pada pelajaran di kelas, mengganggu orang lain di kelas, terlambat datang ke sekolah dan datang setelah guru sudah ada di kelas. Temuan tersebut menunjukkan betapa besar tantangan pendidikan yang dihadapi oleh orangtua, guru, dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

7. Pendidikan dalam perspektif politik

Independensi maupun *otonomi* pendidikan adalah hal yang semestinya berlaku secara universal. Mengapa universal? Oleh karena pendidikan memiliki muatan yang bernilai universal pula. Dimanapun di dunia ini kalau yang dibicarakan adalah keadilan, kejujuran, kecakapan, kemandirian, kebersihan, kreativitas atau nilai-nilai

luhur lainnya, maka tidak ada yang menganggapnya keliru ataupun salah. Adapun yang membedakan dari keberadaan nilai-nilai luhur tersebut adalah ketika sudah memasuki area teknis. Teknis yaitu bagaimana caranya, metodenya, pendekatannya, ataupun media apa yang digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Dalam hal inilah apa yang disebut *pedagogis* (ilmu mendidik) memiliki peran yang sangat penting. Lalu di posisi manakah penguasa mesti menempatkan diri? Tentulah mereka harus berada pada posisi sebagai ”penjaga”, bagaimana agar nilai-nilai luhur yang hendak dicapai itu ”tidak terganggu” oleh kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut. Begitu pula penguasa selain menjadi penjaga, yang tak kalah pentingnya adalah sebagai ”pencipta” suasana kondusif untuk memudahkan dan mempercepat tujuan yang diinginkan.

Kondisi Indonesia dalam bidang pendidikan telah menuai banyak pujian maupun kritikan. Berbicara tentang kualitas pendidikan misalnya, sudah ada yang pantas dibanggakan meskipun tidak sedikit yang mengatakan bahwa kualitasnya masih jauh dari harapan. Berbagai macam analisis para ahli yang meninjau aspek-aspek yang menjadi penyebabnya. Tentang kualitas ini, Rohman (2013: 78-79) menyimpulkan bahwa paling tidak, ada tiga faktor penyebab kualitas pendidikan (sekolah) di Indonesia belum meningkat yaitu:

a. Pendidikan nasional menggunakan *education production function*.

Pendekatan ini meletakkan lembaga sekolah berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila semua *input* dipenuhi maka *output* yang dikehendaki secara otomatis

terpenuhi. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian karena *output* yang diinginkan tidak terbukti sesuai harapan meskipun kebutuhan *input* telah ditunaikan. Dalam hal ini menyadarkan bagi pendidik bahwa objek manusia tidak dapat disamakan dengan objek benda mati. Manusia memiliki karakteristik hidup yang kaya dengan keragaman. Keragaman dari berbagai keunikan masing-masing individu.

b. Penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung bersifat *sentralistik-birokratik*

Sekolah ditempatkan sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi meskipun kadangkala tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Akibatnya, sekolah kehilangan kemandirian, insisiatif, motivasi untuk memajukan dirinya mencapai kualitas.

c. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat belum berpartisipasi secara optimal

Partisipasi masyarakat amat sederhana dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada dukungan terhadap *input* berupa dana, meskipun sebenarnya memungkinkan pada partisipasi yang lebih jauh. Masyarakat belum terlibat pada proses pendidikan seperti dalam hal *monitoring*, *evaluasi*, dan *akuntabilitas*.

Berbicara tentang kualitas pendidikan persekolahan maka secara umum banyak orang memahaminya secara sempit. Menurut Arcaro (2005), ada dua hal pemahaman umum orang kebanyakan tentang kualitas yaitu: (1) kualitas dikaitkan dengan pembiayaan, semakin besar anggaran untuk suatu sekolah maka semakin tinggi kualitasnya, (2) kualitas sekolah dikaitkan dengan prestasi *output* berupa hasil belajar

berdasarkan hasil ujian. Padahal menurut Arcaro (2005) bahwa kualitas tidak hanya menyangkut hal-hal seperti digambarkan pada dua pemahaman di atas tetapi ada hal yang lebih kualitatif. Hal kualitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan cita-cita atau harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Menurut Sirozi (2010: 1) lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, begitu pula lembaga dan proses politik membawa dampak besar bagi karakteristik pendidikan. Abernethy dan Coombe menuliskan:

"In general, the political significance of education in contemporary societies increases with the degree of change a society is undergoing. The massive changes which developing countries have already experienced and those, whether induced or not, which are in process, render all the more conspicuous the reciprocal relationship between politics and education in these areas." (Abernethy dan Coombe, 1965: 287).

Dikatakan bahwa secara umum politik pendidikan dalam masyarakat kontemporer meningkat signifikan seiring perubahan yang sedang terjadi. Proses perubahan besar yang dialami oleh negara berkembang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja telah memperlihatkan hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan.

Dua pandangan ahli di atas menggambarkan bahwa politik berpengaruh terhadap pendidikan dan pendidikan berpengaruh pada politik. Meskipun secara terang-terangan kondisi seperti ini biasanya tidak terlihat. Sehingga nampak seakan-akan bahwa politik terpisah dari pendidikan. Pada era Pilkada langsung saat inilah kelihatan bahwa politik dan pendidikan keterhubungannya begitu kuat.

Pendidikan, utamanya pendidikan formal sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Karena banyaknya yang membutuhkan sehingga isu pendidikan merupakan pilihan primadona bagi pihak penguasa untuk mengambil simpati masyarakat. Sejak dahulu hingga sekarang dinamika hubungan antara kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan selalu ada. Pihak penguasa atau pemerintah selalu berkepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mengokohkan kedudukannya. Mulai zaman penjajahan Belanda dikenal adanya politik *etis* untuk menarik simpati dari rakyat. Politik *etis* dalam bidang pendidikan yaitu pemberian kesempatan kepada kaum pribumi untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal (*Wikipedia online*).

Perkembangan *infiltrasi* 'campur tangan' politik dalam sistem pendidikan di Indonesia mengalami tahapan-tahapan. Menurut Sirozi (2010: 186) ada enam periode perkembangan *infiltrasi* politik terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan dan implikasi sistem pendidikan terhadap dinamika politik, yaitu:

a. Periode pertama (hingga pertengahan tahun 1800-an)

Pendidikan diasuh dan dikontrol oleh tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama memegang otoritas tunggal sampai pada penentuan materi pelajaran yang harus dipelajari, siapa yang mengajar, dan siapa yang menjadi objek materi pelajaran tersebut. Nilai-nilai agama menjadi acuan dasar penyelenggaraan pendidikan. Sampai pada kedatangan pemerintahan kolonial Belanda sudah berdiri sistem pendidikan pondok pesantren tradisional. Pemerintah kolonial dianggap sebagai pemerintah kafir

oleh kaum santri sehingga pondok pesantren dicap oleh pemerintah sebagai sarang para pemberontak.

b. Periode kedua (1800-an – 1942)

Pendidikan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Terjadi pergumulan antara misi pendidikan kolonial yang ingin menyebarkan nilai-nilai modernitas dan sekularitas untuk memperkuat kedudukannya berhadapan dengan misi dari tokoh-tokoh agama dan aktivis pergerakan kemerdekaan yang dimotori oleh kalangan pribumi terpelajar. Pemerintah Kolonial Belanda berusaha sedemikian rupa dengan berbagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan selalu mendukung misi sosial, politik, ekonomi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme. Pada sisi lain, kalangan tokoh agama dan tokoh pribumi terpelajar melalui pendidikan, berusaha membuka mata hati, pikiran, dan menggelorakan semangat anti penjajahan bagi kaum pribumi sehingga bangkit melawan dan berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

c. Periode ketiga (1942 – 1945)

Pendidikan zaman pemerintahan penjajahan Jepang. Gerakan kemerdekaan sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan telah menjadi suatu kekuatan politik yang menentukan arah perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang pendidikan. Kegiatan pendidikan diarahkan pada diseminasi nilai-nilai dan semangat nasionalisme dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Pada periode inilah

bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai bahasa pengantar pada pendidikan formal. Kuatnya pengaruh semangat nasionalisme menjadi penyebab lahirnya aktivis-aktivis kemerdekaan dari kalangan pribumi dan membuat gerakan-gerakan politik semakin jelas dan terbuka.

d. Periode keempat (1945 – 1966)

Pendidikan era pemerintahan Orde Lama. Pendidikan diarahkan pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pendidikannya adalah negara dan pengembangan karakter "*nation and character building*". Penggerak pendidikan dikuasai oleh tokoh-tokoh nasionalis yang banyak memegang posisi penting dalam pemerintahan. Pemerintah secara sistematis menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dalam melakukan sosialisasi ideologi dalam berbangsa dan bernegara.

e. Periode kelima (1966 – 1998)

Pendidikan era pemerintahan Orde Baru setelah Orde Lama berakhir. Pada periode ini pemerintah menjadikan pendidikan sebagai instrumen dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang. Secara khusus bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan untuk mempercepat proses pembangunan. Adapun ciri-ciri sistem pendidikan pada periode Orde Baru adalah: (1) kegiatan pendidikan diwarnai kebijakan yang bersifat sekularisasi pendidikan, (2) kegiatan pendidikan difungsikan sebagai instrumen

pembangunan ekonomi nasional, (3) kegiatan pendidikan cenderung *indoktrinatif*, (4) pendekatan pendidikan dijalankan dengan paradigma *sentralistik*, (5) menteri pendidikan menjadi penguasa tunggal dalam sistem pendidikan nasional, (6) birokrasi ketat, berbelit-belit dan adanya penyeragaman.

f. Periode keenam (dimulai tahun 1998)

Pendidikan era reformasi. Pada periode ini terjadi banyak perubahan yang besar. Semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi dibawa oleh gerakan reformasi yang merebak ke seluruh sektor pembangunan. Dalam sektor pendidikan, semangat ini menjadi menu utama untuk menata sistem pendidikan nasional.

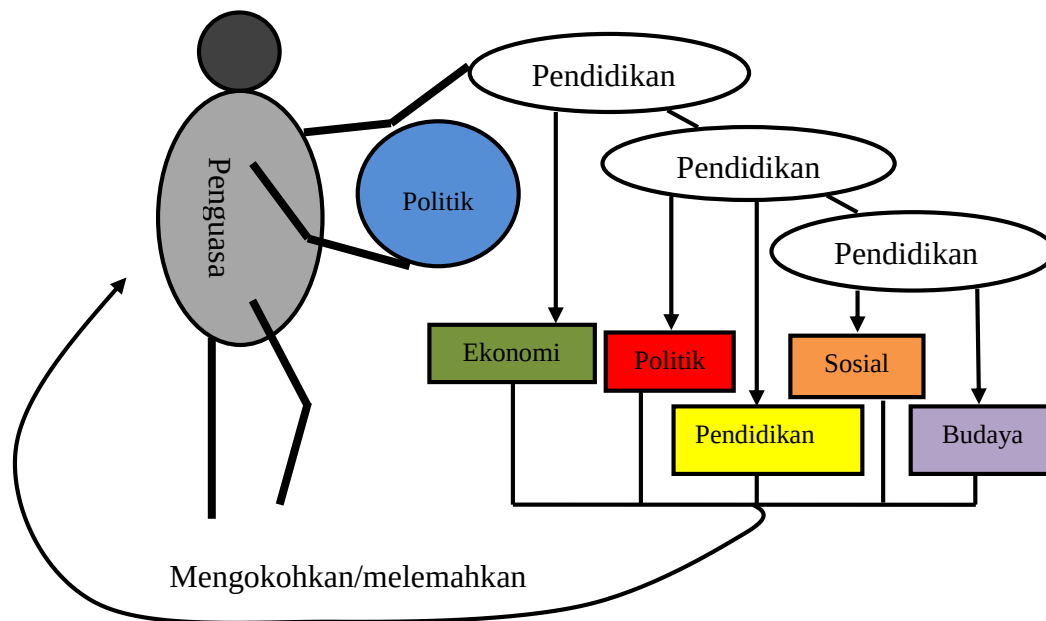
Era reformasi semakin menguatkan dinamika hubungan kekuasaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Jualan partai politik pada saat kampanye menjadikan isu pendidikan sebagai prioritas utama untuk menjadi pemikat bagi calon pemilih. Pendidikan gratis yang dinikmati saat ini merupakan salah satu hasil dari hubungan politik dan pendidikan.

Era reformasi yang membawa muatan desentralisasi dan demokratisasi di sisi lain telah banyak mengubah paradigma maupun perilaku baru bagi pendidikan. Sebagai contoh adalah aktor pendidikan formal yaitu guru. Guru di era reformasi telah banyak mengalami perubahan dalam peta perpolitikan secara nasional. Guru yang dulunya adalah figur yang anggun dalam kesahajaan saat ini bahkan telah terkontaminasi dalam dinamika perpolitikan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa keberadaan guru telah mengalami pergeseran yang cukup berarti. Fakta-fakta tersebut menurut Rohman

(2013) adalah: (1) guru sudah terlibat dalam aksi demonstrasi dalam misi ”perlawanan” terhadap kebijakan pemerintah, (2) dinamika kebijakan desentralisasi (otoda) telah mengubah keberadaan guru sebagai pejabat fungsional menjadi pejabat struktural. Sedangkan untuk kondisi kekinian banyak didapati oknum guru terlibat secara praktis dalam dukung-mendukung kekuatan politik tertentu. Hal ini menurut Rohman (2013) sangat memengaruhi profesionalisme guru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Mencermati uraian periode demi periode keberadaan pendidikan dan politik di atas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: (1) terjadinya pergantian periode menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal dalam setiap misi politik pendidikan yang diemban oleh penguasa, (2) dalam pendidikan terdapat dinamisasi potensi yang setiap waktu mengalami perubahan, (3) pendidikan selalu menjadi instrumen untuk kepentingan politik, (4) sistem politik yang berlaku merupakan corak warna dari sistem pendidikan yang dibangun, (5) pendidikan merupakan alat netral yang dapat dipola berdasarkan tujuan yang dikehendaki, (6) hasil pendidikan pada taraf tertentu (kedewasaan) dapat mengubah haluan dari tujuan awal (contoh: hasil pendidikan dapat menjadi *blunder* bagi perancangannya).

Selama ini pendidikan tidak pernah lepas dari kekuatan politik, begitu pula sebaliknya bahwa politik sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Lalu seperti gambaran pendidikan hubungannya dengan politik? Berikut ini adalah penggambaran ilustrasi yang menjelaskan tentang keterhubungan pendidikan dan politik.



Gambar 2.2. Hubungan antara Pendidikan dan Politik
(Hasil analisis, 2014)

8. Kebijakan pendidikan

Kehidupan manusia tidak pernah usai dari masalah. Masalah adalah terjadinya kesenjangan antara harapan (cita-cita) dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan masalah yang muncul maka lahirlah kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara harapan dan kenyataan. Lalu apa itu kebijakan?

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata asing (Inggris) yaitu *policy*. Para ahli pun memiliki pandangan yang tidak banyak berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan. Menurut Hasbullah dikatakan bahwa pengertian operatif dari kata kebijakan adalah:

”Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi sehingga terjadi dinamisasi gerak-tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.” (Hasbullah, 2015: 37).

Secara sistematis Jones (2004) membagi elemen-elemen dari pengertian kebijakan yang terdiri atas, *goal, plan, program, decision, effect*. Selanjutnya Hasbullah (2015) menjelaskan bahwa: (1) *goal* adalah tujuan yang diinginkan, (2) *plan* adalah pengertian yang spesifik (secara khusus) untuk mencapai tujuan, (3) *program* adalah upaya bagi yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan, (4) *decision* yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana, dan (5) *effect* yaitu akibat-akibat dari rencana.

Berdasarkan pengertian kebijakan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berkelompok. Terlihat pula bahwa efektivitas dari kebijakan yang dihasilkan tergantung pada ketaatan dari subjek (pelaku) dari kebijakan tersebut. Oleh karena itulah sehingga kebijakan mesti ditetapkan oleh penguasa dan bersifat mengikat. Meskipun demikian kebijakan yang diambil oleh penguasa/pemerintah sebaik mungkin harus berdasarkan pada azas rasionalitas dan realitas. Salah satu kebijakan yang sangat fundamental dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara adalah kebijakan dalam pengelolaan pendidikan.

Payung kebijakan tertinggi bidang pendidikan di Indonesia telah diletakkan oleh *founding father* (pendiri bangsa) di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 berbunyi ”kemudian daripada itu untuk membentuk

suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Pancasila pada sila ke-lima berbunyi ” keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. UUD 1945 (hasil amandemen) pasal 31 ayat (1) dikatakan ”setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kebijakan yang dicetuskan oleh pendiri bangsa merupakan hasil perenungan dan melalui diskusi yang panjang dan melelahkan. Dengan mempelajari latar belakang budaya maupun sejarah perjalanan bangsa dalam mencapai kemerdekaan melahirkan konsensus penting. Penderitaan sebagai akibat dari penjajahan bangsa lain atas bangsa Indonesia telah membuka mata dan hati para pejuang sehingga sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan adalah sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Perilaku kaum penjajah yang diskriminatif terhadap warga yang diinginkan mengenyam pendidikan.

Semua fenomena tersebut pada puncaknya menggiring semangat nasionalisme, sehingga Negara pun akhirnya menyatakan bertanggung jawab (wajib) membiayai begitu pula warga berhak mendapatkan pendidikan sekaligus negara mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.

a. Teori perumusan kebijakan dalam pendidikan

Perumusan kebijakan sampai menjadi sebuah kebijakan memiliki latar belakang dan suatu proses. Secara umum kebijakan yang lahir bersumber dari latar belakang

adanya masalah yang dihadapi. Masalah pendidikan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pendidikan. Sedangkan proses perumusan kebijakan didasari oleh prinsip-prinsip rasionalitas yakni teori. Terdapat teori-teori yang menjelaskan tentang perumusan kebijakan (kebijakan pendidikan). Teori-teori yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1) Teori *radikal*

Menurut teori radikal, negara tidak perlu repot menyusun sebuah rencana kebijakan pendidikan bila pada akhirnya kurang sesuai dengan kondisi lokal (Hasbullah, 2015). Teori ini menekankan tentang kebebasan bagi daerah setempat untuk membuat kebijakan lokal.

Ditinjau dari tujuannya teori radikal bisa disebut sebagai teori yang menginspirasi lahirnya kebijakan otonomi daerah atau *desentralisasi*. Meskipun dalam bidang pendidikan tidak sepenuhnya demikian. Adanya istilah "otonomi pendidikan", "MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)", "KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)" tidak serta-merta berarti bahwa ada penyerahan total dari pemerintah pusat kepada pihak daerah atau sekolah untuk membuat kebijakan secara otonomi penuh.

2) Teori advokasi

Menurut teori advokasi pemerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional untuk melindungi kepentingan umum, lembaga-lembaga pendidikan, dan organ-organ pendidikan (Hasbullah, 2015: 72). Teori

advokasi bersumber dari akar teori konflik yang merekomendasikan adanya pemberian kewenangan kepada negara untuk membatasi kelompok-kelompok dominan yang dapat merugikan kelompok-kelompok marginal. Pada kondisi ini pemerintah pusat harus menjaga keseimbangan kemajuan pendidikan sehingga ketimpangan kondisi pendidikan di antara daerah-daerah dapat diminimalkan.

Sehubungan teori radikal yang dikemukakan sebelumnya yang menekankan kebebasan lokal, teori advokasi yang menekankan pada kebijakan yang bersifat sentralistik, maka untuk kondisi ke-Indonesiaan keduanya perlu untuk dikolaborasi. Kolaborasi ini penting untuk mengantisipasi sebuah "ketakutan" yang berakibat buruk. Menurut Wahab (2007: 373) ketakutan itu menyangkut potensi terjadinya perasaan kedaerahan yang berlebihan (*chauvinisme*) sebagai imbas dari otonomi yang disalahtafsirkan.

Penonjolan rasa kedaerahan dapat mengancam keutuhan NKRI. Salah satu akibat yang sering muncul ke permukaan sebagai efek dari otonomi adalah istilah putra daerah. Dalam struktur pembagian wewenang dan kedudukan pada posisi jabatan formal hal seperti itu sangat mengganggu keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sudah sampai merambah pada lembaga yang mengedepankan profesionalitas seperti lembaga pendidikan.

3) Teori *transaktif*

Teori *transaktif* menganggap bahwa setiap kebijakan yang diputuskan perlu melalui musyawarah atau didiskusikan oleh setiap elemen yang berkepentingan

(*stakeholder*). Menurut Hasbullah (2015: 72) bahwa teori *transaktif* sangat menghargai harkat individu untuk dipertimbangkan dengan saksama apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai individu dalam perumusan kebijakan (termasuk kebijakan pendidikan).

Mencermati maksud dari teori ini, maka dapat dikatakan bahwa azas demokratisasi menjadi pertimbangan utama. Dengan segala resiko (plus-minus) dari aplikasi teori ini telah menjadikan lahirnya pribadi-pribadi yang percaya diri bahkan *over confidence* (percaya diri berlebihan) dalam menyikapi setiap kebijakan. Setiap individu menempatkan diri pada posisi yang sejajar dengan individu lainnya. Akibatnya adalah orang menjadi sangat leluasa untuk menyatakan apa yang menjadi keinginannya namun pada sisi lain adanya kebebasan untuk menolak atau melakukan protes atas kebijakan yang diputuskan. Itulah sebabnya menurut Imron (2002) perumusan kebijakan membutuhkan manajemen komunikasi yang baik dan Hasbullah (2015:72) mengatakan bahwa kebijakan yang telah diambil memerlukan proses sosialisasi yang baik dan hati-hati sehingga dapat diterima oleh khalayak dengan sebaik-baiknya.

4) Teori *sinoptik*

Teori *sinoptik* lebih menekankan bahwa dalam menyusun suatu kebijakan agar menggunakan metode berpikir sistem. Kebijakan yang dirancang dan objek yang terkait dengan kebijakan dipandang sebagai satu kasatuan yang utuh dengan tujuan yang sering disebut dengan misi (Hasbullah, 2015: 72). Salah satu kesulitan yang

dihadapi oleh aplikasi dari teori ini adalah keterbatasan personal yang mampu berpikir sistemik.

Kemampuan berpikir sistemik hanya dimiliki oleh individu yang berwawasan luas. Kelompok mereka pun hanya ada pada posisi *elitis* (kaum elit yang menduduki posisi top manajer). Kenyataan yang ada telah membuktikan bahwa kebanyakan individu-individu lebih banyak yang berpikir secara *parsial*. Oleh sebab itulah teori ini sangat kondusif untuk area yang terbatas dan pada kalangan yang cenderung *exclusive*.

Penerapan teori *sinoptik* pada lembaga pendidikan atau sekolah secara khusus di Makassar terkendala pada munculnya "sistem kubu". Yaitu adanya kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh guru dengan membawa "misi" masing-masing dan menolak kubu lainnya. Sistem kubu yang terjadi ini sebagai akibat dari pemahaman demokrasi dengan wawasan sempit (penyakit hati: contoh kecemburuan sosial). Individu-individu seperti guru yang terkontaminasi oleh hal seperti ini akan melupakan tujuan sistem yang lebih besar. Mereka akan lebih memperturutkan kemenangan kubunya dari pada memenangkan visi dan misi sekolahnya.

5) Teori *inkremental*

Teori *inkremental* merupakan teori yang menekankan perumusan kebijakan pendidikan yang berjangka pendek, dan sebaliknya berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang (Hasbullah, 2015:73). Teori *inkremental* sangat memperhitungkan stabilitas objek maupun subjek dari kebijakan tersebut. Stabilitas objek dan subjek sulit untuk diprediksi karena dapat berubah dalam jangka waktu yang

di luar prediksi. Menurut teori ini sangat tidak tepat apabila kebijakan jangka panjang diterapkan pada situasi yang mudah berubah setiap saat.

Kelima teori perumusan kebijakan pendidikan di atas telah menguraikan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang sifatnya tiba-tiba dikeluarkan, tetapi melalui suatu kajian ilmiah dengan landasan teori yang sudah mapan. Penetapan sebuah kebijakan pendidikan selain berlandaskan teori juga melalui tahapan tertentu yang memperhatikan azas kebutuhan, azas manfaat, dan kepentingan pemerintah (penguasa).

b. Proses dan aktor di balik kebijakan pendidikan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah melalui prosedur tersendiri. Banyak pertimbangan yang didasarkan kajian teori dan pengalaman empiris (pengetahuan dan pengalaman). Perumusan kebijakan menggunakan pendekatan-pendekatan. Menurut Hasbullah (2015: 86) beberapa pendekatan dapat dilakukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. *Pertama*, pendekatan kelembagaan yaitu pendekatan yang mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pendidikan dan berbagai tingkatan dalam perumusan kebijakan. *Kedua*, pendekatan proses yaitu pendekatan yang melalui tahapan yang runtut (tidak melompat-lompat). Nugroho (2009) menggambarkan proses perumusan kebijakan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Proses Perumusan Kebijakan

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil suatu tindakan
2.	Menata agenda formulasi kebijakan	Memutuskan isu-isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
3.	Perumusan proposal kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
4.	Legitimasi kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk dicarikan dukungan politik agar diterima sebagai sebuah hukum
5.	Implementasi kebijakan	Mengorganisasi birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak
6.	Evaluasi kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan <i>outputnya</i> , mengevaluasi pengaruh (<i>impact</i>) dan kelompok sasaran dan non sasaran, dan memberikan rekomendasi kebijakan

Sumber: Nugroho (2009)

Ketiga, pendekatan teori kelompok yaitu individu dalam kelompok-kelompok kepentingan melakukan interaksi baik secara formal atau informal dan secara langsung atau lewat media massa menyampaikanuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan. *Keempat*, pendekatan *elitis* yaitu pendekatan melalui pihak penguasa atau mereka yang dekat dengan penguasa. Pendekatan elitis menganggap bahwa tidak ada kelompok masyarakat di luar para elit yang ikut menentukan kebijakan pendidikan. *Kelima*, pendekatan rasional yang

mengedepankan ide bahwa kebijakan pendidikan didasarkan pada pertimbangan rasionalitas. Pertimbangan rasionalitas yang memperhitungkan besarnya pengorbanan dan hasil yang akan dicapai (efisiensi).

Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan pendidikan menurut Imron (2012: 31) adalah: (1) perumusan kebijakan pendidikan, (2) legitimasi kebijakan pendidikan, (3) komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, (4) mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan (5) evaluasi kebijakan pendidikan.

Berdasarkan beberapa tahapan ataupun pendekatan yang digunakan untuk suatu kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ada yang bersifat *top down* (dari atas ke bawah) dan ada pula bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas). Kedua sifat kebijakan ini pada intinya bertemu pada saat sosialisasi atau ketika partisipasi masyarakat perlu dilibatkan.

Kebijakan yang dikeluarkan sering menimbulkan tanda tanya, siapakah aktor di belakang kebijakan pendidikan tersebut? Terdapat beberapa pendapat tentang siapa aktor dari kebijakan pendidikan yang dibuat. Menurut Hasbullah (2015) aktor-aktor di balik perumusan kebijakan terdiri dari: (1) lembaga legislatif atau DPR/DPRD, (2) eksekutif atau pemerintah, (3) administrator yaitu mulai dari tingkat menteri sampai kepala dinas yang ada di daerah, (4) partai politik, (5) *interest group* atau kelompok kepentingan, (6) organisasi massa, (7) perguruan tinggi, (8) tokoh perorangan (tokoh pendidikan).

c. Implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap dimana kebijakan tersebut diuji baik efektivitas maupun efisiensi dalam makna yang sesungguhnya. Pada saat implementasinya banyak faktor yang memengaruhinya sehingga mampu bertahan atau harus diubah dengan kebijakan yang baru. Sebuah contoh kebijakan nasional bidang pendidikan adalah kurikulum 2013 yang sering disingkat K13. Perumusan kurikulum ini didasarkan pada pendekatan yang sangat rasional bahkan dianggap oleh para ahli sebagai kurikulum yang seiring dengan irama psikologi belajar peserta didik. Namun mengalami penundaan karena berbagai alasan.

B. Kemitraan dalam Pendidikan

1. Makna kemitraan

Sebelum meninjau kemitraan dalam pendidikan maka terlebih dahulu diuraikan tentang makna dari kemitraan itu sendiri. Kemitraan memiliki beberapa istilah sesuai dengan tingkatannya. Menurut Heideneim (Kuswidanti, 2008), ada lima istilah kemitraan yaitu (1) *Full collaboration (written agreement, shared vision, consensus decision, formal work assignment)*. Kolaborasi penuh dengan ciri-ciri, perjanjian dilakukan secara tertulis, visi dirancang dan dibuat bersama, keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan, dan penugasan kerja bersifat formal. (2) *Coalition (formal agreement, all member involved in, new resources, joint budget)*. Koalisi dengan ciri-ciri, perjanjian bersifat resmi, semua anggota terlibat, sumber daya baru, dan anggaran ditanggung bersama. (3) *Partnership (formal contract, new resources,*

shared risk and reward). *Partnership* disebut juga dengan kerjasama yang bercirikan, sistem kontrak yang bersifat resmi, sumber daya baru, berbagi risiko, dan ada imbalan. (4) *Alliance (semi formal, some new resources, coordination of task)*. Aliansi atau disebut juga dengan persekutuan dengan ciri-ciri, bersifat semi formal, beberapa sumber daya baru, dan ada koordinasi tugas. (5) *Network (loose association, no significant demands)*. *Network* disebut juga jaringan dengan ciri-ciri, kerugian ditanggung bersama, dan tidak ada tuntutan yang signifikan.

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama tim yang diikat oleh kesepakatan. Menurut Notoatmodjo (Kuswidanti, 2008) kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas dan tujuan tertentu. Secara detail kemitraan diungkapkan sebagai berikut:

“Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.” (Kuswidanti, 2008).

Sedangkan menurut Maryln kemitraan dianggap sebagai suatu kolaborasi seperti yang diungkapkan berikut:

“Collaboration refers to the style or approach in the interaction between schools, parents and community based on the elements of voluntarism, equality accomplishment of common/shared goals, sharing of responsibility in making decisions, sharing of results, sharing of resources and finally having mutual trust and respect to each other.” (Khalid, 2004)

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan Marlyn di atas bahwasanya kolaborasi/kemitraan memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur tersebut meliputi: (1) kesukarelaan, (2) kesetaraan, (3) berbagi tanggung jawab dalam pembuatan

keputusan, (4) berbagi hasil, (5) berbagi sumber daya dan (5) memiliki rasa saling percaya dan menghormati satu sama lain. Sedangkan Kuswidanti (2008) menyimpulkan bahwa ada tiga prinsip dalam kemitraan. Ketiga prinsip kemitraan tersebut adalah: (1) kesetaraan, (2) keterbukaan, dan (3) azas manfaat bersama.

Penjelasan tentang kemitraan secara umum telah diuraikan di atas. Meskipun tidak jauh berbeda dengan kemitraan secara umum, namun menyangkut kemitraan tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) memiliki pengertian dan pandangan khusus. Secara khusus, kemitraan tri pusat pendidikan disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 6) bahwa:

”Kemitraan tri pusat pendidikan adalah jalinan kerjasama antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat yang berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing dengan berlandaskan pada azas gotong-royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban untuk membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.”

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, kemitraan pendidikan bermuara pada terbangunnya ekosistem (berbagai komunitas dan lingkungannya) pendidikan dengan dua tujuan umum yang menjadi prioritas yaitu; (1) menumbuhkan karakter, dan (2) menumbuhkan budaya prestasi bagi peserta didik. Memperjelas kedua tujuan tersebut oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dijelaskan berikut:

”Karakter adalah akhlak, budi pekerti yang mengacu pada nilai-nilai dan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang mencakup karakter religius, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.” (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2015: 7)

Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan budaya prestasi. Apa yang dimaksud budaya prestasi? Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 7) menyebutkan bahwa:

”Budaya prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga sekolah yang terkait dengan pencapaian prestasi, baik prestasi sekolah sebagai institusi maupun prestasi individual peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi masing-masing.”

Dua tujuan kemitraan pendidikan yang telah diuraikan di atas yaitu menumbuhkan karakter dan budaya prestasi merupakan tujuan umum. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menginginkan tujuan yang sifatnya khusus. Tujuan khusus ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan kedua tujuan umum tersebut. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 8) dituliskan ada empat tujuan khusus kemitraan tri pusat pendidikan yaitu:

1. Memperkuat kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan aman.
2. Meningkatkan partisipasi orangtua dalam mendukung belajar anak di sekolah.
3. Meningkatkan peran keluarga dalam menciptakan suasana rumah yang mendukung anak belajar dengan aman dan nyaman.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan anak di masyarakat.

2. Elemen lembaga kemitraan dalam pendidikan

Secara holistik pendidikan merupakan tanggung jawab dimana manusia itu berada. Keberadaan peserta didik secara garis besar berada di rumah (keluarga), di

sekolah, dan di luar dari keduanya (masyarakat). Ketiga tempat ini idealnya berkolaborasi memberikan pengetahuan, pembiasaan, dan dukungan dalam rangka terbentuknya karakter peserta didik yang baik.

Nilai-nilai dalam pendidikan ada yang bersifat dasar dan berlaku universal. Nilai seperti jujur, adil, sopan, ramah, menghargai orang lain, bekerja keras, dan kreatif, merupakan nilai universal yang disetujui dimana saja. Oleh karenanya kemitraan antara semua pemangku kepentingan berupaya memastikan adanya kesamaan atau keseragaman yang bersifat mendasar sebagaimana teori sosiologi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa:

“Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, hanya jika terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai bagi warganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut, oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini pada anak-anak.” (Idi 2010:10).

Tingkat homogenitas dalam masyarakat adalah adanya kesamaan sistem nilai yang disepakati, diakui, dan ditaati bersama. Sistem nilai yang memadai seperti nilai moral berdasarkan budaya, agama, dan nilai standar kebaikan universal yang lain. Penerimaan sistem nilai bagi pelaku kemitraan memerlukan jiwa besar yang didukung oleh wawasan luas, pemikiran cerdas, dan keinginan kuat untuk memperjuangkan keberhasilan pendidikan. Kemitraan pendidikan memiliki alasan yang kuat sehingga penting dibangun, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Epstein, 2002: 7):

“There are many reasons for developing school, family, and community partnerships. Partnerships can improve school programs and school climate, provide family services and support, increase parents’ skills and leadership, connect families with others in the school and in the community, and help teachers with their work. However, the main reason to create such partnerships is to help all youngsters succeed in school and in later life. When parents,

teachers, students, and others view one another as partners in education, a caring community forms around students and begins its work."

Ada beberapa alasan untuk mengembangkan kemitraan pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. *Pertama*, kemitraan dapat meningkatkan program sekolah dan memperbaiki iklim sekolah. *Kedua*, kemitraan mampu menyediakan layanan dan dukungan keluarga. *Ketiga*, kemitraan dapat meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan orangtua. *Keempat*, kemitraan menghubungkan keluarga dengan orang lain di sekolah dan di masyarakat. *Kelima*, kemitraan membantu pekerjaan guru. *Keenam*, yang merupakan alasan utama membangun kemitraan adalah untuk membantu semua anak berhasil di sekolah dan berhasil di masa depan. Ketika orang tua, guru, siswa, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan melihat satu dengan yang lain sebagai mitra dalam pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa bentuk komunitas kemitraan yang peduli di sekitar siswa sudah ada dan mulai bekerja.

Penguatan akan pentingnya kemitraan dalam pendidikan diperkuat oleh temuan-temuan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zagir A, dkk, mengungkapkan tentang pentingnya kemitraan sosial.

"Of all the forms of cooperation of educational organizations and families, the most relevant is a social partnership, where the subjects have common interests, equal rights and are equally responsible for the quality of educational results." (Zagir A dkk, 2016).

Temuan ini bahkan menyimpulkan bahwa dari semua bentuk kerjasama antara sekolah dan keluarga, maka kemitraan sosial merupakan bentuk kerjasama yang paling relevan. Kehebatan kemitraan sosial menurut Zagir A, dkk, karena didukung oleh beberapa kondisi yaitu, (1) subjek memiliki kepentingan bersama, (2) subjek memiliki

hak yang sama, dan (3) subjek secara bersama-sama bertanggung jawab atas kualitas hasil pendidikan.

Hasil penelitian tentang kemitraan pendidikan berikutnya adalah yang dilakukan oleh Venera G. and Ekaterina L (2016). Mereka meninjau kemitraan pendidikan dari segi efektivitas dan produktivitas.

”work on development of the pedagogical culture of parents is more effective if it is done in the form of social partnership between the family and a supplementary education institution. Partnership is the most productive way as it implies more comprehensive and long-term involvement of parents into solution of social and educational problems. (Venera G. and Ekaterina L, 2016).

Dijelaskan oleh Venera G. and Ekaterina L (2016) bahwa. (1) dalam mengembangkan budaya pedagogis orangtua lebih efektif jika dilakukan dalam bentuk kemitraan sosial antara keluarga dan lembaga pendidikan dan (2) kemitraan merupakan cara yang **paling produktif** karena adanya keterlibatan yang lebih komprehensif dan dalam jangka panjang dari pihak orangtua terhadap masalah sosial dan pendidikan.

Dalam pendidikan, kemitraan secara ideal dibangun oleh empat lembaga yang menjadi pemeran utama yaitu: (1) keluarga, (2) sekolah, dan (3) masyarakat, yang dilindungi oleh (4) pemerintah. Sekalipun sekolah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, namun kondisi kekinian di Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar secara khusus, kehadiran pemerintah dalam berpartisipasi secara langsung masih sangat dibutuhkan. Lebih jelasnya keberadaan dan peranan masing-masing unsur-unsur pembangun kemitraan seperti yang diuraikan berikut ini.

a. Keluarga

Peran keluarga dalam pendidikan merupakan harapan besar dari semua pihak. Keluarga adalah pihak yang paling berkepentingan dalam urusan pendidikan dibandingkan dengan semua elemen kemitraan. Meskipun demikian harapan tidaklah selalu sesuai dengan kenyataan. Hasil penelitian Daud (2014) di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil analisis data sebagai berikut:

“Hanya 35% dari responden orang tua yang menyatakan bahwa selalu terlibat secara langsung dalam perencanaan program sekolah, pelaksanaan program, penggalangan sumber dana, memberi bantuan baik berupa tenaga, dana maupun bahan, serta aktif dalam bentuk pemikiran. Namun demikian, masih terdapat 18% orang tua siswa yang sama sekali tidak pernah terlibat langsung. Dari orang tua yang selalu terlibat langsung pada umumnya dalam pelaksanaan program, penggalangan sumber dana, dan pertanggung jawaban sekolah, sedangkan ketidakterlibatan orang tua pada umumnya dalam bentuk bantuan dana, bahan, tenaga dan pemikiran, serta perencanaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab orang tua siswa tidak optimal memberikan bantuan dalam program-program sekolah dengan adanya anggapan dari beberapa anggota masyarakat bahwa dengan adanya bantuan dari pemerintah, maka orang tua tidak perlu lagi memberi bantuan kepada sekolah. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa sekolah adalah tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, umumnya orang tua hanya ingin memberi bantuan lain, yang bukan berupa bantuan dana. Namun demikian, kenyataannya ada sebanyak 71,2% dari orang tua siswa menganggap bahwa biaya pendidikan dari dana bos dana bantuan lain dari pemerintah tidak cukup, dan hanya 28,8% dari orang tua siswa menganggap sudah cukup.

Bagi orang timur nilai keluarga begitu tinggi. Sebuah syair lagu dari film “Keluarga Cemara” diungkapkan demikian: ”harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga.” Sepotong lagu ini sudah mampu menggambarkan bagaimana arti keluarga bagi kita. Keluarga adalah tempat kembali saat sukses maupun saat gagal. Keluarga adalah tempat pulang saat rindu. Fenomena

lebaran setiap tahun selalu menjadi berita dan cerita menarik, mereka para perantau disibukkan oleh peristiwa “mudik lebaran”.

Keluarga terbagi atas dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luar (*extended family*). Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung merupakan agen sosialisasi primer (Damsar, 2011:70). Adapun keluarga luar yang terdiri dari nenek, kakek, paman, tante, dan anggota dewasa lainnya juga turut memberi andil dalam transmisi pengetahuan, nilai, norma-norma, dan harapan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Bernstein (Damsar, 2011:70) terdapat dua tipe ideal dari pola pembinaan dalam keluarga yaitu; keluarga yang berorientasi posisi (*position-centered family*) dan keluarga yang berorientasi pribadi (*person-centered family*). Mempertajam tentang kedua tipe ideal pola pembinaan keluarga secara lebih jelas seperti diuraikan berikut ini:

1) *Position-centered family*

Terjadi pemisahan peran secara jelas dari setiap anggota keluarga, bagaimana peran ayah, peran ibu, peran anak, dan peran anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga menyadari posisi mereka sehubungan dengan keadaan umur, gender, status sosial-ekonomi, dan kekuasaan. Harapannya adalah mereka dapat memahami kedudukan yang dimiliki di antara berbagai posisi yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya pembagian posisi yang jelas di antara anggota keluarga maka mereka memiliki kebebasan menentukan sikap dan perilaku sosialnya.

2) *Person-centered family*

Keluarga memperlakukan anak berdasarkan karakteristik unik yang dimilikinya sebagai pribadi. Sejak kecil anak dirangsang secara aktif perkembangan bahasanya sehingga dapat dikontrol sesuai cara-cara keluarga. Anak dididik, diasuh, sesuai dengan format keluarga. Filosofi dari pola *person-centered family* adalah “air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan jua.”

Keluarga merupakan tempat titik awal seorang anak didik dibentuk oleh orangtua. Orangtua sebagai pemegang peranan harus mampu mendidik sesuai dengan peruntukan anak didik tersebut. Dalam pendidikan keluarga orangtua harus memiliki paradigma positif terhadap sang anak. Menurut Chatib (2012: 57) anak kita adalah “bintang” yang sinarnya mampu menerangi dunia. Untuk itulah kehadirannya merupakan kesyukuran bagi orangtua dan menjadikan kesabaran dan optimisme sebagai landasan utama dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Menurut Ningsih (2008: 7) keluarga merupakan penentu arah sikap dan perilaku anak pada masa mendatang. Keluarga yang dipimpin oleh ayah dan ibu memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memengaruhi anaknya. Kewenangan besar itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor *pertama*, orangtua yang melahirkan dan mengasuh. Peristiwa kelahiran dan pengasuhan mengikat secara kuat lahir dan batin antara seorang anak dan orangtuanya (faktor *genotif* dan *fenotif*). Faktor *kedua*, orangtua merupakan guru pertama yang menanamkan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang dapat membentuk akhlaq atau karakter sang anak. Faktor *ketiga*, orangtua yang membiayai (mencari nafkah) untuk melayani kebutuhan anaknya.

Ketergantungan pemenuhan kebutuhan seorang anak dari orangtuanya dapat menjadikan mereka menjalin keakraban yang lebih. Orangtua merasa senang membantu dan anak berterima kasih kepada orangtuanya.

Peran keluarga menempati kedudukan yang sangat vital dalam menguatkan kemitraan pendidikan. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 9) beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar keluarga dapat berperan lebih optimal antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pola asuh positif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak.
2. Ketersediaan waktu orangtua untuk mendampingi dan berinteraksi dengan anak di rumah secara cukup baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. Ketersediaan waktu orangtua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah sesuai dengan program yang disepakati.
4. Menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong berkembangnya kreativitas anak.
5. Menjalinkan interaksi dan komunikasi yang hangat penuh kasih sayang dengan anaknya.
6. Memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anaknya untuk berprestasi.
7. Menjalinkan hubungan dan komunikasi yang aktif dengan sekolahnya untuk menciptakan lingkungan budaya belajar yang kondusif.
8. Melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.

Keinginan pemerintah terhadap keterlibatan orangtua dalam pendidikan diperkuat oleh hasil penelitian yang dikemukakan oleh Venera G. & Ekaterina L (2016). Mereka berdua menyoroti tentang sikap-sikap kesiapan orangtua sebagai pihak berkepentingan nomor satu dalam kemitraan pendidikan.

“The willingness of parents to partnership includes the following: a positive attitude to the supplementary education institution, the desire to take part in its activities and events; interest in the education quality and outcomes; an ability to assess their own capabilities, to carry out dialogue communication with teachers; understanding their role in the process of cooperation with the educational institution.” (Venera G. & Ekaterina L, 2016).

Diuraikan bahwa kesediaan orangtua untuk kemitraan meliputi berikut ini: (1) sikap positif terhadap lembaga pendidikan (sekolah), (2) keinginan untuk mengambil bagian dalam kegiatan dan acara; (3) berkepentingan dalam kualitas hasil pendidikan; (4) dapat menilai kemampuan mereka sendiri dalam melakukan komunikasi dengan guru; dan (5) memahami peran mereka dalam proses kerjasama dengan lembaga pendidikan (sekolah).

Peran keluarga dalam membentuk karakter anak tidak selalu berhasil dengan baik. Kenyataan yang diinginkan tidak selalu seiring dengan harapan. Selain sisi gemilang keberhasilan keluarga juga ada sisi gelap yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan psikis sang anak. Menurut Fatimah (Suyanto, 2013: 33-35) setidaknya ada enam faktor pendorong terjadinya pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak.

1. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi suatu keluarga sering kali mengecewakan dan berujung pada kekerasan. Problematika finansial keluarga

yang memprihatinkan dapat menciptakan masalah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pakaian, sewa rumah yang relatif dapat memengaruhi jiwa dan tekanan batin yang seringkali pada akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

2. Masalah keluarga. Hubungan dalam keluarga yang kurang atau tidak harmonis yang mengakibatkan kemarahan orangtua sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan. Kekecewaan orangtua karena anak yang lahir cacat fisik atau cacat mental seringkali menjadi beban batin bagi keluarga yang mengurus biaya, tenaga, dan pikiran.
3. Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Terjadi kebingungan bagi orangtua maupun anak tentang siapa yang mengasuh siapa. Pemberian materi dan kasih sayang pun menjadi masalah tersendiri. Akibat perceraian yang suram menjadi berkepanjangan setelah masuknya pihak ketiga yakni ibu tiri atau bapak tiri yang dengan sendirinya status anak tiri pun menjadi beban yang berat.
4. Kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang akibat kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah di antara kedua orangtua anak. Penerimaan anak di luar nikah tidak sama dengan anak yang dilahirkan dengan terhormat. Tidak sedikit anak di luar nikah menjadi orang yang disingkirkan dari kasih sayang keluarga.
5. Permasalahan kejiwaan orangtua. Tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam suatu keluarga menurut kajian psikologis dilakukan oleh orangtua

yang mengalami gangguan kejiwaan. Orangtua senantiasa berada dalam situasi kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres.

6. Faktor pendidikan keagamaan. Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat pula sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman agama. Agama bagi manusia sudah menjadi *way of live* yang diyakini dapat memberikan perasaan damai dan tenteram. Sebaliknya jauh dari agama diyakini menjadi sumber kekacauan pikiran dan tindakan manusia.

Pihak keluarga dalam hal ini adalah orangtua dituntut untuk mampu mengelola masalah. Ketidakmampuan dalam mengelola masalah keluarga dapat berimbas pada munculnya konflik penyebab *disharmoni* ‘ketidakharmonisan’ keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Margaret S (2016) menyebutkan bahwa:

“Mismatch and disorganization of intra-familial relationships causes destabilization, and the family falls into the category of "troubled" family. In this article, we study troubled families, which are one of the factors of social instability.” (Margaret S, 2016)

Menurut Margaret bahwa penyebab terjadinya keluarga bermasalah adalah adanya ketidakrelevanan dan tidak terorganisasinya hubungan intra keluarga. Menurutnya keluarga bermasalah merupakan salah satu faktor terjadinya ketidakstabilan sosial.

Kerumitan dan liku-liku dalam mengelola pendidikan juga telah “memaksa” pemerintah sebagai pengendali eksternal. Kebebasan orangtua memainkan peran dalam melaksanakan pendidikan keluarga dirasakan perlu dilindungi. Peran orangtua dalam pendidikan formal diatur dalam UU No. 20/2003 bahwa; (1) orang tua berhak berperan

serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hambatan dalam hal keterlibatan keluarga memainkan fungsinya dalam pendidikan. Beberapa hambatan tersebut dikemukakan oleh Danim (2010: 182) sebagai berikut: (1) keluarga mengalami kekurangan sarana untuk membantu anak-anak mereka belajar, (2) sekolah tidak menemukan cara efektif mendorong keluarga untuk berpartisipasi bagi kegiatan belajar anak, (3) kepedulian staf sekolah berbeda dalam hal komitmen terhadap keterlibatan keluarga dan mungkin menghasilkan pesan yang “diramu” begitu saja untuk orangtua, (4) prosedur penjangkauan keterlibatan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat dapat menghalangi partisipasi, dan (5) mengubah sistem kebijakan sekolah untuk meminta keterlibatan keluarga dapat menciptakan ketidakstabilan hubungan antar sesama.

Idealnya, kemitraan pendidikan anak dijadikan sebagai prioritas utama. Tidak boleh hanya sekedarnya, semampunya, atau jika ada waktu yang tersisa. Kecintaan terhadap anak bagi orangtua dan kepedulian terhadap peserta didik bagi guru tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja rasa cinta dan peduli tersebut menjadi bukan prioritas lagi ketika semua pihak larut dalam aktivitas masing-masing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2010) memaparkan sebagai berikut:

“Kenyataannya, tuntutan kehidupan di masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan kemitraan tidak menjadi prioritas. Alasannya baik pendidik (guru) maupun orangtua tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertemu dan

membangun hubungan yang baik dalam rangka kemajuan si anak. Kebanyakan orangtua tidak didorong untuk menghabiskan waktu di ruang kelas, begitu juga dengan guru yang hanya berkonsultasi dengan orangtua bila anak yang bersangkutan membuat masalah di sekolah. Semua gejala ini menghasilkan kesalahpahaman, tidak saling mempercayai dan kurangnya rasa hormat yang tergambar dari pelimpahan kesalahan dari orangtua kepada guru atau sebaliknya.” (Utari, 2010).

Secara tradisional keluarga secara turun-temurun memainkan perannya masing-masing. Keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah, dan saudara kandung pasti memainkan peran yang penting dalam pendidikan anak. Purwanto (2009: 82-83) merinci bagaimana seorang ibu memainkan peran dan tanggung jawabnya sebagai berikut: (1) sumber dan pemberi kasih sayang, (2) pengasuh dan pemelihara, (3) tempat mencurahkan isi hati, (4) pengatur kehidupan dalam rumah tangga, (5) pembimbing hubungan pribadi, dan (6) pendidik dalam segi-segi emosional. Sedangkan seorang ayah berperan sebagai: (1) sumber kekuasaan dalam keluarga, (2) penghubung intern keluarga dengan masyarakat, (3) pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga, (4) pelindung dari ancaman luar, (5) hakim yang mengadili jika terjadi perselisihan, dan (6) pendidik dalam hal-hal rasional.

Sebagai lembaga pendidikan informal, keluarga memiliki fungsi. Fungsi-fungsi yang diperankan oleh keluarga secara kelembagaan dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan. Davies (dalam Danim, 2010: 182) mengemukakan empat tema penting keterlibatan keluarga dalam pendidikan yakni: (1) membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses, (2) mendorong perkembangan anak secara keseluruhan termasuk dimensi sosial, fisik, akademik, dan pertumbuhan dan perkembangan emosional, dan (3) mendorong tentang tanggung

jawab bersama untuk anak. Tema-tema ini menggambarkan bahwa keterlibatan keluarga dapat berkontribusi untuk pengembangan semua aspek kehidupan individu dalam masyarakat yang lebih luas.

Masih berbicara tentang fungsi keluarga dalam pendidikan. Seorang pakar bernama Joyce Epstein (dalam Danim 2010: 183) mengemukakan sebuah tipologi berdasarkan enam tingkat keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak sebagai berikut: (1) *parenting*, yaitu memberikan bimbingan, merawat, memotivasi, dan menegakkan disiplin anak, (2) *communicating*, yaitu berkomunikasi secara teratur dengan staf sekolah tentang program-program, kemajuan anak, dan urusan sekolah lainnya, (3) *volunteering*, yaitu kesukarelaan dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kelas, (4) *learning to home*, yaitu belajar di rumah, membantu anak belajar mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum, (5) *decision making*, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah, menjadi pemimpin orangtua atau perwakilannya, dan (6) *collaborating with community*, yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik.

Dalam hal *parenting* (pengasuhan) orangtua juga perlu terlibat dalam kelompok pemerhati *parenting*. Ternyata manfaatnya amat besar, baik bagi orangtua maupun bagi anak didik. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Chang, Park, & Kim (2009) menyimpulkan bahwa:

“revealed that parents who attended parenting classes stimulated their children’s language and cognitive development and provided educational activities more than did parents who did not participate in parenting classes. The cognitive outcomes (the Bayley MDI scores) of the children whose parents attended parenting classes were significantly higher than those of the children of parents who had never attended these classes.” (Chang, Park, & Kim, 2009).

Dijelaskan bahwa orang tua yang terlibat dalam kelompok *parenting*, (1) lebih mampu merangsang perkembangan bahasa anak-anak mereka, (2) lebih mampu merangsang perkembangan kognitif anak-anak mereka, (3) mampu memberikan kegiatan yang mendidik lebih dari pada orang tua yang tidak berpartisipasi dalam kelompok *parenting*. Sedangkan manfaat bagi anak didik adalah bahwa hasil kognitif dari anak-anak yang orangtuanya menghadiri kelompok *parenting* secara signifikan lebih tinggi dari pada anak-anak dari orangtua yang tidak pernah menghadirinya.

b. Sekolah

Sebuah fakta mengawali uraian tentang peranan sekolah dalam pendidikan. Fakta ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daud (2014) di Sulawesi Selatan tentang peran sekolah. Ditemukan hasil analisis data sebagai berikut:

“Pihak sekolah kurang memaksimalkan potensi yang ada baik orang tua, tokoh masyarakat, dan komite sekolah dalam mendukung pencapaian visi dan misi sekolah, serta pelaksanaan program. Hal ini ditunjukkan bahwa hanya 38% sekolah yang selalu mengusahakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan pertanggungjawaban program-program di sekolah. Bahkan, masih terdapat 18% sekolah yang tidak pernah melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat maupun komite sekolah. Beberapa hambatan yang dijumpai sekolah dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat, terutama dalam mengajak dan memberi pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain: (1) adanya pemikiran masyarakat bahwa sekolah merupakan urusan pemerintah saja; (2) dengan adanya dana bos dan bantuan lain dari pemerintah, masyarakat menganggap sekolah sudah mampu, dan tidak perlu lagi diberi bantuan; (3)

kepedulian masyarakat terhadap sekolah masih rendah; (4) adanya pemikiran sebagian masyarakat tentang adanya pendidikan gratis; (5) kemampuan ekonomi masyarakat rendah; (6) adanya beberapa pemerintah daerah yang menyampaikan kepada masyarakat, bahwa tidak ada pungutan biaya penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah; dan (7) komite sekolah belum berperan secara maksimal.”

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dilindungi oleh pemerintah. Di sekolah terlibat beberapa elemen yang merupakan motor penggerak pendidikan seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, dan staf pegawai. Bila dirunut, yang paling banyak dan paling besar peranannya dalam mendidik di sekolah adalah guru.

Guru memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai perekayasa budaya sekolah. Fakhruddin (2008) mengatakan, sebagus apapun, semoderen apapun kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak ada gunanya. Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap bergantung pada kondisi mutu guru. Hal itu ditegaskan UNESCO dalam laporan *The International Commission on Education for Twenty-first Century*, yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru (Fakhruddin, 2008: 12).

Dalam menguatkan kemitraan pendidikan, guru dapat memainkan peran yang sangat strategis. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 13) menyebutkan peranan guru dalam program penguatan kemitraan pendidikan adalah:

1. Pendukung kebijakan program penguatan kemitraan satuan pendidikan (sekolah), keluarga, dan masyarakat di sekolah.

2. Motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi peserta didik.
3. Bersama dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah mengevaluasi pencapaian hasil program penguatan kemitraan.
4. Membantu wali kelas dalam menyampaikan informasi keadaan kelas, misalnya menginformasikan jika ada peserta didik yang tidak masuk agar ditindaklanjuti wali kelas.

Menguatkan apa yang dikemukakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di atas, Venera G dan Ekaterina L dalam penelitiannya tentang efektivitas suatu kemitraan mengungkapkan sebagai berikut:

“A supplementary education teacher should understand that partnership relations with the family are possible if the following conditions are met: respect for the family, humanism in cooperation with the family which implies relying on positive qualities of parents and children; adhering to subject-subject relations with parents.” (Venera G. and Ekaterina L, 2016).

Menurut Venera G dan Ekaterina L bahwa seorang guru harus memahami syarat-syarat hubungan kemitraan dengan orangtua. Beberapa syarat hubungan kemitraan yang harus dipahami oleh guru adalah; (1) menghormati keluarga, humanisme kerjasama dengan keluarga yang mengandalkan kualitas positif dari orang tua dan anak-anak, (3) berpegang pada hubungan subjek-subjek dengan orang tua.

Tokoh pendidikan yang memiliki posisi spesial di sekolah adalah guru wali kelas. Di antara semua guru yang berinteraksi dengan peserta didik maka guru wali kelas yang paling memiliki kedekatan emosi dengan peserta didik. Oleh sebab itulah, dalam penguatan kemitraan, guru wali kelas mempunyai peran tersendiri. Menurut

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 12) disebutkan bahwa guru wali kelas dapat berperan sebagai berikut:

1. Sebagai pengganti orangtua di sekolah.
2. Sebagai mediator terhadap kepentingan peserta didik di sekolah.
3. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak keluarga.
4. Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi kepada kelas yang dibinanya.
5. Memperjuangkan kepentingan kelas dan peserta didik yang dibinanya.

Tokoh yang menjadi penentu kebijakan di sekolah yaitu Kepala Sekolah. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab terlibat dalam semua kebijakan dan kegiatan sekolah. Dalam hal kemitraan, Kepala Sekolah berperan dalam kebijakan internal dan eksternal sekolah. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 12) disebutkan peran-peran Kepala Sekolah sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan yang mendukung terselenggaranya penguatan kemitraan sekolah dengan orangtua dan masyarakat (Komite Sekolah).
2. Pengelola SDM warga sekolah dan anggaran yang ada baik di sekolah maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program kemitraan.
3. Penjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang pelaksanaan program kemitraan.
4. Mitra utama masyarakat (Komite Sekolah).
5. Pengendalian seluruh pelaksanaan program sekolah.

Membangun budaya sekolah juga membutuhkan guru yang responsif terhadap faktor eksternal yang disebut globalisasi. Globalisasi telah menunjukkan betapa banyak

telah membawa perubahan bagi peserta didik. Dalam rangka itulah, (Zhao, 2010: 426) memberi solusi untuk kondisi globalisasi sebagai berikut:

“To meet these challenges, schools need teachers who understand the implications of globalization, are able to effectively work with the increasingly culturally and linguistically diverse student population, and deliver a globally oriented curriculum. In the following section, we discuss the knowledge, skills, perspectives, and attitudes needed for teachers to meet the challenges of globalization.” (Zhao, 2010: 426)

Dijelaskan bahwa menjawab tantangan globalisasi dibutuhkan guru yang memahami implikasi dari globalisasi. Guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan sikap yang diperlukan untuk memenuhi tantangan globalisasi. Guru yang mampu bekerja efektif dengan populasi siswa yang semakin beragam budaya dan bahasanya. Pendidikan yang memberikan kurikulum berorientasi global.

Salah satu penyebab globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi. Dua peristiwa ini (teknologi informasi dan globalisasi) tidak dapat terpisahkan. Guru harus mampu menjadi pelaku pendidikan yang bijaksana dalam menyikapi. Salah satu sikap yang dianggap bijaksana oleh Gnjatović (2015) adalah menghargai kearifan lokal, meskipun dunia pendidikan sudah diwarnai oleh aplikasi teknologi informasi.

“The study showed that the new technological era, brings innovative approach to teaching and learning though the teachers still appreciate and value a good story.” (Gnjatović, 2015).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Gnjatović (2015) menunjukkan pada hakikatnya era teknologi baru telah membawa pendekatan inovatif untuk guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini tidak berarti bahwa produk budaya lama

menjadi terlupakan. Guru harus tetap dituntut untuk selalu mengajarkan nilai-nilai lama lewat cerita yang diharapkan dapat membangun jiwa dan semangat anak didik.

Perilaku pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan dimana siswa berada, serta peran guru dalam mengorganisasi kelas (Ahdiyat dkk, 2009: 6). Oleh sebab itulah budaya sekolah harus direncanakan dan diproses secara terarah dan bertujuan jelas. Abdullah dan Ngang, (2006: 97) berkomentar tentang hal ini bahwa pada peringkat amalan budaya kolaboratif ialah pelaksana pendidikan harus bijak mengolah dimensi budaya kolaboratif secara kreatif berdasarkan tahap motivasi. Hasil penelitian yang mendukung adalah bahwa variabel nilai merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap pengembangan budaya sekolah (Witarsa, 2011:97).

Elemen lain dari guru yang baik bermutu adalah kecerdasan emosi. Guru bermutu memiliki kecerdasan emosi yang baik sehingga mampu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memberi sumbangan secara signifikan sebesar 54.40% kepada komitmen pekerjaan (Iskandar, 2008:174). Komitmen tinggi guru terhadap pekerjaannya dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap peserta didik untuk memiliki karakter yang diharapkan. Herbert Spencer (dalam Danim, 2010:25) mengatakan bahwa, *education has for its object the formation of character* (objek utama pendidikan adalah pembentukan karakter).

Secara internal peserta didik berpotensi untuk memiliki karakter yang kuat. Menurut William Kilpatrick (dalam Muslich, 2011: 133) bahwa penyebab ketidakmampuan seseorang berperilaku baik walaupun secara kognitif dia

mengetahuinya (*moral knowing*) adalah karena dia tidak terlatih melakukan kebaikan (*moral action*). Oleh sebab itulah pendidikan karakter menurut Lickona (dalam Muslich, 2011: 133) perlu ditekankan tiga elemen karakter yang baik, yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan moral). Dengan demikian anak mampu memahami, merasakan, dan melakukan sekaligus kebajikan-kebajikan.

Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam revitalisasi dan penguatan karakter. Baik sebagai subjek maupun objek, perlu disadari bahwa terdapat banyak potensi manusia yang perlu menjadi prioritas dalam pemberdayaan. Menurut Suryanta (2006: 16), jika potensi fisik, akal-intelektual, dan hati diberdayakan maka terciptalah manusia seutuhnya, karena ketiganya merupakan *the gate of knowledge* (pintu gerbang pengetahuan).

Penanaman karakter dalam bentuk nilai-nilai dapat dilakukan di dalam kelas atau pun di lingkungan sekolah. Proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai macam variasi model, metode, atau pun pendekatan. Untuk mencapai tugas secara profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar yang telah dirumuskan, baik dalam arti efek instruksional, maupun dalam arti efek pengiring (Fatkhulloh, 2009:10).

Menurut Masitoh dkk (2009: 7) pembelajaran berorientasi kecakapan hidup memerlukan dukungan budaya sekolah yang mendorong berkembangnya budaya belajar sehingga di sekolah tercipta prinsip “belajar bukan untuk sekolah tetapi belajar

untuk hidup”, belajar bukan untuk ujian, tetapi belajar untuk memecahkan problema kehidupan”. Menurut Masitoh, paling tidak ada tiga hal yang dapat dikembangkan melalui budaya sekolah yaitu; (1) pengembangan disiplin diri dan rasa tanggung jawab, (2) motivasi belajar, dan (3) pengembangan rasa kebersamaan.

Mewujudkan budaya sekolah yang bertujuan dan terencana tentu terkait dengan kurikulum yang dijadikan sebagai *master plan* berskala mikro di sekolah. Khotimah (2008: 2) mengatakan bahwa kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Dalam rangka mewujudkan kurikulum yang baik tersebut, maka kolaborasi antar elemen yang dianggap memiliki kompetensi perlu dilibatkan.

Kemampuan pedagogik guru menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Silalahi (2011:134) menemukan bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan jika guru mampu memilih model pembelajaran dengan baik sesuai karakteristik standar kompetensi dan kompetensi dasar materi yang akan diajarkan serta mampu mengaitkan dengan situasi kehidupan nyata dimana siswa berada.

Dalam hal perlakuan (model, metode, dan pendekatan) guru di sekolah terbukti menghasilkan perubahan berarti bagi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan percaya diri siswa setelah diberikan intervensi penggunaan teknik permainan dalam bimbingan kelompok (Suhardita, 2011:127). Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa, motivasi belajar terhadap kecakapan hidup siswa dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa (Kiswoyowaty, 2011:120). Hasil analisis

data observasi dan wawancara peserta didik menunjukkan bahwa pendekatan *problem posing* model SSCS (*Search, Solve, Create, and Share*) dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kecepatan mengajukan pertanyaan dan tanggapan terhadap jawaban guru (Irwan, 2011: 1).

Selain pembelajaran di kelas, ternyata guru Bimbingan dan Konseling juga memperkuat temuan bahwa program bimbingan dan konseling, pribadi sosial secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa (peserta didik) terhadap keragaman budaya (Ulfah, hlm: 87). Hal ini sangat mendukung interaksi antara peserta didik di kelas atau pun lingkungan sekolah. Dalam hal peningkatan kecerdasan emosi ditemukan bahwa bimbingan kelompok yang diterapkan kepada siswa terbukti efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa (Nurnaningsih, 2011: 276).

Keberhasilan perlakuan peserta didik di sekolah juga sangat tergantung pada faktor internal. Faktor internal peserta didik yang dimaksud adalah semua potensi yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lebih rinci dikatakan oleh Novianti (2008:1) bahwa faktor internal peserta didik yaitu segala sesuatu yang berasal dari peserta didik itu sendiri, seperti rasa senang terhadap pelajaran, motivasi belajar siswa, kesehatan fisik, psikis, serta inteligensi. Kemampuan mengoptimalkan faktor internal berujung pada lahirnya perilaku cerdas. Secara rinci Wahyudi (2011:35) mengemukakan bahwa, cerdas diri terdiri dari lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu mampu memahami emosi diri, meregulasi emosi, memotivasi diri, memahami orang lain, dan berinteraksi dengan orang lain.

Sehubungan dengan moral sebagai wujud kecerdasan diri, maka peserta didik harus mendapatkan keterampilan emosi dan sosial sebagai berikut; (1) mereka harus mengikuti dan memahami perbedaan antara perilaku baik dan buruk, mengembangkan kebiasaan perbuatan yang konsisten dengan sesuatu yang dinilai baik, (2) mengembangkan kepedulian dan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan dan hak orang lain, yang diwujudkan dengan sikap peduli, pemaaf, ramah, dan dermawan, (3) harus merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, marah, bersalah, takut, dan merasa rendah bila melanggar moral (Saman dan Hariastuti, 2009: 31).

Nilai kognitif, afektif, atau psikomotor yang terbina dalam diri peserta didik teraktualisasi dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim (2007: 2) bahwa apabila nilai telah mempribadi dalam kehidupan seseorang, maka akan tampak dalam pola-pola sikap, niat dan perilakunya. Untuk jenjang waktu jangka panjang ke depan ternyata semua sifat-sifat atau nilai-nilai yang baik sangat berimplikasi dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah gabungan antara sifat-sifat yang baik atau bakat-bakat yang dibawa sejak dari kecil, yang terintegrasikan dengan pengalamannya dalam memimpin sebuah lembaga atau organisasi jika berkesempatan menjadi pemimpin (Muflihin, 2008: 5).

Pada sisi lain, fenomena kehidupan telah membelalakkan mata pemerhati pendidikan bahwa beberapa kejadian justeru bertentangan dengan *outcome* pendidikan yang diinginkan. Kurangnya pembelajaran di bidang afektif bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekolah, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik itu dilakukan secara individual atau pun berkelompok

(Novianti, 2008:3). Menurut Luthfiah (2007: 9), pendidikan tidak lagi menganggap penting proses pembelajaran yang kreatif dan visioner, baik untuk memperkaya khazanah intelektual maupun spiritual. Akibatnya, tanpa rasa malu dan beban moral, banyak orang berlomba-lomba meraih gelar akademik dengan “jual-beli” ijazah, tanpa melalui studi panjang yang berjenjang.

Berdasarkan beberapa uraian peran sekolah dalam pendidikan di atas, lalu bagaimana peluang sekolah dan guru dalam kemitraan? Jawabannya adalah bagaimana cara pandang guru terhadap peserta didik. Menurut Epstein (2002: 7) bahwa:

“If educators view children simply as students, they are likely to see the family as separate from the school. That is, the family is expected to do its job and leave the education of children to the schools. If educators view students as children, they are likely to see both the family and the community as partners with the school in children’s education and development. Partners recognize their shared interests in and responsibilities for children, and they work together to create better programs and opportunities for students.”

Apabila guru memandang anak didik sebagai *student* maka pendidikan sekolah cenderung terpisah dengan pendidikan keluarga. Apabila guru memandang anak didik sebagai *children*, maka guru menganggap keluarga dan masyarakat sebagai timkerja dalam suatu kemitraan. Guru memiliki peluang yang besar untuk menganggap anak didik sebagai *children*. Adanya dukungan adat ketimuran yang begitu kental dengan ikatan emosi dan ikatan kekeluargaan merupakan daya dukung yang potensial. Namun apakah hal tersebut sudah terjadi?

Secara kelembagaan sekolah masih dianggap sebagai kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun tidak bisa ditampik bahwa kehadiran sekolah bagi sebagian masyarakat hanya berfungsi sebagai jembatan untuk mendapatkan ijazah

yang diharapkan berujung mendapatkan pekerjaan. Apakah bekal yang diperoleh di bangku sekolah? Kira-kira seperti inilah pertanyaan yang lumrah diutarakan oleh masyarakat yang bersikap skeptis. Menjawab gugatan seperti ini para ahli mencoba merumuskan fungsi-fungsi sekolah yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi para pemangku kepentingan. Dikemukakan oleh Inglis (Danim, 2010: 166-167) merinci enam fungsi dasar sekolah yaitu:

1. Fungsi penyesuaian (*adjustive function*). Sekolah berfungsi membangun kemampuan peserta didik untuk memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan.
2. Fungsi pengintegrasian (*integrating function*). Sekolah berfungsi mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat.
3. Fungsi *diagnostik* dan *direktif* (*diagnostic and directive function*). Sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik. Fungsi ini juga bermanfaat untuk mengetahui potensi peserta didik, memberi arahan kemana dan apakah karir yang diprediksi paling sesuai.
4. Fungsi *diferensiasi* (*differentiation function*). Sekolah berfungsi memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil *diagnosis* kemudian menentukan urutan berdasarkan peran tersebut dan dilatih hanya sejauh dengan kesesuaian tujuan mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu. Cara ini baik untuk mengoptimalkan jenis layanan dan proyeksi harapan anak sehingga cocok dengan aneka diferensiasi atau perbedaan mereka.

5. Fungsi *selektif (selective function)*. Sekolah berfungsi membantu peserta didik secara sadar berupaya menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya.
6. Fungsi hubungan pembantuan dan *referral (helping and referral function)*. Sekolah berfungsi untuk mendorong peserta didik melakukan hubungan seperti hubungan pembantuan dengan pihak lain sekaligus merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula.

b. Masyarakat

Masyarakat itu siapa? Ini adalah pertanyaan yang penting dipertegas dan dibatasi cakupannya sehingga mudah memahami uraian tentang kemitraan pendidikan. Sekalipun sulit dibatasi namun untuk kepentingan penelitian dirasakan penting untuk mempersempit arti dari masyarakat tersebut. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok manusia yang menjadi tempat berinteraksi peserta didik selain dalam keluarga dan sekolah. Dengan demikian masyarakat itu dapat berupa lembaga pendidikan nonformal, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Masyarakat merupakan elemen kemitraan yang paling kompleks. Masyarakat merupakan lautan manusia terdiri dari corak dan latar belakang yang beraneka ragam. Salah satu kelompok masyarakat yang paling dekat dengan dunia pendidikan adalah

Komite Sekolah. Komite Sekolah dianggap sebagai kelompok yang dapat melakukan kontak langsung dengan sekolah yang dapat membangun jaringan dengan masyarakat yang lebih besar.

Kedekatan Komite Sekolah dengan pihak sekolah seharusnya menjadi pionir masyarakat lainnya dalam membantu sekolah menjalankan kemitraan. Oleh karena itu, peran Komite Sekolah harus dirasakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan peserta didik. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 14) Komite Sekolah dalam penguatan kemitraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan sekolah.
2. Melaksanakan kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan bersama dengan pihak sekolah dengan penuh tanggung jawab.
3. Bersama dengan Kepala Sekolah dan guru mengevaluasi pelaksanaan program penguatan kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Harapan sekolah terhadap Komite Sekolah begitu besar, namun fakta berbicara lain. Hasil penelitian di Sulawesi Selatan oleh Daud (2014) mengemukakan:

“Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun masih kurang, yaitu sekitar 45% komite sekolah yang sudah berperan secara aktif dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan, mendukung dalam wujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Namun demikian, terungkap pula bahwa masih terdapat 14% komite sekolah yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan di sekolah. Hal ini tersebar hampir merata pada setiap komponen baik sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun mediator. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah sulitnya anggota komite sekolah mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat umum tentang

pentingnya peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tidak banyak masyarakat yang mau diajak untuk ikut menjadi anggota komite sekolah. Komite sekolah menanggapi dengan baik tentang penerapan peran dan fungsi komite sekolah dalam menunjang pelaksanaan program sekolah. Namun demikian mereka belum dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan karena adanya berbagai kendala. Karena itu, komite sekolah mengharapkan adanya kerjasama dengan kepala sekolah, dan masyarakat. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mengaktifkan masyarakat dalam membantu program sekolah, antara lain mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat secara terus menerus setiap ada kesempatan, dan mengadakan pertemuan antara komite sekolah, kepala sekolah, guru-guru, orang tua siswa, dan masyarakat secara berkala.” (Daud, 2014).

Selain Komite Sekolah, dalam kelompok masyarakat selalu diwarnai oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu sering diistilahkan sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang didengar dan diperhatikan baik perkataan maupun perbuatannya. Kehadiran tokoh masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan sangat penting artinya karena dapat memudahkan proses pelaksanaan pendidikan. Hasil penelitian tentang peran tokoh masyarakat sebagai elemen penting dalam pendidikan dikemukakan sebagai berikut:

“Hasil analisis data menunjukkan sebanyak 36% tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa sudah terlibat secara langsung dalam perencanaan program sekolah, pelaksanaan program, penggalangan sumber dana, memberi bantuan baik berupa tenaga, dana maupun bahan, serta terlibat aktif dalam bentuk pemikiran. Namun demikian, masih terdapat 11% tokoh masyarakat yang tidak pernah terlibat atau diikutsertakan dalam program-program sekolah. Keterlibatan tokoh masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan program, penggalangan sumber dana, dan pertanggung jawaban sekolah, sedangkan ketidakterlibatan tokoh masyarakat pada umumnya dalam bantuan dana, bahan, dan tenaga, serta pemikiran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya tokoh masyarakat memberi bantuan dalam program sekolah, mereka tidak merasa ikut memiliki sekolah yang dimaksud, sehingga kepedulian mereka terhadap sekolah masih rendah. Sebanyak 78,9% tokoh masyarakat yang menganggap bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana bantuan lain dari pemerintah tidak cukup, dan hanya 23,1% dari tokoh masyarakat yang menganggap cukup. Walaupun demikian, partisipasi

mereka untuk memberikan bantuan dana kepada sekolah masih kurang.” (Daud, 2014).

Berbicara tentang masyarakat maka tidak terlepas dari suatu struktur sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat itu. Sebagai sebuah struktur sosial, masyarakat dapat ditinjau dari asumsi teori tentang kondisi kemasyarakatan. Beberapa teori yang menjadi tinjauan ilmiah adalah (1) teori struktural fungsional, dan (2) teori struktural konflik. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur dan teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik (Damsar, 2011). Selanjutnya Damsar menguraikan asumsi-asumsi tentang teori struktural fungsional:

1. Setiap masyarakat terdiri atas berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil. Aktivitas manusia dari berbagai elemen yang terjadi dalam masyarakat memiliki sifat yang relatif memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut sudah menjadi rutinitas yang sudah mantap dan stabil sehingga sulit untuk berubah. Meskipun terjadi perubahan tetapi berjarak waktu yang cukup lama atau terjadi secara evolusi.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Bahwa elemen masyarakat antara satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Rutinitas yang dilakukan dalam keseharian ternyata membentuk struktur yang memiliki jalinan bersifat saling mendukung.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi. Fungsinya memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Kondisi apapun

yang terjadi antara elemen masyarakat dalam struktur kemasyarakatan pasti memiliki fungsi masing-masing. Perbedaan fungsi yang diperankan mampu merawat keberlangsungan struktur tersebut. Siapapun elemen itu dan sekecil apapun elemen tersebut pastilah memiliki andil dalam memainkan peran struktur yang dibangun.

4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara anggotanya. Perbedaan eksistensi menjadikan setiap elemen dalam struktur berfungsi berdasarkan hasil kesepakatan/maklumat bersama baik disengaja maupun berlangsung secara alamiah. Dalam sebuah keluarga misalnya sudah dipahami bersama bagaimana peran masing-masing. Bagaimana seorang ayah bertugas dalam keluarga? Seorang isteri berperan bagaimana? Begitupun anggota keluarga lainnya. Hal ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya tanpa ada yang tahu kapan konsensus tersebut dimulai (berlangsung alamiah) dan mengapa seperti itu? Lingkungan RT yang terdiri dari beberapa keluarga juga sering terjadi konsensus yang disengaja. Dengan melakukan pembagian-pembagian tugas sesuai kondisi masing-masing elemen.

Selanjutnya Damsar (2011: 56-59) menguraikan juga tentang asumsi-asumsi teori struktural konflik. Pandangan teori struktural fungsional dan teori struktural konflik dalam melihat masyarakat memiliki perbedaan. Teori struktural fungsional selalu melihat masyarakat dalam kondisi yang seimbang sementara dalam teori struktural konflik masyarakat dilihat pada proses perubahan. Secara singkat pandangan teori struktural konflik diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan dan perubahan sosial terdapat dimana-mana. Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat. Elemen-elemen itu mempunyai kepentingan, maksud, motif, dan tujuan yang berbeda. Konsekuensinya adalah terjadinya perubahan yang diperjuangkan oleh setiap elemen berdasarkan kepentingan, maksud, motif, dan tujuan yang berbeda itu.
2. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan konflik dan konflik sosial terdapat dimana-mana. Perbedaan kepentingan, maksud, motif, dan tujuan dalam struktur sosial merupakan sumber terjadinya pertikaian atau konflik antara elemen-elemen masyarakat. Selama perbedaan dalam sebuah struktur sosial masih ada, maka selama itu pula pertikaian dimungkinkan selalu terjadi.
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang *disintegrasi* dan perubahan. Perbedaan kepentingan, maksud, motif, dan tujuan dari berbagai elemen merupakan sumber pertikaian dan konflik. Pertikaian dan konflik menyebabkan *disintegrasi* dan perubahan dalam struktur sosial. Berbagai elemen yang membentuk struktur memiliki andil terhadap terjadinya *disintegrasi* dan perubahan struktur sosial.
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Keteraturan, harmonisasi, atau normalnya keadaan yang terlihat dalam masyarakat dianggap sebagai hasil paksaan dari sebagian anggota masyarakat terhadap sebagian anggota masyarakat lainnya. Kemampuan memaksa yang dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat adalah karena

adanya kepemilikan hak-hak istimewa berupa kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan.

UU No.20/2003 mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat yaitu, berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kewajibannya yaitu, memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Muslich (2011:160), jika pendidikan ingin efektif dan utuh, maka dibutuhkan tiga basis pendidikan yang harus bersinergi yaitu: (1) pendidikan berbasis kelas, (2) pendidikan berbasis budaya sekolah, dan (3) pendidikan berbasis masyarakat di luar sekolah. Makbuloh (2008:7) memandang ada timbal balik pendidikan dan masyarakat, pendidikan membutuhkan masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat membutuhkan pendidikan. Selain itu, kepedulian pemerintah sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa disepelekan. Menurut Anwar (2006:8), hanya kepada penguasa, politikus, dan birokrat yang mencintai pendidikanlah, masyarakat menggantungkan harapannya dalam memperoleh pendidikan.

Kedudukan masyarakat sangat penting bagi pendidikan anak. Masyarakat memegang peranan menentukan dalam rangka proses menuju pendewasaan anak didik/peserta didik. Demikian pentingnya keberadaan dan peranan masyarakat sehingga pakar pendidikan senantiasa menjadikannya sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun fungsi yang perlu diperankan oleh masyarakat sebagai bagian dari aktor pendidikan seperti dikemukakan oleh Danim (2010: 174) adalah:

1. Fungsi pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka.
2. Fungsi partisipasi, yaitu orang-orang yang mendukung untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
3. Fungsi *inklusi*, yaitu kesetaraan kesempatan dan anti diskriminasi dengan mengakui bahwa beberapa orang mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Keberterimaan inklusi juga harus didukung oleh pihak sekolah sebagai pelaksana sehingga ada hubungan timbal-balik antara masyarakat dan sekolah. Sebuah hasil penelitian menjelaskan adanya dukungan dari masyarakat sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi.

“kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah.” (Taufan dan Mazhud, 2014).

4. Fungsi dalam penentuan nasib sendiri, yaitu mendukung hak orang untuk membuat pilihan mereka sendiri.

Dalam memperkuat sistem nilai yang dianut oleh pihak yang bermitra dibutuhkan campur tangan pemerintah. Bentuk campur tangan pemerintah adalah kebijakan dalam bentuk regulasi pelaksanaan pendidikan yang bersifat mengikat dan melindungi. Karena bagaimana pun juga pemerintah merupakan penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan.

c. Pemerintah

Pemerintah atau penguasa sebagai pemegang kekuatan politik telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap pergantian periode pemerintahan, bidang pendidikan senantiasa dijadikan sebagai jualan atau alat politik. Pendidikan sebagai jualan politik tidak berarti memiliki konotasi yang bersifat negatif, tetapi yang jelas “politik pendidikan” dimaksudkan untuk memperkuat rezim yang dibangun. Meskipun maksud memperkuat rezim tersebut bisa saja berujung pada “pelemahan” rezim seperti yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda.

Seberapa besar peran pemerintah dalam pendidikan? Ini merupakan pertanyaan mendasar yang mesti dijawab secara jelas dan tegas. Pemerintah adalah penguasa daerah yang meliputi wilayah dan segenap potensi daerah yang ada di dalamnya. Oleh karenanya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai kebijakan yang telah disepakati (azas demokrasi). Sebagai jawaban singkat dari pertanyaan awal di atas maka peran pemerintah adalah membuat kebijakan dengan segala konsekuensinya. Lalu siapakah pemerintah itu? Pemerintah adalah subjek dari suatu pemerintahan. Menurut Koswara (2002: 29) dikatakan bahwa pemerintahan adalah: “(1) dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, (2) dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.”

Dalam arti luas pemerintahan merupakan kegiatan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Arti ini mengisyaratkan sebuah alur kegiatan pemerintah yang bersifat dari bawah (*bottom up*). Dalam tradisi legislatif ada yang disebut dengan masa *reses*

yakni masa kunjungan para legislator untuk menjaring keinginan-keinginan rakyat dan selanjutnya disaring berdasarkan skala prioritas yang disebut kebutuhan mendesak.

Dalam arti sempit dikatakan bahwa kegiatan pemerintah hanya menyangkut bidang eksekutif. Arti ini menandakan bahwa alur kegiatan pemerintah bermakna ganda. Boleh jadi merupakan arus bawah (*bottom up*) dan bisa saja berasal dari arus atas (*top down*). Meskipun kegiatannya bersumber dari arus atas (*top down*) tetapi dalam kenyataannya acap kali pada saat uji publik menuai protes dari publik sendiri.

Kebijakan pendidikan yang telah dicetuskan oleh pemerintah bila dikaitkan dengan regulasi umum yang dibuat oleh pendiri bangsa belum terwujud sebagaimana idealnya. Pendiri bangsa ini telah berikrar untuk **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia**, meskipun belum diterjemahkan secara totalitas. Hal ini bisa dibandingkan dengan kondisi kebijakan Negara-negara lain di dunia dalam bidang pendidikan.

Jika awal mula pendidikan dimulai sejak anak masih dalam kandungan maka tentulah pemerintah serius memberikan perhatian kepada ibu-ibu hamil. Sekedar pembandingan, bahwa di Jepang ada tradisi “berhenti bekerja sementara” ketika seorang ibu dalam kondisi hamil. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi pada sebuah perusahaan di Jepang seperti yang dikutip berikut ini:

“Seorang sahabat semasa SMA punya kesempatan belajar S-2, S-3, dan bekerja di Tokyo. Dia cukup kaget melihat suatu budaya kerja yang berkaitan dengan karyawati yang sedang hamil. Lewat *email*, sahabat ini menceritakan teman sekantornya, seorang perempuan berpendidikan tinggi yang telah menikah dan hamil. Sesuai budaya di Jepang untuk ibu hamil, si ibu muda itu segera menulis surat pengunduran diri. Lalu, pemimpin perusahaan mengadakan semacam upacara perpisahan sederhana. Pada acara tersebut, berkumpul para karyawan

dan sang pemimpin untuk melepas ibu muda yang sedang mengandung tadi. Kemudian sang ibu hamil ini berpidato: “maaf teman-teman, hari ini adalah hari yang paling penting bagi hidupku. Aku tengah mengandung anak pertamaku. Janin di perutku ini sekarang adalah proyek besarku. Jadi, izinkan aku sementara waktu meninggalkan kalian, berhenti sebentar untuk berkonsentrasi pada perkembangan janinku.” Kebanyakan ibu hamil mengikuti kursus dan pendidikan ibu hamil pada lembaga yang disebut *prenatal school*. Biasanya, wanita di Jepang akan bekerja dan berkarier kembali ketika anaknya sudah berusia 8 tahun atau setelah melewati usia *golden age*.” (Chatib, 2012:16-17).

Di Finlandia ada budaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Chatib (2012:17-18) di Finlandia, secara resmi pemerintah memberikan hadiah kelahiran kepada setiap bayi yang baru lahir berupa *baby box* ‘kotak bayi’. Di dalam *baby box* itu berisi pakaian bayi untuk 4 musim yaitu, selimut, handuk, kantong tidur, kasur, sikat rambut, gunting kuku, buku gambar, dan beberapa mainan bayi yang dapat digunakan sampai bayi berusia 2 tahun.

Pengalaman yang diceritakan Widya (2013) ketika berkunjung ke Amerika Serikat selama kurang lebih lima bulan begitu mengharukan. Ternyata di USA peserta didik (generasi muda) begitu dimuliakan. Kalau di Indonesia yang dibolehkan melewati lampu merah adalah, *ambulance*, pemadam kebakaran, dan mobil pejabat, maka di USA ada mobil lain yang dibolehkan yaitu bus sekolah. Begitu besar perhatian pemerintah terhadap generasi calon pengganti di masa depan. Sepertinya pemerintah di USA mengatakan bahwa “ayo, ayo teruslah melaju, generasi pelanjut kita (peserta didik) tidak boleh dihalang-halangi untuk mengejar harapan dan cita-citanya.”

Kejadian yang diuraikan di atas adalah tiga fenomena yang terjadi pada Negara dengan tingkat kualitas pendidikan sangat maju. Fakta ini memberikan gambaran bahwa perhatian pemerintah mereka terhadap generasi penerus begitu besar, serius, dan

detail. Semua yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau paradigma pendidikan yang mereka anut adalah “pendidikan sebagai investasi besar” dan “generasi muda merupakan aset bangsa yang perlu dirawat dengan sebaik-baiknya.”

Peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pendidikan (informal, formal, dan non formal) semestinya menjadi pemrakarsa atau “lokomotif gerbong” pelaksanaan pendidikan. Ibarat pemegang senjata, pemerintah berfungsi sebagai penarik pelatuk dalam memulai kebijakan pendidikan. Setelah pemerintah melakukan “pengguntingan pita” pembukaan pelaksanaan pendidikan maka tindak lanjutnya diteruskan oleh masyarakatnya. Sebagai penanggung jawab utama, pemerintah tidak dapat berlepas tangan sekalipun masyarakatnya secara kreatif dan mandiri dalam berinisiasi. Posisi pemerintah adalah menjadi “orangtua” bagi masyarakatnya yang senantiasa menjadi pemantau segala aktivitas, terutama aktivitas pendidikan. Sebagai orangtua dari masyarakat, tentu saja pemerintah harus siap menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh selalu menggantungkan harapan sepenuhnya kepada pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan di daerah Kediri khususnya di Kampung Inggris dapat menginspirasi daerah-daerah lain dalam hal kemandirian melaksanakan pendidikan non formal. Heningtyas dkk (2016), menyimpulkan bahwa:

“Peran masyarakat lebih mendominasi dalam pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris, pemerintah lebih bersifat pasif dengan lebih mendukung dan menjadi fasilitator dengan yang dikehendaki oleh masyarakat di Kampung Inggris. Kampung Inggris membawa dampak terlebih pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat.” (Heningtyas dkk, 2016).

Keterlibatan masyarakat di Kampung Inggris tersebut menjadi hadiah bagi pemerintah Kota Kediri. Pemerintah telah dibantu lebih banyak oleh masyarakat dalam mengembangkan pendidikan non formal yang berdampak positif luas, sehingga pihaknya cukup menjadi pendukung dan fasilitator saja.

Bila dirunut mulai dari sumber hukum tertinggi (Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945), maka secara konseptual pemerintah Indonesia lebih ideal dalam melindungi rakyatnya dibanding dengan apa yang mereka lakukan (Jepang, Finlandia, dan USA). Persoalannya hanya pada *political will* dan *political action* yang ditunggu oleh segenap rakyat Indonesia.

Partisipasi aktif dari pemerintah dibuktikan dengan kebijakan. Kebijakan yang dikenal dengan peraturan atau regulasi. Dalam bidang pendidikan, regulasi sangat dibutuhkan sebagai payung hukum untuk melaksanakan pendidikan. Pengadaan sarana fisik berupa sekolah belumlah cukup jika tidak dilengkapi dengan regulasi sebagai dasar hukum yang mengatur secara sistemik semua pemangku kepentingan pendidikan. Itulah sebabnya dibutuhkan regulasi yang jelas untuk menaungi pemangku kepentingan dalam bekerjasama atau bermitra secara bersinergi. UU No.20 Tahun 2003 menyatakan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No. 20 Tahun 2003).

Mewujudkan tujuan pendidikan yang mulia ini mustahil dapat dilakukan sendiri, meskipun oleh seorang *superman*. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri

dari individu-individu unik menuntut sebuah kolaborasi yang memadai. Keunikan dari individu inilah yang saling berkontribusi melengkapi kebutuhan pendidikan bagi peserta didik.

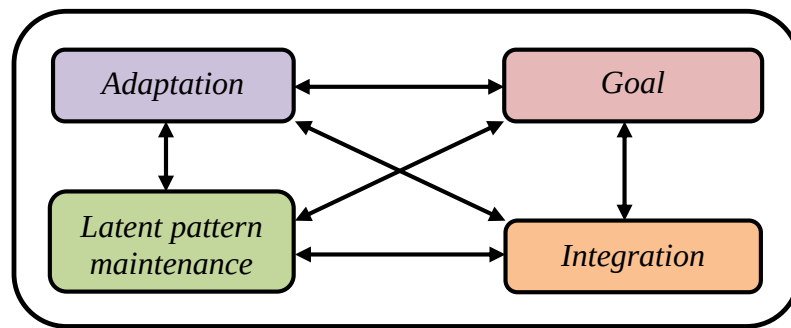
Secara teknis operasional tujuan pendidikan nasional dilindungi oleh UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan hak dan tanggung jawab warga Negara. Hak warga Negara dalam pendidikan diuraikan dalam pasal 5 (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu dalam pasal 6 (2) UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa terdapat empat elemen yang berhak dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Keempat elemen tersebut adalah; (1) orang tua, (2) masyarakat, (3) pemerintah pusat, (4) pemerintah daerah. Kemitraan pendidikan oleh empat elemen ini tersebut dipatenkan dalam suatu sistem yang berfungsi secara optimal.

Optimalisasi fungsi kemitraan pendidikan sebagai sebuah sistem tentulah memerlukan syarat-syarat tertentu. Menurut Persons (Damsar, 2011: 44) sistem hanya dapat berfungsi jika semua persyaratan dipenuhi. Persons mengatakan ada empat persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu sistem agar berfungsi, yakni: (1) *adaptation* (adaptasi), (2) *goal attainment* (pencapaian tujuan), (3) *integration* (integrasi), dan (4) *latent pattern maintenance* (pola pemeliharaan laten). Keempatnya disingkat AGIL. Lebih lanjut AGIL diuraikan oleh Damsar (2011: 4-5) sebagai berikut:

1. *Adaptation* (adaptasi). Merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Lingkungan yang dihadapi dapat berupa lingkungan sosial dan non sosial. Dengan adaptasi, sistem mampu memberi jaminan hal-hal yang dibutuhkan dari lingkungannya serta menyebarluaskan sumber-sumber tersebut ke seluruh sistem.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas tujuan. Setiap orang yang terlibat dalam sistem diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan adalah tujuan bersama dari para anggota dalam suatu sistem sosial.
3. *Integration* (integrasi). Merupakan suatu kebutuhan sistem yang menciptakan kesesuaian antar bagian atau anggota. Fungsi integrasi dapat terpenuhi jika anggota-anggota dalam suatu sistem berperan sesuai fungsinya dalam sistem tersebut. Integrasi dalam sebuah sistem menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin ikatan emosional yang menghasilkan solidaritas dan keikhlasan bekerjasama. Ikatan emosional yang dikembangkan tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu.
4. *Latent pattern maintenance* (pola pemeliharaan laten). *Latent pattern maintenance* adalah prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai aturan. Konsep laten menunjuk pada hal yang tersembunyi. Konsep laten ini sebagai upaya antisipasi sistem sosial jika terjadi *disintegrasi* sehingga ada pola pemeliharaan

tersembunyi yang merawat agar sistem terpelihara. Empat persyaratan ini menurut Damsar (2011:46) bersifat saling berhubungan dan saling memengaruhi.



Gambar 2.3 Hubungan antar Persyaratan Fungsional
Sumber: Damsar 2011

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa setiap persyaratan fungsional dalam sebuah sistem, memiliki hubungan timbal-balik. Setiap persyaratan fungsional memiliki batas yang jelas dan tegas dengan persyaratan fungsional lainnya. Setiap persyaratan juga dapat memberikan masukan dan *output* bagi persyaratan yang lain.

Kemitraan yang dibangun oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah menjadi suatu syarat penting dalam mencapai *outcomes* pendidikan yang bermutu. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang kewenangan harus menyiapkan kebijakan yang mengatur keberlangsungan pelaksanaan kemitraan tersebut. Oleh karena itulah dalam kemitraan pendidikan harus dibangun di atas prinsip-prinsip kemitraan. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015:8), kemitraan pendidikan dibangun di atas prinsip-prinsip:

1. Kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai.
2. Semangat gotong-royong dan kebersamaan.

3. Saling melengkapi dan memperkuat.
4. Saling asah, saling asih, dan saling asuh.
5. Semua upaya ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi peserta didik.

Kelima prinsip kemitraan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini merupakan niat baik yang perlu disambut baik oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara hukum, meskipun tidak diterima maka pemerintah sebagai pemegang kewenangan dapat memaksa semua elemen untuk menerapkannya. Penetapan prinsip-prinsip kemitraan pendidikan yang ditujukan kepada tri pusat pendidikan oleh pemerintah harus efektif dan produktif. Kebijakan tersebut tidak hanya ada di atas kertas tetapi mengandung konsekuensi moral maupun hukum. Untuk itulah kedudukan pemerintah dalam hal ini adalah mengawasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut penguatan kemitraan tersebut.

Tabel 2.2. Fungsi-fungsi Lembaga yang Bermitra dalam Pendidikan

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Pemerintah
1	2	3	4	5
1.	Fungsi <i>parenting</i> , yaitu memberikan bimbingan, merawat, memotivasi, dan menegakkan disiplin anak.	Fungsi penyesuaian, yaitu membangun kemampuan peserta didik untuk memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan.	Fungsi partisipasi, yaitu orang-orang yang mendukung mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.	Penanggung jawab, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

1	2	3	4
2. Fungsi <i>collaborating with community</i> , yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi & mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik.	Fungsi <i>diferensiasi</i> , yaitu memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil <i>diagnosis</i> , kemudian menentukan urutan berdasarkan peran tersebut dan dilatih hanya sejauh dengan kesesuaian tujuan mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu.	Fungsi pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka.	Pembuat, pembina, dan pengendali kebijakan pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi <i>volunteering</i> , yaitu kesukarelaan dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kelas.	Fungsi hubungan pembantuan dan <i>referral</i> , yaitu mendorong peserta didik melakukan hubungan seperti hubungan pembantuan dengan pihak lain sekaligus merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula.	Fungsi <i>inklusi</i> , yaitu kesetaraan kesempatan dan anti diskriminasi dengan mengakui bahwa beberapa orang mungkin memerlukan dukungan tambahan	Penjamin dana pendidikan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun negara tanpa diskriminasi

1	2	3	4
		untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi.	
4. Fungsi <i>learning to home</i> , yaitu belajar di rumah, membantu anak belajar mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum.	Fungsi pengintegrasian, yaitu mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat.	Fungsi dalam penentuan nasib sendiri, yaitu mendukung hak orang untuk membuat pilihan mereka sendiri.	Penyelenggara pendidikan bermutu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
5. Fungsi <i>decision making</i> , yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah, menjadi pemimpin orangtua atau perwakilannya.	Fungsi <i>diagnostik</i> dan <i>direktif</i> , yaitu menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik.	_____	_____
6. Fungsi <i>communicating</i> , yaitu	Fungsi <i>selektif</i> , yaitu membantu peserta didik secara sadar	_____	_____

1	2	3	4
berkomunikasi secara teratur dengan staf sekolah tentang program- program, kemajuan anak, dan urusan sekolah lainnya.	berupaya menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya.		

Sumber: Danim (2010)

C. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan selalu menjadi target dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Mutu pendidikan senantiasa mengalami fluktuasi, kadang-kadang tinggi, sedang, atau rendah bergantung pada usaha yang dilakukan pada setiap periode tertentu. Banyak faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengukuran mutu pendidikan di Indonesia. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pemerintah menempuh kebijakan melalui BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

1. Makna dari suatu mutu

Dalam kehidupan sehari-hari sering muncul ungkapan tentang mutu. Ketika ada seseorang yang baru keluar dari sebuah lembaga pelayanan misalnya kantor lurah kemudian berkomentar ”pelayanannya cukup bermutu”. Ungkapan ini terlontar karena merasa puas dengan apa yang dirasakan sebagai hasil dari pelayanan kantor. Boleh jadi

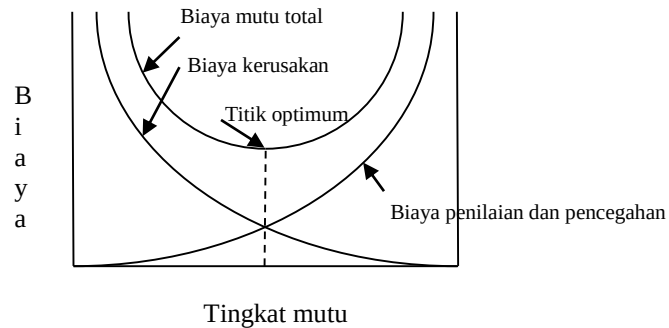
ungkapan itu muncul karena orang tersebut menilai beberapa item penting dari sebuah pelayanan seperti: (1) ketepatan waktu, (2) keramahan, (3) fasilitas pelayanan, (4) kepraktisan, (5) kemudahan. Contoh ini menggambarkan salah satu aspek tentang mutu yaitu aspek hasil. Masih banyak aspek yang bisa menjadi penilaian tentang mutu terkait dengan terpenuhinya pelayanan seseorang sesuai yang menjadi harapannya. Oleh karena itulah konsep tentang mutu memiliki ukuran relatif karena sangat berhubungan dengan penilaian seseorang.

Mutu dari suatu sistem selalu menjadi topik yang menarik dibicarakan. Bahkan bukan hanya dibicarakan tetapi selalu menjadi target pencapaian utama dari sebuah proses. Mutu seringkali dijadikan pertimbangan utama dalam memilih produk ataupun pelayanan jasa. Kebutuhan akan suatu mutu mendorong seseorang untuk membelinya tanpa mempertimbangkan berapapun harga nominalnya. Demikian pentingnya mutu bagi sebagian orang.

Keterkaitan mutu dengan biaya sering berbanding lurus. Semakin tinggi mutu yang diinginkan semakain besar pula biaya yang mesti dikeluarkan. Biaya inilah yang sering menjadi kendala sehingga banyak pula kalangan yang memilih untuk tidak mempertimbangkan mutu dalam menjalankan usahanya. Alasan "asal jadi" atau "yang penting ada" kerap mendasari terjadinya efisiensi dalam biaya produksi atau biaya operasional. Imbas dari prinsip seperti ini adalah meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari kuantitas penjualan yang diperoleh.

Kedua pendapat tentang makna dari suatu mutu di atas memiliki pasar ataupun penganut masing-masing. Kondisi masyarakat berdaya beli tinggi terdorong untuk

cenderung menjadikan mutu sebagai alasan kuat dalam membeli. Sebaliknya masyarakat berdaya beli rendah cenderung untuk mendapatkan keinginannya tanpa mempertimbangkan mutu. Berikut gambaran tradisional hubungan biaya dengan tingkat mutu menurut Juran (dalam Tjiptono & Diana, 2003:45).



Gambar 2.4 Pandangan Tradisional Hubungan Biaya dan Mutu
Sumber: Tjiptono & Diana, 2003

Gambar 2.4 di atas menggambarkan bahwa: (1) biaya mutu total menurun seiring dengan biaya kerusakan dan penurunan tingkat mutu, (2) biaya mutu total meningkat seiring biaya penilaian dan pencegahan serta peningkatan mutu, (3) setelah titik optimum apabila kita ingin meningkatkan mutu, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi.

Menurut Rivai dan Murni (2010: 490) ada beberapa batasan tentang mutu yaitu: (1) Mutu ialah suatu ukuran penyesuaian produk atau jasa terhadap spesifikasi yang terbatas pada waktunya. Makna ini merupakan makna tradisional yang menunjukkan bahwa semakin sesuai antara produk atau jasa yang dihasilkan dengan spesifikasinya maka semakin tinggi nilai mutu produk/jasa yang dimaksud. (2) Mutu ialah totalitas keistimewaan dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang berhubungan dengan

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang telah diberikan. Makna yang kedua ini merupakan makna secara umum yang menunjukkan bahwa pihak produsen mengerahkan kemampuan optimalnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. (3) Sedangkan menurut Davis (dalam Tjiptono dan Diana, 2003: 4) mengatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Makna tentang mutu yang ketiga cakupannya lebih terinci meskipun memiliki kemiripan dengan makna mutu yang kedua. Antara makna (2) dan (3) di atas sama-sama bertitik tolak pada kepuasan dan harapan pelanggan. Ketika pelanggan terpuaskan, harapannya terpenuhi atau bahkan terlampaui, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut memiliki mutu yang baik.

Bagaimana dengan mutu pendidikan? Mutu pendidikan tanggung jawab siapa? Dalam bidang pendidikan, mutu pendidikan merupakan jaminan dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 (1) bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Karena pendidikan bermutu merupakan jaminan dari pemerintah maka dengan demikian pemerintah juga sekaligus memiliki kewenangan untuk melibatkan dan mengatur semua unsur yang berkepentingan dalam mencapai mutu pendidikan yang dimaksud. Siapa mereka? Peserta didik, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada posisi inilah pemerintah dapat memainkan peranan lebih banyak dibandingkan keterwakilannya melalui sekolah.

2. Mutu dan upaya peningkatan mutu pendidikan

Mutu pendidikan di Indonesia menggunakan dua standar pengukuran yaitu: (1) standar internasional, dan (2) standar nasional. Standar internasional dilakukan oleh lembaga yang tergabung dalam *benchmark internasional* seperti PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) untuk mengukur kemampuan membaca, TIMMS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) untuk mengukur kemampuan matematika dan sains, PISA (*Programme for International Student Assessment*) untuk mengukur kemampuan membaca, matematika, dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Pengukuran mutu untuk standar nasional diselenggarakan oleh lembaga negara yang disebut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Baik PIRLS, TIMMS, maupun PISA yang diikuti oleh Indonesia telah memberikan data yang sangat berharga sebagai masukan bagi dunia pendidikan. Ketiga lembaga ini ternyata telah melakukan tugas pengukuran dan penilaian yang cukup komprehensif. Mereka bukan hanya mencari informasi melalui lembaga formal tetapi juga melalui lembaga informal (keberadaan keluarga). Sebagai contoh PIRLS dalam mengukur *literacy experiences* anak didik menggunakan indikator indeks *Early Home Literacy Activities* (EHLA) yaitu rangkuman respon orangtua terhadap kegiatan: (1) membaca buku, (2) bercerita, (3) menyanyi, (4) bermain huruf, (5) bermain kata, dan (6) membaca dengan nyaring. Hasilnya sekitar 44% orangtua di Indonesia tergolong tinggi keterlibatannya di rumah dalam membentuk literasi membaca anak-anaknya, dan berbeda jauh dengan Skotlandia yang mencapai 85% (Hayat & Yusuf, 2011: 78).

Dalam hal ketersediaan sumber daya literasi di rumah PIRLS menggunakan indikator: (1) jumlah buku, (2) jumlah buku anak, (3) sumber belajar lain (komputer, meja belajar sendiri, buku milik sendiri, dan akses terhadap surat kabar), dan (4) pendidikan orangtua. Hasilnya adalah dari 32 negara yang dinilai sekitar 13% peserta didik berada pada kategori *high* HER (*Home Educational Resources*), 77% kategori *medium*, dan 10% kategori *low*. Indonesia berada pada posisi paling bawah yaitu hanya 1% kategori *high*, 62% kategori *medium*, dan 37% kategori *low* (Hayat & Yusuf, 2011: 80). Hasil studi TIMMS menyimpulkan bahwa jumlah buku yang dimiliki peserta didik di rumahnya berkorelasi dengan prestasi belajarnya untuk mata pelajaran matematika dan IPA (Hayat & Yusuf, 2011: 79).

Dalam hal kebiasaan dan sikap orangtua dalam membaca, PIRLS menggunakan indikator PATR (*Parents' Attitudes Toward Reading*) yang dibangun berdasarkan respons (setuju/tidak setuju) orangtua terhadap: (1) keperluan membaca, (2) mendiskusikan dengan orang lain buku yang dibaca, (3) kesediaan meluangkan waktu ekstra untuk membaca, (4) membaca untuk menggali informasi, (5) kedudukan membaca sebagai aktivitas keseharian di rumah. Hasilnya adalah dalam kategori *high* PATR, Indonesia menempati urutan terendah yaitu sekitar 27% peserta didik dengan rerata skor membaca 423. Sementara dalam lingkup PIRLS (keseluruhan) *high* PATR sebesar 52% peserta didik.

Beberapa data faktual di atas tidak menjadikan pemerintah pesimis. Kebijakan standarisasi lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah dan madrasah kian giat dilakukan. Pemerintah dengan BSNP telah menetapkan standar nasional pendidikan

untuk memenuhi syarat-syarat sekolah bermutu. BSNP telah menetapkan ada delapan standar yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 20 Tahun 2003). Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (UU No. 20 Pasal 50 ayat 2).

3. Karakteristik pendidikan menurut TQE (*Total Quality Education*)

Pada bagian satu di atas telah dipaparkan tentang makna mutu, baik secara tradisional maupun secara umum. Sedangkan makna mutu berdasarkan TQ (*Total Quality*) adalah jika setiap orang merasa terikat untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan (Rivai & Murni, 2010: 490). Menurut Rivai dan Murni definisi tersebut mengidentifikasikan tidak hanya yang menentukan kebutuhan atau merancang spesifikasi, tetapi juga memberi target kepada mereka yang menjanjikannya untuk memenuhi kebutuhan atau desain. Mencermati makna mutu berdasarkan TQ di atas mengisyaratkan adanya sebuah kemitraan yakni tercakup dalam kalimat ”setiap orang merasa terikat”. Kemitraan yang baik ditandai dengan salah satu indikator yaitu adanya perasaan terikat dalam suatu komitmen yang dibuat atas dasar musyawarah dan semua elemen mitra mempunyai kedudukan yang setara (hak dan kewajiban).

Hampir semua hasil dari sebuah sistem ketika mengalami keberhasilan ataupun kegagalan, kualitas proses sering menjadi sorotan utama. Seperti apa proses yang dilakukan? Meskipun kualitas elemen lainnya juga perlu diperhatikan. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Menentukan standar kualitas sistem pendidikan membutuhkan kriteria dan perbandingan dengan sistem pendidikan yang biasa (tradisional). Berikut ini adalah perbandingan bagaimana kondisi paradigma pengelolaan pendidikan secara tradisional dan berdasarkan TQE.

Tabel 2.3 Perbandingan antara pendidikan tradisional dan TQE

Elemen	Pendidikan Tradisional	TQE
1	2	3
Persepsi		
<i>Komitmen</i>	Dimiliki oleh para profesional	Dimiliki oleh setiap orang
<i>Ketepatan persepsi</i>	Setiap orang mengetahui kebenarannya	Hanya tim yang memiliki data yang mengetahui kebenarannya
<i>Tanggung jawab perilaku</i>	Dimiliki oleh sekolah	Dimiliki oleh semua individu
<i>Tanggung jawab atas mutu</i>	Personel sekolah	Setiap orang
<i>Sumber pengetahuan</i>	Dewan, administrasi, guru	Setiap orang
<i>Pelanggan sebenarnya</i>	Setiap orang	Komunitas
<i>Pelanggan idealnya adalah</i>	Peserta didik	Komunitas
<i>Inovasi</i>	Dugaan	Sangat menarik
<i>Berpikir berbeda</i>	Dugaan	Sangat menarik
<i>Diatur dengan angka</i>	Normal	Dugaan
<i>Sekolah seperti bisnis</i>	Tidak	Nyata sekali
<i>Mutu plus biaya</i>	Mutu itu mahal	Mutu itu gratis
<i>Jaminan mutu</i>	Tidak ada yang pasti	Kontrol mutu total

1	2	3
Peran		
<i>Orangtua</i>	Menghasilkan anak, bereaksi	Melayani guru
<i>Peserta didik</i>	Menghadiri sekolah	Mencari informasi, mendapatkan informasi, membuthkan agen jasa
<i>Guru</i>	Mengajar, mengontrol, menjadi segalanya	Membimbing, mengajar peserta didik
<i>Prinsip</i>	Mengontrol, mengarahkan, mengatur, merencanakan	Menyingkirkan rintangan, merencanakan, mengatur
<i>Administrasi</i>	Memonitor penerapan kebijakan dan mendukung sekolah	Bertindak sebagai nara sumber, menyingkirkan rintangan
<i>Dewan</i>	Menciptakan kebijakan	Menunjukkan jalan
<i>Komunitas</i>	Memilih dewan dan menyediakan sumber-sumber	Mengenali persyaratan dan menyediakan sumber-sumber
Program-program		
<i>Kurikulum</i>	Diputuskan oleh negara	Diputuskan oleh pelanggan
<i>Instruksi</i>	Kontrak-kontrak guru dan agensi akreditasi	Diputuskan oleh pelanggan
<i>Fiskal</i>	Diputuskan oleh alokasi menurut aturan birokrasi	Dibagi berdasarkan prioritas kebutuhan pelanggan dan dikendalikan oleh nilai tambah
<i>Personel</i>	Diputuskan oleh politik, akreditasi, negara atau peraturan lainnya	Diputuskan oleh penilaian penampilan kebutuhan pelanggan
<i>Pengelolaan fasilitas</i>	Digerakkan oleh biaya	Digerakkan secara instruksional

1	2	3
Program-program		
<i>Layanan pendukung</i>	Digerakkan secara politik	Digerakkan secara instruksional
<i>Layanan di dalam</i>	Diperintah	Biaya mutu
<i>Penilaian kebutuhan</i>	Diperintah	Fungsionari (pejabat)
Organisasional		
<i>Tim</i>	Atletik dan debat	Pemecahan masalah dan sumber
<i>Budaya</i>	Manajemen krisis	Tim tindakan korektif, peningkatan berkesinambungan
<i>Struktur organisasi</i>	Hirarki, politis, respons, dan birokratis	Terpadu dan tetap
<i>Perencanaan</i>	1 sampai 5 tahun	4 sampai 12 tahun
<i>Rencana strategis</i>	Mandat dari negara	Digerakkan dengan bermutu
<i>Pengelolaan sekolah</i>	Prinsip yang terpusat	Dewan mutu terpusat

Sumber: Diadaptasi dari Rivai & Murni (2010: 497-498)

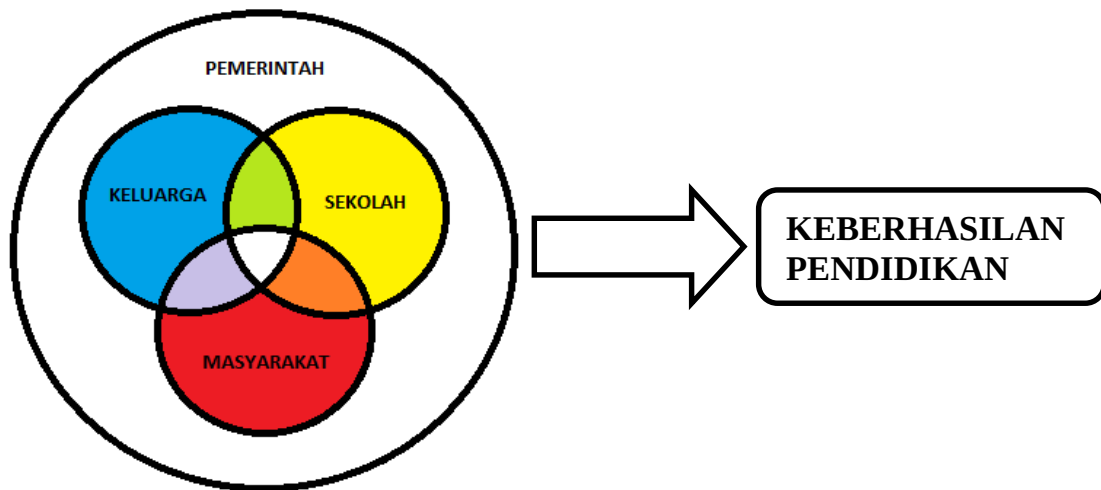
D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas melahirkan kerangka konseptual (kerangka pikir) tentang kemitraan pendidikan. Pihak yang bermitra yaitu: (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, dan (4) pemerintah. Keempat lembaga ini idealnya memiliki kontribusi positif dalam pengelolaan pendidikan sesuai fungsi yang diperankan masing-masing menuju keberhasilan pendidikan.

Dalam fungsi yang diperankan oleh masing-masing lembaga (keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah) tersebut memiliki misi yang sangat berkaitan dengan: (1) Apa

yang menjadi keinginannya? (2) Apa yang menjadi kebutuhannya? dan (3) Apa yang menjadi harapannya? Sehingga dapat membangkitkan (4) Motivasi bagi mereka untuk melakukan kemitraan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Sekalipun memiliki perbedaan tetapi untuk tujuan efektivitas keempat pihak yang bermitra yaitu; keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus memiliki daerah persamaan yang memadai (kadar *homogenitas*). Daerah persamaan tersebut merupakan pengakuan yang disepakati bersama yang terjadi secara alamiah atau terjadi melalui rekayasa.



Gambar 2.5. Kerangka Pikir

Gambar 2.5. kerangka pikir penelitian secara detail dijelaskan sebagai berikut:

1. ○ Pemerintah sebagai penjaga kemitraan (pihak yang bermitra)
2. ■ Kondisi keunikan keluarga (pihak yang bermitra)
3. ■ Kondisi keunikan sekolah (pihak yang bermitra)
4. ■ Kondisi keunikan masyarakat (pihak yang bermitra)

5.  Daerah persamaan pandangan/sikap dari keluarga-sekolah
6.  Daerah persamaan pandangan/sikap masyarakat-keluarga
7.  Daerah persamaan pandangan/sikap sekolah-masyarakat
8.  Daerah kemitraan keluarga-sekolah-masyarakat-pemerintah
9.  Harapan
10. "Keberhasilan pendidikan" yang merupakan tujuan dari kemitraan pendidikan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Makassar dan sekitarnya yang terkait. Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang kasus kemitraan pendidikan di kota Makassar studi kasus di SMP Negeri 8 Makassar.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas enam unsur yakni; (1) anak didik atau peserta didik, (2) orangtua peserta didik, (3) guru, (4) kepala sekolah, (5) pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, dan (6) masyarakat. Secara keseluruhan subjek penelitian adalah 19 orang dengan rincian sebagai berikut; (1) anak didik atau peserta didik sebanyak 5 orang, (2) orangtua peserta didik sebanyak 4 orang, (3) guru sebanyak 4 orang, (4) kepala sekolah sebanyak 1 orang, (5) pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3 orang yaitu; Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, (6) masyarakat sebanyak 2 orang yaitu yang terkait langsung dengan peserta didik (subjek penelitian).

Teknik pengambilan subjek adalah teknik *purposif sampling* yang bersifat *snowball sampling*. Khusus peserta didik dipilih berdasarkan informasi dari guru tentang peserta didik dengan kriteria: berprestasi, tidak bermasalah, dan bermasalah. Peneliti mencari informasi dari pengamatan, wawancara dan dokumen. Subjek penelitian dalam hal ini berfungsi sebagai informan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah penelitian yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itulah sebagai langkah untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka telah ditentukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di Kota Makassar.
2. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang dibagi dalam tiga situasi yaitu; (1) kemitraan keluarga dan sekolah, (2) kemitraan keluarga dan masyarakat, dan (3) kemitraan sekolah dan masyarakat.
3. Peran pemerintah dalam mewujudkan kemitraan tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat).
4. Model kemitraan pendidikan yang dapat diusulkan untuk diimplementasikan di Kota Makassar.

D. Deskripsi Subjek dan Fokus Penelitian

1. Deskripsi subjek penelitian

Melengkapi subjek penelitian yang dimaksud, maka perlu diuraikan arti dari masing-masing subjek penelitian tersebut. Adapun deskripsi subjek penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Anak didik yang dimaksud adalah sebutan bagi subjek penelitian yang bersekolah di SMP Negeri 8 Makassar ketika berada di luar sekolah.
- b. Peserta didik yang dimaksud adalah sebutan bagi subjek penelitian yang bersekolah di SMP Negeri 8 Makassar ketika berada di sekolah.
- c. Orangtua yang dimaksud adalah orangtua atau yang bertindak sebagai orangtua dari peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri 8 Makassar.
- d. Kepala sekolah yang dimaksud adalah Kepala SMP Negeri 8 Makassar.
- e. Guru yang dimaksud adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 8 Makassar.
- f. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
- g. Keluarga yang dimaksud adalah lembaga informal tempat dimana peserta didik dilahirkan atau diasuh oleh orangtua kandung atau orang lain dalam keluarga tersebut yang berfungsi dan berperan sebagai orangtua dalam mendidik.
- h. Sekolah yang dimaksud adalah lembaga formal tempat peserta didik mendapatkan pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan oleh guru yang pernah ataupun sedang mendidik peserta didik yang menjadi subjek dalam penelitian.

- i. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan seperti komunitas warga yang hidup melingkupi dan atau menjadi tempat kebiasaan dari peserta didik (subjek penelitian) berada atau bergaul/berinteraksi selain di sekolah dan dalam keluarga.
- j. Pemerintah kota Makassar yang dimaksud adalah lembaga formal yang ditunjuk oleh pemerintah kota secara khusus menangani pendidikan di Kota Makassar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

2. Deskripsi fokus penelitian

Fokus penelitian yang telah ditetapkan di atas merupakan hasil seleksi dari berbagai rujukan ilmiah yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi lapangan yang terjadi di Kota Makassar. Memperjelas fokus penelitian yang dimaksud, maka berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing fokus penelitian.

- a. Peran keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di Kota Makassar yang dimaksud adalah fungsi pendidikan yang diperankan oleh keluarga, yang meliputi; (1) fungsi *parenting*, yaitu memberikan bimbingan, merawat, memotivasi, dan menegakkan disiplin anak, (2) fungsi *communicating*, yaitu berkomunikasi secara teratur dengan staf sekolah tentang program-program, kemajuan anak, dan urusan sekolah lainnya, (3) fungsi *volunteering*, yaitu kesukarelaan dalam membantu seluruh kegiatan sekolah

dan kelas, (4) fungsi *learning to home*, yaitu belajar di rumah, membantu anak belajar mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum, (5) fungsi *decision making*, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah, menjadi pemimpin orangtua atau perwakilannya, dan (6) fungsi *collaborating with community*, yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik.

- b. Peran sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di Kota Makassar yang dimaksud adalah fungsi pendidikan yang diperankan oleh sekolah yang terdiri dari; (1) fungsi penyesuaian (*adjustive function*) yaitu sekolah berfungsi membangun kemampuan peserta didik untuk memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan, (2) fungsi pengintegrasian (*integrating function*) yaitu sekolah berfungsi mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat, (3) fungsi *diagnostik* dan *direktif* (*diagnostic and directive function*) yaitu sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik, (4) fungsi *diferensiasi* (*differentiation function*) yaitu sekolah berfungsi memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil *diagnosis* kemudian menentukan urutan berdasarkan peran tersebut dan dilatih hanya sejauh dengan kesesuaian tujuan mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu, (5) fungsi *selektif*

(*selective function*) yaitu sekolah berfungsi membantu peserta didik secara sadar berupaya menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya, dan (6) fungsi hubungan pembantuan dan *referral (helping and referral function)* yaitu sekolah berfungsi untuk mendorong peserta didik melakukan hubungan seperti hubungan pembantuan dengan pihak lain sekaligus merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula.

- c. Peran masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di Kota Makassar yang dimaksud adalah fungsi pendidikan yang diperankan oleh masyarakat yang meliputi; (1) fungsi pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka, (2) fungsi partisipasi, yaitu orang-orang yang mendukung untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, (3) fungsi *inklusi*, yaitu kesetaraan kesempatan dan anti diskriminasi dengan mengakui bahwa beberapa orang mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi, (4) fungsi dalam penentuan nasib sendiri, yaitu mendukung hak orang untuk membuat pilihan mereka sendiri.
- d. Peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di Kota Makassar sebagai; (1) penanggung jawab wajib belajar yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, (2) pembuat, pembina, dan

pengendali kebijakan pendidikan yaitu pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) penjamin dana pendidikan yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun negara tanpa diskriminasi, (4) penyelenggara pendidikan bermutu, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- e. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang dibagi dalam tiga situasi yaitu; (1) kemitraan keluarga dan sekolah, (2) kemitraan keluarga dan masyarakat, dan (3) kemitraan sekolah dan masyarakat. Kemitraan ini akan diuji dalam lima tipe. Tipe kemitraan yang dijadikan rujukan terdiri atas lima yaitu; (1) *Full collaboration (written agreement, shared vision, consensus decision, formal work assignment)*, (kolaborasi penuh dengan ciri-ciri, perjanjian dilakukan secara tertulis, visi dirancang dan dibuat bersama, keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan, dan penugasan kerja bersifat formal). (2) *Coalition (formal agreement, all member involved in, new resources, joint budget)* (koalisi dengan ciri-ciri, perjanjian bersifat resmi, semua anggota terlibat, sumber daya baru, dan anggaran ditanggung bersama). (3) *Partnership*

(*formal contract, new resources, shared risk and reward*) (*partnership* disebut juga dengan kerjasama yang bercirikan, sistem kontrak yang bersifat resmi, sumber daya baru, berbagi risiko, dan ada imbalan), (4) *Alliance (semi formal, some new resources, coordination of task)* (aliansi atau disebut juga dengan persekutuan dengan ciri-ciri, bersifat semi formal, beberapa sumber daya baru, dan ada koordinasi tugas), (5) *Network (loose association, no significant demands)* (*network* disebut juga jaringan dengan ciri-ciri, kerugian ditanggung bersama, dan tidak ada tuntutan yang signifikan).

- f. Peran pemerintah dalam mewujudkan kemitraan tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) yang dimaksud adalah keterlibatan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan dalam membangun dan memelihara kemitraan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan.
- g. Model kemitraan pendidikan adalah model implementatif yang diusulkan untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan pendidikan di kota Makassar. Model ini merupakan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan secara holistik dan integratif.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Sebagai penunjang instrumen (*human instrument*) peneliti dilengkapi dengan; (1) lembar kisi-kisi wawancara tidak terstruktur, (2) lembar observasi, (3) buku catatan lapangan, (4) alat perekam gambar (*tablet*), dan (5) alat perekam suara.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Penelitian tentang kemitraan pendidikan memerlukan data yang bersifat *holistik* 'menyeluruh' dan *integratif* 'menyatu'. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan harus bersifat *konektif* 'terhubung' antara satu teknik dengan teknik lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu; (1) wawancara. (2) observasi atau pengamatan, dan (3) mempelajari dokumen. Proses dari ketiga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam seperti pada penjelasan berikut ini.

a. Teknik wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua tujuan yaitu; (1) verifikasi data (pengabsahan data), dan (2) menjaring data yang hanya cocok dengan teknik wawancara. Teknis pelaksanaan wawancara ada dua yaitu; (1) secara *face to face* 'berhadap-hadapan' dan (2) via telepon (hanya satu orang) dengan informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua pola yaitu; wawancara biasa dan wawancara mendalam. Wawancara biasa dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya informasi biasa sedangkan wawancara mendalam dilakukan pada masalah yang bersifat *kontroversial* 'pertentangan'. Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, terdapat dua masalah yang dianggap *kontroversial* yaitu informan inisial AG yang berasal dari peserta didik dan informan inisial AH yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Masalah yang terkait dengan AG menarik ditelusuri secara mendalam karena unik dan tidak biasa sedangkan terkait dengan AH adalah masalah kebijakan pemerintah.

b. Observasi atau pengamatan

Observasi dilakukan sebagai teknik mengumpulkan data yang dengan dua tujuan yaitu; (1) verifikasi data (pengabsahan data) dan (2) menjaring data yang hanya cocok dengan teknik observasi. Verifikasi data dijelaskan tersendiri pada teknik pengabsahan data. Sedangkan penjaringan data yang hanya cocok dengan teknik obeservasi adalah data yang diamati untuk hal-hal yang berkaitan dengan peran dan kemitraan pendidikan. Secara garis besar terdapat dua hal yang diamati yaitu; (1) kondisi lapangan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud adalah kondisi fisik yang terjadi di dalam dan di luar sekolah (keluarga dan masyarakat). Hasil pengamatan yang diperoleh diabadikan dalam bentuk gambar-gambar foto. (2) kondisi proses yang sedang terjadi diamati dan dituliskan dalam bentuk *naratif* 'ulasan'.

c. Mempelajari dokumen

Mempelajari dokumen dilakukan dengan dua tujuan yaitu; (1) verifikasi data (pengabsahan data), dan (2) menjaring data yang sesuai untuk data dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan pendidikan baik di SMP Negeri 8 Makassar maupun yang terjadi di Makassar. Dokumen yang berhasil diperoleh terdiri dari; (1) UU No. 20 tahun 2003, (2) buku petunjuk teknis tentang kemitraan pendidikan tahun 2015 sebanyak 3 buku dari Direktorat Pembinaan Keluarga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (3) program Pemerintah Kota Makassar (*online*), (4) hasil Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun 2014, (5) RKT (Rencana

Kerja Tahunan) SMP Negeri 8 Makassar tahun 2015, (6) Tata tertib dan tata krama SMP Negeri 8 Makassar, dan (7) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dari salah seorang guru SMP Negeri 8 Makassar, dan (8) Media massa baik bentuk *offline* maupun *online*.

2. Teknik pengabsahan data

Data yang dikumpulkan ditindaklanjuti dengan pengabsahan data atau verifikasi data. Data yang sah atau data yang benar diperoleh dengan menggunakan dua teknik yaitu; (1) melakukan triangulasi sumber dan (2) melakukan triangulasi teknik. Kedua teknik pengabsahan data diuraikan berikut ini.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yang dimaksud adalah teknik pengabsahan data untuk mendapatkan data yang benar (data jenuh) dengan melakukan wawancara dengan berbagai sumber (informan). Data yang dianggap sah (benar) diambil setelah verifikasi atau konfirmasi pada masalah yang sama dari sumber (informan) berbeda.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yang dimaksud adalah pengabsahan data untuk mendapatkan data yang benar (data jenuh) dengan menggunakan berbagai teknik. Data yang dianggap sah (benar) adalah data yang diambil setelah verifikasi dari tiga teknik yang digunakan. Terdapat tiga teknik yang digunakan yaitu; wawancara, observasi (pengamatan), dan mempelajari dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Spradley*. Seperti dikemukakan oleh Emzir (2012: 210) bahwa tahapan analisis model *Spradley* mengikuti empat langkah sebagai berikut:

1. Analisis *domain* yaitu analisis data untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek dan subjek penelitian atau situasi sosial melalui pertanyaan umum, pernyataan detail, pengamatan, dan dokumen. Berdasarkan analisis domain ini diperoleh berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan selanjutnya.
2. Analisis *taksonomi* yaitu menjabarkan domain yang dipilih menjadi lebih detail lagi untuk mengetahui struktur internalnya. Hal yang penting dilakukan dalam hal ini adalah observasi atau pengamatan yang lebih terfokus.
3. Analisis *komponensial* yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan membedakan antar elemen. Hal yang penting dilakukan dalam hal ini adalah observasi dan wawancara terseleksi melalui pertanyaan yang mengontraskan.
4. Analisis *tema budaya* yaitu mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus ataupun sub fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar

Orangtua dalam setiap keluarga memiliki andil besar dalam memerankan fungsi-fungsi pendidikan. Paling tidak ada enam fungsi pendidikan dalam keluarga yang semestinya dipahami dan dilaksanakan oleh orangtua. Fungsi pendidikan yang dimaksud adalah: (1) *parenting*, (2) *communicating*, (3) *volunteering*, (4) *learning to home*, (5) *decision making*, dan (6) *collaborating with community*.

1. Fungsi *parenting*

Parenting berarti menjadi orangtua atau memerankan fungsi sebagaimana layaknya orangtua secara ideal terhadap anak. *Parenting* merupakan fungsi orangtua yang diperankan secara khusus dalam pendidikan anak. Dalam fungsinya sebagai *parenting*, orangtua menunjukkan kedekatan terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikis. Fungsi *parenting* dalam pendidikan keluarga mencakup banyak hal. Dalam penelitian ini, fungsi *parenting* dibatasi hanya empat yaitu: (1) pemberian bimbingan, (2) perawatan, (3) pemberian motivasi, dan (4) penegakan disiplin.

a. Pemberian bimbingan

Bimbingan dapat diartikan dengan menuntun, mengajarkan tentang cara mengerjakan sesuatu. Bahkan bimbingan memiliki arti yang lebih khusus yaitu

memegang tangan anak mengarahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh tangan pembimbingnya. Pada umumnya pemberian bimbingan untuk anak kecil dilakukan dengan jarak fisik yang sangat dekat. Bimbingan berarti mengajarkan hal-hal yang mencakup persoalan yang sangat mendasar dan dilakukan dengan menghadirkan diri di dekat anak didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orangtua menunjukkan bahwa membimbing anak memiliki arti yang sangat penting. Mereka memiliki pandangan yang cenderung sama, seperti diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini.

”Bagi saya anak merupakan aset terbesar yang mesti dijaga baik-baik, sehingga masalah membimbing mereka (anak-anak) merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Pernyataan IL ini menyiratkan betapa pentingnya anak bagi orangtua dan betapa pentingnya melakukan pembimbing kepada anak. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan IL di atas, berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah seorang orangtua subjek, mengungkapkan tentang pembimbingan anak.

”Penting, penting sekali. Kita sebagai orangtua hanya menitipkan harapan kepada anak saja. Jika mereka menjadi baik pasti orangtua juga yang merasakan hasil dari kebajikannya.” (Wawancara HR, Rabu 26/1/2016).

Orangtua (HR) menganggap bahwa hasil pembimbingan merupakan harapan masa depan. Semua kebaikan anak merupakan harapan dan cita-cita orangtua. Pendapat senada juga diucapkan orangtua subjek bahwa:

”Menurutku pak, membimbing anak itu sangat penting dan manfaatnya sangat besar. Kalau orangtua yang sadar dengan kebutuhan masa depan anaknya, maka dia tidak mungkin menganggap remeh dalam membimbing anak.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Ungkapan ODS menunjukkan tentang azas manfaat pembimbingan. Beliau juga memandang bahwa orangtua adalah sosok dewasa yang sadar akan tanggung jawabnya dalam memberikan bimbingan kepada anaknya.

Orangtua peserta didik berikut ini lebih bernuansa spiritual. Jika dibandingkan dengan dua sebelumnya, maka orangtua yang satu ini memiliki kecerdasan spiritual yang lebih karena menyandarkan pada dampak yang lebih jauh yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Berikut pernyataannya:

”Membimbing merupakan tanggung jawab bagi setiap orangtua. jika ada orangtua yang tidak membimbing anaknya, maka sama saja dengan menyianyiakan amanah yang Tuhan berikan kepadanya. Jika anak yang nakal, maka saya bisa pastikan orangtuanya tidak memberikan bimbingan yang cukup bagi anaknya.”(Wawancara, OAS, Rabu 1/6/2016).

Selanjutnya ketika orangtua ditanya tentang intensitas pemberian bimbingan kepada anak, maka mereka menjawab sedikit berdiplomasi. Orangtua (IL) menyatakan sebagai berikut:

”Menurut saya, dalam membimbing anak kita harus melakukan setiap saat. Kita tidak boleh bosan atau menyerah melakukannya, apalagi usia anak seperti ini (SMP maksudnya), masih bersifat berubah-ubah, kadang-kadang baik atau tidak baik.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Berdasarkan ungkapan IL menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok orangtua yang bersikap totalitas kepada kebaikan anaknya. Sedangkan menurut HR intensitas pembimbingan dilakukan setiap hari sampai berkali-kali, sebagaimana diungkapkan berikut ini:

”Saya tidak bisa hitung berapa kali membimbing anak setiap hari. Pokoknya kita ini sebagai orangtua jangan bosan-bosanlah menghadapi anak. Dia kan adalah masa depan kita?.” (Wawancara HR, Rabu 26/1/2016).

Ungkapan tentang intensitas pembimbingan anak tidak dapat dipastikan secara kuantitas karena sifatnya situasional. Hanya saja orangtua hendaknya dengan sukarela melakukannya setiap dia dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh OAS sebagai berikut:

”Membimbing anak tidak bisa ditentukan berapa kali, sekian kali, atau kapan dan dimana. Sebagai orangtua saya rela menyiapkan diri membimbing mereka setiap mereka membutuhkan saya.” (Wawancara, OAS, Rabu 1/6/2016).

Lain orangtua lain pula situasi anak yang dihadapinya. Ada orangtua yang memiliki anak yang kerap membutuhkan bantuan, tetapi ada pula orangtua yang memiliki anak lebih mandiri. Akibatnya, orangtua seperti ini mendapatkan sedikit kemudahan dibandingkan dengan orangtua lain dalam membimbing anak-anaknya. Hal ini diungkapkan oleh ODS sebagai berikut:

”Secara kebetulan anak saya memiliki sifat suka bekerja sendiri jika ada masalahnya sehingga saya hanya menyiapkan diri setiap membutuhkan pembimbingan.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Keberhasilan pembimbingan juga ditentukan oleh bagaimana cara orangtua membimbing anaknya. Bagaimana orangtua melakukannya? Berikut ini diperoleh beberapa pernyataan orangtua peserta didik tentang itu.

”Saya adalah ibu rumah tangga biasa yang hanya tinggal di rumah. Oleh karena itu yang paling banyak tahu urusan anak adalah saya, bapaknya anak-anak sibuk bekerja meskipun masih tidak menentu hasilnya. Saya banyak mencurahkan perhatian pada urusan dan masalah anak saya, mudah-mudahan hidupnya nanti bisa lebih baik dari kami.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Orangtua dari subjek ini (IL) memang memiliki banyak waktu bersama dengan anaknya. Selain tidak bekerja di luar rumah, dia memiliki kesenangan menampingi anaknya. Sehingga pembimbingannya dilakukan dengan cara setia menyertai untuk

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sang anak. Hasil wawancara berikutnya menganggap bahwa cara yang dilakukannya tidak spesifik, tetapi sama dengan cara kebanyakan orang lain memberikan bimbingan.

”Cara saya membimbing anak seperti halnya orang kebanyakan, biasa-biasa saja. Bagi saya yang penting semua urusan dan masalah yang dihadapi oleh anak harus diperhatikan dengan serius. Yah, sebagai orangtua bagaimanalah kita pandai-pandai bersikap.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/2016)..

Inti pesan dari pernyataan ODS ini adalah bahwa orangtua tidak boleh lalai dari memperhatikan anaknya. Selain itu orangtua harus cerdas bersikap kepada anaknya. Sedangkan ungkapan pernyataan yang disampaikan oleh orangtua berikut ini menunjukkan sikap religius dengan menjaga kehormatan status yang dimiliki. Berikut pernyataannya:

”Anak ini saya harapkan bisa memiliki akhlak yang baik. Saya sebagai guru agama sering mengajari orang lain tentang berakhlak mulia. Saya malu jika anak saya justeru akhlaknya tidak terpuji. Saya biasakan mereka untuk lebih banyak berinteraksi di rumah saja, disini banyak buku-buku agama yang bisa mereka baca-baca.” (Wawancara, OAS, Rabu 1/6/2016)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan dan status yang dianggap sebagai lambang kemuliaan ingin selalu dijaga. Orangtua yang telah sekian lama menjaga kemuliaan itu ingin agar keturunannya dapat ikut menjaganya. Segala upaya pun dilakukan agar impian tersebut menjadi terpelihara terus. Meskipun demikian tidak semua upaya sesuai dengan harapan. Berikut ini sebuah ungkapan yang menaruh harapan baik tetapi kenyataan yang terjadi bahkan sebaliknya. Orangtua subjek (OAG) memiliki cara khas membimbing anak seperti yang diuraikan berikut:

”Saya ini kebetulan sarjana pak, tetapi menjadi ibu rumah tangga tulen. Saya rasakan bagaimana yang namanya sekolah, sehingga biasa saya perlakukan anak agak keras supaya bisa menghargai jerih payah orangtua, guru-gurunya dan bersungguh-sungguh sekolah. Tetapi mungkin anak saya menanggapi lain sehingga justeru berlaku sebaliknya, saya biasa dipanggil menghadap ke sekolah oleh guru BK karena anak saya dianggap membuat masalah.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Ciri khas dari OAG di atas menunjukkan keprihatinan yang sangat dari seorang orangtua, meskipun tidak selalu sejalan antara maksud dan cara yang dilakukan. Maksud baik memang kadang-kadang ditafsirkan berbeda dengan harapan. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada sang anak, maka tanggapan anaknya justeru menunjukkan harapan yang sebaliknya, seperti ungkapan subjek berikut:

”Saya sering dimarahi oleh orangtua terutama ibu. Hampir setiap hari ibu memarahi saya karena urusan sekolah. Urusan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Apa yang diungkapkan oleh OAG dan AG sendiri sepertinya sama dengan yang dirasakan oleh kebanyakan guru di SMP Negeri 8 Makassar. Setiap guru yang ditanyai tentang anak tersebut selalu menganggap sebagai anak bermasalah. Namun ada satu guru yang berhasil memberikan informasi berbeda. Beliau mengatakan:

”Memang banyak yang menganggap bahwa anak tersebut bermasalah, tetapi bagi saya anak tersebut tidak ada masalah. Saya menganggap bahwa perilakunya masih dalam batas-batas kewajaran. Saya kira, itu sangat tergantung siapa dan bagaimana menghadapinya.” (Wawancara AS, Sabtu, 22/8/2015).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AG sebelumnya bahwa di rumah seringkali merasa diperlakukan tidak menyenangkan oleh ibunya. Ternyata di sekolah pun menurutnya ada kondisi yang selama ini dirasakannya tidak menyenangkan, sebagaimana dia ungkapkan.

”Saya tidak suka pak kalau tidak ada *spasi*. Kita berada dalam ruangan terus, begitu terjadi pergantian pelajaran langsung guru berikutnya masuk lagi, tidak ada *spasinya*. Saya bosan pak, makanya saya sering menghindar (keluar tanpa izin guru).” (Wawancara AG Sabtu, 22/8/2015).

Berdasarkan ungkapan AG ini, bisa menjadi pertimbangan bagi guru untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari masalah tersebut. Salah satu yang penting diperhatikan dari masalah ini adalah bagaimana guru memperhatikan kesiapan peserta didik menerima pelajaran.

Melengkapi hasil wawancara di atas, berikut ini merupakan poin-poin penting berdasarkan hasil bimbingan yang dilakukan baik oleh orangtua, guru atau orang dewasa lainnya baik melalui teladan maupun pengajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh beberapa karakter yang diyakini merupakan hasil pemberian bimbingan tergambar dari hasil pengamatan perilaku peserta didik di SMP Negeri 8 Makassar seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perilaku Peserta Didik Sebagai Hasil Pemberian Bimbingan

No.	Perilaku Peserta Didik	Keterangan
1.	Hormat mengangguk, tersenyum	Kepada orang yang lebih tua
2.	Berjabat cium tangan	Bila bertemu guru di jalan
3.	Berbicara sopan	Kepada orang yang lebih tua
4.	Berdo’a diawal pelajaran	Setiap pagi
5.	Menghindari pelajaran	Bosan situasi monoton
6.	Berkelakar	Berkumpul dengan teman
7.	Berdiam diri di mushalla	Shalat dhuha, baca Qur’an
8.	Antri	Datang dan pulang sekolah

Sumber: Hasil olahan data primer 2015.

b. Perawatan

Secara bahasa perawatan adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai pemeliharaan, penjagaan, pembelaan, atau pengurusan. Lazimnya perawatan dilakukan seseorang untuk hal-hal yang memiliki arti dan nilai yang sangat penting bagi dirinya. Demikian pula dengan anak, siapa pun orangnya sebagai orangtua yang memiliki anak maka tentu saja anaknya merupakan objek yang memiliki nilai dan arti yang sangat besar dan penting.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi yang meliputi beberapa hal. Hal yang pertama adalah bagaimana pemahaman orangtua tentang makna perawatan. Pemahaman tentang makna perawatan menurut salah seorang orangtua berikut adalah:

”Anak seumuran ini (SMP maksudnya) memang masih perlu perawatan orangtua, meskipun sudah lebih mudah dibanding ketika masih di SD. Jadi saya pikir anak ini harus dirawat sepenuh hati.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

IL merupakan tipikal orangtua yang menyadari tentang kelemahan anaknya dalam hal mengurus diri sendiri. Sedangkan orangtua subjek berikut (ODS) memahami perawatan sebagai sebuah naluri pemberian Tuhan, seperti dijelaskan:

”Setahu saya setiap makhluk hidup memiliki naluri merawat keturunannya. Sebagai halnya manusia sejak orangtua melahirkannya ke dunia, baik ibu maupun bapaknya dibekali naluri untuk merawat anak tersebut. Saya yakin bahwa Tuhan Maha Tahu bahwa setiap anak butuh dirawat oleh orang dewasa yaitu orantuanya.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Kedua, dalam hal intensitas perawatan, orangtua subjek memiliki pandangan yang hampir senada. Salah satu ungkapan orangtua subjek tentang intensitas dalam merawat anak diungkapkan sebagai berikut:

”Mengenai intensitasnya tentu setiap hari. Setiap hari dibangunkan, disiapkan sarapan, diantar sampai gerbang sekolah, dan setelah pulang sekolah dijemput lagi, begitulah rutinitasnya.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

OAG menceritakan rutinitas setiap hari bagaimana dia harus mengurus anak. Hal ini tentu membutuhkan kesabaran dan rasa cinta yang tulus kepada sang anak. Tapi dengan cinta semuanya bisa menjadi lancar-lancar saja. Lalu bagaimana cara merawat ini dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orangtua subjek (OAS).

”Saya merasakan bahwa merawat anak utamanya jika ia membutuhkan, merupakan kebahagiaan tersendiri. Saya yakin bahwa Tuhan memberikan perasaan seperti itu kepada seorang ibu atau bapak. Jadi begini pak, cara saya merawat anak saya adalah bagaimana senantiasa menyiapkan diri memberikan bantuan baik diminta ataupun tidak diminta.” (Wawancara, OAS, Rabu 1/6/2016).

Ungkapan OAS di atas masih bersifat normatif dan tidak spesifik. Tetapi yang pasti bahwa ungkapan ini menunjukkan itikad baik yang tulus dari seorang orangtua. Pernyataan dari beberapa orangtua dapat dikonfirmasi berdasarkan pengakuan anaknya. Berikut adalah pernyataan anak tentang perawatan orangtua yang dia rasakan.

”Orangtua utamanya ibu sangat dekat dengan saya. Hal ini saya rasakan sejak masih sekolah di SD. Beliau kerap menemani saya belajar sampai berlama-lama. Beliau membangunkan, mengurus sarapan, mencuci baju, menyeterikakan baju, mengantar ke sekolah dan menjemput dari sekolah. Sampai di rumah disiapkannya pula makan siang.” (Wawancara, DS, Sabtu 1/8/2015).

DS sangat terkesan dengan pendampingan yang dilakukan oleh orangtuanya. DS masih mengingat kebaikan-kebaikan orangtua yang telah lama berlalu. Adapun kelengkapan dari hasil wawancara di atas, disajikan data tentang hasil perawatan yang diberikan orangtua seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perawatan Peserta Didik oleh Orangtua di SMP Negeri 8 Makassar

No.	Jenis Perawatan	Keterangan
1.	Menyiapkan perlengkapan sekolah	Setiap dibutuhkan
2.	Membangunkan	Setiap hari sekolah
3.	Menyiapkan makanan	Setiap hari
4.	Menyiapkan uang jajan	Setiap ke sekolah
5.	Menyiapkan pakaian	Setiap pagi hari sekolah
6.	Mengantar ke sekolah	Setiap hari sekolah
7.	Menjemput pulang	Setiap pulang sekolah
8.	Mengingatkan/berpesan	Berkaitan sekolah
9.	Menjaga/merawat kesehatan	Mengawasi/berobat
10.	Mendampingi ke sekolah	Jika ada undangan

Sumber: Hasil olahan data primer 2015.

c. Pemberian motivasi

Secara bahasa, motivasi merupakan kata benda yang dapat diartikan sebagai kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Arti lain yang cukup populer adalah usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi secara umum dikenal dua macam yaitu motivasi *intrinsik* (motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang) dan motivasi *ekstrinsik* (motivasi yang direkayasa oleh orang lain dalam rangkan menguatkan motivasi *intrinsik*). Kekuatan kedua motivasi ini tidak sama bagi setiap orang tergantung pada usia dan suasana hidup yang melingkupinya.

Apa makna atau arti sebuah motivasi bagi orangtua terhadap anaknya. Hasil wawancara dengan OAS mengatakan bahwa motivasi amat berarti dalam mengangkat semangat, sebagaimana diungkapkan:

”Saya tahu dan kita semua tahu barangkali bahwa anak seumuran ini masih sering berubah-ubah (labil maksudnya). Olehnya itu ketika dia mengalami, apa namanya, penurunan semangat maka motivasi sangat berarti bagi dia.” (Wawancara, OAS, Rabu 1/6/2016).

OAS sebagai orangtua memosisikan dirinya sebagai teman curahan hati bagi anaknya. OAS merasakan bahwa dirinya sangat berarti bagi anaknya di saat-saat semangat menjadi menurun. Pendapat yang sama diungkapkan oleh orangtua berikut.

”Saya kira motivasi itu sangat penting bagi anak. Dengan motivasi yang kita berikan maka mereka dapat memiliki semangat untuk sekolah, saya kira begitu pak.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Sangat sederhana ungkapan IL tentang motivasi. Kesederhanaan tersebut bisa saja sebagai kedalaman makna motivasi bagi seorang IL. Arti motivasi berikutnya diungkapkan oleh orangtua subjek berikut ini.

”Sebenarnya timbal balik. Anak merupakan motivasi bagi saya untuk bekerja sehingga dapat menafkahi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya juga saya merupakan motivator buat dia. Saya yakin bahwa dengan kesungguhan saya bekerja mencari nafkah, menyiapkan kebutuhannya dapat menginspirasi untuk bersemangat belajar.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Memberi contoh merupakan juga motivasi yang ampuh bagi anak. Contoh atau teladan merupakan bukti yang lebih tinggi dari pada sekedar berbicara. Demikian diungkapkan oleh orangtua subjek berikut ini:

”Yang paling baik menurut saya adalah memberikan contoh. Kalau anak diharapkan rajin maka kita juga memperlihatkan kepada dia bagaimana rajin itu. Kebetulan saya tidak bekerja di kantoran tetapi saya selalu berusaha

mendampingi anak agar dia mengerti betapa saya mengharapkan dia bisa berhasil.” (Wawancara HR, Rabu 26/1/2016).

Pada dasarnya seorang anak ada juga yang memiliki kepekaan perasaan dengan melihat dan merasakan keikhlasan pengorbanan orangtuanya. Seperti yang menjadi harapan OAS terhadap anaknya, bahwa anaknya dapat termotivasi setelah melihat jerih-payah orangtua berjuang untuk kebahagiaan dirinya.

Seberapa sering orangtua memberi motivasi kepada anak? Berikut pernyataan orangtua subjek tentang intensitas pemberian motivasi.

”Bagi saya pak, motivasi itu bisa saja setiap saat. Dan saya kira, sebagai orangtua harus pandai-pandai melihat bagaimana kondisi anak tersebut. Kalau lagi tidak bersemangat maka kita sebagai orangtua harus memperlihatkan semangat kepada dia.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Motivasi yang diberikan OAG kepada anaknya lebih cenderung berbentuk pemodelan. OAG yakin bahwa sebagai orang dewasa, orangtua tidak boleh lemah di depan anak, tetapi harus mencontohkan semangat yang baik setiap saat.

Sebagai bahan konfirmasi dari pernyataan orangtua dapat diferivikasi berdasarkan pernyataan anaknya. Pengakuan seorang anak didik tentang motivasi yang dia rasakan selama ini diungkapkan sebagai berikut:

”Orangtua saya secara tulus mengurus selama ini. Terus terang pak saya ingin membalas semua jerih payah mereka dengan bersungguh-sungguh belajar. Saya ingin membahagiakan mereka.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/8/2015).

Selain motivasi dari orangtua, ternyata keberadaan sekolah juga menjadi motivasi tersendiri bagi seorang DS. DS sangat menyukai keberadaan sekolah dengan segala fasilitas yang disediakan. DS mengungkapkan bahwa:

”Saya merasa senang di sekolah ini. Banyak pilihan yang disiapkan oleh sekolah untuk pengembangan diri. Ada kelas akselerasi, kelas bilingual dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Saya sendiri aktif mengikuti kegiatan rohis.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/8/2015).

Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa anak didik atau peserta didik memperlihatkan sikap positif dari pemberian motivasi. Tabel 4.3 berikut ini adalah poin-poin penting dari suatu motivasi kepada anak.

Tabel 4.3 Daftar Perilaku Anak Didik Hasil Motivasi

No.	Sikap	Keterangan
1.	Rajin ke sekolah	Setiap pagi
2.	Gembira di sekolah	Setiap hari
3.	Bersemangat belajar	Setiap hari
4.	Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler	Setiap sore

Sumber: Hasil olahan data primer 2015.

d. Penegakan disiplin

Disiplin menurut kamus berarti ketaatan pada peraturan. Hampir tidak ada manusia yang senang diikat oleh aturan-aturan. Manusia secara umum ingin memiliki kebebasan dan lepas dari aturan yang mengikat. Dengan demikian disiplin tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Disiplin diawali dengan latihan, pengulangan, mesti dibiasakan, bahkan cenderung dipaksakan pada tahap-tahap awal.

Bagaimana pendapat orangtua tentang penegakan disiplin? Berikut ini adalah pernyataan mereka tentang arti penting dari kedisiplinan. Pernyataan pertama dikemukakan oleh OAG, mengatakan:

”Disiplin itu susah pak, tapi penting dimiliki oleh setiap orang. Kalau sedari kecil anak bisa berlaku disiplin maka insya Allah kebiasaan itu bisa bertahan sampai ia besar nanti. Jadi saya kira, anak itu penting dibiasakan hidup disiplin sejak kecil.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Arti penting sebuah kedisiplinan bagi setiap orang memang berbeda-beda. Pengalaman hidup seseorang dapat menjadi pelajaran yang berharga tentang pentingnya kedisiplinan. Hal ini dikemukakan salah seorang orangtua dari subjek.

”Disiplin itu sangat penting. Saya tahu betul bahwa syarat penting untuk berhasil adalah disiplin. Rata-rata orang yang sukses dalam hidupnya, karirnya dan lain-lain pasti memiliki sifat dan sikap disiplin.” (Wawancara HR, Rabu 26/1/2016).

Mengajarkan disiplin kepada anak membutuhkan cara-cara tersendiri. Setiap orangtua memiliki kebiasaan masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh orangtua subjek berikut ini.

”Mengajarkan disiplin dengan memberi contoh, yah memberi contoh. Setiap pagi saya harus bangun lebih dahulu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya seperti sarapan, pakaian sekolah, dan mengantar ke sekolah.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/2016).

Sampai hari ini, mendidik dengan memberi teladan dirasakan masih lebih efektif. Seperti inilah yang dirasakan oleh ODS, bahwa teladan orangtua sangat jitu dalam rangka mempengaruhi dan mendisiplinkan anak.

Konfirmasi tentang pernyataan orangtua di atas menyangkut penegakan disiplin dikuatkan oleh pengakuan dari peserta didik. Peserta didik merasakan langsung apa yang diberikan oleh orangtua mereka dalam mendidik disiplin. Boleh jadi pada awalnya berat dirasakan oleh anak, tetapi jika sudah terbiasa maka penegakan disiplin bagi anak ini dapat menjadi lebih mudah. Berikut ini merupakan pengakuan beberapa orang subjek didikan disiplin yang dilakukan oleh orangtuanya.

”Saya sangat terharu dengan kesabaran orangtua. Setiap hari saya diurusi dengan baik, meskipun kadang-kadang marah tetapi itu akibat dari kesalahan saya. Namun yang jelas semua yang dilakukan orangtua setiap pagi, setiap hari telah mengajarkan kepada saya untuk menghargai waktu, menghargai aturan-aturan sekolah.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/8/ 2015).

Iniilah yang dimaksud oleh orangtua subjek (ODS) bahwa anak adalah manusia yang memiliki hati. Ketika anak disantuni, diurusi, diperhatikan, dan dipenuhi kebutuhannya maka pastilah akan merasa berutang budi, merasa berterima kasih kepada orangtuanya. Sebagai kelengkapan data penegakan disiplin diperoleh data hasil pengamatan berdasarkan sikap dan tingkah laku peserta didik seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Sikap Peserta Didik sebagai Cerminan Kedisiplinan

No.	Sikap Disiplin	Keterangan
1.	Datang tepat waktu	Setiap pagi
2.	Budaya antri	Setiap
3.	Pakaian seragam	Setiap hari
4.	Mengerjakan Tugas/PR guru	Setiap ada tugas
5.	Aktif kegiatan ekstrakurikuler	Setiap hari sekolah

Sumber: Hasil olahan data primer 2015.

2. Fungsi *communicating*

Communicating adalah salah satu dari fungsi pendidikan yang diperankan oleh keluarga (orangtua). *Communicating* yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga (orangtua) senantiasa melakukan komunikasi secara teratur dengan guru dan staf sekolah tentang program-program, kemajuan anak, dan urusan sekolah lainnya. Komunikasi yang terbangun antara pihak keluarga dan pihak sekolah sangat

dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Keluarga (orangtua) membutuhkan pihak sekolah dan pihak sekolah juga membutuhkan keluarga.

1) Komunikasi program sekolah

Program sekolah ada yang bersifat rutinitas dan ada pula yang sifatnya kontemporer. Program sekolah yang sifatnya rutinitas lebih banyak berkaitan dengan kepentingan pelayanan peserta didik. Pelayanan peserta didik yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagaimana orangtua berkomunikasi dengan pihak sekolah? Apakah terjadi komunikasi timbal-balik, atau hanya komunikasi satu arah? Berikut beberapa pandangan orangtua tentang komunikasi yang dibangun selama ini. Hasil wawancara yang berkaitan dengan komunikasi orangtua dengan pihak sekolah diungkapkan oleh OAG, bahwa:

”Kami hanya menunggu informasi dari pihak sekolah. Jika sekolah menghubungi maka kami juga berusaha datang sepanjang tidak bertepatan dengan kegiatan lain. Saya kira sekolah harus berinisiatif untuk selalu menghubungi orangtua siswa, siapa tahu ada hal-hal yang penting yang perlu dibicarakan. Jelasnya kami menunggulah, begitu.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Ternyata OAG adalah orangtua yang hanya menunggu informasi awal dari sekolah. Jika pihak sekolah tidak menghubungi maka semua dianggap baik-baik saja. Pernyataan orangtua subjek selanjutnya dapat menjadi renungan bagi semua pemangku kepentingan bahwa di jaman teknologi komunikasi seperti ini, ternyata kendala

komunikasi antara guru-orangtua atau orangtua-guru justeru terjadi. Sebuah dialog antara peneliti dan informan sebagai berikut:

”Apakah ibu kenal nama guru yang mengajar anak ibu? Tidak pak. Apakah ibu pernah berkomunikasi dengan guru yang mengajar anak ibu? Tidak pak. Adakah nomor ponsel guru yang ibu simpan? Tidak pak. Bagaimana ibu sampai bisa datang di sekolah ini? Ada undangan.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Sebuah kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika orangtua peduli pada anaknya. Semestinya orangtua yang baik dan sadar akan pentingnya pendidikan wajib tahu dan kenal dengan guru yang mendidiknya. Ada atau tidak ada masalah, komunikasi tetap harus terlaksana. Pernyataan berikut merupakan ungkapan yang dikeluhkan oleh guru yang merasakan sulit membangun komunikasi dengan orangtua.

“Salah satu kendala yang dihadapi sekolah untuk mendiskusikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik adalah respon dari orangtua terhadap undangan atau panggilan dari sekolah. Beberapa orangtua tidak hadir memenuhi undangan atau panggilan dari pihak sekolah.” (Wawancara AS, Jumat 9/10/ 2015).

Sikap proaktif dari pihak keluarga dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah yang ditunjukkan selama ini hanya terfokus pada waktu dan keadaan tertentu. Orangtua hanya datang jika diundang, adapun inisiatif datang sendiri ke sekolah merupakan peristiwa yang sangat langka.

Frekuensi komunikasi antara pihak orangtua dengan pihak sekolah terjadi secara berkala. Komunikasi berkala dilakukan untuk kegiatan yang terjadwal secara rutin seperti rapat komite sekolah, penerimaan rapor, penerimaan peserta didik setiap tahun pelajaran baru. Adapun komunikasi yang tidak terjadwal atau sifatnya insidental adalah

berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Menurut keterangan dari salah seorang guru bahwa:

“Banyak program yang dilaksanakan oleh sekolah sifatnya terjadi di luar rencana dan itu membutuhkan mediasi. Paling tepat memediasi kita dengan orangtua adalah pemerintah supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan pihak keluarga peserta didik.” (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

Sumbangan orangtua terhadap program sekolah terkait dengan baiknya komunikasi. Apabila komunikasi berjalan baik maka persoalan dapat diatasi dengan mudah. Tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya maka sikap dan pikiran negatif bisa saja muncul terutama dari pihak orangtua. Salah satu masalah yang butuh komunikasi adalah tentang sumbangan orangtua terhadap program sekolah. Pendapat orangtua subjek mengatakan sebagai berikut:

”Sebagai orangtua, saya juga mau membantu pihak sekolah sepanjang saya sanggup. Saya memberikan sumbangan sesuai kemampuan yang saya miliki. Jika saya tidak bisa, terpaksa minta keringanan, mudah-mudahan pihak sekolah dapat memahami keadaan orangtua siswa seperti saya ini.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

2) Komunikasi kemajuan anak didik

Fungsi komunikasi lainnya yang mesti diperankan oleh orangtua dalam pendidikan adalah senantiasa memantau perkembangan anaknya di sekolah. Orangtua mengomunikasikan tentang kemajuan anak didik merupakan sikap dan tindakan yang selalu diharapkan dan dinantikan oleh guru. Guru merasa sangat gembira jika ada orangtua berinisiatif menanyakan perkembangan anaknya di sekolah. Guru merasakan tidak sendirian mengantarkan peserta didik menuju kesuksesan. Sebaliknya guru pun

tidak merasakan kesendirian dalam menanggung akibat jika peserta didik atau anak didik yang dibina bersama mengalami masalah atau kegagalan.

Bagaimana yang terjadi di SMP Negeri 8 Makassar? Apakah secara intensif orangtua memantau kemajuan anaknya di sekolah? berikut petikan hasil wawancara dengan salah satu orangtua subjek. Beliau mengatakan bahwa:

”Sepanjang anak saya tidak bermasalah berarti aman-aman saja, tidak perlu terlalu sibuklah kan kita bisa dihubungi kalau ada masalah. Alhamdulillah sejauh ini anak saya tidak pernah membuat masalah di sekolah sehingga anggapan saya bahwa anak ini pelajarannya lancar-lancar saja.” (Wawancara IL, Sabtu 6/6/2016).

Pernyataan ini bersifat wajar untuk kalangan orangtua yang kurang peduli dengan kemajuan anak di sekolah. Berbeda halnya jika orangtua mengharapkan nilai lebih dari apa yang sekedar diperoleh dari sekolah yang sifatnya biasa-biasa, sehingga kemajuan anak didik tidak hanya dikomunikasikan setiap enam bulan tetapi bisa lebih berkali-kali. Ungkapan orangtua berikut sebagai bukti bahwa orangtua begitu langka berkomunikasi dengan sekolah.

”Setiap akhir semester kami diundang ke sekolah, bahkan dua tahun terakhir ini kita orangtua diundang menerima rapor hasil ujian selama setengah semester. Bagus juga, tetapi maklumlah sepertinya biasa bertepatan dengan pekerjaan. Jadi kalau sempat, kami datang tetapi jika kebetulan sibuk, maka kami terpaksa minta tolong keluarga lain untuk datang mewakili.” (Wawancara HR, Sabtu 26/9/2015).

Pernyataan senada juga dikatakan oleh orangtua subjek lainnya. Orangtua ini (OAG) menganggap bahwa komunikasi hanya dibutuhkan oleh pihak sekolah.

”Selama anak saya sekolah di SMP Negeri 8 ini pihak sekolah yang biasanya menghubungi. Hal yang saya ingat betul yaitu pada saat rapat komite atau penerimaan rapor para orangtua diundang semua. Dalam pikiran saya sekolah

pasti menghubungi orangtua siswa jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Padahal jika terjadi sesuatu yang sifatnya vital maka tindakan penyelesaian tidak lagi mudah dilakukan. Andaikan komunikasi berjalan intensif, maka dipastikan bahwa masalah yang dihadapi dapat dengan mudah terselesaikan.

Melengkapi data wawancara di atas, maka banyak hal penting yang perlu dikomunikasikan oleh orangtua-guru atau guru-orangtua. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi tentang masalah terkait komunikasi tersebut, seperti tabel 4.5. berikut.

Tabel 4.5 Masalah yang Membutuhkan Komunikasi Dua Arah

No.	Masalah	Keterangan
1.	Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas	Setiap bulan
2.	Program Komite Sekolah	Setiap tahun
3.	Tata Tertib dan Tata Krama Peserta Didik	PPDB
4.	Program Kerja Tahunan	Setiap Tahun
5.	Hasil Pembelajaran Peserta Didik	Tengah Semester, Semesteran, Tahunan
6.	Masalah-masalah Insidental	Setiap Kejadian

Sumber: Hasil olahan data primer 2015.

3) Komunikasi urusan sekolah lainnya

Urusan sekolah lainnya yang dimaksud adalah urusan sekolah yang bersifat insidental atau tidak terprogram dalam agenda resmi sekolah meskipun tetap mempunyai keterkaitan. Komunikasi yang terjadi merupakan inisiatif dari pihak

orangtua. Komunikasi untuk urusan sekolah seperti ini hanya dilakukan oleh sedikit orangtua dengan maksud yang berbeda-beda. Urusan sekolah yang di luar agenda resmi lebih banyak yang bersifat tidak mendidik. Kedatangan orangtua ke sekolah karena memiliki kepentingan pribadi. Orangtua mengomunikasikan maksudnya agar pihak sekolah memberikan "lampu hijau" dan mengabulkan permohonannya.

SMP Negeri 8 Makassar memiliki program kelas akselerasi (percepatan). Kelas akselerasi merupakan tempat berkumpulnya peserta didik yang dianggap kaum elit dalam hal kognitif. Di antara seribuan lebih peserta didik hanya dua kelas (72 orang) atau satu kelas (36 orang) yang terjaring masuk ke dalam kelas akselerasi. Terlepas dari predikat elit dalam hal kognitif, kelas akselerasi juga mengangkat "gengsi" orangtua. Predikat gengsi inilah menjadi alasan "perburuan" orangtua untuk melakukan pendekatan di luar jalur resmi.

"Awal terbentuknya kelas *akselerasi* masih bisa dijamin bahwa peserta didik yang masuk merupakan pilihan yang betul-betul memenuhi syarat. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang dipaksakan oleh sebagian orangtua mereka." (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

Kasus lain yang marak dijadikan jalan keluar bagi orangtua adalah "pindah naik". Pindah naik artinya pindah sekolah dan naik kelas. Istilah ini ditujukan kepada peserta didik yang sebenarnya tinggal kelas, tetapi karena peserta didik dan orangtuanya tidak rela menerima maka jalan keluarnya adalah peserta didik tersebut diputuskan boleh naik kelas tetapi harus pindah ke sekolah lain. Sistem pindah naik adalah sikap ketidakrelaan menerima kenyataan pahit yaitu tinggal kelas. Tinggal kelas dianggap sebagai aib yang mempermalukan keluarga.

3. Fungsi *volunteering*

Volunteering yaitu kesukarelaan orangtua dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kegiatan kelas. Sukarela merupakan sikap atau tindakan seseorang secara sadar dilakukan tanpa paksaan dan tanpa tendensi pribadi. Dalam istilah agama dikatakan ikhlas semata-mata mengharapkan rahmat dari Tuhan. Jadi sukarela hanya mengharapkan imbalan *inmaterial* berupa kepuasan batin, kebahagiaan hakiki, dan balasan kebaikan dari Tuhan.

Sebagai bagian dari fungsi pendidikan, kesukarelaan merupakan modal besar untuk membesarkan kualitas sekolah. Meskipun demikian kesukarelaan sangat berat untuk dilakukan. Berikut pernyataan salah satu orangtua subjek (HR).

”Bagaimana ya? Seandainya saya ini tidak sibuk, barangkali hal itu bisa saja dilakukan. Bagaimana kalau kita juga sibuk dan bertepatan dengan kegiatan sekolah, apa boleh buat saya tentu tidak bisa berbuat di luar kemampuan saya, dan saya bisa berharap dapat terlibat dalam membantu sekolah di lain waktu saja.” (Wawancara HR, Sabtu 26/9/2015).

Pernyataan HR sebenarnya lumrah di kalangan orangtua peserta didik tetapi dampaknya buruk. Jika semua orangtua beralasan seperti ini, maka tidak ada lagi yang hal yang dapat dipertemukan antara orangtua dan guru. Kesukarelaan orangtua datang dan membantu kegiatan sekolah membutuhkan pengorbanan besar. Orangtua menganggap penting tetapi hanya sedikit yang mampu, seperti diungkapkan berikut.

”Membantu kegiatan sekolah atau kelas secara sukarela itu amat penting tetapi berat. Saya kira hal seperti terkait dengan hobi juga. Kalau memang kita mencintai kegiatan pendidikan tentu tidak ada masalah tetapi yang menjadi masalah kalau sebaliknya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa banyak orangtua dapat bertindak seperti itu jika punya waktu luang yang banyak atau sangat dipaksa oleh keadaan yang dihadapinya.” (Wawancara OAG, Rabu 26/1/2016).

Kesukarelaan orangtua memberikan bantuan bisa terpengaruh oleh opini publik tentang pendidikan gratis. Orangtua mengetahui sedikit informasi tentang kebijakan ini dan diperkuat lagi oleh media informasi seperti kutipan berita berikut.

“Sumbangan ataupun iuran itu tidak bisa dibebankan kepada siswa ataupun orang tua siswa. Karena proses belajar mengajar di sekolah itu adalah kewajiban dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan,” ujar Subhan.” (Tribun Timur.Com, 2014).

Pernyataan ketua *Ombudsman* tersebut benar adanya. Semua yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar sudah ditanggulangi oleh pemerintah seperti; buku pegangan peserta didik, alat dan bahan pembelajaran. Hanya saja, di luar keperluan kegiatan pembelajaran sekolah membutuhkan dana rutin, seperti; gaji penjaga keamanan, gaji guru honorer, baju olahraga, dan baju praktikum.

Sikap dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah adalah mengintervensi konflik orangtua dan sekolah. Apabila sekolah berada pada jalur yang benar maka harus didukung dan dibela meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak. Menurut hasil wawancara dengan orangtua tentang konflik yang kerap terjadi antara orangtua dan sekolah dikatakan:

“Saya kira tergantung orangnya pak, ada orangtua yang keberatan dengan pungutan tapi bagi saya sepanjang bisa ditanggulangi mengapa tidak. Kalau ada orangtua yang mengadukan sekolah sampai ke media massa saya kira itu kembali lagi sama orangnya, tapi saya pikir lebih baik kalau dibicarakan baik-baik dulu.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015)

Program sekolah atau program kelas di SMP Negeri 8 Makassar membutuhkan uluran tangan masyarakat dan orangtua. Adapun kegiatan tersebut tertera sebagaimana tabel 4.6. berikut ini.

Tabel 4.6 Daftar Kegiatan yang Memerlukan Kesukarelaan Orangtua

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas	Setiap bulan
2.	Fasilitas Kelas Akselerasi	Sesuai kebutuhan
2.	Fasilitas Kelas <i>Bilingual</i>	Sesuai kebutuhan
3.	Insidental	Temporer

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

4. Fungsi *learning to home*

Fungsi keluarga dalam pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah adalah memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah. Fungsi orangtua yang satu ini dikenal dengan istilah *learning to home* (belajar di rumah). Data tentang *learning to home* akan dibagi menjadi tiga bagian yakni: (1) pembantuan belajar di rumah, (2) pembantuan pekerjaan rumah, dan (3) pembantuan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah.

1) Pembantuan belajar di rumah

Setiap anak yang menempuh pendidikan di sekolah selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk belajar. Jika di sekolah dia membutuhkan guru dan temannya dan bila di rumah dia memerlukan bantuan orangtuanya. Pembantuan belajar anak didik memberikan dukungan moral sehingga dia merasa tidak sendirian.

Pembantuan belajar di rumah sangat bergantung pada suasana kenyamanan yang diberikan kepada anak. Kenyamanan dapat mendukung semangat anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh orangtua subjek berikut ini.

”Kewajiban orangtua menyiapkan kebutuhan belajar anak, meja belajar, lampu belajar, buku-buku yang diperlukan dan kalau dia mau belajar kelompok atau bimbel (bimbingan belajar) atau les privat kita mesti siapkan. Pokoknya yang terbaiklah untuk kesuksesan belajar dan sekolahnya.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Bantuan belajar berupa fasilitas belajar terbukti membantu anak belajar di rumah. Hal seperti ini juga dialami oleh orangtua subjek (IL) sebagaimana diungkapkan berikut.

”Bagaimana belajar anak ibu di rumah? Lumayan baik pak. Bagaimana kalau ada tugas yang diberikan oleh gurunya? Yah, saya bantu pak semampu saya. Jadi kalau ibu tidak mampu? Kan ada internet. Oh, jadi ibu punya fasilitas internet di rumah? Yah, dengan HP toh, saya rasa cukup murah biayanya.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Kesadaran orangtua dalam memberikan fasilitas merupakan dukungan positif bagi efektivitas belajar anak. Selain itu suasana belajar yang memberikan teladan bagi anak dapat mempengaruhi semangat belajar anak, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang subjek berikut:

”Saya terbiasa tinggal di rumah pak, jarang keluar rumah. Bapak saya guru dan ibu hanya ibu rumah tangga tapi sarjana. Saya melihat ibu biasa membaca buku-buku agama, apalagi bapak saya tegas terutama kalau menonton acara televisi, tidak oleh sembarang” (Wawancara AS, Sabtu, 1/8/2015).

Menciptakan suasana belajar tidak mudah. Suasana belajar harus dimulai dengan niat yang baik dan tekad yang kuat untuk memperbaiki. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selain orangtua memberikan contoh yang baik juga harus bersikap tegas untuk hal-hal yang dapat mengganggu suasana belajar anak.

Pada zaman sekarang memang tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas belajar sangat banyak tersedia. Sehingga yang diperlukan adalah keinginan kuat dari orangtua

untuk mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Oleh karena itulah, orangtua sangat diharapkan dapat membantu anak dengan meluangkan waktu sedapat mungkin mendampingi anak dalam belajar. Hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik (AG) mengatakan bahwa:

”Saya merasa betah belajar dengan bapak karena beliau bisa *nyambung* ’komunikatif’ untuk diajak berdiskusi. Saya dan bapak dapat berkomunikasi dengan lancar tentang keluhan diri saya maupun pelajaran saya.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Pernyataan ini menjelaskan bahwa orangtua sebaiknya pandai-pandai beradaptasi dengan anak. Orangtua dituntut pandai memasuki dunia anak, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anaknya.

2) Pembantuan pekerjaan rumah (PR)

Pembantuan PR dapat terlaksana jika guru sepakat dengan orangtua peserta didik. Maksudnya adalah guru memberikan PR dan didukung oleh orangtua. Sejauhmana penerimaan orangtua terhadap PR?

”Saya sangat mendukung jika para guru selalu memberikan PR kepada siswanya. Saya kira dengan PR atau tugas yang diberikan, maka anak akan belajar atau mengulang pelajaran yang telah diperoleh di sekolah. Setelah sampai di rumah, maka kamilah yang senantiasa mengawasi tentang PR yang diberikan tersebut.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Dukungan yang diberikan oleh orangtua adalah menerima upaya guru tentang PR. Bantuan lain yang diharapkan oleh guru dari orangtua peserta didik salah satunya adalah orangtua mengingatkan PR anaknya, seperti ungkapan berikut:

”Sepertinya tidak ada pertanyaan lain yang sering saya ajukan kepada anak saya ketika mau pergi bermain selain, ”apakah PR sudah dikerjakan atau belum?”. Mungkin ini sudah menjadi tradisi sehingga anak saya juga merasa perlu

menyelesaikan PRnya baru pergi bermain atau dia berjanji bahwa setelah bermain dengan temannya maka PR harus dikerjakan.” (Wawancara OAS, Rabu 1/6/2016).

Mengingatkan PR kepada anak merupakan cara standar yang hampir dilakukan oleh setiap orangtua. Tindakan seperti ini boleh jadi membuat anak menjadi benci atau tidak suka, tetapi tetap harus dilakukan.

Selain mengingatkan PR anak, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga semangat anak. Menjaga semangat anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah menemani anak belajar seperti diuraikan:

”Waktu SD orangtua saya terutama ibu, selalu menjadi teman belajar saya. Ketika ada PR dan menjelang ulangan ibu bertindak sebagai penguji, dia bertanya tentang materi pelajaran yang telah saya baca. Sekarang setelah sekolah di SMP ibu menemani ketika saya butuhkan bantuannya.” (Wawancara DS, Sabtu 1/8/2015).

Membantu dengan menemani sebenarnya sudah baik bagi anak. Tetapi ketika orangtua punya kompetensi membantu langsung, maka lebih baik lagi. Hal ini diungkapkan oleh orangtua berikut.

”Kalau masalah PR saya tidak terlalu repot. Dengan kesadaran sendiri anak saya kerja PR nya. Kita ini orangtua hanya mengarahkan, nanti kalau butuh bantuan baru saya turun tangan, saya juga kan pernah kuliah meskipun hanya program diploma, jadi kalau PR matematika masih bisa sedikit membantu anak apalagi kalau ada rumusnya itu tinggal diganti-ganti.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Membantu langsung mengerjakan PR juga harus memiliki batasan tertentu. Sebenarnya pendampingan dalam mengerjakan PR bagi anak merupakan dukungan moral yang sangat berharga. Jangankan dibantu secara langsung atau teknis, menemani saja anak mengerjakan PR sudah merupakan bantuan yang besar baginya.

3) Pembantuan kegiatan yang berhubungan kurikulum sekolah

Kegiatan apa yang berhubungan dengan kurikulum? Kurikulum adalah rujukan kegiatan kurikuler. Semua mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri dengan segala kelengkapannya merupakan ruang lingkup kegiatan kurikuler.

Upaya pengembangan diri butuh waktu di luar jam pelajaran. Oleh karena itu restu dan izin dari orangtua menjadi syarat. Orangtua dapat memiliki pertimbangan tersendiri sekaitan dengan pengembangan diri, seperti diungkapkan berikut:

”untuk mengembangkan dirinya, saya memberikan kesempatan kepada anak saya. Di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak disediakan, terserah kepada anak saya mau pilih yang mana asalkan tidak mengganggu kegiatan pelajaran sekolah yang diberikan oleh guru-gurunya.” (Wawancara OAS, Ahad 7/2/2015).

Pembenaran tentang kegiatan pengembangan diri diungkapkan oleh peserta didik. Peserta didik yang satu ini mendapat restu dan dukungan orangtuanya untuk aktif pada kegiatan kerohanian Islam (Rohis) di sekolah seperti dikatakan:

”Saya merasa senang di sekolah ini. Banyak pilihan yang disiapkan oleh sekolah untuk pengembangan diri. Ada kelas akeselerasi, kelas bilingual dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Saya sendiri aktif mengikuti kegiatan rohis.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/8/ 2015).

Selain kegiatan pengembangan diri di sekolah juga dapat dikembangkan di tempat lain. Orangtua dan anak di SMP Negeri 8 Makassar sudah menjadi hal biasa sepakat untuk menyertakan pada kegiatan pengembangan diri seperti bimbingan belajar ataupun les privat, seperti diungkapkan berikut:

”sudah jadi kebiasaan saya lihat di Makassar ini yaitu anak-anak ikut bimbingan belajar. Jadi kalau anak saya membutuhkan itu maka saya berupaya untuk membiayainya. Ada juga temannya yang memanggil guru-guru privat ke rumah untuk mengajar atau mengulang-ulang pelajaran yang mungkin perlu

dimantapkan saya kira itu juga perlu dan kita sebagai orangtua harus mengupayakan sebaik-baiknya.” (Wawancara HR, Sabtu 26/9/2015).

Pengembangan diri merupakan salah satu kegiatan yang mendapat fasilitas lengkap di SMP Negeri 8 Makassar selain di luar. Sebagai kelengkapan data, tabel 4.7. berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang aktif diikuti oleh peserta didik.

Tabel 4.7 Kegiatan Pengembangan Diri

No.	Kegiatan Pengembangan Diri	Keterangan
1.	Ekstrakurikuler	Banyak pilihan
2.	Les Bahasa Inggris	Sore hari
3.	Kerohanian Islam	Setiap Ahad
4.	Bimbingan Belajar	Luar sekolah
5.	Olimpiade Sains	Jadwal disesuaikan lomba

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

5. Fungsi *decision making*

Fungsi keluarga yang diperankan orangtua dalam pendidikan adalah pengambilan keputusan (*decision making*). Fungsi tersebut sangat penting karena orangtua merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap masa depan anaknya. Fungsi ini terkait langsung dengan keterlibatan orangtua di sekolah.

Fungsi pengambilan keputusan dari orangtua peserta didik memiliki cakupan yang luas, sehingga perlu dibatasi. Adapun *decision making* sebagai fungsi orangtua dalam pendidikan yang menjadi fokus pembahasan dalam hal ini terbagi atas dua yaitu: (1) partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan (2) partisipasi orangtua sebagai pemimpin para orangtua atau perwakilan orangtua di sekolah.

1) Partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan sekolah

Partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah masih sangat terbatas. Kalaupun ada, itu hanya sebatas partisipasi pasif. Partisipasi pasif yang dimaksud adalah pihak orangtua hanya diminta menyetujui atau bertanda tangan belaka. Sebagai contoh penyusunan tata tertib dan tata krama peserta didik, orangtua hanya diberikan kesempatan membaca kemudian menandatangani sebagai tanda persetujuan.

Berdasarkan fenomena tersebut menguatkan bahwa ada yang salah dalam sistem pelibatan orangtua. Pada kenyataannya, ada juga orangtua yang merasa siap untuk terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan sekolah. Berikut pernyataannya.

”Meskipun saya bukan pengurus komite sekolah tetapi kalau rapat komite sekolah saya selalu mengupayakan untuk selalu hadir, ini hanya satu atau dua kali setiap tahun. Saya tidak suka kalau tidak mendengar secara langsung hasil keputusan rapat komite sekolah.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Pernyataan di atas memang tidak bisa mewakili semua orangtua, namun paling tidak terdapat beberapa orangtua peserta didik yang masih peduli. Kepedulian ini bukan hanya sekedar menghadiri rapat komite saja tetapi ada juga orangtua yang siap menyumbangkan ide, saran, atau pikirannya. Berikut petikan wawancaranya.

”kalau diberikan kesempatan, maka saya pasti tidak menyianyiakannya memberikan tanggapan atau saran-saran tentang program-program dan kegiatan komite sekolah. Hal yang paling sering kita sikapi adalah yang berkaitan dengan sumbangan orangtua siswa.” (Wawancara HR, Sabtu 26/9/2015).

Tingkatan lebih tinggi lagi yaitu bukan sekedar pemberi saran tetapi ada yang siap untuk terlibat langsung sebagai pengurus. Berikut petikan hasil wawancaranya.

”seandainya kita ini dipercaya sebagai pengurus komite kemungkinan besar saya terima, tetapi saya tahu bahwa dimana-mana di setiap sekolah yang ditunjuk sebagai pengurus komite sekolah adalah orang-orang yang hebat.” (Wawancara OAS, Ahad 7/2/2015).

Apa yang disampaikan oleh OAS di atas sesuai dengan fakta. Pengurus komite sekolah dipegang oleh orang-orang berpengaruh, karena sistem menghendaki demikian. Pihak sekolah pun sangat membutuhkan tokoh-tokoh berpengaruh sebagai mitra dalam komite sekolah.

Pada komunitas kecil, di SMP Negeri 8 Makassar ada pelibatan orangtua peserta didik. Komunitas tersebut berkaitan dengan program unggulan seperti kelas akselerasi dan kelas *bilingual*. Sebagian orangtua bahkan berambisi terlibat aktif di dalamnya seperti pernyataan berikut.

”di SMP delapan ini ada kelas akselerasi, menurut pemberitahuan kepala sekolah katanya tinggal satu periode lagi kelas ini mau dihapus. Kebetulan anak saya masuk dalam kelas tersebut, jadi kami terlibat dalam paguyuban orangtua kelas akselerasi yang diamanahkan untuk dapat menyelesaikan jalannya kelas unggulan tersebut.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

2) Partisipasi sebagai pemimpin orangtua atau perwakilan orangtua di sekolah

Jumlah orangtua peserta didik cukup banyak sehingga tidak semua dapat menduduki posisi sebagai pemimpin atau wakil orangtua di sekolah. Telah diuraikan sebelumnya bahwa ada wadah yang disiapkan oleh pemerintah bagi orangtua peserta didik untuk berkiprah atas nama orangtua peserta didik di sekolah yaitu komite sekolah.

Keterlibatan orangtua di SMP Negeri 8 Makassar bukan hanya sebagai pengurus komite sekolah tetapi juga terlibat dalam komunitas lain. Sebagai sekolah yang inovatif

di SMP Negeri 8 Makassar terdapat bentukan kelas yaitu; kelas BL (*bilingual*) dan kelas percepatan (akselerasi). Kedua program sekolah tersebut merupakan inisiatif sekolah setelah melihat potensi peserta didik yang memiliki peluang yang cukup besar untuk diadakan. Setelah mendapat restu dari pemerintah (dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan) maka "dijual" program ini kepada orangtua peserta didik. Kedua program tersebut tergolong elit di sekolah sehingga baik peserta didik maupun orangtua peserta didik menunjukkan sambutan penerimaan yang baik. Banyak yang ikut dalam seleksi tetapi ruang penerimaan terbatas sehingga jadilah kedua program ini menjadi primadona dari kelas biasa. Berdasarkan pengamatan dan studi dokumen diperoleh data tentang keterlibatan orangtua dalam *decision making* seperti tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8 Partisipasi Orangtua dalam Pengambilan Keputusan Sekolah

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyusunan Tata Tertib dan Tata Krama	Partisipasi pasif
2.	Penyusunan RKM (Rencana Kerja Menengah)	Partisipasi pasif
3.	Penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan)	Partisipasi pasif
4.	Rapat Komite Sekolah	Partisipasi aktif
5.	Paguyuban orangtua kelas akselerasi dan kelas bilingual	Partisipasi aktif
6.	Kegiatan belajar tambahan	Partisipasi aktif
7.	Pelibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler	Partisipasi pasif

Sumber: Hasil olahan data primer dan sekunder 2015

6. Fungsi *collaborating with community*

Fungsi pendidikan keluarga yang diperankan oleh orangtua berikutnya adalah *collaborating with community* (berkolaborasi dengan komunitas atau masyarakat). *Collaborating with community* yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik.

Collaborating with community masih terbatas pada ikatan keluarga. Masyarakat Makassar memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Hal ini terlihat dari ramainya acara-acara keluarga yang kerap dilakukan. Tetapi dalam hal memfokuskan pada tema pendidikan belum mendapat perhatian serius. Itulah sebabnya ketika ada pertemuan keluarga hanya membicarakan tema yang ringan dan sekedar basa-basi dan tidak sampai pada identifikasi potensi-potensi pendukung upaya pendidikan. Berikut petikan wawancara.

”Mendata potensi-potensi keluarga tidak pernah kami pikirkan apa lagi lakukan, tetapi paling tidak disetiap pertemuan keluarga seperti acara pernikahan atau acara keluarga lainnya kami hanya saling bertanya tentang keadaan keluarga masing-masing.” (Wawancara, ODS, Ahad 5/6/ 2016).

Mendata potensi-potensi pendidikan di kalangan komunitas keluarga mungkin hanya terjadi pada masyarakat maju dan mapan. Hanya saja ketika memilih lingkungan tempat tinggal kondisi calon tetangga dan lingkungannya menjadi pertimbangan keputusan. Berikut petikan wawancaranya.

”paling tidak waktu kami beli rumah, yah sempat bertanya-tanya apa rata-rata pekerjaan calon tetangga kita nanti. Tapi biasanya dari informasi jenis pekerjaan calon tetangga tersebut bisalah diperkirakan tingkat pendidikannya sehingga

menjadi pertimbangan untuk memutuskan jadi atau tidak membeli rumah untuk tinggal.” (Wawancara OAS, Ahad 7/2/2015).

Pendapat OAS ini adalah pendapat standar semua orangtua yang tingkat pendidikannya cukup tinggi. Keinginan OAS tersebut berlatar belakang pertimbangan edukasi untuk kebaikan anak-anaknya. Asumsinya, jika lingkungan dihuni oleh orang-orang berpendidikan baik, maka lingkungannya juga pasti baik.

Setelah menempati lingkungan yang dianggap kondusif, maka tindakan selanjutnya adalah mengusahakan hubungan sosial. Hubungan sosial antar tetangga atau keluarga, lagi-lagi belum sejauh membentuk komunitas pemerhati pendidikan. Berikut petikan wawancaranya:

”belum sejauh itu kami lakukan. Rata-rata kita hanya mengatakan bahwa yang penting bisa hidup damai berdampingan dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau ada acara tetangga kita ikut-ikutilah menghormati, datang bersilaturahmi.” (Wawancara, ODS Ahad 5/6/ 2016).

Hasil konfirmasi dengan salah satu informan, membenarkan adanya kegiatan yang mendukung hubungan sosial antar tetangga atau keluarga. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama. Berikut petikan wawancaranya.

“Saya tidak suka ke luar kalau sudah berada di rumah. Saya senang dan betah berada di rumah, membaca buku, berbincang-bincang dengan orangtua. Walaupun saya harus ke luar itu disebabkan ada kajian keagamaan yang dilaksanakan di sekitar rumah pada hari ahad dan di sekolah pada hari jumat sore. Kalau di komplek perumahan saya bersama warga kompleks dan kalau jumat pembinanya adalah kakak-kakak dari kelompok kajian yang memang membina para pelajar seperti saya.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/7/2016).

Inisiatif untuk memerankan fungsi *collaborating with community* bagi orangtua sangat penting. Banyak sumber daya keluarga dan masyarakat yang potensial.

B. Keberadaan Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar

1. Kondisi fisik SMP Negeri 8 Makassar

Kondisi fisik yang dimaksudkan adalah semua perangkat keras yang dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Meskipun tidak bisa dituliskan semuanya namun secara garis besar meliputi: (1) ringkasan sejarah sekolah, (2) civitas akademika, dan (3) sarana dan prasarana sekolah.

a. Ringkasan sejarah SMP Negeri 8 Makassar

SMP Negeri 8 Makassar didirikan pada tanggal 5 April 1977. Terletak di Jl. Batua Raya No. 1 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berada di atas tanah seluas 10.490 meter persegi dengan status tanah SHM (Sertifikat Hak Milik). Saat ini berstatus akreditasi A. Jika melewati alamat tersebut di atas sebuah atribut di depan sekolah terlihat seperti gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1. Beranda SMP Negeri 8 Makassar
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Sejak diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. Andi Abubakar Punagi) SMP Negeri 8 Makassar telah dipimpin sebanyak 7 orang kepala sekolah, seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kepala SMP Negeri 8 Makassar sejak 1977

No.	N a m a	Kepala Sekolah
1.	Drs. H. A. Malebbireng	Pertama
2.	Drs. H. Abd. Haris	Kedua
3.	Muh. Said Ruddin, B.A.	Ketiga
4.	Drs. Solehuddin Intam	Keempat
5.	Drs. Pangerang	Kelima
6.	Drs. H. Abd. Muin Tarham	Keenam
7.	Hikma Manganni, S.Pd., M.Pd.	Ketujuh (sekarang)

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

SMP Negeri 8 Makassar adalah sekolah negeri pertama dibangun di Kecamatan Panakkukang (sekarang Kecamatan Manggala, seperti pada gambar 4.2). Waktu itu SMP Negeri 8 Makassar belum mampu melayani peserta didik secara mandiri. Menutupi semua kekurangannya, maka diminta bantuan dari sekolah negeri terdekat.



Gambar 4.2 Peta Kecamatan Manggala Tempat SMP Negeri 8 Makassar
(*Sumber: Hasil olahan data sekunder 2015*)

Menutupi kekurangan yang dialami mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka pihak SMP Negeri 8 Makassar memilih SMP Negeri 4 Makassar dijadikan sebagai partner. Setelah merasa mampu, maka sejak tahun 1977 dimulailah penerimaan peserta didik baru. Tahun 1980 untuk pertama kali SMP Negeri 8 Makassar memiliki alumni.

Pembinaan yang baik dari Kepala Sekolah, guru, staf pegawai, dukungan yang memadai dari orangtua peserta didik, dan masyarakat telah menjadikan sekolah ini banyak diminati. Tidaklah berlebihan jika SMP Negeri 8 Makassar selalu menjadi sekolah pavorit atau dipavoritkan oleh masyarakat. Setiap tahun pelajaran baru sangat banyak pendaftar berharap ditampung di sekolah ini. Hingga saat ini (tahun 2015) tercatat sebanyak 1229 orang peserta didik. Sebagai sekolah dipavoritkan SMP Negeri 8 memiliki keunggulan seperti yang disajikan pada tabel 4.10. berikut merupakan profil penting SMP Negeri 8 Makassar.

Tabel 4.10 Data Profil Penting SMP Negeri 8 Makassar

No.	Informasi	Keterangan
1. Jenis	SMP Negeri	
2. Akreditasi	A	
3. Status	RSBI/SSN	Sebelum dihapus oleh pemerintah
4. Kurikulum	2013	
5. Jenis Kelas	Reguler, <i>Akselerasi</i> , dan <i>Bilingual</i>	Kelas <i>akselerasi</i> sisa 1 dan rencana ditiadakan tahun 2016

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Informasi dari tabel 4.10 menjadi catatan khusus bagi pihak internal dan eksternal sekolah bahwa SMP Negeri 8 Makassar merupakan sekolah unggulan pemerintah dan diunggulkan oleh masyarakat. Adanya kelas *akselerasi* dan kelas *bilingual* merupakan wujud dari kreativitas pembina sekolah didukung oleh pemerintah dan orangtua peserta didik. Ini adalah wujud kemitraan yang *real* di SMP Negeri 8 Makassar. Kelas *akselerasi* didukung oleh *paguyuban* orangtua secara khusus mengenai pendanaan sehingga memiliki fasilitas khusus pula seperti: ruang belajar khusus, alat pendingin ruangan (AC), LCD permanen, papan tulis khusus, dan media pembelajaran lainnya.

Status RSBI/SSN yang pernah diraih juga menjadi bukti capaian dari kerja keras semua pihak terkait. Andai saja pemerintah tidak menghapuskan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) boleh jadi SMP Negeri 8 Makassar sudah menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

Akreditasi A yang disandang merupakan bukti bahwa SMP Negeri 8 Makassar tampil sebagai sekolah penuh percaya diri. Kepercayaan diri ini dibuktikan dengan tetap bertahan menggunakan K13 (Kurikulum 2013) meskipun pemerintah belum mewajibkan.

b. Civitas akademika SMP Negeri 8 Makassar

Civitas akademika adalah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 8 Makassar. Civitas akademika terdiri atas: guru, tenaga administrasi, tenaga

keamanan, dan peserta didik. Menurut keadaan bulan Juli 2015 civitas akademika secara kuantitas seperti disajikan pada tabel 4.11. berikut ini:

Tabel 4.11 Civitas Akademika SMP Negeri 8 Makassar

No.	Civitas Akademika	Banyaknya (Orang)	L	P	Keterangan
1.	Kepala Sekolah (KS)	1			
2.	Wakasek Sekolah	1			
3.	Guru Tetap	59	16	43	Termasuk KS/WKS
4.	Guru Tidak Tetap	3	1	2	
5.	Pegawai Tetap	9	5	4	
6.	Pegawai Tidak Tetap	7	3	4	
7.	Penjaga/Pesuruh	2	2	-	
8.	Kelas VII	409	192	217	Tambahan 5 orang
9.	Kelas VIII	382	180	202	
10.	Kelas IX	433	185	248	
Jumlah		1304	584	720	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Dalam mengelola sekolah, SMP Negeri 8 Makassar dibina oleh guru sebanyak 62 orang. Secara rinci disajikan dalam tabel 4.12. berikut ini.

Tabel 4.12 Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Status

No.	Status	Banyaknya (orang)	Keterangan
1.	Guru Tetap	59	PNS
2.	Guru Tidak Tetap	3	Non PNS
Jumlah Total		62	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Banyaknya guru berdasarkan tabel 4.12 di atas adalah 62 orang. Sedangkan banyaknya peserta didik adalah 1229 orang. Sehingga rasio antara guru dan peserta didik adalah 62:1229 atau mendekati 1:20. Satu guru menghadapi sekitar dua puluh peserta didik. Perhitungan seperti ini merupakan perhitungan secara umum. Tetapi dengan jumlah jam wajib setiap guru yaitu 24 jam pelajaran, maka rata-rata setiap guru membina sebanyak enam kelas atau sekitar $6 \times 36 = 216$ orang peserta didik.

Persyaratan guru profesional adalah minimal setingkat sarjana (S1). Data tabel 4.13 di bawah ini menunjukkan bahwa secara persentase menunjukkan bahwa kualifikasi itu belum terpenuhi.

Tabel 4.13 Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Banyaknya (orang)	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	12	PNS
2.	Sarjana (S1)	45	PNS
3.	Sarjana (S1)	3	Non PNS
4.	Diploma (D2)	1	PNS
5.	Diploma (D1)	1	PNS
Jumlah Total		62	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Kualifikasi S1 sebesar 96,77% dan yang belum kualifikasi S1 sebesar 3,23%. Nilai *plus* dari kenyataan di atas adalah adanya beberapa orang guru dengan tingkat pendidikan yang berkualifikasi S2 sebesar 19,35%. Hal ini sangat membantu dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal-hal teknis pelaksanaan pembelajaran maupun dalam hal menunjang pengembangan karir. Guru dengan

kualifikasi S2 dapat memberikan bimbingan kepada teman sejawatnya dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, guru SMPN 8 Makassar berdasarkan golongan cukup baik, seperti terlihat pada penyajian tabel 4.14. berikut ini.

Tabel 4.14 Guru SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Banyaknya (orang)	Keterangan
1.	IV C	2	Guru Tetap
2.	IV B	45	Guru Tetap
3.	IV A	5	Guru Tetap
4.	III D	3	Guru Tetap
5.	III C	3	Guru Tetap
6.	III A	1	Guru Tetap
7.	-	3	Guru Tidak Tetap
Jumlah		62	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Ternyata jumlah guru dengan golongan IV A – IV C sebanyak 52 orang atau sebesar 83,87%. Golongan III A – III D sebanyak 7 orang atau sekitar 11,29%. Keadaan seperti ini sebagai pertanda baik bahwa karir guru yang menjadi pendidik di SMP Negeri 8 Makassar sangat bagus. Kenaikan pangkat/golongan bagi guru berkaitan dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki. Keempat kompetensi tersebut adalah: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Bila dihubungkan dengan profesionalisme guru berarti di atas 80% guru di SMP Negeri 8 Makassar telah menunjukkan kinerja yang sangat baik atau minimal baik. Adapun sisanya yang masih golongan III (golongan III A – III D) hanya

karena faktor usia dari masa kerja yang masih muda. Selanjutnya disajikan keadaan guru dan mata pelajaran yang diampuh seperti yang disajikan pada tabel 4.15. berikut.

Tabel 4.15 Guru Tetap SMP Negeri 8 Makassar Berdasarkan Keadaan Mata Pelajaran

No.	Mata Pelajaran	Banyaknya (orang)	Keterangan
1.	Pendidikan Agama Islam	1	Kekurangan 2
	Pendidikan Agama Kristen	2	
2.	PKn	4	
3.	Bahasa Indonesia	6	Kekurangan 2
4.	Matematika	7	
5.	IPA	9	Kelebihan 2
6.	IPS	8	Kelebihan 2
7.	Seni Budaya	4	
8.	Penjaskes	4	
9.	Bahasa Inggris	8	Kelebihan 2
10.	Prakarya	2	Kekurangan 1
11.	TIK	-	Kekurangan 1
12.	Muatan Lokal	-	
13.	BK	4	Kekurangan 2
Jumlah		59	

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2015

Data pada tabel 4.15 di atas menunjukkan adanya kekurangan guru dan kelebihan guru di sisi lainnya. Persoalan seperti ini juga terjadi di beberapa sekolah di Makassar. Hal yang begitu *ironis* dalam kekurangan dan kelebihan guru adalah perhatian pemerintah dalam membuat pemerataan penempatan guru, meskipun laporan tentang data keadaan guru (DKG) dan pegawai administrasi dilaporkan setiap bulan.

Tidak adanya tindak lanjut dari DKG untuk waktu yang singkat tidak menjadi masalah, akan tetapi bila hal ini berlarut-larut maka kemitraan antara sekolah dan pemerintah patut dipertanyakan.

Penempatan guru yang tidak merata menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan penempatan guru dilakukan tidak berbasis data (atau tidak memperhatikan data). Salah satu contoh yang paling menyolok adalah penerimaan guru pindahan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Contoh lainnya adalah penyebaran guru berdasarkan jenis kelamin. Terlihat pada tabel 4.16 bahwa didominasi oleh guru perempuan.

Tabel 4.16 Guru SMP Negeri 8 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Banyaknya (Orang)	Keterangan
1.	Laki-laki	17	Termasuk GTT
2.	Perempuan	45	Termasuk GTT
Jumlah		62	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Tabel 4.16 ini secara persentase didominasi oleh guru perempuan yaitu 72,58%. Guru laki-laki hanya 27,42%. Secara rasio 17:45 atau 1:2,65 hampir 1:3. Dalam hal-hal tertentu kondisi seperti ini tidak menguntungkan. Kegiatan kurikuler, bila jumlah guru perempuan dalam usia produktif biologis mendominasi, maka sering terjadi tugas-tugas kegiatan belajar mengajar terganggu. Kepentingan sekolah yang bersamaan dengan keperluan pribadi (contoh: mengurus anak) sulit ditinggalkan. Kondisi ini memberikan pilihan yang berat bagi guru. Meninggalkan tugas berarti menelantarkan

peserta didik. Mengurus peserta didik berarti meninggalkan anak atau paling tidak menjadi beban pikiran dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Begitu pula dalam kegiatan ekstrakurikuler keberadaan guru laki-laki sangat penting karena mereka lebih mampu *full time* dibandingkan guru perempuan.

Menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, lagi-lagi peran pemegang kebijakan (pemerintah) perlu memperhatikan secara serius. Pemerintah memperhatikan data, mempertimbangkan data, kemudian menindaklanjuti data dengan penuh kearifan.

Tenaga administrasi sangat penting dalam mendukung pengelolaan setiap sekolah. Begitupula dengan tenaga keamanan. Mereka (tenaga administrasi/keamanan) mengambil peran yang tidak dapat ditangani semua oleh guru dan sangat dibutuhkan oleh guru itu sendiri. Tenaga Administrasi dan Keamanan SMP Negeri 8 Makassar terlihat pada sajian tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17 Tenaga Administrasi dan Keamanan SMP Negeri 8 Makassar

No.	Pendidikan	Banyaknya (Orang)	Keterangan
1.	Sarjana (S1)	3	Termasuk
2.	SMA	13	Tenaga
3.	SMEA	1	Honorar
4.	SD	2	
Jumlah		18	

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2015

Berdasarkan tabel 4.17 dan tabel 4.11 mengindikasikan bahwa SMP Negeri 8 Makassar mengalami kekurangan tenaga administrasi. Adanya 9 orang tenaga tidak

tetap (PTT) menjadi bukti adanya kekurangan. Sebanyak 18 tenaga administrasi, terdapat 9 tenaga tetap dan 9 orang tenaga tidak tetap. Sebanyak 9 orang tenaga tetap hanya 2 orang sarjana. Sebanyak 9 orang tenaga tidak tetap, ada 1 orang yang sarjana. Tenaga administrasi berdasarkan golongan, seperti pada tabel 4.18 berikut ini.

Tabel 4.18. Tenaga Tetap Administrasi Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Banyaknya (Orang)	Keterangan
1.	Golongan III B	6	
2.	Golongan III A	3	
Jumlah		9	

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2015

Tabel 4.18 menggambarkan tenaga administrasi SMP Negeri 8 Makassar adalah tenaga administrasi yang berpengalaman. Semuanya golongan III padahal hanya 2 yang sarjana. Berarti didominasi oleh tenaga administrasi yang berpengalaman. Kondisi ini sangat mendukung keberhasilan pelayanan administrasi. Kondisi selanjutnya adalah peserta didik. Sisi kuantitas peserta didik di SMP Negeri 8 Makassar seperti digambarkan pada tabel 4.19. berikut ini.

Tabel 4.19 Kondisi Jumlah Peserta Didik Per Juli 2015

No.	Kelas	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	VII	192	217	409	Tambahan 5 peserta didik
2.	VIII	180	202	382	
3.	IX	185	248	433	
Jumlah		557	667	1224	

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2015

Pada bulan September 2015 terjadi mutasi (penambahan) peserta didik sebanyak 5 orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 1229 orang peserta didik. Jumlah peserta pindahan ini tidak banyak.

”Adanya perubahan jumlah peserta didik oleh karena pihak sekolah sudah bisa menerima pindahan peserta didik dari sekolah lain, meskipun terasa berat mengingat status sekolah unggul.” (wawancara MY, Sabtu, 19/09/2015).

Tabel 4.19 di atas menunjukkan peserta didik perempuan lebih dari banyaknya peserta didik laki-laki setiap tingkatan kelas. Rasio laki-laki dan perempuan adalah 1:1,2. Adapun persentase peserta didik perempuan sebesar 54,49% dan peserta didik laki-laki sebesar 45,51%. Peserta didik dibina dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Tabel 4.20. berikut, menggambarkan kegiatan ekstrakurikuler.

Tabel 4.20 Kegiatan Ekstrakurikuler SMP Negeri 8 Makassar

No.	Kegiatan Ekskul	Keterangan
1.	Basket	Formal
2.	<i>Cheers</i>	Semi Formal
3.	Futsal	Formal
4.	Karate	Formal
5.	Majelis Ilmu	Kegiatan Rohis
6.	Majalah Dinding	Semi Formal
7.	OSIS	Formal
8.	Paskibra	Formal
9.	PMR	Formal
10.	Pramuka	Formal
11.	PIKER	Binaan guru BK
12.	PKLH	Semi Formal

Sumber: Hasil olahan data primer dan sekunder 2015

Keragaman kegiatan ekstrakurikuler memberikan kenyamanan bagi peserta didik untuk memilih berdasarkan bakat atau kesukaan mereka. Kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di SMP Negeri 8 Makassar telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih prestasi non akademik. Hal tersebut sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri bagi peserta didik yang tidak mampu meraih prestasi dalam bidang akademik. Sudah banyak tropi kejuaraan dan piagam penghargaan sebagai bukti prestasi non akademik yang diraih peserta didik SMP Negeri 8 Makassar.

Kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada baik yang bersifat formal maupun semi formal (diakui tetapi belum diberikan SK oleh Kepala Sekolah) bisa saja bertambah sesuai kebutuhan peserta didik atau dirasakan perlu oleh guru. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang cukup membantu peserta didik bermasalah adalah PIKER (Pusat Informasi Konseling Remaja). PIKER berada di bawah koordinasi guru BK beranggotakan peserta didik yang dianggap "bermasalah" atau dekat dengan "peserta didik bermasalah". Salah satu tujuannya adalah memudahkan koordinasi dan pengontrolan bagi guru BK dalam mengatasi peserta didik bermasalah. Ini adalah sebuah gagasan dari hasil diskusi guru BK yang cukup *brilian* sekaligus ditindaklanjuti dengan baik. Pada kesempatan wawancara dengan salah seorang peserta didik bernama CHR yang dianggap bermasalah oleh gurunya, ternyata adalah anggota PIKER.

c. Prasarana dan sarana SMP Negeri 8 Makassar

Bangunan SMP Negeri 8 Makassar berdiri di atas tanah seluas 10.490 m². Luas tanah untuk bangunan yaitu 7.250 m². Luas tanah pekarangan yaitu 3.240 m². Berarti

di SMP Negeri 8 Makassar memiliki ruang terbuka sebanyak 30,89%. Bila dibandingkan dengan ruang tertutup dengan persentase 60,11% maka dapat dirasakan bahwa SMP Negeri 8 Makassar ini sudah begitu padat dengan ruang tertutup. Ruang gerak bagi 1229 orang peserta didik pun menjadi semakin terbatas. Dari sisi positif memudahkan bagi guru untuk melakukan pengawasan bagi peserta didik namun dari sisi negatif sekolah justru menjadi semakin sesak. Padahal ditinjau dari segi fisik, usia peserta didik berada dalam kondisi fisik yang suka bergerak dan seperti tidak pernah mengalami rasa lelah. Mereka berlari, berkejaran, bermain bola dan gerakan-gerakan fisik lainnya. Begitu pun dari tinjauan kesehatan kebanyakan ruang tertutup kurang baik bagi kesehatan apalagi bagi kesehatan mata. Dengan kondisi seperti ini, maka penataan ruang perlu menjadi pertimbangan. Paling tidak untuk penambahan ruang tertutup berikutnya tidak lagi menutupi ruang terbuka yang masih tersisa. Keadaan bangun ruang SMP Negeri 8 Makassar seperti disajikan pada tabel 4.21. berikut ini.

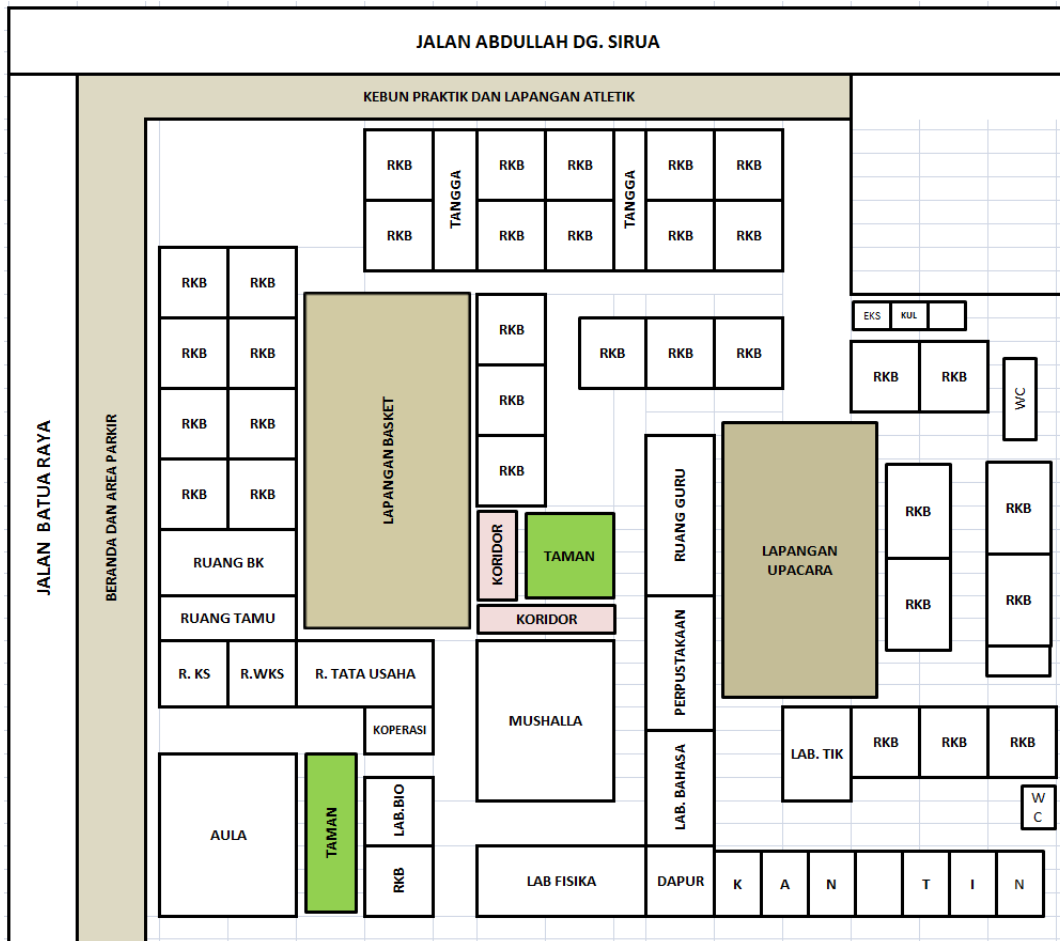
Tabel 4.21 Bangun Ruang SMP Negeri 8 Makassar (Juli 2015)

No.	Bangun Ruang	Banyaknya (Unit)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ruang Kelas Belajar	31	Permanen
2.	Ruang Kepala Sekolah	1	Permanen
3.	Ruang Guru	1	Permanen
4.	Ruang Tata Usaha	1	Permanen
5.	Ruang Perpustakaan	1	Permanen
6.	Ruang TIK	1	Permanen
7.	Ruang Lab. Fisika	1	Permanen

1	2	3	4
8.	Ruang Lab. Biologi	2	Permanen
9.	Ruang Lab. Bahasa	1	Permanen
10.	Ruang Aula	1	Permanen
11.	Ruang Praktek	1	Permanen
12.	Ruang Mushalla	1	Permanen
13.	Ruang Kantin	6	Permanen
14.	Ruang Ekskul	1	Permanen
15.	Ruang Koperasi/Toko	1	Permanen
16.	Ruang Dapur	1	Permanen
17.	Ruang Penjaga	1	Permanen
Jumlah		54	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Daftar bangun ruang sesuai tabel 4.21 menunjukkan bahwa prasarana SMP Negeri 8 Makassar sudah maksimal. Berarti yang perlu diupayakan adalah bagaimana ruangan tersebut dioptimalkan pemanfaatannya. Bangun ruang permanen (prasarana) yang ditampilkan berdasarkan tabel 4.21 di atas sudah dilengkapi dengan sarana, sehingga pemanfaatannya tinggal menyesuaikan. Semua bangunan dimanfaatkan berdasarkan fungsinya. Civitas akademika yang ada di SMP Negeri 8 Makassar mampu menggunakan fasilitas tersebut secara efektif. Keadaan demikian sebenarnya sudah melebihi standar prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana yang lengkap memungkinkan civitas akademika di SMP Negeri 8 Makassar dapat melakukan aktivitas dengan mudah atau bahkan lebih dari yang diperlukan. Banyaknya ruang yang dimanfaatkan di SMP Negeri 8 Makassar sebagaimana disajikan pada gambar 4.3. berikut ini.



Gambar 4.3 Denah/Site Plan SMP Negeri 8 Makassar
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Gambar 4.3 di atas semakin memperjelas bahwa SMP Negeri 8 Makassar dikelilingi oleh bangun ruang (ruang tertutup). Kepadatan bangunan ruang tertutup ini salah satu faktor ketidaknyamanan bagi setiap orang baru (tamu) yang datang ke lokasi sekolah. Kondisi ruang tertutup dapat dilihat pada sajian tabel 4.22. Meskipun demikian ketidaknyamanan ini ditutupi dengan kenyamanan penyambutan ketika berkunjung di SMP Negeri 8 Makassar. Mulai dari satpam sampai kepada kepala sekolah menyambut tamu dengan suasana yang bersahabat.

Tabel 4.22 Ruang Terbuka SMP Negeri 8 Makassar

No.	Ruang Terbuka	Banyaknya (Petak)	Keterangan
1.	Lapangan Upacara	1	Selebihnya
2.	Lapangan Basket	1	adalah
3.	Lapangan Atletik	1	halaman
4.	Lapangan Parkir	1	
5.	Taman	2	
6.	Kebun Praktek	1	
Jumlah		8	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Meskipun hanya sekitar 40% ruang terbuka, namun prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik sudah cukup terpenuhi. Hanya saja diperlukan kearifan dari civitas akademika terutama pihak pimpinan untuk mengelola ruang terbuka sesuai standar peruntukannya. Fasilitas yang telah disiapkan pihak sekolah ada juga yang bersifat khusus (tidak untuk umum). Fasilitas tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 4.23.

Tabel 4.23 Fasilitas (Prasarana dan Sarana) Khusus SMP Negeri 8 Makassar

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Ruang Kelas Akselerasi ber-AC	Prasarana/Sarana
2.	Komputer Tes Psikologi	Sarana
3.	Laboratorium Bahasa	Prasarana/Sarana
4.	Jaringan Internet	Sarana
5.	Gedung Serba Guna (Aula)	Prasarana
6.	Alat Peraga Multimedia dan Audiovisual	Sarana

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Disebut fasilitas khusus karena secara umum tidak semua sekolah memilikinya. Adanya fasilitas ini, SMP Negeri 8 Makassar memberikan kemudahan khususnya bagi guru untuk mengembangkan PBM (Proses Belajar Mengajar). Fasilitas yang tersedia seperti ini menginspirasi pula bagi guru untuk mengembangkan kreativitas pembelajaran. Guru dapat dengan mudah menerapkan sistem pembelajaran berbasis ICT (*Information and Communication Technologies*).

2. Budaya SMP Negeri 8 Makassar

Budaya mencerminkan kondisi nyata yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Budaya mencerminkan apa yang dilakukan, dan bukan apa yang berlaku. Budaya SMP Negeri 8 Makassar yang dimaksudkan adalah budaya yang dianut oleh SMP Negeri 8 Makassar sebagai sebuah organisasi. Budaya merupakan sistem nilai yang disepakati oleh setiap civitas akademika baik yang nampak secara fisik (*hard culture*) yang biasa disebut (*artefak*) maupun non fisik (*soft culture*) atau *non artefak*. Deskripsi budaya SMP Negeri 8 Makassar dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) bagian *artefak (hard culture)*, (2) bagian *non artefak (soft culture)*.

a. Artefak (*hard culture*) di SMP Negeri 8 Makassar

Artefak sebagai bagian dari suatu budaya menjadi bukti yang mudah dilihat sekaligus dinilai oleh setiap mata yang melihatnya. Ketika memasuki area SMP Negeri 8 Makassar maka semua yang dipandang oleh mata merupakan budaya *artefak*. Mulai dari bentuk pintu gerbang, pagar, pintu, ruang terbuka, ruang tertutup/bangunan (prasarana), penataan isi di dalam bangunan (sarana) dan sebagainya. Sebagai

konsekuensi dari deskripsi *artefak* yang ada di SMP Negeri 8 Makassar maka digambarkan mulai dari pintu gerbang sampai bagian *artefak* yang ada di dalam ruang-ruang bangunan. Pintu gerbang ini dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4 Pintu Gerbang SMP Negeri 8 Makassar
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

SMP Negeri 8 Makassar hanya menggunakan sistem satu pintu yaitu pintu gerbang, meskipun terdapat pintu lain tapi sengaja ditutup oleh pihak sekolah. Dari segi model pintu gerbang mengikuti model kebanyakan kantor pemerintah yang dibuat cukup besar dan permanen dengan atap ciri khas rumah Bugis-Makassar.

Pagar dibuat cukup tinggi dengan mengikuti model *non-minimalis* yaitu pagar besi dengan memadukan hiasan lengkung besi yang berfungsi sekaligus sebagai pengaman (tombak runcing). Pagar SMP Negeri 8 Makassar yang terdiri dari besi hanya separuh yang membentuk hurul L dan separuhnya lagi berupa pagar tembok tinggi. Pagar ini cukup sulit untuk dilalui oleh peserta didik dengan cara memanjat.

Halaman pertama yang dijumpai adalah jalanan tempat peserta didik lalu ketika masuk dan pulang dari sekolah. Halaman ini sekaligus berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan guru, pegawai, dan tamu-tamu. Halaman multi guna tersebut disajikan pada gambar 4.5 berikut ini.



Gambar 4.5 Jalanan Masuk Sekaligus Tempat Parkir Kendaraan
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Artefak lainnya adalah dinding-dinding ”berbicara”. Dinding-dinding berbicara adalah tulisan-tulisan yang dapat dilihat dan dibaca setiap saat melewatinya. Dinding berbicara ini sangat dianjurkan dalam teori *quantum learning* (pembelajaran kuantum).

Banyak tulisan yang dipajang di dinding tembok SMP Negeri 8 Makassar. Pesan dari dinding berbicara ini begitu beragam dan bermakna pendidikan. Ada yang berupa ajakan berbuat baik. Ada tulisan memberi motivasi. Ada tulisan bernuansa tekad. Ada tulisan yang memberi inspirasi. Ada pula tulisan yang mengingatkan. Tulisan-tulisan ini sangat jelas terbaca dari jarak yang wajar. Salah satu tulisan penyambutan dapat dilihat pada sajian gambar 4.6 berikut ini.



Gambar 4.6 Tulisan Penyambutan Peserta Didik
Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Tulisan ini merupakan penyambutan secara khusus kepada peserta didik, terutama peserta didik baru. Peserta didik baru merupakan "keluarga baru" yang perlu disambut gembira. Penyambutan ini dapat memberikan efek positif. Ajakan membudayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dijumpai saat memasuki ruang untuk tamu yang datang, seperti terlihat pada gambar 4.7. berikut ini.



Gambar 4.7 Ajakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Penyambutan dengan senyum dan sapa sudah menjadi budaya di SMP Negeri 8 Makassar pada saat menyambut tamu-tamu yang datang silih berganti setiap hari kerja.

Tulisan-tulisan dinding berisi ajakan (perintah dengan cara lemah-lembut) lainnya seperti tertera pada gambar 4.8 berikut ini.



Gambar 4.8 Ajakan Sekaligus Motivasi
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Selain itu masih ada beberapa tulisan sebagai bentuk kerjasama (kemitraan) sekolah dengan pemerintah kota. Pemerintah kota yang telah kurang lebih dua tahun berkuasa di Makassar memiliki program unggulan yaitu kebersihan kota. Pendidikan di sekolah dianggap sebagai salah satu ujung tombak menuju tercapainya program tersebut. SMP Negeri 8 Makassar menyadari diri sebagai bagian dari sistem yang dibangun oleh pemerintah kota. SMP Negeri 8 Makassar menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Berikut ini adalah tulisan yang menyatakan tekad dari civitas akademika SMP Negeri 8 Makassar terpampang di tempat penyambutan tamu (ruang kedatangan tamu).

Tulisan dukungan sekaligus promosi dari program pemerintah ini menyemangati para peserta didik untuk selalu mengingat dan melakukannya. Tulisan tersebut terpampang dengan jelas dan cukup menyolok sehingga menarik perhatian. Pemandangan ini seperti terlihat pada gambar 4.9. beriku ini.



Gambar 4.9 Tulisan Dukungan Sekolah terhadap Program Pemerintah Kota
Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Tulisan (dinding berbicara) yang paling penting adalah cita-cita dari sekolah itu sendiri. Cita-cita atau mimpi atau impian bagi sebuah lembaga seperti sekolah disebut dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Cita-cita tertuang dalam tulisan besar pada dinding tembok sekolah, seperti yang terlihat pada gambar 4.10 berikut ini.



Gambar 4.10 Visi dan Misi SMP Negeri 8 Makassar
Sumber: Hasil olahan data primer 2015

SMP Negeri 8 Makassar ditinjau dari sisi *artefak* budaya telah melakukan tindakan yang benar. Visi dan Misi sekolah dipajang di tempat terbuka yang cukup

mudah dibaca bagi siapa saja yang melewatinya. Dipajang di tempat umum untuk senantiasa mengingatkan pada warga sekolah bahwa visi dan misi inilah setiap hari diperjuangkan. Hanya saja menurut salah satu informan (PJ) mengatakan bahwa:

”visi dan misi yang ditulis besar di dinding tembok luar kelas tersebut sudah mengalami revisi, rumusan visi dan misi yang benar adalah yang tertera di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan. (wawancara, Sabtu 12 September 2015, pukul 11.20 wita).

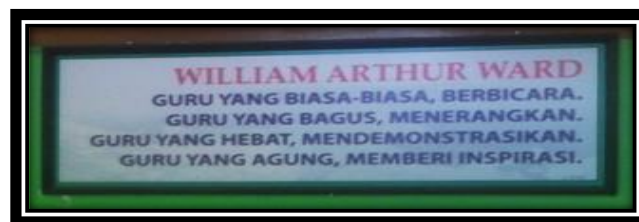
Artefak yang lain di SMP Negeri 8 Makassar adalah model setiap bangunan yang mengikuti gaya klasik. Gaya klasik bangunan sekolah di Sulawesi Selatan. Model bangunan sekolah yang mengingatkan pada model rumah suku Bugis-Makassar. Sedangkan penataan letak satu bangunan dengan bangunan lainnya dibuat sedemikian sehingga kelihatan saling berdekatan. Tentu saja menguntungkan bagi pembina sekolah untuk menjangkau baik dalam pandangan mata maupun untuk mendatanginya.

Penataan *interior* di SMP Negeri 8 Makassar dibedakan menjadi empat bagian yaitu: (1) ruangan kelas belajar/laboratorium, (2) ruangan guru, (3) ruangan tata usaha/BK, dan (4) ruangan kepala sekolah. Pembagian ini didasarkan karena adanya perbedaan yang menandakan keunikan masing-masing ruangan. Walaupun ada hal-hal yang menunjukkan persamaan-persamaan seperti, warna dinding dan pajangan yang terdapat pada dinding ruangan.

Pada ruang-ruang kelas dan laboratorium, sarana seperti meja dan kursi pengaturannya dibentuk secara matriks (menurut baris dan kolom). Meja guru berada di depan meja peserta didik berdekatan sudut ruangan dan jendela. Tempat duduk peserta didik laki-laki dan perempuan diatur secara terpisah. Adapun pajangan pada

dinding ruangan terdiri dari lembaran daftar pembagian tugas kebersihan peserta didik, lembaran daftar struktur organisasi kelas, lembaran daftar roster mata pelajaran, lembaran 7K, foto Presiden dan Wakil Presiden, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Pajangan lain yang ada di laboratorium seperti; tata tertib laboratorium, foto-foto ilmuwan (penemu di bidang keilmuan).

Pada ruang guru ditata menyesuaikan dengan daya tampung. Jumlah guru yang cukup banyak kelihatan dari padatnya penataan meja guru. Penataan meja seperti itu memudahkan guru untuk berkomunikasi satu sama lain. Terdapat sekat antara guru yang diberi tugas tambahan (urusan kurikulum, urusan sarana, dan urusan kesiswaan) dengan guru lainnya. Sebagai penghubung informasi di dalam ruang guru terdapat papan informasi yang setiap waktu berubah. Pada dinding dalam dipajang foto Presiden/Wakil Presiden, papan bicara, dan hiasan dinding. Sedangkan dinding bagian luar terpampang pajangan kata-kata inspiratif memotivasi seperti gambar 4.11. berikut.



Gambar 4.11 Tulisan inspiratif dan motivasi untuk guru
Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Pada ruang tata usaha/ruang BK (Bimbingan dan Konseling) meja kerja ditata secara terbuka. Ruang kerja kepala tata usaha dengan pegawai lainnya tidak memiliki sekat sehingga semua bisa saling melihat begitu juga ruang BK. Pimpinan dapat mengontrol bawahan dengan mudah begitu pula sebaliknya. Penataan meja kerja dibuat

mengelilingi ruang tamu yang diisi dengan kursi dan meja tamu. Pada dinding bagian dalam dipajang foto gambar Presiden/Wakil Presiden, Garuda Pancasila begitu juga dipajang papan bicara penting (struktur organisasi, papan potensi pegawai) untuk mengingatkan pegawai sekaligus informasi untuk setiap orang/tamu yang masuk. Pajangan untuk dinding bagian luar adalah papan bicara yang berkaitan dengan program dan penggunaan dana BOS dan dana Gratis. Khusus ruangan BK dilengkapi dengan satu unit komputer yang dapat digunakan psikotest bagi siapa saja.

Ruangan kepala sekolah letaknya tersendiri. Ukurannya cukup untuk; (1) meja kerja kepala sekolah, (2) kursi/meja tamu, dan (3) satu meja besar. Ketiga sarana ini letaknya berdekatan sehingga orang yang duduk pada salah satunya dapat berkomunikasi secara wajar. Pajangan pada dinding bagian dalam adalah gambar foto-foto penting. Ada gambar foto Presiden/Wakil Presiden, Garuda Pancasila, gambar foto kepala sekolah dan mantan kepala SMP Negeri 8 Makassar. Ada satu pajangan yang menarik yaitu pajangan inspiratif berupa sertifikat penghargaan nasional untuk prestasi kepala sekolah. Selain pajangan di dinding, pada lemari diletakkan berbagai macam tropi/piala kejuaraan dari capaian prestasi peserta didik. Pajangan di luar ruangan adalah hasil karya-karya seni dan keterampilan peserta didik serta papan potensi guru.

Artefak juga ada dalam bentuk dokumen-dokumen penting. Dokumen penting di sekolah banyak macamnya. Penggambaran *artefak* bentuk dokumen pada tulisan ini dibatasi hanya dua, yaitu; (1) tata tertib sekolah dan (2) rencana kerja tahunan (RKT).

Tata tertib sekolah adalah produk sekolah yang harus disetujui oleh pihak peserta didik dan orangtuanya. Pembuatan tata tertib tidak melibatkan pihak orangtua dan

masyarakat. Meskipun demikian tata tertib sekolah dirancang dengan memperhatikan kemaslahatan peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam tata tertib sekolah pada umumnya adalah nilai-nilai luhur yang bisa diterima dengan baik oleh siapa saja. Orangtua hanya membaca dan menandatangani sebagai tanda persetujuan. Tata tertib sekolah dijadikan salah satu syarat penerimaan peserta didik baru atau pindahan. Pada naskah tata tertib terdapat tiga unsur penandatanganan tetapi mewakili empat unsur. Keempat unsur itu adalah: (1) Pemerintah (Kepala Sekolah), (2) Sekolah (Guru), (3) Orangtua (Komite Sekolah), dan (3) Masyarakat (Komite Sekolah).

b. Budaya *non artefak* (*soft culture*) SMP Negeri 8 Makassar

Budaya *non artefak* yang dimaksudkan adalah semua yang dilakukan dalam bentuk perilaku atau sikap yang telah disepakati di SMP Negeri 8 Makassar. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan maka budaya *non artefak* dibagi menjadi empat bagian. Bagian-bagian itu adalah: (a) perilaku peserta didik, (b) perilaku guru, (c) perilaku kepala sekolah, dan (d) interaksi.

Sebelum diuraikan tentang keempat budaya *non artefak* di atas, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah merupakan ruh yang menjiwai keempat unsur tersebut (perilaku peserta didik, perilaku guru, perilaku kepala sekolah, dan interaksi). Visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah menjadi pijakan terjadinya sistem nilai yang disepakati di sekolah (budaya sekolah). Visi SMP Negeri 8 Makassar berbunyi: **Menjadi Sekolah yang**

Kompetitif, Berprestasi, Berwawasan Kebangsaan Berdasarkan Imtaq dan Iptekso Serta Bebas Lingkungan.

Visi adalah mimpi yang hendak diwujudkan oleh setiap orang, kelompok orang, organisasi, atau lembaga. Visi merupakan pembeda yang bersifat unik (berbeda dengan yang lain) sebagai ciri khas dari pemiliknya. Visi merupakan impian jangka panjang yang membutuhkan perjuangan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya, visi tidak boleh asal berganti untuk setiap pergantian jabatan pimpinan karena pada umumnya visi dibuat oleh pendiri atau perintis bersamaan dengan didirikannya suatu lembaga. Kalaupun ada yang perlu direvisi dari visi maka tidak boleh mengubah substansi. Visi dibuat dengan singkat namun penuh dengan interpretasi bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itulah diperlukan uraian operasional yang disebut dengan misi. Misi SMP Negeri 8 Makassar adalah:

1. Mengembangkan pembelajaran sesuai dengan standar isi berdasarkan imtaq
2. Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan olah raga

Turunan dari misi sekolah adalah tujuan sekolah. Pada tujuan sekolah semakin dipertegas apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan SMP Negeri 8 Makassar adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
2. Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global,
3. Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan Komite Sekolah) untuk bersama-sama

melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing,

4. Meningkatkan program ekstrakurikuler agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri peserta didik,
5. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jumlah tamatan yang melanjutkan ke perguruan tinggi,
6. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah,
7. Meningkatkan kualitas semua sumber daya manusia baik guru, karyawan, dan peserta didik yang dapat berkompetisi baik lokal maupun global.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah diuraikan di atas maka untuk mencapainya perlu ditetapkan sasaran setiap tahun pelajaran. Sasaran SMP Negeri 8 Makassar Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan keterampilan seluruh warga sekolah terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan implementasinya dalam proses pendidikan di sekolah,
2. Peningkatan perolehan hasil belajar peserta didik, baik untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran maupun perolehan nilai Ujian Nasional (UN) sehingga mencapai minimal 75%,

3. Peningkatan disiplin seluruh warga sekolah (guru, tata usaha dan karyawan lainnya serta peserta didik) ditandai dengan terciptanya 7K dan kehadiran minimal 95%,
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan orangtua baik dalam dukungan moral maupun material dengan pencapaian kehadiran pada rapat komite sekolah dan kemampuan membayar sumbangan masing-masing mencapai minimal 90%,
5. Penambahan sarana dan prasarana terutama pemenuhan IT sehingga minimal 75% ruang dilengkapi perangkat IT yang terhubung dengan jaringan internet,
6. Peningkatan proses pembelajaran melalui pembelajaran berbasis IT minimal untuk 8 mata pelajaran,
7. Peningkatan mutu lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi sehingga mencapai minimal 75%,
8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan SMP, PT, Dinas/Instansi terkait dan dunia usaha industri dalam bentuk kesepakatan tertulis (MoU).

Baik visi, misi, tujuan, maupun sasaran sekolah idealnya dijadikan sebagai budaya sekolah. Semua uraian tentang empat unsur (visi, misi, tujuan, sasaran) ini sebagian besar telah menjadi budaya di SMP Negeri 8 Makassar. Kegiatan akademik atau bidang kurikuler sebagai inti dari sebuah sekolah sudah menjadi kegiatan rutinitas mendominasi sekitar 90%. Adapun perubahan yang terjadi hanyalah merupakan perubahan target sasaran baru setiap tahun dalam rangka pencapaian atau peningkatan pencapaian dari visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan budaya *non artefak (soft culture)* dibagi sesuai pembagian sebelumnya.

1) Perilaku peserta didik

Masa sekolah di tingkat SMP secara normal paling lama tiga tahun. Waktu selama satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun bukanlah waktu yang memadai untuk terbentuknya sebuah budaya baru. Adapun yang dapat membantu percepatan terbentuknya budaya baru adalah kesamaan sistem nilai yang dibawa oleh peserta didik baik dari rumahnya (didikan orangtua) ataupun dari sekolah sebelumnya (SD).

Kebijakan Pemerintah Kota hampir dua tahun terakhir (sejak tahun 2014) sangat membantu percepatan adaptasi budaya di setiap sekolah menengah (SMP, SMA, dan SMK). Pemerintah Kota membuat prioritas penerimaan peserta didik baru berdasarkan pemetaan wilayah. Seorang calon peserta didik yang mendaftar pada sekolah berdekatan dengan rumahnya diberi peluang besar untuk lulus (karena poinnya yang tinggi). Calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan lokasi SMP Negeri 8 Makassar tentu lebih banyak mengenal kebiasaan yang ada di dalam sekolah. Mereka dapat mengenal melalui pergaulan dan apa yang dilihatnya selama berada di tempat tinggalnya.

Hasil wawancara, pengamatan, dan studi dokumen selama berada di SMP Negeri 8 Makassar telah memberikan kesan yang banyak. Perilaku peserta didik secara umum (mayoritas) sudah menjadi suatu budaya (dilakukan). Perilaku peserta didik dibagi menjadi tiga bagian yaitu; (1) perilaku peserta didik terhadap tata tertib sekolah, (2) perilaku peserta didik terhadap guru, dan (3) perilaku peserta didik terhadap sesama peserta didik.

a) Perilaku peserta didik terhadap tata tertib sekolah

Tata tertib sekolah sudah menjadi pengenalan awal bagi setiap peserta didik yang baru masuk di SMP Negeri 8 Makassar. Sudah menjadi kewajiban bagi peserta didik dan orangtua/walinya untuk menandatangani tata tertib sekolah pada saat setelah mereka diwawancarai oleh guru. Penguatan persetujuan tata tertib sekolah ditandai dengan pembubuhan tanda tangan bersama di atas kertas bermeterai. Maka sejak saat itu akad kesepakatan orangtua, peserta didik dan pihak sekolah dimulai. Mereka kemudian menjalani hari-hari sekolah dengan sebuah ikatan yang dibangun secara sadar tanpa ancaman, tanpa paksaan dan bertekad mewujudkan sosok peserta didik yang kelak dapat menjadi tumpuan harapan bagi semua.

Kehadiran peserta didik sesuai aturan jadwal sudah menjadi ciri standar sekolah yang baik. SMP Negeri 8 Makassar termasuk salah satunya. Setelah pukul 7.30 wita masing-masing peserta didik sudah berada di dalam ruang kelas atau di lapangan olah raga bagi yang olah raga. Proses kegiatan belajar mengajar berlangsung secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Waktu belajar untuk belajar dan waktu istirahat untuk beristirahat, meskipun ada peserta didik yang "nakal" dan mencoba keluar pada waktu terlarang. Ketika ditanyakan kepada pemilik kantin (PK), apakah pada saat jam pelajaran berlangsung ada peserta didik yang berbelanja di kantin? Pemilik kantin menjawab bahwa:

"Hal itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, anak-anak bisa datang kapan saja, tapi sekarang ini tidak lagi karena kami hanya dibolehkan melayani pada saat jam istirahat atau saat pulang." (Wawancara PK, Sabtu 25/10/2015).

Berdasarkan pengamatan bahwa untuk melayani 1229 orang peserta didik, SMP Negeri 8 Makassar menyiapkan sebanyak enam kantin dan dua toko. Sedangkan untuk menyesuaikan durasi waktu istirahat pemilik kantin mengantisipasi dengan menyiapkan makanan dalam wadah "siap ambil" sehingga begitu bel istirahat berbunyi, maka peserta didik dapat dengan cepat menikmati makanan tanpa menunggu antrian. Terciptanya suasana seperti ini juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran guru yang mengajar. Apabila guru bertanggung jawab penuh atas beban tugas yang diberikan kepadanya maka peserta didik juga akan mudah diarahkan.

Selain jadwal belajar dan jadwal istirahat, tata tertib juga mengatur tentang aturan berpakaian dan berpenampilan bagi peserta didik. Dari ujung kaki sampai ujung rambut telah diatur dalam tata tertib. Pihak sekolah mengeluarkan kriteria tentang sepatu, kaos kaki, warna dan model celana, warna, model, dan kelengkapan atribut baju, asesoris yang boleh dan yang terlarang, sampai pada panjang rambut bagi peserta didik laki-laki dan model rambut/kerudung bagi peserta didik perempuan. Peserta didik di SMP Negeri 8 Makassar dalam hal ini selalu dipantau oleh semua pihak (mulai dari Satpam sampai Kepala Sekolah) mulai dari mereka datang sampai waktu pulang ke rumah. Rutinitas pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah membuat peserta didik sangat jarang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik telah memenuhi aturan dengan sebaik-baiknya. Mereka merasa tidak terbebani dengan batasan-batasan yang ditoleransi oleh pihak sekolah. Peserta didik sudah merasa senang dengan aturan yang

diberlakukan dan selalu merasa diawasi oleh guru-guru mereka. Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan:

”Kami menjemput peserta didik sambil salaman bahkan cium tangan pada pagi hari banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang kami lakukan adalah memberikan teguran jika di antara mereka ada yang berpenampilan tidak sesuai dengan tata tertib.” (Wawancara HM, Sabtu 29 Agustus 2015).

b) Perilaku peserta didik terhadap guru

Peserta didik sangat memperhatikan gurunya. Pemandangan pagi hari awal sekolah dimulai begitu mengharukan. Peserta didik diantar oleh orangtua masing-masing ditandai ”salaman dan cium tangan” sebagai pelepasan singkat dari orangtua. Adapun guru yang sudah datang di sekolah menyambut kedatangan peserta didik ditandai ”salaman dan cium tangan” juga sebagai tanda penerimaan. Pemandangan ini tak ubahnya seperti acara lepas sambut. Orangtua melepaskan anaknya dan guru menyambut muridnya. Pemandangan ini disajikan pada gambar 4.12 berikut ini.



Gambar 4.12 ”Acara Lepas Sambut Peserta Didik” Orangtua dengan Guru
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Pemandangan seperti gambar 4.12 di atas setiap hari akan dijumpai setiap pagi sebelum pukul 07.30 wita (waktu tanda pelajaran I dimulai). Bahkan menurut penjelasan kepala sekolah acara penjemputan peserta didik lebih ramai lagi pada hari-

hari selain hari Sabtu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu merupakan hari membersihkan (Sabtu Bersih) sehingga banyak guru datang tidak bersamaan. Pernyataan kepala sekolah ternyata memang terbukti bahwa penjemputan peserta didik lebih ramai di luar hari Sabtu, seperti pada gambar 4.13 berikut ini.



Gambar 4.13 Guru Ramai-ramai Menyambut Peserta Didik
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

c) Perilaku peserta didik terhadap sesama peserta didik

Pergaulan sesama peserta didik merupakan miniatur pergaulan sosial. Mereka (peserta didik) berbaur dalam kondisi perbedaan latar belakang yang cukup beragam. Perbedaan suku, perbedaan keluarga, perbedaan sifat, perbedaan keinginan dan perbedaan kegemaran. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap satu dalam sistem. Mereka diikat oleh sistem yang sama yakni sistem yang berlaku dalam lingkungan SMP Negeri 8 Makassar. Sistem itu bernama tata krama dan tata tertib SMP Negeri 8 Makassar.

Pada dasarnya apa yang terjadi di SMP Negeri 8 Makassar juga ada di sekolah lain. Sikap peserta didik mulai dari yang buruk/mengecewakan sampai pada sikap yang baik/membanggakan guru maupun orangtua. Hal yang membedakan SMP Negeri 8 Makassar dengan sekolah lain adalah intensitas kejadian. Kejadian buruk yang ada di SMP Negeri 8 Makassar cenderung lebih sedikit dengan sekolah lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak internal sekolah maupun dengan pihak eksternal (orangtua, masyarakat, dan pemerintah).

Pengalaman dalam melakukan wawancara dan observasi terhadap peserta didik telah memberikan kesan bahwa peserta didik yang "bermasalah" di SMP Negeri 8 Makassar jumlahnya hanya sedikit. Hubungan antara sesama peserta didik berjalan dengan baik dan harmonis. Senyum keceriaan, canda dan tawa, bercakap secara berkelompok, dan gerakan-gerakan yang tidak kenal lelah dari peserta didik merupakan ciri keseharian yang dijumpai. Tata krama dan tata tertib sekolah yang dibarengi dengan sanksi telah mengubah dari aturan yang berlaku menjadi aturan yang dilakukan (sudah menjadi budaya).

Jika muncul masalah antar peserta didik maka pihak sekolah (guru) merespon dengan cepat. Adanya tindakan responsif dari pihak sekolah ketika terjadi masalah antar peserta didik menjadi kunci penyelesaian sebelum masalah tersebut menjadi masalah besar. Guru (terutama guru BK) dengan sigap mengambil langkah-langkah taktis untuk menelusuri penyebab utamanya. Setelah itu, mereka melibatkan komponen yang dianggap memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah, seperti orangtua/wali dari peserta didik. Guru, orangtua, atau masyarakat (lembaga

masyarakat) melakukan komunikasi seperlunya untuk menuntaskan masalah antar peserta didik yang muncul. Sebagai contoh kasus peserta didik yang melakukan pemalakan terhadap peserta didik lainnya. Wali Kelas, guru BK menghadirkan semua yang terkait dengan peristiwa tersebut yaitu; korban, pelaku, saksi, dan orangtua pelaku melakukan komunikasi, seperti yang disajikan pada gambar 4.14. berikut ini.



Gambar 4.14 Penyelesaian Masalah Peserta Didik dengan Komunikasi
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

2) Perilaku guru

Guru adalah tokoh sentral yang menjadi pemeran utama fungsi-fungsi pendidikan di setiap sekolah. Kesuksesan terlaksananya fungsi pendidikan bergantung pada totalitas guru memainkan perannya. Totalitas hanya bisa terwujud jika guru memiliki dedikasi terhadap misi pendidikan. Guru yang berdedikasi pastilah mencintai profesinya. Sehingga semua komponen yang berkaitan dengan profesinya menjadikan ia merasa senang dan bahagia. Mereka (guru) senang berjumpa dengan peserta didik, bertemu dengan teman sejawat, menikmati saat-saat mengajar di dalam kelas,

senantiasa memacu diri untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan senantiasa mencari jalan keluar apabila menghadapi masalah-masalah pendidikan.

Berdasarkan usia guru di SMP Negeri 8 Makassar merupakan kombinasi antara guru senior (tua) dan guru muda. Berdasarkan pangkat dan golongan menunjukkan bahwa guru senior lebih banyak daripada guru yunior. Bahkan di antara semua guru masih ada satu orang yang merupakan guru pembuka SMP Negeri 8 Makassar. Beliau adalah saksi sejarah bagaimana SMP Negeri 8 Makassar mengalami masa sulit dan masa jaya. Masa jaya SMP Negeri 8 Makassar masih ada hingga saat ini, sehingga pewarisan nilai-nilai kejayaan oleh guru senior kepada guru yang lebih yunior masih berlangsung.

Secara alamiah guru di SMP Negeri 8 Makassar tetap konsisten pada sikap mempertahankan nama baik sekolah. Mereka menyadari bahwa merebut predikat sebagai sekolah yang dipavoritkan bukan hal yang mudah. Kesadaran ini memacu segenap civitas akademika untuk selalu berada di garis depan ketika ada kebijakan baru dari pemerintah, seperti K13 (Kurikulum 2013). SMP Negeri 8 Makassar meskipun tidak termasuk bagian dari *pilot proyek* K13, namun tetap bertahan menerapkannya. Sementara sekolah lain ramai-ramai kembali pada kurikulum 2006. Tentu saja bukan tanpa alasan, guru SMP Negeri 8 Makassar percaya diri dengan pilihan tersebut karena memiliki kemampuan untuk itu.

Perilaku lain yang menarik dibahas dari guru SMP Negeri 8 Makassar adalah kemampuan beradaptasi dengan lompatan ide pembentukan kelas BL (bilingual) dan kelas *akselerasi* 'percepatan'. Kedua ide ini menuntut kesiapan tenaga guru yang

memiliki kemampuan dan kemauan lebih. Keberanian dalam mengambil sikap dari keputusan yang berat, memang patut diapresiasi oleh setiap pemangku kepentingan. Tidaklah mengherankan jika pihak pemerintah kota, masyarakat, dan orangtua memberikan dukungan baik finansial maupun serta kebijakan.

Keberagaman kegiatan ekstrakurikuler (tercatat sebanyak 12 organisasi) menjadi ciri bahwa guru juga rela meluangkan waktunya untuk melakukan pembinaan selain kegiatan kurikuler. Sekalipun frekuensi kegiatan tidak sepadat dengan kegiatan kurikuler, namun kegiatan ekstrakurikuler menuntut pengabdian yang tulus. Meluangkan waktu di luar jam resmi harus dilatarbelakangi koordinasi dengan keluarga guru bersangkutan, peserta didik, kepala sekolah, dan yang terpenting adalah orangtua peserta didik sendiri. Selain itu, kesiapan mendapatkan resiko seperti keberatan dari pihak orangtua peserta didik, protes dari masyarakat, teguran dari pemerintah kota senantiasa harus diantisipasi. Intinya adalah guru harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya.

3) Perilaku kepala sekolah

Kompetensi kepala sekolah menurut Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2010 adalah: pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi yang disebutkan di atas menjadi syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Bila dimaknai lebih detail seorang kepala sekolah harus: (1) memiliki pengetahuan dalam hal kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan sikap sosial, (2) memiliki sikap dalam hal

kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan sikap sosial, dan (3) memiliki keterampilan dalam hal kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan sikap sosial. Tiga kemampuan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan satu rangkaian yang tidak boleh terpisah jika seorang kepala sekolah ingin sukses dalam melaksanakan tugasnya.

SMP Negeri 8 Makassar terdapat sebuah sertifikat penghargaan nasional bergengsi yang diraih oleh kepala sekolah. Sertifikat itu bernama *Indonesian Awards of Education 2015* sebagai penghargaan bagi tokoh-tokoh yang berhasil dalam bidang khusus di antaranya bidang pendidikan. Meskipun tidak ditanyakan, cukuplah sertifikat itu menjadi bukti bahwa kepala sekolah berhasil memimpin SMP Negeri 8 Makassar.

Menjelaskan secara detail tentang perilaku kepala sekolah SMP Negeri 8 Makassar dibagi menjadi empat bagian. Empat bagian tersebut adalah: (1) kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, (2) kepala sekolah terhadap peserta didik, (3) kepala sekolah kepada bawahain, dan (4) kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah.

a) Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan

Hasil studi dokumen diperoleh informasi penting tentang kepala sekolah. Ada dua dokumen penting yang diambil sebagai keputusan besar dan ditandatangani oleh kepala sekolah yakni: (a) tata krama dan tata tertib sekolah, dan (b) RKT (Rencana Kerja Tahunan) tahun 2014/2015. Kedua dokumen ini menjadi acuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat memperhatikan apa yang menjadi program sekolah. Kebijakan untuk melibatkan semua civitas akademika terlihat dari banyaknya papan bicara yang tertera di tempat-tempat strategis dalam lingkungan sekolah. Papan bicara ini senantiasa mengingatkan semua warga sekolah bahwa "ini adalah tujuan yang hendak kita capai bersama".

Berdasarkan teori budaya organisasi, pemimpin adalah pembuat atau perekayasa budaya. Pembuat budaya biasanya hanya terjadi bagi pemimpin yang merintis suatu organisasi. Sedangkan perekayasa bisa saja dilakukan oleh semua pemimpin organisasi baik yang merintis atau pun yang hanya melanjutkan. Demikian pula kepala SMP Negeri 8 Makassar yang sementara ini menjabat (2015) tentulah lebih banyak berfungsi sebagai perekayasa budaya yang telah dibuat oleh kepala sekolah sebelumnya. Sebagai perekayasa budaya di SMP Negeri 8 Makassar, kepala sekolah dituntut untuk pandai mengadopsi atau mengadaptasi situasi dan kondisi internal maupun eksternal.

Apa yang dialami dan dirasakan oleh semua warga sekolah saat ini merupakan hasil dari kepemimpinan kepala sekolah dari awal hingga sekarang. Kemampuan kepala sekolah mengadopsi dan mengadaptasi ide-ide, inovasi maupun perubahan yang terjadi patut diapresiasi sebagai suatu tindakan yang cerdas dan berani. Cerdas dalam pengertian bahwa keputusan-keputusan yang diterapkan di sekolah merupakan hal yang perlu, mendesak dan memiliki manfaat besar. Sebagai contoh adalah penerapan kurikulum 2013 (K13) yang menuai banyak keluhan bahkan kontroversi. Kepala SMP Negeri 8 Makassar justru memutuskan tetap bertahan menerapkan K13 dengan segala konsekuensi yang harus diterima. Langkah cerdas belumlah cukup jika pihak kepala

sekolah sebagai top manajer tidak memiliki keberanian menerima resiko sebagai konsekuensi sebuah keputusan.

b) Kepala sekolah terhadap peserta didik

Sebagian telah diuraikan di atas tentang perilaku kepala sekolah terhadap peserta didik. Kepala sekolah selalu menjadi pelopor pembinaan peserta didik di sekolah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa begitu kepala sekolah sampai di lingkungan halaman sekolah beliau langsung turun dari kendaraan kemudian berdiri menyambut kedatangan peserta didik, seperti yang tersaji pada gambar 4.15. di bawah ini.



Gambar 4.15 Kepala Sekolah Menyalami Peserta Didik Satu Persatu
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Kedekatan emosional kepala sekolah dengan peserta didik perlu diapresiasi. Ini merupakan gambaran kerelaan seorang "bapak" menyambut anak-anaknya dengan perhatian dan kasih sayang. Tidak diragukan lagi akan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa peserta didik. Bukankah selama ini yang menjadi keluhan anak-anak adalah perhatian yang kurang? Tidak sedikit anak yang bermasalah

merupakan akibat tidak adanya perhatian yang cukup dari orangtuanya. Kedekatan seperti ini menurut kepala sekolah menimbulkan perasaan dihargai dan perasaan dicintai bagi peserta didik. Peserta didik merasakan bahwa dirinya memiliki nilai dan arti yang besar sehingga mereka tidak merasa rendah diri dalam berinteraksi di dalam lingkungan sekolah.

Imbas dari kedekatan emosional seperti ini adalah peserta didik dapat berkomunikasi dengan kepala sekolah (guru) tanpa perasaan takut. Masalah yang dialami oleh peserta didik dapat diungkapkan secara apa adanya. Guru akan menjadi tempat mencurahkan perasaan susah maupun senang dari peserta didiknya. Guru akan menjadi sumber penyelesaian masalah bagi peserta didik di sekolah.

Imbas lain yang cukup penting dari perilaku kepala sekolah terhadap peserta didik adalah munculnya dampak pengiring bagi guru. Guru-guru pun tanpa dikomando melakukan seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah. Saat wawancara dilakukan kepala sekolah ditanya "apakah salam-salaman seperti ini setiap hari pak?" Kepala sekolah menjawab:

"Ini kebetulan hari sabtu, jadi tidak banyak guru datang bersamaan. Seandainya bapak datang di hari lain maka akan terlihat begitu panjang barisan guru-guru menyalami anak-anak." (Hasil wawancara HM, Sabtu 29/8/2015, 08.15 wita).

Hubungan kasih sayang dengan cara seperti ini amat berpengaruh pada kontak emosional peserta didik dan guru. Peserta didik lebih mudah diajak berkomunikasi sehingga berimplikasi pada mudahnya mereka diarahkan. Pendidikan bisa berlaku secara efektif bila pendidik dan objek didik terjalin hubungan yang akrab.

c) Kepala sekolah terhadap bawahan

Bawahan yang dimaksud adalah guru dan pegawai. Kesuksesan kepala sekolah dalam memimpin sangat dipengaruhi oleh keberadaan dukungan guru dan pegawai. Dua komponen (guru dan pegawai) ini adalah mitra utama bagi kepala sekolah yang mesti mendapat perhatian khusus. Bagaimana perilaku kepala sekolah terhadap bawahannya?

Terhadap guru dan pegawai, perilaku kepala sekolah begitu *fleksibel* tergantung tuntutan situasi dan kondisi. Ada canda dan tawa pada saat senggang, bergembira dan bersantai. Ada ketegasan pada saat membutuhkan ketegasan. Ada keseriusan ketika sekolah menuntut keseriusan. Ada pula kearifan dan toleransi ketika menyangkut perkara persaudaraan dan kekeluargaan. Ada banyak hal yang mesti disikapi berbeda oleh kepala sekolah. Namun yang pasti adalah, kepala sekolah mampu menyikapi dengan pendekatan profesional bernuansa kekeluargaan.

Ketika ada guru atau pegawai mengalami masalah keluarga, kepala sekolah berempati dan menyikapi dengan sikap yang bijaksana. Sebagai pimpinan berupaya menyelami apa masalahnya, apa yang menjadi penyebabnya, bagaimana mencari alternatif penyelesaian, kemudian menawarkan solusi terbaik.

Ketika ada guru yang ingin melanjutkan pendidikan, kepala sekolah memberikan dukungan semampunya. Guru diberikan kesempatan sebaik-baiknya, membantu dalam hal meringankan tugas-tugas mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah senantiasa memaklumi guru tersebut bila ada tugas-tugasnya sedikit terganggu atau terlalaikan.

Pada saat ada kegiatan sekolah berkaitan dengan pihak eksternal (orangtua atau lembaga masyarakat) maka kepala sekolah sangat berhati-hati dan bertindak tegas kepada guru dan pegawai. Kepala sekolah tidak menginginkan pihak eksternal dikecewakan hanya karena kelalaian yang terjadi di antara guru ataupun pegawai. Itulah sebabnya ketika menjelang pembagian rapor ulangan tengah semester dilakukan tepat waktu meskipun sekitar 1229 peserta didik harus diperiksa hasil ulangannya secara keseluruhan. Mengantisipasi undangan orangtua peserta didik yang telah diedarkan, maka kepala sekolah "menyandera" semua guru dan sebagian pegawai untuk tinggal di sekolah melaksanakan pemeriksaan bersama hasil ulangan tengah semester dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Semua ini dilakukan demi memberi pelayanan prima kepada peserta didik dan orangtuanya.

d) Kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah

Kepala sekolah diangkat dan bertanggung jawab terhadap pemerintah kota. Sudah sewajarnya bila semua program pemerintah kota yang membutuhkan dukungan dan partisipasi sekolah dijadikan sebagai prioritas untuk disukseskan. Demikian halnya dengan kepala SMP Negeri 8 Makassar. Selain rutinitas tugas yang berkaitan dengan pemerintah kota seperti laporan bulanan, program jangka pendek maupun program tahunan, ada juga program unggulan pemerintah kota yang senantiasa menjadi perhatian khusus.

Pemerintah kota memiliki program unggulan yang dipromosikan saat kampanye sampai mereka dilantik. Promosi program dilakukan di setiap moment tempat maupun

waktu. MTR (Makassarta Tidak Rantasa), LISA (Lihat Sampah Ambil), SOTTARONG (Sekolah Tata Lorong), SEBELASRASA (Sepuluh Menit Sebelum Belajar Ambil Sampah) dan sebagainya. Program seperti ini sangat strategis disosialisasikan dan diterapkan di sekolah-sekolah.

Kepala SMP Negeri 8 Makassar bersama dengan warga sekolah melakukan tindakan nyata. Kepala sekolah menggunakan berbagai media dan metode dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Pengarahan pada saat upacara bendera yang ditujukan secara umum. Pengarahan pada saat rapat guru dan pegawai. Mengingat pada setiap kesempatan yang ada. ”Tabe pak, bu tolong diarahkan anak-anak, banyak sampah di sekitar sini”. Semua ini merupakan implementasi dari tulisan dukungan program kebersihan seperti yang terlihat pada gambar 4.16 di bawah ini.



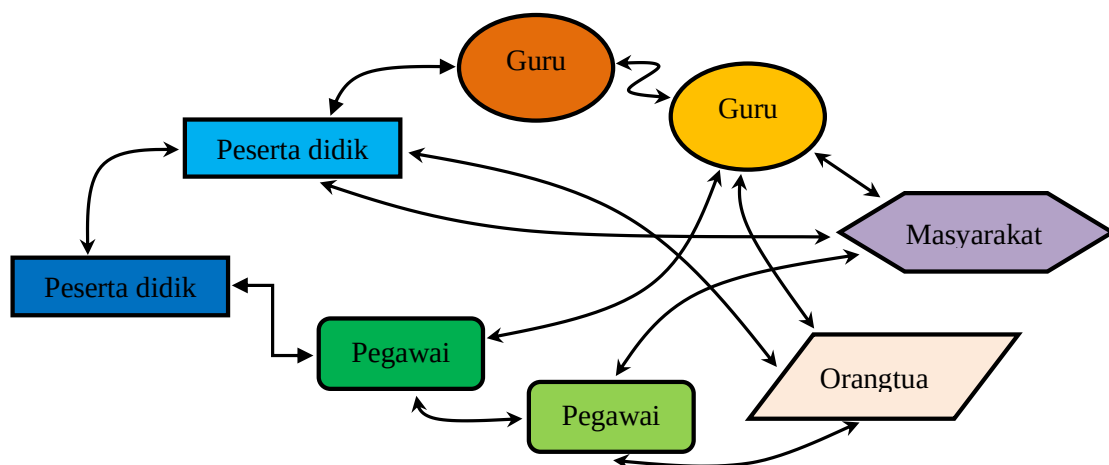
Gambar 4.16 Tekad dan Dukungan Kepada Program Pemerintah
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Selain dengan media komunikasi langsung, kepala sekolah menggunakan media lain yaitu papan bicara atau dinding bicara seperti yang terlihat pada gambar 4.16 di atas. Media ini dianggap dapat menjadi ”pengingat” bagi setiap warga sekolah untuk senantiasa memperhatikan program pemerintah tersebut. Harapan yang paling penting

adalah program pemerintah ini menjadi milik semua warga sekolah sehingga dengan atau tanpa diperintahkan pun tetap dilakukan seterusnya.

4) Interaksi di SMP Negeri 8 Makassar

Terjadi multi interaksi di SMP Negeri 8 Makassar. Ada interaksi alamiah dan ada pula interaksi yang direncanakan. Interaksi alamiah setiap hari terjadi. Ada lima komponen yang melakukan interaksi yaitu peserta didik, guru, pegawai, orangtua, masyarakat. Interaksi alamiah yang terjadi yaitu antara sesama peserta didik, antara sesama guru, antara sesama pegawai, antara peserta didik dengan guru, antara peserta didik dengan pegawai, antara peserta didik dengan orangtua, antara peserta didik dengan masyarakat, antara guru dengan pegawai, antara guru dengan orangtua peserta didik, dan antara masyarakat dengan pihak sekolah (kepala sekolah, guru atau pegawai). Bila diringkaskan, maka interaksi alamiah di SMP Negeri 8 Makassar terlihat seperti pada gambar 4.17. berikut ini.



Gambar 4.17 Interaksi Alamiah di SMP Negeri 8 Makassar
(Sumber: Hasil olahan data primer 2015)

Interaksi alamiah yang terjadi di SMP Negeri 8 Makassar sangatlah dinamis. Silih berganti pihak eksternal sekolah datang keperluan dan kepentingan berbeda-beda. Ciri khas yang dirasakan di sekolah ini adalah adanya sikap *koperatif* dan menerima dengan baik siapa saja yang bertamu. Kerjasama dan penerimaan yang begitu baik dari pihak sekolah sehingga banyak peneliti sering menjatuhkan pilihan untuk menjadikan SMP Negeri 8 Makassar sebagai lokus penelitian.

Interaksi selanjutnya adalah interaksi yang terjadi karena direncanakan atau terjadwal. Interaksi terencana terkait dengan rutinitas dan program sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti rapat komite sekolah, rapat guru, penerimaan rapor, atau pun acara-acara keagamaan dan hari nasional merupakan interaksi yang direncanakan.

Baik interaksi alamiah maupun interaksi yang direncanakan keduanya memiliki dampak yang baik terhadap sekolah. Interaksi yang terjadi dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengevaluasi hasil capaian selama waktu tertentu. Hasil evaluasi dapat memunculkan ide-ide baru untuk perbaikan dan pengayaan program. Program yang sudah terlaksana, sedang terlaksana, atau pun yang baru direncanakan dapat diketahui titik lemahnya, keunggulannya, siapa yang pantas melaksanakannya, dan dengan siapa program tersebut dimitrakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya yang tercipta di SMP Negeri 8 Makassar merupakan hasil dari suatu kemitraan. Kemitraan telah dibangun secara internal dan eksternal. Kemitraan di SMP Negeri 8 Makassar tersebut merupakan pengaruh dari peran pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orangtua peserta didik), sekolah, dan masyarakat sekitarnya.

3. Keberadaan fungsi pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar

Keberadaan fungsi pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 8 dibagi atas enam bagian. Adapun keenam fungsi tersebut adalah; (1) fungsi penyesuaian, (2) fungsi pengintegrasian, (3) Fungsi *diagnostik* dan *direktif*, (4) fungsi *diferensiasi*, (5) fungsi selektif, dan (6) fungsi hubungan pembantuan dan *referral*.

a. Fungsi penyesuaian (*adjustive function*)

Fungsi sekolah yang pertama adalah fungsi penyesuaian atau disebut juga *adjustive function*. Dalam hal ini sekolah berfungsi membangun peserta didik untuk memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan. Sekolah bertindak sebagai lembaga yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat membawa dirinya di dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik siap beradaptasi dengan kehidupan masyarakat dan sebaliknya pihak masyarakat juga siap menerima kehadiran dari peserta didik tersebut.

Peran sekolah dalam melaksanakan fungsi adaptasi di SMP Negeri 8 Makassar dilakukan dengan berbagai macam aktivitas. Tiga ranah yang diemban oleh pendidikan formal yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor selalu dijadikan sebagai pijakan kegiatan di sekolah. Semua yang dilakukan itu dalam rangka menyiapkan anak didik untuk dapat diterima di dalam masyarakat. Adaptasi anak didik dalam masyarakat dipersiapkan oleh lembaga yang bernama sekolah, seperti ungkapan guru-guru yang menjadi informan. Berikut petikannya:

”sebagai guru kami menyadari bahwa peserta didik yang dibina di sini secara mental belum dewasa. Tentu saja mereka belum bisa sepenuhnya bertingkah

laku sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itulah menjadi kewajiban guru untuk membekali mereka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, etika, dan keterampilan.”(Wawancara, AHK, Selasa 1/9/2015).

AHK menganggap bahwa sekolah merupakan lembaga yang bertujuan untuk pendewasaan. Asumsinya adalah ketika anak menuju pada alam dewasa maka tidak sulit lagi beradaptasi dengan masyarakat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh guru informan berikut ini.

”dalam kehidupan masyarakat banyak aspek yang perlu diketahui oleh peserta didik. Mereka bergaul dengan berbagai macam manusia. Tentulah kami senantiasa membekali mereka dengan pelajaran bagaimana mereka bersikap, bertingkah laku sehingga dapat diterima secara normal oleh masyarakat,” (Wawancara, PJ Kamis 3/9/2015).

PJ sadar betul bahwa banyak peristiwa di dalam masyarakat yang meresahkan dan pelakunya adalah dari kalangan pelajar. Tentulah kejadian tersebut menjadi bahan pemikiran bagi pendidik untuk mencari tahu, apa sesungguhnya yang salah. Menurut MY bahwa sekolah tak ubahnya adalah lembaga untuk mengembalikan peserta didik untuk diterima di masyarakat. Berikut pernyataannya:

”boleh dibilang bahwa sekolah ini seperti layaknya lembaga pemasyarakatan. Jadi anak-anak ini dibina dengan tiga kemampuan yaitu sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Kalau mereka sudah sanggup memiliki tiga kemampuan itu maka pastilah mereka dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat.” (Wawancara, MY Sabtu 5/9/2015).

Betul apa yang dikatakan oleh MY, meskipun tidak persis sama dengan lembaga pemasyarakatan dalam arti khusus. Tetapi, apa yang menjadi kenyataan bahwa tidak sedikit kalangan usia pelajar sering bertingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itulah, guru dan segenap pendidik lainnya merasa

berkepentingan untuk menjaga status sebagai pengwal moral. Hal ini dikemukakan oleh guru informan berikut ini.

”kalau anak didik kita bersalah di luar dan berpakaian seragam sekolah, maka pasti sering ditanyakan, ”anak sekolah dari mana? Siapa gurunya? Kalau sudah ditanyakan seperti ini maka mau atau tidak mau gurulah yang menanggung malu. Kejadian-kejadian seperti itu saya kira bisa saja diantisipasi sepanjang anak didik ini mau secara sungguh-sungguh mengikuti arahan-arahan guru di sekolah.” (Wawancara, AS Selasa 1/9/2015).

Sebagai konfirmasi dari apa yang dinyatakan oleh guru-guru diperkuat oleh pernyataan peserta didik. peserta didik ini merasakan bagaimana lembaga sekolah telah banyak membekali dirinya dengan kebaikan. Berikut petikannya.

”kami di sini kami banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Selain pelajaran rutin setiap hari, kami juga diberikan pilihan-pilihan kegiatan penunjang yaitu kegiatan ekstrakurikuler. (Wawancara MAS, Selasa 1/9/2015).

Apa yang dirasakan oleh MAS di atas adalah suasana bersama yang berlaku juga untuk peserta didik lainnya. Ada yang spesifik dikemukakan oleh subjek berikut terkait dengan budaya penjemputan peserta didik di pagi hari. CHR merasa terkesan dengan perlakuan guru yang menjemputnya di pintu gerbang setiap pagi. Berikut pernyataannya.

”setiap pagi kita semua yang datang dengan tertib berbaris, menyalami guru-guru, mencium tangan guru, ditegur jika ada kesalahan atau kekurangan, dinasehati dengan lembut, dihargai, guru menepuk bahu dan lain-lain.” (Wawancara CHR, Kamis 3/9/2015)

Kesaksian CHR telah menjadi catatan tersendiri bagi peneliti setelah menyaksikan dengan kejadian yang sebenarnya. Hal ini telah dikuatkan dengan rekaman gambar pada data budaya di SMP Negeri 8 Makassar sebelumnya. Lalu, apa

yang dilakukan oleh guru yang menjemput peserta didik di pintu gerbang? Berikut penjelasan HM (Kepala Sekolah).

”Selain kami menanyakan satu-persatu tentang keadaan mereka (peserta didik), kami juga melatih dengan cara membiasakan mereka untuk berjalan tertib dan antri bersama teman-temannya.” (Wawancara HM, Sabtu 29/8/2015).

Menambah hasil wawancara di atas, maka ada baiknya disajikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mendukung fungsi adaptasi tersebut. Adapun daftar kegiatan tersebut sebagaimana terangkum dalam tabel 4.24. berikut.

Tabel 4.24 Kegiatan dalam Rangka Fungsi Adaptasi

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Menjemput anak didik di gerbang	Setiap pagi
2.	Memimpin berdoa	Setiap memulai pelajaran
3.	Memotivasi	Di awal pembelajaran
4.	Memimpin pembelajaran	Sesuai jadwal mengajar
5.	Memberikan evaluasi	Sesuai jadwal kalender
6.	Upacara bendera	Setiap hari senin
7.	Membina kegiatan ekstrakurikuler	Sesuai pembagian tugas

Sumber: hasil olahan data primer 2015

Menguatkan fungsi adaptasi sebagai fungsi yang diperankan oleh lembaga pendidikan yang bernama sekolah, disiapkan mata pelajaran dengan karakternya masing-masing. Setiap mata pelajaran tersebut memiliki cakupan aspek yang menjadi muatannya. Tabel 4.15. berikut ini adalah daftar mata pelajaran di SMP Negeri 8 Makassar.

Tabel 4.25 Daftar Mata Pelajaran

No.	Mata Pelajaran	Cakupan Aspek
1.	Pendidikan Agama	kognitif, psikomotor, afektif
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	kognitif, afektif
3.	Bahasa Indonesia	kognitif, psikomotor, afektif
4.	Bahasa Inggris	kognitif, psikomotor, afektif
5.	Matematika	kognitif, afektif
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	kognitif, psikomotor, afektif
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	kognitif, afektif
8.	Keterampilan	kognitif, psikomotor, afektif
9.	Teknik Informasi Komputer	kognitif, psikomotor, afektif
10.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	kognitif, psikomotor, afektif
11.	Muatan Lokal	kognitif, psikomotor, afektif

Sumber: hasil olahan data sekunder 2015

Fungsi adaptasi yang diemban oleh sekolah idealnya mampu memotret baik ucapan ataupun tindakan yang diterima secara universal. Berikut ini adalah sebuah ajakan yang mendidik semua kalangan di sekolah untuk selalu mengawali aktivitas dengan do'a. Ajakan berdo'a seperti terlihat pada sajian gambar 4.18 berikut ini.



Gambar 4.18 Ajakan Mengawali Semua Kegiatan dengan Do'a

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

b. Fungsi pengintegrasian (*integrating function*)

Fungsi sekolah yang kedua adalah fungsi pengintegrasian atau *integrating function*. Fungsi pengintegrasian bagi sekolah adalah bahwa sekolah berfungsi mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat. Pengintegrasian bagi peserta didik yang dimaksud adalah bahwa peserta didik memperoleh pendidikan di sekolah yang berasal dari berbagai sumber belajar yaitu guru, peserta didik, bahan ajar, dan interaksi. Semua bekal yang mereka dapatkan selama menimba pendidikan di sekolah bisa bermanfaat sebagai modal ketika menerima amanah ataupun tanggung jawab sebagai individu atau anggota kelompok dalam masyarakat.

Setelah peserta didik memperoleh bekal dari pendidikan di sekolah, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengaplikasi dalam kehidupan di luar sekolah? Bagaimana peserta didik mengintegrasikan tiga ranah yang telah mereka asah selama satu, dua, dan tiga tahun. Berikut ini beberapa pencerahan yang disampaikan oleh guru.

”cukup beragam kegiatan yang melibatkan kompetensi peserta didik. Dalam lingkup yang terbilang kecil ketika berada di lingkungan rumah mereka dapat aktif kegiatan sosial seperti remaja masjid, karang taruna. Mereka bisa mengaplikasikan diri sebagai panitia, protokol acara dan lain-lain.” (Wawancara AHK, Selasa 8/9/2015).

Penjelasan AS ini memang terbukti dalam kehidupan masyarakat kota. Aktivitas remaja masjid saat bulan Ramadhan banyak memanfaatkan anak-anak usia remaja. Mereka terlihat senang dengan aktivitas sosial seperti itu.

Pada skala formal, kemampuan aplikasi dan integrasi kemampuan kognitif peserta didik tersalurkan lewat kegiatan lomba. Lomba yang saat ini menjadi topik

pembicaraan adalah OSN (Olimpiade Sains Nasional), sebagaimana diungkapkan berikut.

”saya sebagai pembina olimpiade mata pelajaran sampai saat ini senantiasa mengikuti anak didik dari sekolah ini. Kegiatan ini menurut saya memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mengukur kompetensi kognitif yang selama ini mereka pelajari.” (Wawancara AS, Kamis 10/9/2015).

Penjelasan guru di atas dibenarkan oleh peserta didik yang pernah dibina oleh beliau. Kegiatan OSN merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi peserta didik. berikut ini petikan pernyataannya.

”saya bersama MAS waktu kelas VIII kerap dibimbing oleh ibu AS untuk ikut olimpiade sains. Kadang-kadang dapat juara juga, tetapi meskipun tidak juara asalkan bisa bertanding dengan siswa sekolah lain sekaligus mengukur kemampuan kami.” (Wawancara DS, Kamis 8/9/2015).

Secara garis besar beberapa kegiatan di luar dan di dalam sekolah merupakan bagian dari fungsi integrasi. Kegiatan tersebut mencoba mengintegrasikan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Kegiatan terkait fungsi integrasi tersaji pada tabel 4.26 di bawah ini.

Tabel 4.26 Kegiatan yang Berhubungan Fungsi Integrasi

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Lomba OSN	kognitif, psikomotor, afektif
2.	Remaja Masjid	kognitif, afektif
3.	Olah raga	kognitif, psikomotor, afektif
4.	Musik	kognitif, psikomotor, afektif
5.	Perkemahan	kognitif, afektif
6.	Palang Merah	kognitif, psikomotor, afektif

Sumber: hasil olahan data primer 2015

Pembekalan ranah kognitif memberikan bekal kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guru fisika tertulis sebagai berikut:

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya (afektif)
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong-royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya (afektif).
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dari kejadian tampak mata (kognitif, psikomotor).
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori (kognitif/psikomotor).

(Sumber: *diadopsi dari data primer 2015*)

Pada hakikatnya guru dapat dimaklumi bila memberikan porsi kognitif lebih dari afektif maupun psikomotor. Perlakuan pemberian porsi ranah kognitif lebih banyak oleh karena tuntutan lingkungan di luar sekolah (pengguna/penerima lulusan). Lingkungan di luar sekolah masih menjadikan nilai kognitif jadi pertimbangan utama.

c. Fungsi diagnostik dan direktif (*diagnostic and directive function*)

Fungsi sekolah yang ketiga adalah fungsi diagnostik dan direktif atau *diagnostic and directive function*. Sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik. Fungsi ini juga bermanfaat untuk mengetahui potensi peserta didik dan memberi arahan kemana nantinya nanti karir yang diprediksi paling sesuai. Sungguh besar peranan sekolah dalam hal ini.

Diagnostic artinya melakukan suatu tes untuk melakukan diagnosis (penentuan atau penetapan). Diagnosis dari hasil *diagnostic* didasarkan pada kaidah ilmiah yang sering dilakukan oleh orang-orang profesional. Sedangkan *directive* artinya memberikan petunjuk atau pengarahan. Jadi menurut Bahasa sekolah berfungsi dalam hal *diagnostic and directive* yaitu melakukan tes *diagnostic* untuk menentukan tentang siapa sebenarnya peserta didik yang dihadapi. Informasi yang diinginkan seperti bakat peserta didik, sifat peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Informasi tersebut dijadikan petunjuk dalam mengarahkan peserta didik.

SMP Negeri 8 Makassar sebagai sekolah pavorit berupaya optimal berperan dalam fungsi diagnostik dan direktif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di ruang BK (Bimbingan Konseling) terdapat sarana berupa satu unit komputer yang disiapkan untuk tes psikologi. *Software* ‘perangkat lunak’ penting ini dimanfaatkan untuk siapa saja yang mau. Guru BK yang mengatakan:

“Komputer ini saya siapkan untuk siapa saja yang mau tes psikologi. Tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk menggunakannya. *Software*nya saya dapatkan dari teman-teman di Jawa.” (Wawancara PJ, Selasa 17/8/2015).

Penjelasan dari guru BK di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak memprogramkan secara khusus. Semata-mata merupakan inisiatif dari pribadi guru BK yang merasakan pentingnya tes diagnosis. Menurut keterangan guru BK bahwa di SMP Negeri 8 Makassar dulu pernah ada tes diagnosis tetapi pihak orangtua peserta didik merasa tidak membutuhkan.

“Setelah hasil tes diagnosis diperoleh, kami pun menyampaikan kepada masing-masing orangtua peserta didik untuk dikonsultasikan, akan tetapi keputusannya

kembali lagi kepada orangtua, mereka tetap bertahan pada keinginan-keinginan mereka.” (Wawancara PJ, Selasa 17/8/2015).

Keberterimaan hasil tes diagnosis untuk pemetaan potensi peserta didik memang belum mendapatkan tempat dari elemen mitra yaitu orangtua. Apabila orangtua peserta didik tidak memberikan dukungan maka kondisi ini menjadi hambatan bagi sekolah untuk bertahan apalagi mengembangkan upaya tersebut. Berikut adalah kelengkapan data wawancara yaitu hasil observasi aktivitas sekolah untuk fungsi diagnostik.

Tes diagnostik yang paling sering dilakukan di setiap sekolah adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester. Hasil dari pemeriksaan ini senantiasa dijadikan peringatan kepada peserta didik apakah perlu diperbaiki atau ditingkatkan, sebagaimana dikatakan oleh guru berikut ini.

“tes yang kita berikan kepada peserta didik seperti ulangan harian seharusnya diperiksa dan dibagikan kembali kepada mereka. Tujuannya adalah supaya mereka tahu kelebihan dan kekurangannya, kalau perlu yang peserta didik mendapat hasil di bawah KKM dinasehati secara khusus sebelum diberikan remedial.” (Wawancara AS, Sabtu 3/10/2015).

Memeriksa hasil kerja peserta didik pada kenyataannya berat dilakukan. Akan tetapi hasilnya sangat penting sebagai informasi. Informasi bagi peserta didik dan juga menjadi informasi kepada guru untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu dalam proses pembelajarannya. Hal diungkapkan oleh salah seorang guru informan berikut ini.

“sebenarnya yang tidak kalah pentingnya dari pelaksanaan ulangan-ulangan ini adalah untuk informasi bagi guru. Sejauh mana efektivitas dari pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik. Makanya kalau saya sarankan kepada guru supaya hasil kerja peserta didik diperiksa supaya informasi nilai yang didapatkan betul-betul nyata.” (Wawancara AHK, Sabtu 3/10/2015).

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan yang dilaksanakan diperoleh beberapa informasi penting tentang aktivitas yang terkait fungsi diagnostik. Tabel 4.27. berikut ini menggambarkan secara jelas aktivitas yang berhubungan dengan fungsi diagnostik yang diperankan oleh sekolah.

Tabel 4.27 Aktivitas yang Berhubungan Fungsi Diagnostik

No.	Aktivitas	Keterangan
1.	Ulangan Harian	Mendiagnosis Kompetensi Dasar
2.	Ulangan Tengah Semester	Mendiagnosis menuju ulangan semester
3.	Ulangan Semester	Mendiagnosis menuju kenaikan kelas
4.	Tes Bakat	Mendiagnosis bakat
5.	Tes Potensi Akademik	Mendiagnosis potensi akademik

Sumber: hasil olahan data primer 2015

Selain fungsi diagnostik dan direktif yang dikelola pada kegiatan kurikuler juga ada yang dibina dalam kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi ekstrakurikuler yang dimotori oleh OSIS (Organisasi Siswa Intera Sekolah) melakukan diagnostik dan direktif dengan melakukan pendataan minat kepada peserta didik. OSIS dan organisasi ekstrakurikuler di bawah naungannya menyebarkan formulir pendaftaran calon anggota. Calon anggota yang terdaftar selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan atau pengkaderan calon anggota baru.

d. Fungsi diferensiasi (*differentiation function*)

Fungsi sekolah yang keempat adalah fungsi diferensiasi atau *differentiation function*. Menurut Bahasa, diferensiasi bermakna perbedaan. Fungsi diferensiasi berarti

fungsi yang bertujuan menentukan perbedaan melalui pengaturan-pengaturan tertentu. Sedangkan bila dikaitkan dengan sekolah maka fungsi diferensiasi artinya sekolah berfungsi memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil diagnosis kemudian menentukan urutan berdasarkan peran tersebut dan dilatih hanya sejauh dengan kesesuaian tujuan mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu. Cara ini baik untuk mengoptimalkan jenis layanan dan proyeksi harapan anak sehingga cocok dengan aneka diferensiasi atau perbedaan mereka.

Berdasarkan makna fungsi diferensiasi di atas menunjukkan bahwa fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi diagnostik. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh guru berikut ini.

”analisis hasil tes senantiasa dilakukan oleh guru. Hanya kita diwajibkan untuk menganalisis hasil ulangan harian, karena hanya itulah yang ada remedialnya. Hasil analisis inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan remedial atau memberikan pengayaan.” (Wawancara, AHK Kamis 1/10/2015).

Apa yang diungkapkan oleh AHK merupakan tugas ideal bagi seorang guru yang baik. Hasil analisis yang dilakukan oleh guru merupakan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dari hasil analisis tersebut menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh guru setelah mengetahui hasil analisis adalah menyarankan atau memberi putusan kepada peserta didik dalam memilih sekolah lanjutan. Berikut ulasannya.

”kami guru BK menyarankan kepada peserta didik untuk dapat memilih sekolah lanjutan apakah SMA atau SMK. Tentunya harus berdasarkan data-data yang akurat mengenai kecenderungan dari hasil-hasil belajar yang selama ini diperoleh. Itupun keputusannya terserah kepada peserta didik dan orangtuanya.” (Wawancara PJ, Selasa 17/8/2015).

Menindaklanjuti hasil analisis yang dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan konsultasi dengan peserta didik yang sifatnya klasikal atau individu. Peserta didik diberikan informasi tentang keberadaan posisinya selama menempuh pendidikan. Jika perlu bukan hanya peserta didik tetapi orangtua mereka pun perlu dihadirkan untuk berkonsultasi. Ternyata di SMP Negeri 8 Makassar memberlakukan terobosan baru yaitu penerimaan rapor setelah setengah semester berlangsung. Berikut ulasannya.

”ada terobosan baru yang kami lakukan di sekolah ini. Kalau selama ini orangtua hanya diundang menerima rapor setelah ulangan semester, namun kali ini kita juga mencoba mengundang orangtua untuk menerima hasil belajar selama setengah semester. Tujuannya adalah mengantisipasi agar nilai yang diperoleh peserta didik dijadikan alasan untuk memperbaiki sampai pada akhir semester.” (Wawancara AS, Sabtu 3/10/2015).

Fungsi diferensiasi di sekolah bermanfaat untuk memelihara hasil diagnostik yang telah memetakan potensi peserta didik. Potensi yang telah dipetakan lebih mudah dikembangkan karena sudah tergambar kejelasan tentang siapa dan bagaimana peserta didik. Tabel 4.28 berikut ini adalah upaya-upaya pemetaan potensi sebagai tindak lanjut dari fungsi diferensiasi.

Tabel 4.28 Bentuk Upaya Pemetaan Potensi di SMP Negeri 8 Makassar

No.	Pemetaan Potensi	Keterangan
1.	Dokumentasi nilai kognitif, afektif, psikomotor	Buku Rapor
2.	Dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler	Buku Rapor
3.	Pembinaan peserta olimpiade	Olimpiade
4.	Kelas akselerasi	Program unggulan
5.	Kelas bilingual	Program unggulan

Sumber: Hasil olahan data primer dan sekunder 2015

Pemetaan potensi yang telah dilakukan di atas cukup membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara *spesifik*. Di sisi lain guru pun dapat berkonsentrasi lebih optimal melakukan pola pembinaan (mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih). Meskipun demikian upaya ini belum dilakukan dengan totalitas dan perlakuan yang istimewa bila dibandingkan dengan sekolah lain.

e. Fungsi selektif (*selective function*)

Fungsi sekolah selanjutnya adalah fungsi selektif (*selective function*). Dalam fungsi selektif ini sekolah berperan memberikan bantuan kepada peserta didik agar secara sadar mengenal kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya. Fungsi selektif sangat berkaitan pada fungsi sekolah sebelumnya yaitu fungsi diagnostik dan fungsi diferensiasi. Ketiga fungsi sekolah yaitu diagnostik, diferensiasi, dan selektif memiliki kesamaan yaitu berfungsi memetakan atau mengelompokkan.

Pendidikan yang dilakukan di sekolah sampai saat ini masih berfokus pada tiga ranah penilaian yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Diterjemahkan dalam Bahasa rapor sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi selektif dapat berlangsung sepanjang masa karena berlangsung terus-menerus.

“semua sekolah melakukan seleksi bagi peserta didik. Seleksi ini disadari atau tidak hampir setiap waktu dilakukan di sekolah. Sebelum proses pembelajaran, ketika berlangsung proses pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran. Inilah tugas kita sebagai guru, setiap hari kita menilai afektif, kognitif, dan psikomotor.” (Wawancara, AS Sabtu 17/10/2015).

Apa yang dikatakan oleh AS memang benar adanya. Setiap hari guru menjadi pengamat bagi peserta didiknya. AS menguraikan fungsi seleksi ini secara umum, lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh MY berikut ini.

“seleksi yang dilakukan secara khusus itu dimulai saat penerimaan peserta didik baru, pengelompokan kelas, penentuan urutan peringkat prestasi, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik. Secara garis besar itulah yang menjadi tradisi selama ini.” (Wawancara MY, Sabtu 17/10/2015).

Uraian dari MY menjelaskan tentang fungsi seleksi secara khusus di sekolah. Apa yang diuraikan oleh MY lebih bersifat nilai-nilai hasil belajar yang dilaksanakan di sekolah. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang berkaitan dengan ekstra kurikuler? Berikut uraiannya.

“seleksi ini tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran tetapi pada kegiatan ekstra kurikuler pun selalu ada seleksi. OSIS sebagai induk atau naungan dari organisasi ekstrakurikuler setiap periode melakukan seleksi baik itu bakat maupun minat. Tindak lanjut seleksi adalah seleksi dalam bentuk latihan dasar sebagai persyaratan menjadi anggota resmi.” (Wawancara AHK, Sabtu 17/10/2015).

AHK adalah salah seorang guru Pembina ekstrakurikuler yaitu Pramuka. Beliau aktif melakukan pembinaan Pramuka mulai dari penjangkaran awal sampai pada seleksi kenaikan tingkat. Demikian pula, seorang guru Pembina Olimpiade Fisika yang sementara menghadapi beberapa peserta didik peserta olimpiade mengatakan:

“Beberapa peserta didik yang tinggal ini secara khusus saya bina. Mereka ini adalah calon peserta yang diunggulkan untuk mengikuti OSN, mudah-mudahan bisa membawa hasil yang menggembirakan nanti.” (Wawancara AS, Sabtu 8/8/2015).

Hasil dari semua pelaksanaan seleksi selalu disertai dengan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman mendidik bagi yang belum berhasil. Hal ini bermanfaat sebagai salah satu bentuk motivasi eksternal. Berikut ulasannya.

“setiap akhir semester atau kenaikan kelas kami undang orangtua peserta didik untuk menerima hasil belajar anaknya. Hal yang paling mengharukan adalah pada saat diumumkan peserta didik berprestasi, peserta didik dan orangtua diminta tampil di depan umum untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Setelah semua penyerahan penghargaan selesai maka setiap wali kelas menuju kelas masing-masing untuk menyerahkan rapor sekaligus melakukan pembicaraan seperlunya dengan orangtua atau walinya.” (Wawancara HM, 17/10/2015).

Pembicaraan seperlunya di kelas biasanya diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang beruntung. Boleh jadi banyak nilainya yang tidak tuntas atau prestasinya menurun dari prestasi sebelumnya. Jika disadari, nilai yang diberikan guru kepada peserta didik sudah merupakan penghargaan atau hukuman bagi peserta didik.

Bagaimana pendapat orangtua pada salah satu kegiatan? Ditemui pada saat menunggu pembagian rapor hasil belajar tengah semester seorang orangtua bersama anaknya mengatakan:

“cukup bagus kegiatan ini (penerimaan rapor tengah semester). Kita bisa tahu prestasi belajar anak sejak dini sebelum menerima rapor sesungguhnya. Hanya saja saya lihat ini kurang orangtua siswa yang datang.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan fungsi selektif di SMP Negeri 8 Makassar berjalan dinamis. Tabel 4.29 berikut ini adalah rangkuman dari pelaksanaan kegiatan untuk fungsi selektif sekolah.

Tabel 4.29 Fungsi Selektif yang Diperankan di SMP Negeri 8 Makassar

No.	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru	Setiap tahun pelajaran baru
2.	Pembagian Kelas	Setiap tahun pelajaran
3.	Penaikan Kelas	Setiap tahun pelajaran

1	2	3
4.	Seleksi OSN (Olimpiade Sains)	Setiap tahun
5.	Seleksi Utusan Pertandingan Olahraga	Setiap kegiatan
6.	Kelulusan	Setiap tahun
7.	Seleksi Kegiatan Ekskul	Setiap saat

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

f. Fungsi hubungan pembantuan dan referral (*helping and referral function*)

Fungsi pendidikan yang diperankan oleh sekolah bagian terakhir adalah hubungan pembantuan dan referral (*helping and referral function*). Dalam memerankan fungsi pendidikan *helping and referral function* sekolah berfungsi mendorong peserta didik melakukan hubungan pembantuan dengan pihak lain dan merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula.

Fungsi hubungan pembantuan sering dilakukan oleh pihak sekolah. Ada kegiatan yang bersifat dibutuhkan oleh sekolah dan ada juga pihak luar yang butuh kepada sekolah. Berikut petikan wawancaranya.

“kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pihak luar bersifat timbal balik. Biasanya kegiatan itu kami yang membutuhkan seperti melakukan studi wisata ke tempat-tempat bersejarah, ke pabrik semen, ke percetakan koran. Sebaliknya pihak luar juga kadang-kadang membutuhkan jasa kami seperti pada acara-acara hari-hari nasional biasa dimintai anak-anak untuk ikut dalam kelompok pakaian adat.” (Wawancara AS, Kamis 5/11/2015).

Fungsi pembantuan terhadap pihak luar biasanya tidak terduga. Mengantisipasi kegiatan tak terduga dari luar sekolah membutuhkan kiat-kiat tersendiri. Peserta didik yang dilibatkan harus berasal dari mereka yang mudah beradaptasi. Berikut ungkapannya.

“kegiatan yang sifatnya pembantuan ini sering tidak terjadwal. Hal ini karena adanya agenda pihak luar sekolah yang kita tidak tahu. Meskipun kadang-kadang mengganggu jalannya proses pembelajaran tetapi kita berusaha untuk senantiasa melakukan penyempurnaan.” (Wawancara PJ, Sabtu 7/11/2015).

Kegiatan dalam rangka hubungan pembantuan terhadap pihak luar sering dikaitkan dengan program-program pemerintah. Sehingga pelibatan peserta didik sangat membantu kegiatan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru Pembina Pramuka berikut ini.

“sebagai Pembina Pramuka, kita sering diundang untuk beberapa kegiatan tingkat kota atau provinsi. Kegiatan perkemahan misalnya, selalu dikaitkan dengan bakti sosial seperti penghijauan atau biasa dinamakan penanaman seribu pohon.” (Wawancara AHK, Kamis 5/11/2015).

Kegiatan-kegiatan lingkungan atau kemansiaan seringkali membutuhkan kesiapan keterampilan dan kemampuan fisik. Oleh karena itulah harus diisi dengan latihan-latihan sebelum ke tempat tujuan. Berikut kutipan wawancaranya.

“setiap kegiatan yang kami ikuti yang sifatnya butuh keterampilan, maka sebelum berangkat selalu didahului dengan latihan-latihan, memberikan informasi tentang kondisi medan tempat kegiatan dilaksanakan.” (Wawancara AHK, Kamis 5/11/2015).

Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi tersebut selalu menyiapkan peserta didik. Adapun kegiatan yang berhubungan dengan *helping and referral function* terbagi atas dua yaitu, (1) kegiatan bersifat permanen dan (2) kegiatan yang sifatnya temporer atau eksidensial. Meskipun ada kegiatan yang bersifat temporer atau eksidensial, namun pihak sekolah selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Kegiatan yang berkaitan dengan *helping and referral function* di SMP Negeri 8 Makassar ada yang tergolong khusus dan tergolong umum. Kegiatan yang tergolong

khusus dilakukan melalui seleksi atau penunjukan langsung berdasarkan kemampuan. Sedangkan untuk kegiatan yang tergolong umum dapat dilakukan oleh peserta didik secara keseluruhan. Tabel 4.30 berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *helping and referral function* yang dilakukan di SMP Negeri 8 Makassar.

Tabel 4.30 Kegiatan *Helping and Referral Function*

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Kebersihan dan Keindahan Kota	Umum/Rutin
2.	Diseminasi Bahaya Narkoba	Khusus/Temporer
3.	Diseminasi Pembauran untuk Kesbang	Khusus/Temporer
4.	Partisipasi Agenda Tahunan Pemkot	Khusus/Umum/rutin
5.	Kemanusiaan	Khusus/Temporer
6.	PIKER (Informan Sebaya)	Khusus/Permanen

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

C. Keberadaan Masyarakat Sebagai Lembaga Pendidikan di Kota Makassar

Ada empat fungsi pendidikan yang diperankan oleh masyarakat yang akan dijelaskan yaitu: (1) fungsi pemberdayaan, (2) fungsi partisipasi, (3) fungsi *inklusi*, dan (4) fungsi dalam penentuan nasib sendiri.

1. Fungsi pemberdayaan

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya, memiliki daya, atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan dalam pendidikan berarti membuat anak didik atau peserta didik memiliki kekuatan dengan mendidik mereka. Apa yang diberdayakan? Potensi anak didik/peserta didik. Potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap anak

didik sudah memiliki potensi tersebut yang dia dapatkan dari orangtuanya (keluarga). Setiap peserta didik sudah memiliki potensi itu yang diperolehnya dari gurunya (sekolah). Pertanyaannya adalah, apakah semua bekal potensi yang telah dimilikinya diberdayakan oleh masyarakat ketika berada di tengah-tengah mereka (masyarakat)?

Menjalankan fungsi pemberdayaan, masyarakat pertama-tama harus melakukan identifikasi. Identifikasi yang dimaksud adalah identifikasi anak usia sekolah di lingkungan tempat tinggal. Tentang identifikasi anak usia sekolah, anggota masyarakat yang menjadi informan menguraikan sebagai berikut.

”saya rasa semua yang tinggal di dekat sekolah (SMP Negeri 8 Makassar) ini adalah anak sekolah. Tapi saya tidak tahu dimana mereka sekolah karena terlalu banyak. Saya kira tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, apalagi pemerintah kota katakan ”semua anak bisa sekolah” berarti kalau tidak sekolah salahnya sendiri dan orangtuanya.” (Wawancara PW, Sabtu 7/11/2015).

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan berikut ini:

”untuk mengenali mereka susah pak, yang mana sekolah dan yang mana yang tidak sekolah. Setahu saya dengan adanya pendidikan gratis berarti semua anak mesti sekolah. Kalau tidak sekolah berarti itu kesalahan orangtuanya.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Setelah melakukan identifikasi, lalu masyarakat menindaklanjuti dengan membuat program pemberdayaan. Bagaimana program pemberdayaan itu dibuat? Berikut ini petikan penjelasannya.

”kami yang tinggal di sekitar sini sering melihat anak-anak sekolah aktif di masjid kalau waktu magrib tapi ada juga yang tidak. Apalagi bulan Ramadhan yang lalu kebetulan libur sekolah jadi saya lihat mereka rata-rata berlama-lama di masjid.” (Wawancara PW, Sabtu 16/7/2016).

Secara persis dia tidak mengetahui apa yang menjadi aktivitas anak didik tersebut. Dia hanya melihat dan merasakan bahwa ada komunitas yang membuat

program kegiatan bagi anak didik tersebut. Penjelasan berikut ini lebih mengarah pada kejelasan tentang program pemberdayaan yang dimaksud. Berikut ulasannya.

”yang saya tahu di masjid sini ada pengurusnya yang suka menyuruh anak-anak remaja, terutama kalau peringatan maulid. Beberapa orang anak ikut dalam perkumpulan remaja mesjid.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Setelah program pemberdayaan selesai maka langkah berikutnya adalah melaksanakan program. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan meliputi banyak kegiatan, seperti yang diuraikan oleh informan (anggota masyarakat) berikut ini.

”anak-anak SMP Negeri 8 di sini banyak yang orangtuanya termasuk orang berada. Rata-rata mereka bukan cuma belajar di sekolah tetapi ikut juga bimbel (bimbingan belajar) kalau sore, biasanya nanti sudah magrib baru pulang.” (Wawancara PW, Sabtu 16/7/2016).

Selain masjid dan tempat bimbel, rupanya tempat permainan (game) juga menjadi tempat anak didik menghabiskan waktunya. Berikut ini dijelaskan oleh salah seorang informan (anggota masyarakat).

”di sekitar sekolah juga ada tempat mangkal anak-anak sekolah. Kalau penjemputnya belum datang mereka masuk dulu main PS (*Play Station*). Saya yakin orangtuanya sudah tahu itu, jadi kalau dia cari anaknya di sekolah kemudian tidak ada, maka orangtuanya langsung ke tempat itu.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Salah satu fungsi pendidikan yang diemban oleh masyarakat adalah bagaimana mengetahui kelompok-kelompok pelajar di sekitarnya. Oleh karena itu perlu upaya identifikasi kelompok-kelompok pelajar di lingkungan tersebut. Mengenai fungsi ini diuraikan oleh informan sebagai berikut.

”kalau di lingkungan sini, yang ada adalah kelompok remaja masjid, saya tahu persis karena salah satu anggotanya adalah tetangga saya. Kalau ada kegiatan di

masjid merekalah yang sering mengantar undangan ke warga.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015)

Selain kelompok remaja masjid juga ada komunitas lainnya. Komunitas olahraga yang sekarang ini banyak dimainkan oleh pelajar. Berikut ini petikan hasil wawancaranya.

”sekarang yang lagi banyak adalah kelompok-kelompok futsal. Mereka biasa main di sekolah kalau terbuka, atau kumpul-kumpul uang baru pergi menyewa tempat main futsal. Tapi saya kira secara resmi mereka tidak punya nama kelompok, paling hanya terbentuk begitu saja kalau mereka ketemu.” (wawancara PW, Sabtu 16/7/2016).

Kelompok yang lagi banyak dibicarakan adalah geng motor. Ketika ditanyakan tentang keberadaan mereka, informan berikut menjawab agak ragu-ragu. Berikut petikannya.

”kalau anggota geng motor saya kurang tahu. Tapi kalau diberita kita dengar, daerah sekitar sinilah biasa disebutkan. Mungkin sudah ada juga tapi susah dikenal karena mereka berpakaian sekolah kalau siang, mudah-mudahan saja tidak ada yang terlibat dalam kelompok itu.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Upaya pemberdayaan sebagai fungsi pendidikan berikutnya adalah membentuk kelompok pelajar. Kelompok ini bertujuan agar para anak didik tetap memiliki komunitas pembelajar di luar kegiatan sekolah. berikut ulasan dari salah seorang informan.

”yang membentuk kelompok remaja mesjid itu pengurus mesjid. Anak remaja mesjid juga sering mengajari anak-anak mengaji (TPA) yang belajar, mengatur anak-anak kecil kalau sudah mau sembahyang. Kelompok remaja masjid rata-rata sekolah di sekitar daerah ini juga” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Bagaimana masyarakat melakukan pembinaan terhadap kelompok pelajar tersebut? Adakah pembinaan itu atau hanya dilakukan tanpa perencanaan? Berikut petikan wawancaranya.

”pembinaan yang dilakukan oleh kelompok remaja masjid berjalan apa adanya, seperti pengurus mesjid. Kalau ada kegiatan mesjid yang ingin dilaksanakan, mereka pun dilibatkan dalam rapat-rapat pengurus masjid, para remaja ini biasa dijadikan panitia untuk bantu-bantu pengurus masjid.” (Wawancara KS, Sabtu 14/11/2015).

Pembinaan kelompok pelajar bukan hanya lewat remaja masjid. Sekelompok anak didik yang ada di sekolah justeru melibatkan diri dalam kelompok kajian ilmu agama. Mereka ini sedikit lebih serius dibanding remaja masjid. Berikut penjelasan salah seorang guru yang menjadi informan.

”ada beberapa anak SMP Negeri 8 ini tergabung dalam kegiatan kelompok kajian. Ada ormas Islam yang gencar masuk di sekolah-sekolah untuk membina kajian al Islam setiap hari ahad. Saya lihat mereka cukup aktif dan umumnya anak-anak perempuan.” (Wawancara AS, Kamis 7/1/2016).

Konfirmasi tentang kelompok kajian tersebut diakui oleh salah seorang subjek penelitian. Kelompok kajian ini telah berlangsung cukup lama. Berikut uraiannya.

“Kami sering memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah atau hari ahad untuk melakukan kajian agama. Kami banyak dibimbing oleh kakak-kakak *murabbi* (pembimbing laki-laki) dan *murabbiah* (pembimbing perempuan) pencerahan masalah-masalah keagamaan.” (Wawancara DS, Sabtu 1/8/2015).

Fasilitas fisik yang disepakati oleh masyarakat berupa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebutuhan kegiatan anak didik. Hampir semua kebutuhan anak didik telah disiapkan oleh komunitas masyarakat. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan anak didik/peserta didik. Fasilitas fisik yang dimaksud sebagaimana sajian pada tabel 4.31 berikut ini.

Tabel 4.31 Fasilitas Fisik Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kebutuhan	Fasilitas	Keterangan
1.	Afektif	• Masjid • Gereja • Sekolah • Gedung ormas keagamaan	• Kegiatan remaja masjid • Sekolah minggu • Kajian rohis • Kajian rohis
2.	Kognitif	• Gedung bimbingan belajar • Rumah belajar	• Bimbingan belajar • Kerja kelompok
3.	Psikomotor	• Lapangan olah raga • Kolam renang • Rumah bermain • Jalanan umum • Studio musik	• Permainan olah raga • Berenang • Game elektronik • Balap motor • Bermain musik
4.	Hiburan	• Bioskop • Tempat rekreasi • Akses internet • Pasar swalayan	• Nonton film • Rekreasi keluarga/teman • <i>Game online, browsing, searching</i> • <i>Refreshing</i>

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Tabel 4.31 di atas merupakan fasilitas yang sering menjadi tempat transit atau tempat berkumpul bagi anak didik atau peserta didik. Kedatangan peserta didik atau anak didik di tempat yang dimaksud berbeda-beda. Beberapa peserta didik mengunjungi tempat tersebut langsung setelah pulang dari sekolah. Mereka tidak pulang ke rumah lebih dahulu tetapi langsung menuju tempat-tempat seperti rumah bermain (*game online* dan *play station*).

Fasilitas non fisik merupakan paket pendukung yang sangat menentukan bagi kegiatan anak didik atau peserta didik. Dukungan fasilitas non fisik yang diberikan bertujuan bagaimana anak didik atau peserta didik terjaga dari pengaruh buruk yang dapat merusak nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan di rumah dan di sekolah. Dukungan fasilitas non fisik berfungsi memperkuat nilai-nilai pendidikan.

Sebagai contoh, bioskop merupakan sarana dan prasarana hiburan yang digemari oleh anak didik atau peserta didik. Sebagai sarana hiburan tidak jarang pula menjadi wadah penyampaian pesan-pesan pendidikan. Keberadaan bioskop sebagai sarana hiburan diperuntukkan untuk mengurangi masalah, seperti suasana tegang atau jenuh setelah ujian di sekolah. Bioskop juga menjadi tempat bersosialisasi atau bersilaturahmi antara seseorang dengan orang lain, dan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebagai sarana hiburan, suasana bioskop juga sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik bagi anak didik/peserta didik. Hal-hal yang tidak baik seperti, berpacaran yang berlebihan, menonton film yang tidak sesuai umur, bersantai hingga lupa waktu (waktu shalat, dan waktu pulang ke rumah). Upaya pengelola bioskop untuk menjadikan bioskop sebagai tempat yang peduli dengan nilai-nilai pendidikan sudah ada tetapi belum optimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada juga kalimat peringatan yang peduli dengan moral anak didik seperti gambar 4.19 berikut ini.



**BILA MELIHAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA
JANGAN HANYA DIAM, LAPORKANLAH!**

Gambar 4.19 Himbauan Menyikapi Penyalahgunaan Narkoba
Sumber: Diadaptasi dari Tayangan di Layar Bioskop sebelum Film Dimulai

Tayangan pada gambar 4.19 ini terpampang lebar pada layar bioskop (layar yang disorot lampu). Kalimat peringatan pada gambar 4.19 di atas berlaku pada saat sebelum pertunjukan film bioskop dimulai. Waktu penayangan kalimat peringatan tersebut cukup mendapat perhatian karena semua mata berkonsentrasi menanti tayangan film, meskipun efektivitasnya belum jelas. Paling tidak, ada upaya menggalang dukungan untuk selalu satu pikiran dalam meminimalkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kalimat peringatan lainnya seperti gambar 4.20. di bawah ini.



Gambar 4.20 Himbauan Pengelola Bioskop

Sumber: Diadaptasi dari Layar Monitor Customer Service Bioskop 2015

Pesan yang tertera pada layar monitor *customer service* 'tempat pelayanan tiket' bioskop (gambar 4.20) cukup baik, meskipun terkesan seadanya. Terkesan seadanya karena tidak dipajang di tempat yang mudah terbaca. Hanya mereka yang sedang mengantri memesan tiket masuk yang bisa melihatnya dengan baik. Itupun tampilannya berganti-ganti (tidak tetap).

2. Fungsi partisipasi

Fungsi masyarakat dalam pendidikan yang kedua adalah fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi yang dimaksudkan yaitu masyarakat mendukung untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini mendudukan masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam kemitraan pendidikan. Masyarakat yang menyadari tentang fungsi partisipasi pastilah tidak bersikap apatis terhadap situasi dan kondisi

pendidikan yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat yang menyadari fungsi tersebut menjadi “mata dan telinga” bagi mitra lainnya (keluarga, sekolah, dan pemerintah).

Mendukung pengambilan kebijakan pendidikan berarti memberikan semangat kepada pengambil kebijakan untuk tetap kuat dengan keputusannya. Dalam kebijakan pemerintah, sekolah memiliki partner yang cukup dekat yaitu Komite Sekolah yang selama ini mendampingi. Berikut ulasannya.

”Komite Sekolah sampai saat ini selalu menjadi partner kami dalam beberapa kebijakan sekolah. Kami mencoba memberdayakan komite sekolah untuk menjadi mediator dalam pengambilan kebijakan program sekolah yang terkait masalah fasilitas sekolah.” (Wawancara HM, Sabtu 29/8/2015).

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan mampu mempercepat target dan tujuan. Oleh karenanya sebanyak mungkin masyarakat mampu memberikan dukungan, karena kalau tidak maka pelaksana kebijakan menjadi gamang, sebagaimana diuraikan berikut.

”Tidak semua kebijakan pendidikan mendapat dukungan masyarakat. Hal yang paling banyak disoroti adalah kebijakan program sekolah yang terkait dengan finansial. Meskipun Pemerintah Kota sudah memberlakukan SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) tetapi saya tidak berlakukan di sini, karena menghindari konflik yang tidak perlu terjadi.” (Wawancara HM, Sabtu 29/8/2015).

Harapan dari pelaksana kebijakan adalah bagaimana media sebagai bagian dari komunitas masyarakat dapat menjadi penerang bagi semua pihak. Media massa merupakan sarana yang sangat ampuh mengubah opini yang berkembang di masyarakat. Berikut ungkapannya.

”Salah satu unsur masyarakat yang paling mempengaruhi masyarakat adalah surat kabar. Kalau tidak berhati-hati, maka berita yang dimuat tentang kebijakan program sekolah bisa merusak nama pribadi dan nama sekolah. Harapan saya adalah bagaimana media berita ini dapat memberitakan secara berimbang, akurat, dan melalui konfirmasi.” (Wawancara AS, Kamis 7/1/2016).

Masyarakat sangat potensial dalam pengambilan putusan. Hanya saja sangat diharapkan untuk terlibat secara *elegan* dan bermartabat. Bila keterlibatannya tidak melalui jalur terhormat seperti *urung rembug* maka andilnya bisa lewat lain seperti terpengaruh oleh opini publik yang justeru lebih beresiko. Berikut ulasannya.

”Partisipasi dalam pengambilan keputusan ada juga yang bersifat menekan. Berita koran biasa melakukannya secara gencar sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang akan diambil.” (Wawancara AS, Kamis 7/1/ 2016).

Keputusan yang telah diambil harus mampu dikawal bersama. Masyarakat sebagai komunitas terbesar sebaiknya turut menjaga dan menyukseskan keputusan itu. Berikut komentarnya.

”Masyarakat itu banyak unsurnya. Terus terang banyak yang mendukung tetapi tidak sedikit juga yang malah mempengaruhi pikiran publik sehingga keadaan dapat bertolak belakang dengan harapan. Usul saya, andaikan yang namanya masyarakat yang tidak mendukung itu melakukan upaya konfirmasi ke sekolah, maka hasilnya mungkin lebih baik.” (Wawancara AHK, Sabtu 2/1/2016).

Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itulah semua pihak termasuk masyarakat harus terlibat aktif sebagaimana dikemukakan berikut ini.

”Kenyataannya memang demikian. Masyarakat sekarang diminta atau tidak selalu menjadi pengamat pelaksanaan kebijakan. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan *Ombudsman* sehingga mereka dapat lebih leluasa untuk melaporkan penyimpangan kebijakan pendidikan.” (Wawancara AS, Sabtu 9/1/2016).

Masyarakat memiliki peluang yang besar dalam berpartisipasi oleh karena dilindungi oleh undang-undang. Beberapa lembaga telah diberikan peran oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting dalam kebijakan-kebijakan pendidikan.

Masyarakat berperan atau berpartisipasi dalam pendidikan anak dalam berbagai cara dan bentuk. Semuanya sangat bergantung pada kondisi dan keadaan yang sedang dan akan terjadi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau mendukung keputusan yang telah diambil seperti pada tabel 4.32 berikut.

Tabel 4.32 Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan

No.	N a m a	Partisipasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Komite Sekolah	• Pembuatan Tata tertib/tata krama peserta didik • Penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah)	Lembaga
2.	Dewan Pendidikan	• Memberikan pertimbangan kebijakan sekolah • Mengkritisi kebijakan pendidikan	Lembaga
3.	Kelompok Belajar	• Memfasilitasi peserta didik putus sekolah	Lembaga
4.	Bimbingan Belajar		Lembaga
5.	<i>Ombudsman</i>	• Memantapkan pemahaman peserta didik • Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kebijakan sekolah/pendidikan	Lembaga
6.	LSM		Lembaga

1	2	3	4
		• Mengkritisi kebijakan sekolah/pendidikan • Melaporkan penyimpangan kebijakan	
7. Media Massa		• Mempublikasikan kebijakan sekolah/pendidikan	Lembaga
8. Lainnya		• Melaporkan kebijakan yang keliru • Membuat opini di media massa	Perseorangan

Sumber: hasil olahan data primer dan sekunder 2015

Unsur masyarakat lainnya adalah Dewan Pendidikan. Partisipasi yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan (meskipun tidak seagresif *Ombudsman*) tetapi saran, pertimbangan, dan kritiknya dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kota dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sebagai contoh dalam sistem penerimaan peserta didik baru, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar mengatakan:

“Dewan Pendidikan akan menjadi lembaga yang strategis demi peningkatan kualitas pendidikan di Makassar. Selain itu, Dewan Pendidikan juga membahas rencana penerimaan siswa baru secara *online* untuk lebih *efesien, efektif*, lebih cepat, lebih mudah dan lebih hemat.” (*Berita Kota Makassar*, 8 Juni 2015).

Keterangan yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar ini, menunjukkan bahwa lembaga ini memberikan dukungan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk menyukseskan program unggulannya. Dewan Pendidikan Kota Makassar sangat memahami program unggulan dari pemerintah yaitu menjadikan Makassar sebagai *Smart City* ‘kota cerdas’.

Dewan Pendidikan menganggap bahwa salah satu penentu kesuksesan pendidikan di Kota Makassar adalah sistem manajerial sekolah. Masukan dan saran ini

ditujukan kepada keberadaan kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah yang ditugaskan tidak hanya memiliki kompetensi kepala sekolah tetapi lebih dari itu adalah persoalan moral. Berikut pernyataan berita koran oleh salah seorang anggota Dewan Pendidikan.

“Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Makassar Syaril Badaruddin mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto untuk tidak meloloskan calon kepek yang memiliki uji publik dan rekam jejak yang buruk.” (*pojoksulsel.com*, 14 Januari 2016).

3. Fungsi inklusi

Fungsi pendidikan bagi masyarakat yang ketiga adalah fungsi inklusi. Fungsi inklusi yang dimaksudkan adalah masyarakat menerima, mengakui, mendukung, dan memperjuangkan kesetaraan kesempatan dan anti diskriminasi dengan mengakui bahwa beberapa orang mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi.

Dalam dua tahun terakhir (2014 dan 2015) Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem *online* dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap warganya, seperti yang dikutip berikut ini.

- “Tata cara pendaftaran di PPDB *online* Kota Makassar SD, SMP, SMA, SMK
- Buka situs makassar.siap-ppdb.com
 - Pilih jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK)
 - **Pilih salah satu jalur penerimaan siswa baru, yaitu Jalur Reguler, Jalur Inklusi, Jalur Keluarga Pra Sejahtera, dan Jalur Domisili.**
 - Kemudian akan muncul halaman baru, lalu klik Daftar
 - Isilah data diri yang diperlukan dan pilih loket sekolah yang anda tuju.
- Cara Memilih Locket Sekolah
- Cari dan klik menu Daftar

- Kemudian klik Data Pendaftar
- Selanjutnya klik loket sekolah, dan akan muncul nama-nama Sekolah
- Pilih salah satu sekolah yang akan anda tuju atau anda minati.”

(Sumber: Dikutip dari sistem online PPDB Kota Makassar 2015).

Pendidikan inklusi di Kota Makassar sudah berjalan sekitar sembilan tahun (sejak tahun 2007). Keberadaannya yang tergolong baru sudah mulai diterima oleh masyarakat. Kendala utama yang menjadi alasan pendidikan inklusi adalah daya dukung sekolah yang masih sangat terbatas.

Masyarakat Kota Makassar tidak membiarkan jika terjadi pelanggaran kebijakan pemerintah yang menodai hal-hal yang menyangkut kesetaraan dan persamaan hak.

Tabel 4.33. di bawah ini adalah peran masyarakat dalam menjalankan fungsi inklusi.

Tabel 4.33 Peran Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Inklusi

No.	Peran Masyarakat	Keterangan
1.	Mendukung Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem rayon.	Sistem <i>online</i>
2.	Menjadi <i>watch dog</i> ‘anjing penjaga’ jika terdapat perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. (oknum) dalam pelayanan pendidikan (terutama sekolah)	Lembaga masyarakat dan Perorangan
3.	Menindaklanjuti sampai selesai penyimpangan kebijakan yakni perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum tertentu	Lembaga masyarakat

Sumber: hasil olahan data primer 2016

SMP Negeri 8 Makassar sebagai sekolah yang dipavoritkan tidak lagi dimonopoli oleh kelompok masyarakat tertentu yang berasal dari berbagai tempat. SMP Negeri 8 Makassar saat ini sudah mampu menampung peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah tanpa bersaing dengan pendaatang dari luar. Kegembiraan akan keadaan ini dikemukakan sebagai berikut.

“Saya merasa senang karena anak saya bisa bersekolah di sini. Sekolahnya bagus, dekat, mudah dijangkau, dan gratis lagi. Kapan lagi, ini merupakan kesempatan yang baik bagi orang seperti saya, walaupun ada yang dibayar itu karena anak saya ikut les Bahasa Inggris, tidak masalah.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

4. Fungsi dalam penentuan nasib sendiri

Fungsi pendidikan yang keempat yang harus diperankan oleh masyarakat adalah penentuan nasib sendiri. Fungsi dalam penentuan nasib sendiri yang dimaksudkan adalah bahwa masyarakat mendukung hak-hak orang (hak-hak anak) untuk membuat pilihan mereka sendiri. Fungsi yang keempat ini sangat terkait dengan fungsi pemberdayaan, fungsi partisipasi, dan fungsi inklusi yang telah diuraikan sebelumnya.

Peserta didik ketika keluar dari lingkungan sekolah atau rumah maka masyarakat menjadi orangtuanya. Oleh karena itu, masyarakat semestinya memberikan alternatif pilihan suasana kepada peserta didik agar dapat terjaga dari pengaruh buruk yang mengancam hasil pendidikannya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

”masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan tidak boleh berlepas tangan dari tanggung jawab akan keselamatan peserta didik. Mereka wajib memberikan suasana yang mendidik dimana saja sehingga tidak hanya suguhan fasilitas yang berdampak buruk saja yang tersedia tetapi yang lebih penting menyiapkan pilihan yang dapat membangun moral dan ilmu pengetahuan mereka.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Langkah lanjut dari fungsi penentuan nasib sendiri adalah melindungi peserta didik dalam menentukan pilihan. Melindungi pilihan anak didik sangat-sangat penting mengingat kondisi mereka yang masih labil, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pejabat pemerintah berikut ini.

”tentu kita tidak ingin bahwa generasi muda ini larut dalam pilihan hidup yang berbahaya sementara kita berdiam diri. Meskipun sebenarnya hal-hal berbahaya tersebut tidak mungkin menjadi pilihan kalau tidak tersedia dimana-mana dan gampang diperoleh. Kalau anak sudah kokoh pada pilihannya maka masyarakat harus dewasa menyikapinya. Sebagai contoh, anak didik tidak mungkin dilarang menggeluti olahraga prestasi sebagai peluang masa depannya, maka mulai dari pengembangan bakatnya harus dikawal dari berbagai segi seperti gizi, skill, moral, dan fasilitas terutama dari orangtuanya.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Sebelum menentukan pilihan, maka selain menyiapkan alternatif pilihan bagi peserta didik maka masyarakat juga harus demokratis. Memberikan pertimbangan tentang kelebihan dan kekurangan pilihan adalah salah satu pilihan terbaik, sebagaimana diungkapkan berikut ini.

”tentu saja kita harus memberikan pertimbangan kepada mereka. Dan pertimbangan ini diupayakan terang-benderang sehingga apa yang menjadi pilihannya betul-betul sesuai dengan kondisi dirinya. Jikalau perlu berkonsultasi kepada pakar atau ahli yang bisa menjelaskan secara detail tentang kelebihan dan kekurangan pilihannya.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Memberikan pilihan tentu tidak berarti berlepas tangan. Masyarakat sebagai orangtua ketika anak berada di situ harus turut bertanggung jawab dengan pilihan yang dilakukan peserta didik, seperti yang diungkapkan berikut ini.

”iniilah yang dinamakan masyarakat maju. Jika semua anak usia sekolah dipandang sebagai aset bangsa yang menjanjikan masa depan maka apapun pilihan mereka maka kita harus turut berada di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri mengiringi langkah-langkahnya.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Dukungan masyarakat dalam memberikan pilihan nasib sendiri bagi anak didik tentu tidak dilakukan tanpa adanya perlakuan. Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan dapat berlaku sebagai “orangtua” yang hanya akan memberikan kebebasan kepada anak didik jika telah melakukan upaya-upaya pendidikan. Peran kehidupan masyarakat banyak peluang dan kegiatan yang bisa diambil sebagai pilihan, seperti disajikan pada tabel 4.34. di bawah ini.

Tabel 4.34 Peran Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Penentuan Nasib Sendiri

No.	Jenis Peran	Keterangan
1.	Memberdayakan nilai kognitif, afektif, dan psikomotor yang telah diperoleh peserta didik/anak didik dari sekolah dan keluarga	Semua hal yang bersifat mendukung pilihan-pilihan baik dari peserta didik atau anak didik
2.	Berpartisipasi dalam memberikan dukungan moral dan material sehingga peserta didik/anak didik kokoh pada pilihan-pilihannya (kognitif, afektif, dan psikomotor).	
3.	Menerima perbedaan, mendukung dan memperjuangkan persamaan hak dan anti terhadap diskriminasi bagi semua	

Sumber: Hasil olahan data pimer 2016

Setiap orang dapat terpengaruh suasana lingkungan. Oleh karena itu anggota masyarakat yang baik idealnya berada di atas sebuah kesepakatan untuk menciptakan suasana yang baik bagi perkembangan generasi mudanya. Pada tabel 4.35 berikut ini adalah wadah pendidikan yang sering mendapat kunjungan dari peserta didik.

Tabel 4.35. Wadah Pendidikan di Masyarakat Kota Makassar

No.	Wadah Pendidikan	Keterangan
1.	Komunitas Agama	Pengawasan pembimbing
2.	Lembaga Bimbel	Pengawasan pembimbing
3.	Karang Taruna	Pengawasan pihak kelurahan
4.	Komunitas Olah Raga	Tanpa pengawasan khusus
5.	Komunitas Seni	Tanpa pengawasan khusus
6.	Komunitas Hobi	Tanpa pengawasan khusus
7.	Media Publik	Tanpa pengawasan
8.	Media Hiburan	Tanpa pengawasan khusus

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

D. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Bidang Pendidikan

Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah Wali Kota Makassar sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah, juga berupaya melakukan *sinkronisasi* sehingga regulasi nasional dapat bersinergi dengan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Makassar.

Visi:

**“MEWUJUDKAN KOTA DUNIA UNTUK SEMUA, TATA LORONG
BANGUN KOTA DUNIA”**

Misi:

- Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
- Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia
- Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi

MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA

- Menuju bebas pengangguran
- Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua
- Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam

- Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
- Sampah kita DIA tukar beras
- Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
- Rumah kota murah untuk rakyat kecil
- Hidup hijau dengan kebun kota

KOTA NYAMAN KELAS DUNIA

- Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya
- Bentuk badan pengendali pembangunan kota
- Bangun *Waterfront City* selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar
- Bangun sistem transportasi publik kelas dunia
- Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia
- Bangun *Biringkanal city* dan delapan ikon kota baru lainnya
- Bangun taman tematik
- Tata total lorong

PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA BEBAS KORUPSI

- Menuju PAD Rp 1 triliun
- Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan
- Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun
- Pelayanan publik langsung ke rumah
- Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan
- Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
- Bebas bayar internet di ruang publik kota "Makassar *Cyber City*"
- Bentuk Makassar *Incorporated* dan Bank of Makassar

(Sumber: data online <http://makassarkota.go.id/>).

Khusus untuk bidang pendidikan dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pemerintah Kota Makassar dalam Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2013 lebih rinci mengatur tentang fungsi pemerintah daerah dalam pendidikan. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar seperti yang disajikan pada tabel 4.36 di bawah ini.

Tabel 4.36 Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

No.	Fungsi	Keterangan
1.	Menyusun rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana	Paket
2.	Menyusun rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana	
3.	Melaksanakan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana	
4.	Memberi perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana.	
5.	Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya	
6.	Melaksanakan kesekretariatan dinas	
7.	Membina unit pelaksana teknis	

Sumber: Diadaptasi dari renstra Dinas Pendidikan & Kebudayaan Makassar 2015

Sebagai rujukan dalam pembahasan hasil penelitian ini, fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan mengacu kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah

memerankan fungsi pendidikan sebagai berikut: (1) penanggung jawab pendidikan, (2) pembuat, pembina, dan pengendali kebijakan pendidikan, (3) penjamin mutu dan dana pendidikan, dan (4) penyelenggara pendidikan.

1. Penanggung jawab pendidikan

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan memiliki pengertian bahwa pemerintah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari pelaksanaan pendidikan. Sebagai penanggung jawab, pemerintah memiliki kewenangan yang luas sekaligus memikul beban yang sangat besar.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar dikatakan bahwa: “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas **tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.**” Tanggung jawab ini secara khusus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Makassar) melindungi dirinya dengan regulasi. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum sekaligus menjadi batas-batas kewenangan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsinya. Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar seperti yang disebutkan berikut.

”Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah

Nomor 7 Tahun 2013), disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar merupakan **unsur pelaksana Pemerintah Kota** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.”

(Sumber: *renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, 2015*).

Pelaksanaan program wajib belajar, pemerintah membuat regulasi tentang wajib belajar. Berikut ini petikan hasil wawancara.

”sebagai landasan yuridis, wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sudah lama tersirat dalam UUD 1945. Hanya saja secara tersurat tidak bersamaan dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau pun peraturan menteri tentang itu. Sekarang ini bahkan sudah sampai di tingkat perda ataupun peraturan walikota.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Langkah selanjutnya setelah regulasi dijadikan sebagai ikatan dan aturan maka dengan regulasi tersebut pemerintah kemudian merancang program yaitu program wajib belajar. Berikut petikannya.

”langkah tindak lanjut dari sebuah peraturan, apakah itu peraturan yang bersifat nasional ataukah hanya kebijakan pemerintah kota adalah bagaimana merancang program. Seperti halnya program wajib belajar, itu sudah lama disahkan penggunaannya dan perbaikan-perbaikannya didasarkan pada keadaan yang telah dilaksanakan.” (Wawancara HSB, Rabu 26/1/2016).

Hal yang tidak boleh diabaikan dalam menyukseskan sebuah regulasi adalah sosialisasi program kerja. Regulasi tentang wajib belajar harus dipahami betul oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar khalayak memahami keberadaan program tersebut dan mendapatkan saran/masukan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

”sosialisasi itu sudah pasti. Sebuah aturan tidak bisa langsung begitu saja diberlakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi dianggap sudah memadai. Tentu sosialisasi ini bertujuan sebagai uji publik mengenai keberterimaan daripada sebuah kebijakan. Diharapkan lewat sosialisasi inilah diperoleh masukan-masukan untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan selanjutnya.” (Wawancara KPS, Kamis 27/1/2016)

Sasaran program wajib belajar adalah usia wajib belajar. Secara akurat sasaran program wajib belajar perlu diketahui. Oleh karena itulah harus dilakukan pendataan, seperti yang diungkapkan oleh pemerintah berikut ini.

”kewajiban pemerintah dalam program wajib belajar adalah melakukan pendataan usia wajib belajar. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kuantitas usia wajib belajar secara keseluruhan di kota Makassar. Dengan mengetahui kuantitasnya maka kita dapat dengan mudah melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan yang diharapkan dan semua usia wajib belajar tersebut terakomodasi dalam pelayanan.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Bentuk tanggung jawab pemerintah yang lainnya adalah melaksanakan program wajib belajar. Bagaimana pemerintah Kota Makassar melaksanakan program tersebut? Berikut ini komentar pemerintah Kota Makassar.

”pelaksanaan program wajib belajar dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus berkesinambungan. Wajib belajar ini merupakan amanah dari regulasi kita. Sekarang ini, pemerintah kota juga mencanangkan ”semua anak bisa sekolah” yang berarti tidak boleh ada kendala yang bisa menghalangi seorang anak usia sekolah untuk tidak bersekolah. Mudah-mudahan nanti kebijakan ini meningkat menjadi ”semua anak wajib sekolah” sehingga harapannya ke depan para orangtua dapat dipaksa secara hukum bila tidak menyekolahkan anaknya.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Biasanya program yang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan. Ketika program sementara terlaksana maka kegiatannya adalah monitoring. Ketika sudah selesai maka kegiatannya adalah evaluasi. Berikut ulasannya.

”langkah selanjutnya setelah program sementara dan sedang terlaksana adalah monev ’monitoring dan evaluasi’. Langkah ini bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan. Apabila didapati adanya kekurangan maka akan diperbaiki, apabila sudah sesuai dengan target maka dupayakan dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi.” (Wawancara HSB, Rabu 26/1/2016).

Berdasarkan data (wawancara, dokumen, dan pengamatan) yang diperoleh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar lebih banyak bertanggung jawab

pada bidang pendidikan formal. Sedangkan untuk pendidikan non formal dan informal masih banyak yang luput. Dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dikatakan bahwa:

”Tanggung jawab seorang guru atau pihak sekolah semestinya hanya sampai pada jam pelajaran sekolah berlangsung. Kalau sudah terlepas dari jam sekolah maka otomatis sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Sepintas apa yang dikemukakan oleh pejabat tersebut benar adanya. Bahkan mayoritas orang berpendapat demikian. Namun bila dikaji lebih mendalam baik Undang-undang No. 20 Tahun 2003 maupun Perda (Lembaran) Daerah No. 7 Tahun 2013 disitu sama sekali tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (artinya 24 jam).

Tanggung jawab pendidikan 24 jam ketika dikonfirmasi kepada informan HSB (Kabid Dikdas Kota Makassar). HSB mengungkapkan bahwa:

”Sebenarnya bagus tetapi kemitraan 24 jam seperti ini tidak dikenal dalam aturan kita. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan di sekolah yang saya pahami adalah hanya terbatas pada keberadaan Komite Sekolah. Itulah sebabnya setelah saya baca proposal anda langsung teringat dengan hasil penelitian saya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu Komite Sekolah” (Wawancara HSB, Rabu 26/1/2016).

Merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, maka tanggung jawab pendidikan 24 ini bukanlah hal keliru. Oleh karena itu, semestinya tanggung jawab yang diemban pemerintah selalu mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yaitu:

“Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No. 20 Tahun 2003).

2. Pembuat, pembina, dan pengendali kebijakan pendidikan

Fungsi berikutnya yang diperankan oleh pemerintah adalah sebagai pembuat, pembina dan pengendali daripada kebijakan di bidang pendidikan. Fungsi ini sangat terkait dengan fungsi pertama yaitu penanggung jawab pendidikan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah harus membuat kebijakan sebagai perangkat yang diharapkan dapat memudahkan pencapaian tujuan.

Fungsi pemerintah sebagai pengendali kebijakan dapat mempermudah dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut (pemerintah).

”mengarahkan penyelenggaraan pendidikan merupakan amanat regulasi kita. Mengarahkan di sini dimaksudkan agar pendidikan yang kita laksanakan dapat terlaksana secara optimal. Apakah yang harus diarahkan? Ya tentu saja mulai dari letaknya apakah cukup strategis, sasarannya apakah cukup proporsional, dan yang tak kalah pentingnya adalah azas kebutuhan dan kemampuan penyelenggaraan.” (Wawancara HSB, Rabu 26/1/2016).

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan tidak menutup mata dan tidak membiarkan user pendidikan berjalan sendiri. Pemerintah senantiasa melakukan pembimbingan dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan berikut ini.

”pembimbingan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun nonformal, sekarang ini juga sedang diprioritaskan pendidikan keluarga (informal) harus berjalan efektif. Artinya jumlah lembaga pendidikan dapat terlayani secara optimal dalam melakukan pembinaan. Baik tenaga profesional, tenaga teknis, maupun infrastruktur dan suprastrukturnya.” (Wawancara AH, Sabtu 30/7/2016).

Selain pembimbingan dan pengarahan pemerintah senantiasa menyalurkan bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan. Bantuan ini selalu diupayakan secara

optimal dan berkeadilan. Berkeadilan berdasarkan skala kepentingan dan proporsional, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemerintah berikut ini.

”hakikatnya pemerintah ingin membantu seoptimal mungkin semua lembaga pendidikan yang dilaksanakan. Tetapi terkendala dengan keterbatasan kemampuan sehingga yang kita upayakan adalah melakukan urutan skala prioritas dalam memberikan bantuan dan ini harus.” (Wawancara AH, Sabtu 30/7/2016).

Pemerintah dalam mengendalikan kebijakan, melengkapi dirinya dengan sumber-sumber informasi. Salah satu sumber informasi yang biasa dipakai adalah pengawas pendidikan, seperti diungkapkan berikut ini.

”pengawasan tentu saja. Untuk pendidikan formal saja sekarang justeru terjadi *over* kuantitas tenaga pengawas. Tenaga pengawas yang kita punya melebihi kebutuhan, ada juga baiknya karena kekhawatiran dalam bidang pengawasan tidak lagi terjadi, tetapi yang kasian adalah pengawasnya terjadi pembagian yang tidak proporsional untuk mencukupi persyaratan seorang pengawas.” (Wawancara AH, Rabu 2016)

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran dan pengembangan dari UU No. 20 Tahun 2003 dipertegas penetapan rencana dan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

”Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar adalah **merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan**, meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana.” (Sumber: *renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar*, 2015).

Kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Makassar dibuat dalam redaksi yang bersifat luas dan luwes (normatif). Adapun maksudnya supaya kebijakan tersebut dapat dijabarkan atau dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih empiris sehubungan situasi dan kondisi yang bersifat kontemporer. Sehubungan dengan penelitian ini, kebijakan pemerintah yang dibahas meliputi: (1) kebijakan di bidang pendidikan dasar, (2) kebijakan di bidang pendidikan non formal dan informal.

1) Kebijakan di bidang pendidikan dasar

Pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam melaksanakan kebijakannya Pemerintah Kota Makassar menetapkan tugas yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dan secara teknis operasional dijalankan oleh Bidang Pendidikan Dasar.

”Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja program dan pengembangan kurikulum pendidikan TK, SD dan SMP, menilai dan menetapkan izin operasi pendidikan dasar, menata kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dan penguatan mutu pendidikan.”

Sumber: renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 2015.

Pada ujung kalimat di atas dikatakan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melakukan **penguatan mutu pendidikan**. Mutu pendidikan meliputi mutu nilai afektif, mutu nilai kognitif, dan mutu nilai psikomotor. Ketiga mutu nilai tersebut harus seimbang satu sama lain.

Dalam rangka menguatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan beberapa kebijakan seperti yang disajikan pada tabel 4.37 berikut ini.

Tabel 4.37 Kebijakan Populer Pemerintah Kota Makassar dalam Pendidikan

No.	Kebijakan Populer	Keterangan
1.	Rekrutmen Kepala Sekolah (Lelang Jabatan Kepala Sekolah)	Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Sistem <i>Online</i>	Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk program inklusi
3.	PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan)	Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2014, 2015, 2016

Pemerintah Kota Makassar berkeinginan mendapatkan kepala sekolah yang memiliki komitmen membangun pendidikan berkualitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Wali Kota Makassar ”revolusi pendidikan adalah harga mati untuk menciptakan pendidikan berkualitas serta berkarakter yang tak lama lagi berlangsung di Makassar.” (*tribunnews.com*, 2016). Wali Kota Makassar berkeinginan semua kepala sekolah yang berhasil direkrut dapat bersinergi mewujudkan program pemerintah Kota yang ingin mewujudkan *smart city* ’kota cerdas’.

Sedangkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) sasarannya adalah orangtua pra sejahtera dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini satu paket antara pekerja anak dan orangtua yang kehidupannya tidak sejahtera sehingga memaksa anaknya untuk mencari nafkah.

“Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal MI, saat membuka acara secara resmi menyampaikan pesan kepada seluruh orangtua agar memberikan hak kepada anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas, “Dengan adanya program PPA-PKH ini, diharapkan mampu mengembalikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan,”. Selain program PPA-PKH, pemerintah kota menyiapkan beasiswa miskin yang diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, karena ini sudah menjadi hak setiap anak dan kewajiban bagi pemerintah dan orangtua untuk memenuhinya,” ujarnya.”
Sumber: <http://makassarkota.go.id/berita-201-pemkot-makassar-stop-pekerja-anak.html>, 2016.

Pernyataan dari Pemerintah Kota Makassar tersebut menandakan bahwa hak pendidikan mesti diberikan anak. Tidak ada alasan bagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

2) Kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal

Bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal terbagi atas tiga seksi yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Pendidikan Masyarakat, dan (3) Kursus dan Pelatihan. Dalam fungsi layanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal, dan Informal memiliki tugas sebagai berikut:

”Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, menilai dan menetapkan izin operasional penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal.”

Sumber: renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 2015

Keseriusan pemerintah pusat terhadap pendidikan keluarga ditandai dengan terbentuknya satu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015.

3. Penjamin dana pendidikan

Peran pemerintah selanjutnya adalah menjamin tersedianya dana pendidikan yang dibutuhkan oleh warga negara. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Hal pendidikan merupakan amanah penting dan prioritas dari UUD 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 hasil amandemen disebutkan: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah memberikan layanan terselenggaranya pendidikan dengan cara memberikan jaminan dana. Jaminan dana selama ini sudah dirasakan oleh semua sekolah tanpa kecuali, berikut ulasannya.

”implementasi layanan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan jaminan dana untuk semua sekolah. Sekarang ini semua sekolah sudah mendapatkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) bahkan dana Gratis meskipun kurang lancar, yang disesuaikan dengan banyaknya peserta didik yang dibina. Ditambah lagi dengan bantuan-bantuan berupa bangunan kelas, laboratorium, beserta sarannya meskipun dilakukan secara bertahap dan bergiliran.” (Wawanacara, HSB Rabu 26/1/2016).

Selain itu pemerintah juga memberikan kemudahan bagi terselenggaranya pendidikan. Secara khusus pemerintah Kota membuat terobosan dengan motto ”semua anak bisa sekolah” dan itu diwujudkan lewat SPPDB, seperti diungkapkan berikut.

”dalam rangka memberikan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat tentu harus dengan totalitas atau tidak sekedarnya saja. Sekarang ini bapak Wali Kota Makassar beserta jajarannya mencoba melakukan pelayanan pendidikan yang memudahkan yaitu SPPDB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem berkeadilan.” (Wawancara AH, Sabtu 30/7/2016).2016).

Sebagai langkah operasional, amanat UUD 1945 hasil amandemen kemudian dituangkan dalam Undang-undang. Menguatkan secara operasional, pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban Negara diatur dalam UU No.20 Tahun 2003.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Sumber: UU No. 20 Tahun 2003

Persoalan dana pendidikan sudah ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Angka 20% dari APBN merupakan porsi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk bidang lain. Besaran persentase yang dianggarkan untuk dana pendidikan merupakan bukti bahwa bidang pendidikan merupakan prioritas pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 disebutkan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Sumber: UUD 1945 hasil amandemen

Dalam hal pembiayaan atau pendanaan pendidikan dasar sebagai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sering mengalami masalah di Kota Makassar. Beberapa masalah yang kerap terjadi di Makassar yang terkait dengan masalah pembiayaan tidaklah sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah Kota. Hanya saja faktor komunikasi yang tidak tersedia sehingga bermasalah. Adapau masalah pembiayaan itu seperti yang disajikan pada tabel 4.38 di bawah ini.

Tabel 4.38 Masalah Pembiayaan Pendidikan yang Terjadi di Kota Makassar

No.	Pembiayaan	Keterangan
1.	Tunjangan profesional guru	Kadang-kadang terlambat dan tidak disiapkan tempat bertanya
2.	Dana BOS dan dana pendidikan Gratis	Terlambat dan peruntukannya bersifat kaku
3.	Pembiayaan di luar peruntukan dana BOS dan dana pendidikan Gratis	Menjadi polemik
4.	Bantuan yang tidak sesuai kebutuhan	Tidak ada komunikasi

Sumber: Hasil olahan data primer 2016

Imbas dari buntutnya komunikasi tersebut adalah demonstrasi guru. Hal ini dapat dilihat pada sajian gambar 4.21 berikut ini.



“MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM. Baru saja diambil sumpahnya, 50 legislator terpilih periode 2014-2019 langsung mendapat 'shok terapi' aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Makassar, Senin (8/9/2014). Puluhan guru dari berbagai sekolah di Makassar menggelar aksi demonstrasi..”

Pengalaman seperti yang dikutip di atas, semestinya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Makassar. Guru yang dijunjung tinggi sebagai profesi yang

dimuliakan menjadi kurang pantas bila melakukan aksi jalanan (unjuk rasa). Salah satu jalan keluar dari masalah ini adalah membangun komunikasi yang jelas.

“Dengan adanya peristiwa demonstrasi seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi hubungan guru dengan pemerintah kota. Diperlukan wadah bagi guru untuk dapat mengomunikasikan setiap kejanggalan yang terjadi” ucapnya (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). “Meskipun demikian perlu dipahami bahwa keterlambatan ini bukan karena ditahan oleh pemerintah kota, tetapi semata-mata faktor SPB (Surat Perintah Bayar) yang belum turun, faktor yang lain adalah ketidaklengkapan berkas administrasi sebagian guru”, ujarnya.”
Sumber: penjelasan ibu APA (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Masalah dana BOS dan dana Gratis adalah bagaimana membelanjakannya. Menggunakan dana ini tidak boleh sembarang membelanjakan meskipun ada yang dibutuhkan, setiap item harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan. Jadi peruntukannya terkesan kaku. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

“Barangkali di antara semua kepala bidang sayalah yang paling sering berteriak jika ada pertemuan nasional tentang dana BOS dan dana Gratis. Kita kelebihan dana tetapi tidak dapat dibelanjakan meskipun ada hal yang sangat kita perlukan. Kalau dibelanjakan yang bukan peruntukannya (meskipun perlu) maka bisa-bisa berhadapan dengan hukum.” *Sumber: AH (kepala bidang di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar).*

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa meminta bantuan dalam bentuk uang dari orangtua peserta didik merupakan hal yang sangat sensitif. Apabila salah kata, salah kelola pastilah membahayakan nasib kepala sekolah. Jika kepala sekolah salah dalam melangkah maka menjadi “bumerang” yang dapat menggoyahkan kedudukannya. Orangtua melakukan demonstrasi menuntut semua biaya sekolah dibebaskan seperti yang tersaji pada gambar 4.22. berikut ini.



Gambar 4.22 Unjuk Rasa Menuntut Pendidikan Gratis Total
 Sumber: <http://www.antarane.ws.com/berita/361562/dana-pendidikan-gratis-rp33003-miliar-makassar-dipotong>

Pengetahuan yang mendalam terhadap peserta didik ini mesti dibagi-bagi kepada setiap guru mitra terutama wali kelas. Sehingga semua peserta didik dapat dipetakan berdasarkan kompetensi, kegemaran, bakat, suku, agama, ras dan tingkat kemapanan ekonomi mereka. Menurut AH, seorang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan kepala sekolah mengatakan bahwa:

“Seorang kepala sekolah harus tahu sampai sekecil-kecilnya tentang sekolah. Oleh karena itu dia harus datang paling awal dan pulang paling akhir. Setiap hari mesti datang pagi-pagi mendahului semua orang. Dengan cara ini, ia dapat mengetahui siapa anak penguasa dan siapa anak pengusaha. Kepala sekolah bukan kepala ruangan yang hanya tinggal di ruangnya tetapi setelah selesai menjemput peserta didik harus berkeliling memantau proses pembelajaran di semua kelas. Cara ini sekaligus mengetahui siapa guru yang rajin dan yang malas. Sebenarnya masalah bantuan biaya operasional sekolah sangat mudah diperoleh dari orangtua peserta didik jika kepala sekolah dan guru (wali kelas) memiliki data yang lengkap tentang siapa peserta didiknya. Guru dan kepala sekolah tidak perlu mengekspos secara terbuka hal-hal sensitif seperti itu. Karena persoalan bantuan orangtua dapat diwujudkan dengan cara-cara kekeluargaan.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Pembiayaan lain yang juga sering bermasalah adalah penyediaan atau pengadaan bahan dan alat kebutuhan sekolah yang tidak sesuai keperluan. Bahan dan alat seperti kebutuhan laboratorium dan perpustakaan seringkali diberikan pemerintah tanpa melalui analisis kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh guru pengelola laboratorium SMP Negeri 8 Makassar.

“Biasa kita bingung dengan sumbangan yang datang tiba-tiba. Alat-alat dan bahan laboratorium yang diberikan itu sebenarnya masih banyak di sekolah, kami tidak membutuhkannya tetapi dikasih. Mestinya pihak sekolah dikonfirmasi dulu apa yang dibutuhkan baru bahan dan alatnya dikirim kemari.” (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

4. Penyelenggara pendidikan bermutu

Fungsi pendidikan berikutnya yang wajib diperankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (pemerintah Kota) adalah menyelenggarakan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu adalah target yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengelola pendidikan.

“kebijakan pemerintah kota Makassar dalam bidang pendidikan sudah menjadi konsumsi publik. Melalui visi dan misi dan program unggulan wali kota yaitu ingin menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkarakter.” (Wawancara AH, Sabtu 30/7/2016).

Penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak lantas melupakan prinsip-prinsip keadilan. Mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Makassar memberi solusi melalui SPPDB sebagaimana penjelasan berikut ini.

”SPPDB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diberlakukan pemerintah Kota telah menggembirakan warga yang bertempat tinggal di dekat sekolah yang mungkin selama ini sulit disentuh, contohnya kalau seorang anak tinggal di dekat SMAN 3 Makassar dengan jarak maksimal 1 km, maka ia diterima lewat jalur **domisili**. Ada lagi jalur untuk kaum ekonomi lemah yang

disebut jalur **prasejahtera**, jalur untuk kaum **abilitas** yang disebut jalur **inklusi**, dan jalur lainnya yaitu **kemitraan**, **reguler**, dan **prestasi**. Harapannya semua jalur ini memiliki porsi masing-masing dan calon peserta didik hanya bersaing dalam jalurnya saja.” (Wawancara AH, Sabtu 30/7/2016).

Pendidikan bermutu merupakan amanat dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Pendidikan bermutu terkait dengan akreditasi. Pada pendidikan formal akreditasi dilakukan dengan menilai delapan standar pendidikan. Adapun delapan standar pendidikan yaitu; (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Delapan standar ini menjadi indikator mutu yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu, akreditasi A (tertinggi), akreditasi B, dan akreditasi C (terendah). Adapun tujuannya seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 bahwa:

“Akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu: (1) memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.”

Sumber: Kepmen Pendidikan Nasional No.087/U/2002

Perkembangan manfaat dari nilai akreditasi sebuah sekolah saat ini belum banyak dipahami dan dirasakan baik internal sekolah maupun pihak eksternal. Namun yang patut dicatat bahwa akreditasi sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar. Meskipun baru sekedar wacana tetapi sudah merupakan kabar gembira

bahwa nilai akreditasi sekolah (lembaga formal) akan dijadikan dasar mendaftar pada sekolah tingkat lanjutan.

“Dalam rangka menjaga mutu pendidikan yang ditandai oleh nilai akreditasi, kedepan nantinya di Kota Makassar ini akan diusulkan supaya penerimaan peserta didik baru berbasis nilai akreditasi, maksudnya sekolah yang berakreditasi A hanya bisa menerima peserta didik dari alumni sekolah yang berakreditasi A pula.”

Sumber: Penjelasan APA (Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan, 2015).

Pernyataan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di atas mudah-mudahan bukan sekedar wacana sesaat tetapi sesegera mungkin ditindaklanjuti. Sehingga keberadaan nilai akreditasi bukan hanya menjadi simbol kebanggaan tanpa manfaat.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat dari regulasi tersebut baik pemerintah maupun pemerintah Kota menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Sebuah data yang berhasil diperoleh menggambarkan kinerja layanan pendidikan dasar dari tahun 2009 sampai tahun 2013 seperti pada tabel 4.39 di bawah ini.

Tabel 4.39 Kinerja Terhadap Layanan dan Luaran Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Seluruh Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar

No.	Indikator	Kondisi Tahun 2009	Capaian Tahun 2010	Capaian Tahun 2011	Capaian Tahun 2012	Capaian Tahun 2013	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	APK SD/MI/SDLB	106,73	107,17	113,41	115,00	115,22	98,48
2.	APK SMP/MTs/SMPLB	98,81	98,88	105,00	108,00	108,67	96,17
3.	APM SD/MI/SDLB	98,27	98,29	99,06	99,45	99,41	99,61
4.	APM SMP/MTs/SMPL	93,16	93,17	95,16	96,16	97,15	100,00
5.	Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SD/MI/SDLB 0.7%.	0,02	0,01	0,004	0,003	0,001	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMP/MTs/SMLB 1%	0,37	0,25	0,18	0,18	0,001	200,00
7.	Rata-rata hasil UASBN SD/MT/SDLB	7,24	7,35	7,62	7,75	7,85	7,85
9.	Persentase SD/SDLB telah berakreditasi.	82,20	82,20	82,20	85,00	98,00	100,00
10.	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	52,54	52,54	52,54	70,00	81,50	100,62
11.	Persentase lulusan SD memiliki kompetensi mengoperasikan computer	10,00	15,00	20,00	39,00	45,00	107,14
12.	Persentase lulusan SMP memiliki kompetensi mengoperasikan computer	20,00	42,00	50,00	85,00	87,00	145,00
13.	Penambahan 1 SD SSN di tiap kecamatan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	41,67
14.	Jumlah SD yang termasuk Sekolah Kategori Mandiri (SKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00
15.	Jumlah SD yang termasuk Rintisan SBI	1	1	0	1	0	0
16.	Jumlah kelas unggulan SD	0	20	0	40	40	50
17.	Penambahan SMP SSN	8	8	8	5	8	80
18.	Jumlah SMP yang termasuk Sekolah Kategori Mandiri (SKM)	1	1	0	2	3	100
19.	Jumlah SMP yang termasuk Rintisan SBI	4	4	2	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Jumlah kelas unggulan SMP	0	20	30	40	65	100
21.	Pembelajaran di SMP dilaksanakan berbasis TIK (e-learning).	1	8	15	30	30	120
Rata-rata Capaian							98,48

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 2015

Besaran persentase realisasi dari tabel 4.34 yaitu 98,48% merupakan prestasi yang membanggakan. Bila ditelisik satu persatu capaian setiap tahun maka kondisinya cenderung selalu mengalami peningkatan untuk item positif.

E. Pembahasan

1. Peran Keluarga dalam Pendidikan di Kota Makassar

Peran keluarga dalam pendidikan menjadi pondasi pertama bagi setiap anak didik. Orangtua terutama ibu disebut sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi setiap manusia yang lahir. Keberadaan peran keluarga ditunjukkan oleh sejauh mana elemen dari keluarga memainkan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Fungsi keluarga dalam hal pendidikan merupakan fungsi yang sangat vital karena menyangkut transmisi nilai atau pewarisan nilai. Nilai yang dikembangkan hingga saat ini dalam dunia pendidikan adalah nilai afektif, nilai kognitif, dan nilai psikomotor. Mewujudkan ketiga nilai tersebut keluarga memerankan beberapa fungsi. Fungsi keluarga dalam hal pendidikan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Epstein (2002) meliputi enam

fungsi yaitu: (1) *parenting*, (2) *communicating*, (3) *volunteering*, (4) *learning to home*, (5) *decision making*, dan (6) *collaborating with community*. Keenam fungsi keluarga ini dijadikan dasar pijakan untuk menjelaskan (eksplanasi) peranan keluarga dalam pendidikan di Kota Makassar.

a. *Parenting*

Parenting berarti menjadi orangtua atau memerankan fungsi sebagaimana layaknya orangtua secara ideal (semestinya) terhadap anak. *Parenting* merupakan fungsi orangtua yang diperankan secara khusus dalam pendidikan anak. Dalam fungsinya sebagai *parenting*, orangtua menunjukkan kedekatan terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikis. Fungsi *parenting* berlangsung cukup lama. Pengalaman hidup orangtua yang panjang dan melelahkan dimulai dari mengandung janin, melahirkan bayi dan menyusui sampai anak bisa disuapi hingga menjadi anak-anak kemudian tumbuh menjadi remaja. Pengalaman tersebut telah menciptakan hubungan kedekatan emosional yang sangat kuat dan mengikat antara anak dan orangtua (terutama ibu). Orangtua sangat mengenal anaknya dan anak begitu paham dengan orangtuanya.

Secara universal fungsi *parenting* merupakan fungsi yang muncul alamiah. Fungsi *parenting* merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, karena Tuhan sebagai pencipta kehidupan. Tuhan menganugerahkan instink 'naluri' dalam hal *parenting* baik kepada makhluk yang bernama binatang apalagi kepada manusia. Keadilan Tuhan mengatakan bahwa bayi yang baru lahir adalah sosok makhluk yang

serba lemah. Manusia yang baru lahir secara fisik belum mampu mencari makanan dan minuman sendiri. Baik makanan maupun minumannya sangat tergantung pada Tuhan melalui perantara orangtuanya. Semua rezki berupa makanan, minuman, dan kasih sayang, dititipkan oleh Tuhan kepada orangtua sebagai sosok yang paling dekat dengan anaknya. Sang bayi adalah makhluk yang masih lemah tak berdaya dan hanya sanggup menangis sebagai ekspresi meminta pertolongan agar kebutuhannya segera dipenuhi.

Secara instink pula orangtua (ibu) menyambut ekspresi (tangisan) bayi dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh bayinya. Setelah menemukan apa penyebab tangisan bayinya kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan pertolongan, maka seketika itu pula tangisan bayi berangsur-angsur reda. Demikian seterusnya hingga sang bayi tumbuh dan berkembang sedikit demi sedikit seiring dengan penambahan usianya. Selama anak belum mencapai kedewasaan yang utuh baik secara fisik maupun secara psikis, maka selama itu pula fungsi *parenting* masih sangat dibutuhkan.

Fungsi *parenting* merupakan fungsi orangtua yang sangat mendasar karena fungsi ini digerakkan oleh instink (naluri) manusia. Instink merupakan kekuatan yang berada di luar kekuasaan manusia dan makhluk hidup lain yang memilikinya. Oleh karenanya fungsi *parenting* selalu ada pada diri manusia dalam setiap pergantian kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun demikian fungsi *parenting* selalu ada dalam kehidupan manusia dan mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan fungsi *parenting* merupakan hal yang wajar terjadi pada manusia. Manusia adalah makhluk dinamis yang terus-menerus berubah dan berkembang dari masa ke masa. Salah satu organ tubuh penting manusia yang bernama otak memiliki

keunikan. Otak manusia merupakan organ tubuh yang terus-menerus berkembang seiring dengan aktivitas berpikir sebagai respon dari stimulus yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perabaan. Perkembangan yang terjadi tersebut kemudian berimbas pada perubahan fungsi *parenting*.

Fungsi *parenting* dalam pendidikan keluarga mencakup banyak hal. Dalam penelitian ini, fungsi *parenting* dibatasi berdasarkan beberapa hal penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Epstein (2002) yaitu: (1) pemberian bimbingan, yaitu bagaimana orangtua memberikan bimbingan kepada anaknya, (2) perawatan, yaitu bagaimana orangtua merawat anaknya, (3) pemberian motivasi, yaitu bagaimana orangtua memberikan motivasi kepada anaknya, (4) penegakan disiplin, yaitu bagaimana orangtua dalam mengajarkan tentang kedisiplinan kepada anaknya.

1) Pemberian bimbingan

Secara bahasa bimbingan dapat diartikan dengan menuntun, mengajarkan tentang cara mengerjakan sesuatu. Bahkan bimbingan memiliki arti yang lebih khusus yaitu memegang tangan anak mengarahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh tangan pembimbingnya. Pada umumnya pemberian bimbingan untuk anak kecil dilakukan dengan jarak fisik yang sangat dekat. Bimbingan berarti mengajarkan hal-hal yang mencakup persoalan yang sangat mendasar dan dilakukan dengan menghadirkan diri di dekat anak didik.

Orangtua adalah orang dewasa yang mendampingi anaknya. Dalam pendampingan yang dilakukannya, setiap orangtua memiliki perbedaan dalam hal cara

pendekatan. Perbedaan pendekatan orangtua dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti faktor kultur, faktor sosial, dan faktor tingkat pendidikan. Pemberian bimbingan orangtua kepada anak didik dapat dilakukan dengan cara memberikan nasehat kepada anak, mengingatkan mereka, memperlihatkan contoh, mengawasi secara dekat, memberikan hadiah atau memberikan penghargaan jika anak mendapatkan keberhasilan atau prestasi dan memberikan hukuman jika melakukan pelanggaran.

Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh orangtua peserta didik di SMP Negeri 8 Makassar pada prinsipnya bersifat universal. Universal yang dimaksudkan adalah bahwa pemberian bimbingan orangtua kepada anaknya di tempat lain pun terjadi hal yang sedemikian. Meskipun ada yang unik namun tidak banyak berbeda dibandingkan dengan pemberian bimbingan bagi anak yang bersekolah di tempat lain.

Berdasarkan perilaku yang diamati tersebut ada satu yang menarik dibicarakan yaitu menghindari pelajaran. Perilaku yang dilakukan oleh peserta didik tersebut menjadi pembicaraan guru yang mengajar di kelasnya. Kebanyakan guru yang dimintai keterangan tentang perilaku peserta didik tersebut mengatakan bahwa dia adalah peserta didik yang bermasalah. Bermasalah yang dimaksudkan oleh guru tentang peserta didik tersebut antara lain, peserta didik tersebut tidak fokus dalam mengikuti pelajaran di kelas, sering keluar saat pelajaran baru dimulai/berlangsung, dan tidak mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan kepadanya.

Keterangan guru yang sempat ditemui selalu menganggapnya sebagai peserta didik yang nakal dan susah diatur. "Dia (peserta didik) itu tidak bisa ditebak keinginannya". Demikian ungkapan guru pada umumnya. Meskipun hampir semua

guru yang kenal dengan peserta didik tersebut berpendapat sama namun ada juga guru memberikan pendapat yang berbeda. Guru ini berbeda pandangan dengan rekan guru lainnya. Guru tersebut mengatakan:

”Memang banyak yang menganggap bahwa anak tersebut bermasalah, tetapi bagi saya anak tersebut tidak ada masalah. Saya menganggap bahwa perilakunya masih dalam batas-batas kewajaran. Saya kira, itu sangat tergantung siapa dan bagaimana menghadapinya.” (Wawancara AS, Sabtu, 22/8/2015).

Hasil wawancara di atas terdapat kalimat ” Saya kira, itu sangat tergantung siapa dan bagaimana menghadapinya”. Kalimat ini menyiratkan adanya kedewasaan dalam mendidik. Meskipun kebanyakan orang berpendapat sama tetapi tidak berarti yang banyak itu benar. Guru ini berani tampil berbeda dengan pendapat kebanyakan rekannya. Hal yang dianggap masalah bagi rekan guru yang lain, namun bukan masalah bagi dirinya. Guru ini menganggap bahwa harus ada strategi yang digunakan untuk menghadapi peserta didik yang dianggap ”bermasalah”.

Memaknai kejadian seperti ini seharusnya dikembalikan kepada tujuan dari pendidikan yang dirintis. Salah satu tujuan pendidikan yang paling umum dan akrab didengar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah memanusiakan manusia yang belum dewasa menjadi dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Langeveld (1971) bahwa pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak untuk menuju pendewasaan sehingga anak tersebut cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Jadi intinya adalah bahwa mendidik peserta didik untuk menjadi orang dewasa dibutuhkan guru yang menyiapkan dirinya secara dewasa menghadapi perilaku yang jauh dari nilai-nilai kedewasaan.

Kasus yang satu ini menarik perhatian untuk ditelusuri lebih jauh dan lebih mendalam. Kasus peserta didik yang menghindar dari pelajaran di kelas yang terjadi pada sekolah sebaik SMP Negeri 8 Makassar merupakan hal yang sungguh kontras bila dihubungkan dengan reputasi sekolah. Untuk mendapatkan jawaban pasti tentang kejadian seperti ini, maka peserta didik tersebut harus dimintai keterangan mengapa sering menghindar dari pelajaran. Peserta didik ini mengatakan:

”Saya tidak suka pak kalau tidak ada *spasi*. Kita berada dalam ruangan terus, begitu terjadi pergantian pelajaran langsung guru berikutnya masuk lagi, tidak ada *spasinya*. Saya bosan pak, makanya saya sering menghindar (keluar tanpa izin guru).” (Wawancara AG Sabtu, 22/8/2015).

Pernyataan peserta didik seperti ini perlu menjadi pertimbangan bagi guru. Guru sebaiknya mencari tahu tentang sesuatu di balik pernyataan tersebut. Apa yang menjadi akar permasalahan sehingga ada peserta didik yang berani melawan arus kebiasaan peserta didik lainnya. Penyebabnya pasti faktor internal dan atau faktor eksternal.

Bisa saja terjadi bahwa yang mengalami rasa bosan bukan cuma AG tetapi juga bagi peserta didik lainnya. Keluhan seperti ini bisa saja didapati pada kebanyakan peserta didik. Perasaan bosan adalah kondisi yang wajar dialami oleh peserta didik. Suasana yang monoton seperti dinding kelas yang membatasi dan suasana pembelajaran tidak variatif menjadi pemicu kebosanan peserta didik. Perasaan bosan yang berlarut-larut memaksa peserta didik melakukan tindakan menghindari atau meninggalkan kelas dalam keadaan pembelajaran sedang berlangsung.

Menelusuri apa yang terjadi pada peserta didik tersebut (AG) dibutuhkan informasi lain yaitu tentang kondisi orangtua. Hasil investigasi terhadap peserta didik

tersebut memberikan informasi yang sangat membantu. Dalam pembimbingan yang dilakukan oleh orangtua peserta didik tersebut ternyata mendapatkan perlakuan yang berlebihan. Peserta didik tersebut mengatakan:

”Saya sering dimarahi oleh orangtua terutama ibu. Hampir setiap hari ibu memarahi saya karena urusan sekolah. Urusan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Dua hal yang perlu dianalisis dari keadaan peserta didik yang satu ini. Keadaan pertama, dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik di rumah yakni sering dimarahi. Keadaan kedua, dia mendapatkan perlakuan yang sama ketika berada di sekolah, juga sering ditegur atau dimarahi. Dua keadaan yang diterima oleh peserta didik ini bersumber dari persoalan yang sama yaitu urusan sekolah. Dua tempat pendidikan yaitu keluarga dan sekolah tidak memberikan kenyamanan dan keamanan secara psikis sehingga peserta didik yang satu ini melakukan tindakan sendiri dengan cara menghindar dari pelajaran atau lebih tepatnya lari dari masalah.

Apakah peserta didik ini bodoh dari sisi kognitif? Ketika ditelusuri lebih jauh ternyata peserta didik yang satu ini pernah masuk dalam kelas BL (Bilingual). Kelas BL merupakan kelas khusus di SMP Negeri 8 Makassar yang menggunakan dua bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Peserta didik yang masuk dalam kelas BL merupakan hasil seleksi ketat selama satu semester. Jumlah kelas BL yang terbatas sehingga tidak banyak peserta didik yang bisa masuk dalam kelas tersebut. Dengan data seperti ini menandakan bahwa peserta didik tersebut tidak termasuk dalam kategori bodoh bahkan sebaliknya, dia pintar.

Misteri yang menyelubungi keadaan peserta didik tersebut secara perlahan mulai terjawab. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan mengungkapkan tentang siapa sesungguhnya peserta didik ini. Pengakuan peserta didik ini sekaligus menjawab mengapa dia tidak mapan dengan kondisi yang monoton. Jawaban ini terungkap setelah ditanyakan tentang apa yang menjadi kegemarannya. Peserta didik ini memberikan jawaban sebagai berikut:

”Saya gemar bertualang di alam bebas baik di gunung atau di laut. Selain itu pula, kalau tidak pergi bertualang atau saya di rumah sering melakukan percobaan-percobaan fisika. Itulah kegemaran yang saya sering lakukan.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Keterangan yang diungkapkan oleh informan di atas mengarah pada satu keputusan bahwa peserta didik yang dianggap ”bermasalah” ini adalah peserta didik yang memiliki ciri-ciri anak kreatif. Dalam teori kreativitas dikatakan oleh Munandar (1999) anak yang memiliki kreativitas atau anak yang kreatif tidak mapan pada satu kondisi tertentu dan cenderung sulit diatur. Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Munandar (1999) bahwa perlakuan yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk berkreasi bagi anak yang kreatif dapat membunuh kreativitasnya.

Sebagai pendidik baik orangtua ataupun guru ketika menghadapi hal seperti di atas (yaitu, peserta didik menghindari pelajaran) maka diperlukan tindakan yang bijaksana. Peserta didik atau anak didik yang dihadapi idealnya harus dikenal oleh guru dan orangtua dengan baik. Dikenal secara mendalam baik fisik maupun psikis. Pengakuan orangtua berikut mengesankan bahwa dia bijaksana menyikapi anaknya.

”Kalau masalah PR saya tidak terlalu repot. Dengan kesadaran sendiri anak saya kerja PR nya. Kita ini orangtua hanya mengarahkan, nanti kalau butuh bantuan

baru saya turun tangan, saya juga kan pernah kuliah meskipun hanya program diploma, jadi kalau PR matematika masih bisa sedikit membantu anak apalagi kalau ada rumusnya itu tinggal diganti-ganti.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015)

Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak adalah perhatian yang proporsional. Sering terjadi rasa bosan jika anak diperlakukan dengan perhatian berlebihan. Apalagi menghadapi anak kreatif. Dibutuhkan kesabaran di atas rata-rata. Karakter anak kreatif adalah gemar dengan suasana yang berganti atau tidak monoton.

Khusus untuk guru dituntut untuk mengenal karakteristik peserta didik. Salah satu kompetensi dari empat kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik. Disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.”

Secara jelas dikatakan pada kompetensi pedagogik di atas bahwa guru dituntut memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Apakah yang harus dipahami dari peserta didik? Yang harus dipahami dari peserta didik adalah karakternya. Seperti yang dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang pemahaman guru terhadap peserta didik yaitu:

“Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya.”

Penjelasan tentang mengenal karakteristik di atas, bagi seorang guru profesional harus mengetahui paling sedikit enam karakteristik peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Aspek yang berkaitan dengan masalah peserta didik yang

dibicarakan di atas (peserta didik yang menghindari pelajaran) adalah aspek intelektual, sosial, emosional dan moral. Apabila guru mengenal dengan baik maka peserta didik tersebut dapat diberi peluang yang lebih banyak untuk berkembang dari pada sekedar memarahi dan memberikan hukuman.

2) Perawatan

Secara bahasa perawatan adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai pemeliharaan, penjagaan, pembelaan, atau pengurusan. Lazimnya perawatan dilakukan seseorang untuk hal-hal yang memiliki arti dan nilai yang sangat penting bagi dirinya. Demikian pula dengan anak, siapa pun orangnya sebagai orangtua yang memiliki anak maka tentu saja anaknya merupakan objek yang memiliki nilai dan arti yang sangat besar dan penting. Sudah menjadi takdir Tuhan yang telah memberikan naluri kepada manusia untuk menyayangi anak yang dilahirkannya bahkan juga kepada anak orang lain. Rasa kasih sayang yang dimiliki dapat memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk sanggup merawat orang lain selain dirinya dan terutama anak sendiri.

Perawatan terjadi karena adanya ketidakmampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri. Ketidakmampuan merawat diri sendiri disebabkan oleh berbagai faktor. Ada orang yang memiliki keterbatasan fisik (cacat fisik) sehingga tidak sanggup merawat dirinya sendiri (faktor fisik). Ada pula orang yang mengalami keterbatasan mental karena cacat mental atau belum sampai pada kematangan mental sehingga orang tersebut belum dapat merawat dirinya dengan baik (faktor mental). Ada juga karena faktor kesibukan sehingga tidak cukup memiliki waktu untuk merawat dirinya

(faktor eksternal). Semua keterbatasan yang terjadi pada diri seseorang membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu dirinya melakukan perawatan. Perawatan terbaik bagi seorang anak dapat diperoleh dari orang yang mencintai dan menyayangnya. Orangtualah yang merupakan sosok paling mengetahui dan paling memahami tentang siapa anak yang dirawatnya.

Piaget (dalam Schunk, 2012: 333) menjelaskan bahwa peserta didik yang duduk di tingkat sekolah menengah pertama termasuk dalam kategori orang yang memiliki *egosentrisme*. Selanjutnya menurut Piaget (dalam Schunk, 2012: 333) usia antara (11 tahun – dewasa) termasuk dalam tahapan perkembangan kognitif *operasional formal*. Ciri-cirinya adalah pikiran mereka tidak lagi terfokus pada hal-hal yang dapat dilihat, mereka sudah dapat berpikir lebih dari satu dimensi dan karakter abstrak, mereka membandingkan antara kenyataan dan kondisi ideal sehingga mereka sering memperlihatkan cara berpikir yang idealistik.

Berdasarkan penjelasan Piaget di atas terdapat kondisi yang kontradiksi pada peserta didik usia sekolah menengah pertama. Kontradiksi antara keinginan dan kemampuan. Kontradiksi antara harapan dan kenyataan yang dihadapi. Peserta didik menginginkan kondisi yang ideal tetapi pada sisi lain mereka sendiri tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkannya. Dua sisi berbeda yang dihadapi oleh peserta didik seperti ini menimbulkan masalah. Dengan adanya masalah tersebut, maka pada celah inilah perawatan dari orang lain terutama orangtua sangat diperlukan.

Perawatan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya seperti pada tabel 4.2 adalah kondisi mayoritas yang terjadi di SMP Negeri 8 Makassar. Tidak semua perawatan tersebut dilakukan oleh orangtua secara lengkap. Pada item no. 10 tabel 4.2 dituliskan **mendampingi ke sekolah**. Mendampingi anak ke sekolah merupakan salah satu bentuk perawatan yang sering mengalami kendala di Kota Makassar.

Mendampingi ke sekolah yang dimaksudkan adalah mendampingi anak ketika ada undangan dari pihak sekolah yang membutuhkan kehadiran anak dan orangtuanya sekaligus. Kehadiran orangtua mendampingi anaknya biasa terjadi jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan pihak orangtua seperti; penerimaan rapor atau peserta didik terlibat dalam suatu masalah.

Harapan kehadiran orangtua mendampingi anaknya ke sekolah seringkali tidak terwujud sehingga kondisi seperti ini dikeluhkan oleh pihak sekolah. Gejala yang terlihat selama ini mengesankan bahwa komunikasi antara orangtua dengan guru belum mampu mengalahkan aktivitas atau rutinitas orangtua dalam mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat ditanyakan mengapa tidak datang atau tidak hadir, maka kesibukan atau aktivitas pekerjaan sering dijadikan alasan.

Masih banyak orangtua yang beranggapan bahwa menghadiri undangan atau panggilan dari pihak sekolah bisa diwakili, meskipun pada kenyataannya ada hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan oleh guru kepada orangtua dan tidak bisa diwakilkan. Kebiasaan orangtua mewakilkan orang lain untuk berkomunikasi dengan guru terjadi pada beberapa sekolah termasuk di SMP Negeri 8 Makassar. Komunikasi merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu kemitraan.

3) Pemberian motivasi

Secara bahasa, motivasi merupakan kata benda yang dapat diartikan sebagai kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Arti lain yang cukup populer adalah usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi secara umum dikenal dua macam yaitu motivasi *intrinsik* (motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang) dan motivasi *ekstrinsik* (motivasi yang direkayasa oleh orang lain dalam rangka menguatkan motivasi *intrinsik*). Kekuatan kedua motivasi ini tidak sama bagi setiap orang tergantung pada usia dan suasana hidup yang melingkupinya.

Motivasi dari orang dewasa masih sangat dibutuhkan oleh anak (motivasi *ekstrinsik*). Motivasi yang diberikan oleh orang yang memiliki pengalaman lebih banyak dan baik yaitu orangtua atau orang yang dituakan. Kebutuhan akan motivasi *ekstrinsik* sangat penting oleh karena kemampuan memotivasi diri sendiri (motivasi *intrinsik*) bagi seorang anak usia SMP belum banyak yang bisa diharapkan.

Pada SMP Negeri 8 Makassar pemberian motivasi *ekstrinsik* dilakukan oleh pihak keluarga (orangtua), pihak sekolah (guru), dan pihak masyarakat. Motivasi yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak dalam bentuk *edifikasi* yaitu membesarkan nama SMP Negeri 8 Makassar sebagai sekolah yang dipaforitkan di Kota Makassar. Masyarakat sudah terlanjur tahu keadaan ini sehingga tidak bisa lagi menghapus dari memori mereka tentang keunggulan SMP Negeri 8 Makassar. Pemberian motivasi yang diberikan oleh pihak sekolah dilakukan setiap hari sekolah. Pemberian motivasi

tersebut diawali sejak peserta didik datang memasuki gerbang sekolah sampai mereka berada di dalam kelas. Setiap guru di kelas pada saat memulai pembelajaran selalu dituntut oleh standar prosedur untuk memulai pembelajaran dengan motivasi. Sedangkan pihak orangtua sebagai pemeran utama dari fungsi pemberian motivasi melakukan motivasi dengan menunjukkan sikap dan perlakuan terhadap anaknya. Motivasi yang diberikan oleh orangtua lebih banyak dalam wujud dukungan sikap seperti menyiapkan fasilitas belajar, membantu tugas-tugas sekolah anak, mengantar ke sekolah dan menjemput pulang.

Motivasi *intrinsik* bagi peserta didik tidak terlepas dari motivasi *ekstrinsik* dari lingkungan sekitar. Peserta didik memilih SMP Negeri 8 Makassar sebagai tempat yang diyakini dapat mengantarkan dirinya mencapai cita-cita juga karena motivasi *ekstrinsik*. Pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar menjadikan peserta didik merasa senang menimba ilmu.

”Saya merasa senang di sekolah ini. Banyak pilihan yang disiapkan oleh sekolah untuk pengembangan diri. Ada kelas akeselerasi, kelas bilingual dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Saya sendiri aktif mengikuti kegiatan rohis.” (Wawancara DS, Sabtu, 1 Agustus 2015).

Secara psikologis anak usia sekolah tingkat SMP memiliki ”angan yang melambung tinggi” namun tidak didukung oleh kemampuan yang dimilikinya. Anak usia SMP berada pada tahapan perkembangan kognitif *operasional formal* yang cenderung mengharapkan kondisi ideal. Jika ada yang menjadi harapannya dan tidak terpenuhi, maka akibatnya sangat buruk. Kelabilan mental psikologis dapat membuat peserta didik menjadi goyah ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang

diterima. Pada saat terjadi demikian, maka kehadiran motivasi *ekstrinsik* sangat berperan penting. Motivasi *ekstrinsik* berasal dari orangtua atau guru.

Kehadiran kehangatan keluarga sebagai tempat mencurahkan rasa kecewa saat anak mengalami kegagalan menjadi "obat" yang sangat mujarab baginya. Keluarga yang dapat menjadi "obat" bagi seorang anak adalah keluarga yang di dalamnya terbangun suasana harmonis. Di dalam keluarga tersebut hadir orangtua yang dapat bertindak secara proporsional. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kondisi keluarga berpengaruh besar bagi kestabilan jasmani dan rohani anak. Menurut Ningsih (2008:7) keluarga merupakan penentu arah sikap dan perilaku anak pada masa mendatang.

4) Penegakan disiplin

Disiplin menurut kamus berarti ketaatan pada peraturan. Hampir tidak ada manusia yang senang diikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati. Manusia secara umum ingin memiliki kebebasan dan lepas dari aturan yang mengikat. Dengan demikian disiplin tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Disiplin diawali dengan latihan, pengulangan, mesti dibiasakan, bahkan cenderung dipaksakan pada tahap-tahap awal.

Secara umum peserta didik sudah terlatih dengan kedisiplinan. Hasil pengamatan kedatangan peserta didik di sekolah menunjukkan bahwa orangtua sudah menjadikan rutinitas mengantar anaknya ke sekolah setiap pagi. Rutinitas mengantar anak ke sekolah pasti diawali dengan rutinitas kegiatan yang mendahuluinya. Mulai pada malam hari orangtua memantau aktivitas persiapan sekolah pada besok pagi.

Mulai dari pengontrolan PR, aktivitas malam (menonton televisi), hingga waktu tidur malam. Orangtua membangunkan setiap pagi, mengawasi dan mengontrol kegiatan persiapan ke sekolah seperti penyiapan pakaian, sarapan pagi, dan waktu keberangkatan.

Rutinitas setiap hari sekolah pada pagi hari yang diprakarsai oleh orangtua berimbas pada kebiasaan bangun pagi atau bangun subuh bagi anak. Kebiasaan tersebut beradaptasi pada fungsi-fungsi organ tubuh si anak sehingga tidak lagi menimbulkan efek buruk yang dapat mengganggu kenyamanan belajar di sekolah seperti sakit kepala, dan mengantuk.

Partisipasi dari pihak sekolah terhadap kedisiplinan anak tidak terlepas dari penerapan tata tertib dan tata krama sekolah. Jadwal pembelajaran telah berhasil ”memaksa” orangtua dan anaknya untuk melatih dalam hal kedisiplinan waktu. Secara teratur peserta didik datang sebelum pukul 07.30. wita. Peserta didik berdatangan silih berganti, ada yang lebih awal datang sehingga hanya petugas satpam saja yang disalami, ada yang datang saat guru-guru sudah berbaris menyambut mereka, dan ada pula yang sudah berada pada penghujung waktu baru datang. Bagi yang datang terlambat harus berurusan dulu dengan guru piket. Pada sisi yang lain, aturan pelarangan naik sepeda motor sendiri ke sekolah bagi peserta didik juga mampu ”memaksa” orangtua untuk mengantar anaknya ke sekolah atau menggunakan jasa angkutan umum. Hal seperti ini merupakan suatu pembiasaan mendidik yang diharapkan berubah menjadi sifat atau karakter bagi anak didik/peserta didik.

Rutinitas atau kebiasaan hidup disiplin yang dibangun secara teratur oleh orangtua terhadap anaknya sangat membantu pihak sekolah. Meskipun masih ada peserta didik yang sering datang terlambat, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Jumlah yang sedikit tersebut termasuk meringankan guru (pihak sekolah) dalam melakukan pembinaan. Tindakan pembinaan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang melanggar aturan disiplin juga didukung oleh orangtua sesuai dengan perjanjian awal (tata tertib dan tata krama). Orangtua dapat menerima dengan senang hati selama dalam batas-batas kewajaran.

b. *Communicating*

Komunikasi sangat penting kedudukannya dalam suatu sistem kerjasama, baik komunikasi antar individu, komunikasi individu dengan kelompok/lembaga, atau komunikasi antar kelompok/lembaga. Membangun komunikasi dalam kemitraan pendidikan merupakan unsur yang tidak boleh tidak ada. Semua elemen yang bermitra pasti membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi yang baik dan lancar dapat memudahkan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi.

Communicating adalah salah satu dari fungsi pendidikan yang diperankan oleh keluarga (orangtua). *Communicating* yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga (orangtua) senantiasa melakukan komunikasi secara teratur dengan guru dan staf sekolah tentang program-program, kemajuan anak, dan urusan sekolah lainnya. Komunikasi yang terbangun antara pihak keluarga dan pihak sekolah sangat

dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Keluarga (orangtua) membutuhkan pihak sekolah dan pihak sekolah juga membutuhkan keluarga.

1) Komunikasi program sekolah

Program sekolah ada yang bersifat rutinitas dan ada pula yang sifatnya kontemporer. Program sekolah yang sifatnya rutinitas lebih banyak berkaitan dengan kepentingan pelayanan peserta didik. Pelayanan peserta didik yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan kegiatan ekstrakurikuler. Program sekolah yang ditetapkan tidak semuanya dapat diselesaikan secara mandiri. Pihak sekolah memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber keuangan, keterbatasan jaringan, dan keterbatasan tenaga pelaksana. Mengingat bahwa program sekolah pada intinya merupakan kebutuhan peserta didik maka sikap *proaktif* dari pihak keluarga (orangtua) sangat diperlukan. Oleh karena itu, wadah komunikasi yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin.

Satu-satunya wadah untuk berkomunikasi antara pihak keluarga dan sekolah yang disediakan oleh pemerintah secara legal adalah komite sekolah. Komite sekolah dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah berperan cukup besar bagi dunia pendidikan terutama dalam membangun program-program sekolah. Hingga saat ini, Komite sekolah masih dipertahankan oleh pemerintah meskipun dari segi ruang lingkup pergerakannya tidak sebesar dulu. Adanya kebijakan pemerintah yang menggantikan peran besar dari Komite Sekolah yaitu sebagai salah satu sumber

penunjang pendanaan untuk membiayai program-program sekolah sehingga peran dari Komite Sekolah hanya mewadahi komunikasi antara orangtua dan sekolah dalam program-program yang tidak dibicarakan dalam kebijakan pemerintah tersebut.

Program kebijakan pemerintah seperti program dana BOS, program dana Gratis, dan program tunjangan profesi guru telah menggantikan sebagian besar dari fungsi Komite Sekolah. Selama ini fungsi yang diperankan oleh Komite Sekolah lebih banyak menyangkut dana untuk pembiayaan tambahan kesejahteraan guru/pegawai, pembiayaan sarana/prasarana dan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kini sebagian besar telah diambil alih oleh program dana BOS dan dana Gratis. Kini Komite Sekolah tidak lagi mengurus masalah dana meskipun dana BOS dan dana Gratis tidak dapat menyediakan semua yang diperlukan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan mendasar peserta didik. Dana BOS dan dana Gratis tidak diizinkan dipakai untuk pengadaan barang (selain buku) atau prasarana sekolah. Penggunaan dana BOS dan dana Gratis hanya dapat digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara mendetail. Pemerintah memberikan dana dilengkapi dengan rincian item yang boleh dibiayai. Jika ada pembiayaan yang dilakukan di luar dari yang ditetapkan oleh pemerintah maka konsekuensi hukuman dapat dijatuhkan. Konsekuensi dari penggunaan dana BOS dan dana Gratis telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi sebagian besar pemegang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang tidak hati-hati dalam penggunaan telah menerima hukuman dan bagi kepala sekolah yang sangat hati-hati justeru harus mengembalikan dana tersebut karena ketakutan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

Kebijakan dana BOS dan dana Gratis ternyata tidak menutupi semua kebutuhan sekolah. Kebutuhan pokok yang penting bagi peserta didik sebenarnya sudah cukup bahkan lebih. Tetapi kebutuhan pendukung bagi sekolah secara umum ada yang tidak tertutupi seperti, gaji petugas keamanan dan pengadaan berupa material karena yang dibolehkan hanya untuk perawatan/pemeliharaan. Kebutuhan yang tidak tertutupi tersebut dianggap perlu dibicarakan dengan orangtua dan masyarakat.

Menurut informasi dari pihak sekolah, bahwa pihak keluarga atau orangtua atau masyarakat banyak yang tidak tahu dengan peruntukan dana BOS dan dana Gratis. Anggapan sebagian besar dari pihak orangtua adalah semua kebutuhan peserta didik sudah tertanggulangi seratus persen oleh dana BOS dan dana Gratis. Hal ini berdampak pada munculnya sikap protes dari pihak orangtua jika ada pungutan atau partisipasi dalam wujud uang. Situasi yang terjadi seperti ini yang tidak sedikit telah memunculkan konflik antara pihak orangtua atau masyarakat dengan pihak sekolah. Idealnya, kalau pihak orangtua merasa berkepentingan dengan hal-hal yang diharapkan dari pelayanan sekolah, maka semestinya bersikap proaktif dengan program-program sekolah yang membutuhkan keterlibatannya.

Sikap proaktif dari pihak keluarga dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah yang ditunjukkan selama ini hanya terfokus pada waktu dan keadaan tertentu. Orangtua hanya datang jika diundang, adapun inisiatif datang sendiri sangat langka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru, dikatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang dihadapi sekolah untuk mendiskusikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik adalah respon dari orangtua terhadap undangan atau panggilan dari sekolah. Beberapa orangtua

tidak hadir memenuhi undangan atau panggilan dari pihak sekolah.” (Wawancara AS, Jumat 9 Oktober 2015).

Frekuensi komunikasi antara pihak orangtua dengan pihak sekolah terjadi secara berkala. Komunikasi berkala dilakukan untuk kegiatan yang terjadwal secara rutin seperti rapat komite sekolah, penerimaan rapor, penerimaan peserta didik setiap tahun pelajaran baru. Adapun komunikasi yang tidak terjadwal atau sifatnya insidental adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Menurut keterangan dari salah seorang guru bahwa:

“Banyak program dilaksanakan oleh sekolah yang sifatnya terjadi di luar rencana dan itu membutuhkan mediasi. Paling tepat memediasi kita dengan orangtua adalah pemerintah supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan pihak keluarga peserta didik.” (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

Pernyataan guru ini cukup beralasan. Beberapa program sekolah ternyata sangat sensitif ketika dijual kepada pihak orangtua. Apalagi berkaitan dengan pembiayaan. Sensitif dalam pengertian bahwa reaksi dari orangtua kadang-kadang di luar dugaan. Harapan dari pihak sekolah bahwa pihak orangtua dengan sukarela dan antusias dapat membantu ternyata justru menuai protes.

Protes yang dilakukan pun bervariasi, ada yang langsung dan ada yang menggunakan pihak ketiga. Kalau sifatnya protes langsung gaungnya hanya sampai di sekolah. Tetapi jika protesnya menggunakan pihak ketiga seperti media cetak, LSM, atau DPR maka persoalannya bisa menjadi panjang. Konflik antara orangtua dan sekolah akhir-akhir ini sering menjadi topik perbincangan melalui media cetak saat sebelum, pada, dan sesudah penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016.

Beberapa sekolah di Makassar pun masuk dalam pemberitaan yang tidak menyenangkan. Kalau sudah berkembang di media cetak berita yang tidak menyenangkan tentang pengaduan pihak orangtua tentang kebijakan sekolah, maka banyak pihak yang tergiring untuk menyalahkan pihak sekolah. Dengan demikian terjadilah keputusan yaitu kebenaran berdasarkan suara terbanyak.

Menyalahkan sekolah berarti kepala sekolah yang harus menerima akibatnya. Tahun pelajaran 2015/2016 tercatat beberapa kepala sekolah diberhentikan karena diputuskan bersalah dalam menjalankan kebijakan program sekolah. Apakah kepala sekolah benar-benar bersalah? Inilah masalahnya, karena adanya penggiringan opini yang sangat cepat dari publikasi media sehingga kadang-kadang “vonis” harus dijatuhkan secepatnya pula oleh pemerintah. Betapa tidak, akibat dari “kesalahan” kepala sekolah tersebut berarti turut juga mempermalukan pemerintah kota sebagai pejabat yang mengangkat kepala sekolah. Dari kejadian seperti ini, bila direnungkan lebih dalam mampu diantisipasi dengan komunikasi. Sekali lagi, komunikasi. Ketegasan pemerintah patut diacungkan jempol sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan. Namun dengan komunikasi yang dijalin dengan baik, sangat memungkinkan akibatnya lebih baik dari yang sudah terjadi.

Keluarga dan sekolah adalah dua pilar pelaku sekaligus berkepentingan dengan pendidikan. Dua pilar tersebut seharusnya menjadi “dua sejoli” atau “dua sahabat” yang masing-masing saling mencintai, saling membutuhkan, dan saling memuliakan. Dua sahabat yang bila salah satu dari mereka sakit maka yang lain turut merasakan sakitnya. Dua sahabat yang bila salah satu dari mereka bahagia maka yang lain pun

turut bahagia. Dua sahabat yang saling terbuka, jujur, dan saling memahami apa yang dibutuhkan untuk pendidikan. Bukan sebaliknya, yang satu berniat meraup keuntungan pribadi dan yang lain selalu menaruh rasa curiga. Pantaslah jika semua elemen menuju atau kembali kepada paradigma baru kemitraan pendidikan yang ditandai dengan pertanyaan, “*What can all of us together do to educate all children well?* (apa yang kita dapat kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan baik?), Anne Wescott dan Jean L. Konzal (2002).

Paradigma kemitraan terakhir ini menawarkan kepada diri sendiri dan orang lain tentang bagaimana sebaiknya pendidikan ini dikelola. Paradigma ini menggugah potensi semua pihak tentang apa yang bisa disumbangkan untuk kemitraan pendidikan agar anak-anak kita menjadi baik.

2) Komunikasi kemajuan anak didik

Fungsi komunikasi lainnya yang mesti diperankan oleh orangtua dalam pendidikan adalah senantiasa memantau perkembangan anaknya di sekolah. Orangtua mengomunikasikan tentang kemajuan anak didik merupakan sikap dan tindakan yang selalu diharapkan dan dinantikan oleh guru. Guru merasa sangat gembira jika ada orangtua berinisiatif menanyakan perkembangan anaknya di sekolah. Guru merasakan tidak sendirian dalam mengantarkan peserta didik menuju kesuksesan. Sebaliknya guru pun tidak merasakan kesendirian dalam menanggung akibat jika peserta didik atau anak didik yang dibina bersama mengalami masalah atau kegagalan.

Kesadaran dari orangtua untuk memperhatikan kemajuan yang dialami oleh anak di sekolah sangat membantu pihak sekolah dalam upaya antisipasi maupun penyelesaian masalah-masalah yang menimpa peserta didik. Ciri-ciri orangtua yang sadar akan peran ini adalah orangtua sering bertanya tentang keadaan anak baik secara langsung kepada anaknya maupun melalui guru atau teman anaknya di sekolah. Orangtua dilindungi oleh undang-undang dalam hal mendapatkan informasi tentang kemajuan anaknya di sekolah. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal (1) dikatakan "Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya." Informasi yang diperoleh oleh orangtua dijadikan sebagai bahan yang dapat dikomunikasikan secara langsung kepada anaknya atau langsung kepada guru di sekolah. Komunikasi yang dibangun antara orangtua dan guru (pihak sekolah) tentu membutuhkan sikap saling pengertian dan kesadaran tinggi akan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Setiap orangtua pasti menyayangi anaknya. Meskipun bukti kasih sayang yang diberikan oleh setiap orangtua berbeda-beda. Ada orangtua yang menganggap bahwa anak dikasihi dan disayangi dengan memenuhi kebutuhan materi. Orangtua yang memiliki anggapan seperti ini sering disibukkan oleh aktivitas mencari nafkah secara berlebihan sehingga hampir tidak lagi mempunyai waktu untuk urusan yang lain, salah satunya adalah berkomunikasi dengan guru tentang kemajuan anak di sekolah. urusan komunikasi antara orangtua dengan sekolah dipercayakan kepada oranglain termasuk pembantu rumah tangga yang tinggal di rumahnya.

Optimalisasi peran keluarga dalam fungsi komunikasi tentang kemajuan anak harus didukung oleh kondisi yang memadai antara orangtua dan guru (sekolah). Keduanya harus didukung oleh komitmen yang dibangun atas inisiatif bersama, didorong oleh rasa tanggung jawab karena merasa berkepentingan pada masa depan anak. Situasi dan kondisi yang dibutuhkan seperti yang tertera pada tabel 4.40.berikut.

Tabel 4.40 Kondisi Pendukung Komunikasi Kemajuan Anak

No.	Kondisi Pendukung	Keterangan
1.	Sepakat bahwa kemajuan anak sangat penting	Di atas dari kewajiban
2.	Orangtua dan guru saling mengenal baik	Tidak sekedar kenal biasa
3.	Saling proaktif berkomunikasi	Tergantung situasi
4.	Memilki komitmen kuat	Tertulis, jika perlu
5.	Saling menghargai	
6.	Mengutamakan pendekatan informal	
7.	Memahami posisi masing-masing	

Sumber: Hasil olahan data primer 2015

Rasa kasih sayang orangtua kepada anak didik dan guru terhadap peserta didik pada hakikatnya tidak perlu diragukan keberadaannya. Orangtua diikat oleh hubungan lahir batin yang kuat sementara guru didorong oleh panggilan jiwa sebagai bentuk dedikasi terhadap profesi guru. Meskipun demikian rasa kasih sayang keduanya kepada anak/peserta didik kadangkala tidak ditunjukkan dengan sikap yang tepat. Anak/peserta didik berada di antara dua kutub dengan perlakuan pendidikan yang tidak memberikan harapan untuk dihargai, ”yang ini salah, yang itu salah, semua salah”.

Kenyataan menunjukkan adanya sikap atau tindakan orangtua yang tidak relevan dengan rasa kasih sayang. Sehubungan dengan rasa kasih sayang orangtua kepada anaknya, ada hal yang menarik dialami tentang fungsi komunikasi kemajuan anak bagi orangtua, yaitu orangtua tidak kenal dengan guru yang mengajar anaknya.

Orangtua yang berhasil diwawancarai, pada umumnya mengaku tidak kenal dengan guru yang mengajar anaknya di sekolah. Adapun orangtua yang mengaku kenal dengan guru, karena sebelum anaknya didaftarkan di SMP Negeri 8 Makassar sudah mengenal lebih dahulu, ada hubungan pertemanan atau karena bertetangga rumah dengan guru. Sebuah dialog yang menggelitik di bawah ini pada saat penerimaan buku rapor hasil UTS (Ulangan Tengah Semester).

”Apakah ibu kenal nama guru yang mengajar anak ibu? Tidak pak. Apakah ibu pernah berkomunikasi dengan guru yang mengajar anak ibu? Tidak pak. Adakah nomor ponsel guru yang ibu simpan? Tidak pak. Bagaimana ibu sampai bisa datang di sekolah ini? Ada undangan.” (Wawancara IL, Sabtu 26/9/2015).

Dialog di atas menggambarkan suatu sikap yang tidak tepat dimiliki oleh orangtua peserta didik. Sikap orangtua yang tidak mau tahu atau pasif atau sikap ”masa bodoh” hingga guru yang mengajar anaknya pun tidak dikenal. Kalau orangtua bersikap demikian berarti komunikasi yang terjadi hanya bersifat satu arah. Guru bersikap proaktif sedangkan orangtua bersikap pasif. Salah satu ciri dari komunikasi seperti ini adalah komunikasi dilakukan jika terjadi masalah. Komunikasi seperti itu tidak bersifat antisipatif. Padahal banyak persoalan yang sangat mudah diatasi ketika masih dalam skala masalah kecil dan sangat sulit diselesaikan apabila sudah menjadi masalah besar, dan itupun harus melibatkan banyak pihak.

Hasil olahan data di atas merupakan intisari dari hasil pengamatan, evaluasi capaian kegiatan sekolah, dan wawancara. Bila dicermati dengan seksama dari tujuh item kondisi pendukung maka ada satu kata kunci yang perlu disepakati oleh orangtua dan guru yaitu **cinta** yang sebenar-benarnya kepada anak didik bagi orangtua dan peserta didik bagi guru. Kekuatan cinta merupakan kekuatan yang tak bisa diukur besarnya. Kekuatan cinta mampu menggerakkan seseorang melebihi kemampuannya. Karl Roger (Idanursanti, 2007: 15) mengatakan bahwa cinta adalah “keadaan dimengerti secara mendalam dan menerima dengan sepenuh hati”. Menurut Freud (Idanursant, 2007: 15) menyimpulkan bahwa “kita jatuh cinta karena kita mengikuti aturan-aturan yang tertanam di alam bawah sadar kita.” Kemampuan alam bawah sadar yang dimiliki oleh orangtua ataupun guru menjadikannya tidak mengenal kata ”lelah”, lupa pada kata ”bosan” dan tidak kenal lagi dengan kata ”menyerah”. Sebaliknya kata yang ada dalam benaknya hanyalah ”berhasil, sukses, dan bahagia”.

Pada tabel 4.40 di atas menunjukkan bahwa komunikasi sangat membutuhkan dukungan moral dari kedua belah pihak yaitu orangtua (keluarga) dan guru (sekolah). Komunikasi yang terjalin baik antara orangtua dan guru ditandai dengan adanya kepemilikan informasi yang sama dan berimbang tentang apa, siapa, mengapa, dimana, dan bagaimana anak/peserta didik itu. Apa yang dilakukan anak/peserta didik? Siapa yang menjadi temannya? Mengapa ia melakukan hal itu? Bagaimana ia melakukan kegiatannya? Dan pertanyaan lain tentang informasi keadaan anak/peserta didik. Komunikasi yang baik ditandai dengan dukungan moral berupa sikap saling proaktif atas dasar cinta yang rasional kepada anak/peserta didik dengan setulus-tulusnya.

3) Komunikasi urusan sekolah lainnya

Urusan sekolah lainnya yang dimaksud adalah urusan sekolah yang bersifat insidental atau tidak terprogram dalam agenda resmi sekolah meskipun tetap mempunyai keterkaitan. Komunikasi yang terjadi merupakan inisiatif dari pihak orangtua. Komunikasi untuk urusan sekolah seperti ini hanya dilakukan oleh sedikit orangtua dengan maksud yang berbeda-beda. Urusan sekolah yang di luar agenda resmi lebih banyak yang bersifat tidak mendidik. Kedatangan orangtua ke sekolah karena memiliki kepentingan pribadi. Orangtua mengomunikasikan maksudnya agar pihak sekolah memberikan "lampu hijau" dan mengabulkan permohonannya.

SMP Negeri 8 Makassar memiliki program kelas akselerasi (percepatan). Kelas akselerasi merupakan tempat berkumpulnya peserta didik yang dianggap kaum elit dalam hal kognitif. Di antara seribuan lebih peserta didik hanya dua kelas (72 orang) atau satu kelas (36 orang) yang terjaring masuk ke dalam kelas akselerasi. Terlepas dari predikat elit dalam hal kognitif, kelas akselerasi juga mengangkat "gengsi" orangtua. Predikat gengsi inilah menjadi alasan "perburuan" orangtua untuk melakukan pendekatan di luar jalur resmi.

"Awal terbentuknya kelas *akselerasi* masih bisa dijamin bahwa peserta didik yang masuk merupakan pilihan yang betul-betul memenuhi syarat. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang dipaksakan oleh sebagian orangtua mereka." (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

Kasus lain yang marak dijadikan jalan keluar bagi orangtua adalah "pindah naik". Pindah naik artinya pindah sekolah dan naik kelas. Istilah ini ditujukan kepada peserta didik yang sebenarnya tinggal kelas, tetapi karena peserta didik dan

orangtuanya tidak rela menerima maka jalan keluarnya adalah peserta didik tersebut diputuskan boleh naik kelas tetapi harus pindah ke sekolah lain. Sistem pindah naik adalah sikap ketidakrelaan menerima kenyataan pahit yaitu tinggal kelas. Tinggal kelas dianggap sebagai aib yang mempermalukan keluarga. Tinggal kelas tidak mau diterima oleh orangtua sebagai bagian dari upaya pendidikan. Meskipun pada hakikatnya tinggal kelas dapat berpengaruh baik bagi peserta didik yang mengalaminya. Sebaliknya bila sistem selalu memberi jalan untuk mengubah **tinggal kelas** menjadi **naik kelas** dengan jalan **pindah naik** maka pelan tapi pasti gesah (wibawa) dalam sistem pendidikan sekolah berkurang atau hilang sama sekali.

Kemampuan menjaga *konsistensi* sistem yang dibangun sangat berat. Relasi atas nama keluarga, pertemanan, balas budi, atau balas jasa begitu kuat mempengaruhi keteguhan prinsip. Relasi seperti ini sudah menjadi budaya di negara Indonesia seperti yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi yaitu untuk memberantas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Komunikasi yang terjalin dengan maksud untuk memuluskan tujuan meskipun melanggar norma pendidikan dan norma profesionalisme sesungguhnya termasuk dalam "benalu" dari pohon ilmu pendidikan. Pelan dan perlahan, sedikit demi sedikit menggerogoti dan merusak kalau tidak sampai mematikan pohon ilmu pendidikan.

c. *Volunteering*

Volunteering yaitu kesukarelaan orangtua dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kegiatan kelas. Sukarela merupakan sikap atau tindakan seseorang secara

sadar dilakukan tanpa paksaan dan tanpa tendensi pribadi. Dalam istilah agama dikatakan ikhlas semata-mata mengharapkan rahmat dari Tuhan. Jadi sukarela hanya mengharapkan imbalan *inmaterial* berupa kepuasan batin, kebahagiaan hakiki, dan balasan kebaikan dari Tuhan yang diyakininya. Kesukarelaan orangtua untuk membantu kegiatan sekolah didasari oleh satu alasan yaitu cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Kekuatan emosi inilah (cinta dan kasih sayang) sehingga orangtua dengan sukarela melepaskan anaknya untuk dididik di sekolah oleh orang lain.

Orangtua bertindak atas nama cinta dan kasih sayang kepada anak. Dorongan cinta dan kasih sayang merupakan syarat untuk bertindak sukarela. Kesukarelaan dalam membantu, dapat diketahui dari penerimaan hasil dari sebuah proses. Jika hasilnya baik maka diterima dengan sukacita sewajarnya. Jika hasilnya buruk maka diterima dengan sabar dan ditindaklanjuti dengan melakukan *instrospeksi* diri. Orang yang bertindak sukarela lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri daripada mencari objek untuk dipersalahkan. Menyalahkan diri sendiri lebih baik, karena dengan mudah dapat mencari jalan keluar daripada menuduhkan kesalahan pada orang lain dan mengharapkan mereka untuk melakukan perubahan.

Dalam dunia pendidikan *volunteering* (kesukarelaan) diharapkan tidak hanya ada pada orangtua, tetapi semua pihak yang terlibat dalam menangani pendidikan yaitu; orangtua, guru, anggota masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan sangat membutuhkan kesukarelaan. Orang yang benar-benar ikhlas dengan alasan *spiritual* keagamaan dan kemanusiaan. Pendidikan sangat memerlukan relawan karena hasil pendidikan tidak langsung dapat diperoleh tetapi dengan menunggu waktu yang relatif lama.

Pendidikan ditinjau dari keuntungan materi merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan kesabaran tingkat tinggi dalam menantikan hasilnya. Oleh karenanya diperlukan sikap sabar dan ketabahan yang kuat. Tabah dan kuat hanya ada pada orang yang ikhlas atau sukarela. Kesukarelaan sangat sulit didapatkan kecuali dari dua pihak yang memiliki hubungan emosional yang kuat, seperti antara orangtua dan anak. Mengapa demikian? Karena tujuan utama bagi orangtua yang sukarela bukan imbalan materi. Harapannya hanyalah kepuasan batin. Dengan demikian maka yang paling tepat memiliki kesukarelaan membantu pendidikan adalah orangtua.

Orangtua yang menyekolahkan anak ketika ditanya, mengapa ibu menyekolahkan anaknya? Maka jawabannya beragam. Ada orangtua yang mengatakan bahwa sekolah dapat mengubah nasib menjadi lebih baik. Orangtua membandingkan dirinya yang hanya sekolah tingkat rendah atau tidak sekolah sama sekali. Jawaban ini adalah jawaban orangtua dari kalangan menengah ke bawah sebagai *user* yang dominan.

Ada orangtua yang menaruh harapan besar kepada sekolah untuk perbaikan akhlaq. Orangtua seperti ini melirik pendidikan pesantren atau pendidikan yang menekankan pada aspek keagamaan. Lain lagi dengan istilah *home schooling* yang banyak dilirik oleh kalangan masyarakat dengan tingkat penghasilan di atas rata-rata. Orangtua seperti ini menginginkan anaknya memperoleh pendidikan tanpa terkontaminasi oleh hiruk-pikuk pergaulan remaja yang sulit terkontrol oleh orangtua. *Home schooling* memungkinkan bagi anak maupun orangtua memiliki banyak waktu untuk bersama karena jadwal sekolah bisa disesuaikan.

Kesukarelaan orangtua dalam membantu kegiatan sekolah di Makassar sudah banyak dibicarakan pada fungsi keluarga sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang sangat mendukung pembelajaran yaitu fungsi perawatan dan fungsi komunikasi. Kesukarelaan orangtua membantu program sekolah yang menjadi hangat dibicarakan adalah kesukarelaan bantuan finansial atau material.

Kesukarelaan membantu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan finansial tidak lagi seperti dulu. Sekolah gratis yang sedang digalakkan oleh pemerintah telah mengubah sebagian besar paradigma berpikir dari orangtua. Penyebutan uang sudah menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Sekolah gratis telah dimaknai oleh orangtua bahwa semua kebutuhan di sekolah sudah dipenuhi semuanya oleh pemerintah. Alasan ini menjadi "senjata" bagi orangtua untuk "menyerang" sekolah jika didapati ada penggalangan dana untuk kegiatan sekolah.

Persoalan pungutan di sekolah menurut *Ombudsman* perwakilan Sulsel sudah menerima 253 laporan terkait pelayanan publik sedangkan laporan terkait pungutan di sekolah terlapor sekitar 100 laporan (Tribun Timur.Com, 2014). Pernyataan ketua *Ombudsman* perwakilan Sulsel tentang pungutan sebagai berikut:

"Sumbangan ataupun iuran itu tidak bisa dibebankan kepada siswa ataupun orang tua siswa. Karena proses belajar mengajar di sekolah itu adalah kewajiban dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan," ujar Subhan." (Tribun Timur.Com, 2014).

Pernyataan ketua *Ombudsman* tersebut benar adanya. Semua yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar sudah ditanggulangi oleh pemerintah seperti; buku pegangan peserta didik, alat dan bahan pembelajaran. Sehingga apabila sekolah

memungut biaya untuk proses pembelajaran maka termasuk pungutan yang tidak dibenarkan. Hanya saja, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di luar keperluan untuk proses pembelajaran sekolah membutuhkan dana tambahan yang sifatnya rutin, sebagai contoh; gaji penjaga keamanan sekolah, gaji guru honorer, baju olahraga, dan baju praktikum.

Istilah pungutan memang sangat sensitif dalam pandangan dan pendengaran orangtua/masyarakat. Semua ini terjadi karena komunikasi dan sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Baik orangtua (keluarga) maupun guru (pihak sekolah) dipisahkan oleh jarak toleransi yang mampu mengkompromikan keduanya apabila terjadi miskomunikasi. Kemitraan keduanya hanya ada dalam area *non budgeting* dan dapat mengurangi keharmonisan bila yang dibicarakan berhubungan dengan uang. Akibat yang ditimbulkannya adalah sikap antipati orangtua/masyarakat kepada sekolah jika berbicara masalah pembiayaan atau pungutan. Pada situasi seperti ini diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengayom kemitraan.

Sikap dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah adalah sikap adil dan tindakan proporsional dalam mengintervensi masalah orangtua dan sekolah. Apabila sekolah berada pada jalur yang benar maka harus didukung dan dibela meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak. Jangan karena alasan pencitraan pemerintah kepada rakyatnya sehingga mengorbankan wibawa sekolah apalagi merusak nama baik profesi guru yang semestinya dimuliakan. Menurut hasil wawancara dengan orangtua tentang konflik yang kerap terjadi antara orangtua dan sekolah dikatakan:

“Saya kira tergantung orangnya pak, ada orangtua yang keberatan dengan pungutan tapi bagi saya sepanjang bisa ditanggulangi mengapa tidak. Kalau ada orangtua yang mengadukan sekolah sampai ke media massa saya kira itu kembali lagi sama orangnya, tapi saya pikir lebih baik kalau dibicarakan baik-baik dulu.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015)

Banyaknya orangtua yang merasa keberatan dengan kebijakan pungutan uang untuk membantu program sekolah lebih sedikit dibanding orangtua peserta didik yang mendukung. Hanya saja media cetak telah mampu mempengaruhi opini publik sehingga beritanya menjadi besar. Gaung berita “penyimpangan” sekolah membuat banyak pihak merasa tidak nyaman termasuk pemerintah Kota. Ketika sudah menjadi konsumsi publik maka langkah tindakan untuk memperbaikinya sudah sulit. Penyelesaian yang dianggap efektif dan mampu meredam gejolak adalah menjatuhkan sanksi kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah.

d. *Learning to home*

Fungsi orangtua yang paling dikenal dalam pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah adalah memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah. Fungsi orangtua yang satu ini dikenal dengan istilah *learning to home*. *Learning to home* (belajar di rumah) adalah salah satu fungsi keluarga dalam membantu anak didik dalam pendidikan. Fungsi ini menggambarkan tentang bagaimana orangtua membantu anak didik belajar di rumah, membantu secara langsung atau menciptakan suasana yang mampu memicu anak untuk belajar dengan baik seperti menyiapkan segala kebutuhan belajar yang diperlukan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap peserta didik di sekolah dan orangtua di rumah menunjukkan bahwa orangtua peserta didik memberikan perhatian yang cukup baik terhadap pelajaran anaknya di rumah pada saat masih berada di Sekolah Dasar. Seiring dengan pertambahan tingkat pendidikan anak, pihak orangtua mengaku tidak lagi terlibat jauh sebagaimana ketika anaknya masih di SD. Pengakuan orangtua bahwa anaknya sudah mampu berinisiatif sendiri dalam belajar. Kebanyakan orangtua peserta didik yang berhasil diwawancarai berpendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Learning to home merupakan keterlibatan langsung orangtua secara khusus dalam masalah pelajaran yang berhubungan dengan kurikulum. Dalam menjelaskan tentang *learning to home* akan dibagi menjadi tiga bagian yakni: (1) pembantuan belajar di rumah, (2) pembantuan pekerjaan rumah, dan (3) pembantuan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah.

1) Pembantuan belajar di rumah

Setiap anak yang menempuh pendidikan di sekolah selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk belajar. Jika di sekolah dia membutuhkan guru dan temannya dan bila di rumah dia memerlukan bantuan orangtuanya. Pembantuan belajar yang diberikan kepada anak didik atau peserta didik sekaligus sebagai dukungan moral baginya sehingga dia merasa tidak sendirian.

Salah satu penentu terbantunya seorang anak didik di rumah dalam belajar adalah suasana yang kondusif. Suasana kondusif belajar anak didik dapat terwujud bila orangtua memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Beberapa hal

yang berkaitan dengan suasana kondisi belajar adalah: (1) adanya contoh dari orangtua, (2) adanya fasilitas yang mendukung, (3) orangtua memberikan perhatian khusus.

Contoh yang diperlihatkan oleh orangtua sangat membantu bagi anak didik untuk mendapatkan motivasi dalam belajar. Dalam sebuah keluarga yang sadar dengan pendidikan tentu merasa berkepentingan membantu anaknya agar dapat terinspirasi belajar tanpa diperintah dengan susah payah. Salah satu cara yang efektif untuk membangun inspirasi tersebut adalah memberi contoh anak di rumah dengan kegiatan belajar pula. Seorang orangtua yang gemar memperlihatkan suasana belajar seperti membaca koran, membaca buku, mendengarkan berita, menulis, dan melakukan diskusi, sangat baik dijadikan pemicu bagi anak untuk belajar dengan sukarela tanpa ditindaki secara paksa dan kekerasan.

Pembantuan dalam belajar bagi anak dapat dibangun dengan membiasakan suasana belajar bersama. Jika sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang (ibu, ayah, dan dua orang anak) ada tiga orang yang belajar bersama maka anggota keluarga yang satu pasti merasa tidak nyaman bila tidak "ikut" juga belajar. Adanya dominasi suasana belajar dalam sebuah keluarga dengan sendirinya "memaksa" anggota keluarga lain untuk turut belajar. Menurut hukum *konvergensi* yang dikemukakan oleh William Stern (Jalaluddin dan Idi, 2011: 154) mengatakan bahwa pendidikan anak selain dipengaruhi oleh bakat yang dibawa sejak lahir juga dapat dipengaruhi oleh suasana lingkungannya. Apabila seorang anak dibiasakan dalam suasana lingkungan yang gemar belajar, maka paling tidak suasana tersebut mengarahkannya untuk ikut belajar.

”Saya terbiasa tinggal di rumah pak, jarang keluar rumah. Bapak saya guru dan ibu hanya ibu rumah tangga tapi sarjana. Saya melihat ibu biasa membaca buku-buku agama, apalagi bapak saya tegas terutama menonton acara televisi.” (Wawancara MAS, Sabtu, 1/8/2015).

Menciptakan suasana belajar tidak mudah. Suasana belajar harus dimulai dengan niat yang baik dan tekad yang kuat untuk memperbaiki. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selain orangtua memberikan contoh yang baik juga harus bersikap tegas untuk hal-hal yang dapat mengganggu suasana belajar anak. Ketegasan orangtua (bapak sebagai pemimpin keluarga) tidak boleh hanya satu kali, tetapi dilakukan setiap dituntut oleh situasi yang mengharuskan untuk bertindak tegas. Tahap awal mungkin terasa berat karena banyak aspek yang dipertimbangkan. Pertimbangan antara ketegasan dan rasa kasihan yang tidak rasional terhadap anak.

Selain contoh yang diberikan kepada anak, maka yang tak kalah pentingnya juga adalah penyediaan fasilitas belajar. Fasilitas belajar memberikan kemudahan sekaligus perasaan senang karena anak dikelilingi oleh ”senjata dan peluru” yang banyak untuk ”mengalahkan” tantangan dalam belajar. Adanya fasilitas belajar yang cukup di rumah sangat membantu anak maupun orangtua untuk belajar di rumah, Hal ini didukung oleh pendapat Irawati Istadi (2007: 169) bahwa:

“Orang tua tidak bisa menghindarkan diri sebagai pemikul utama penanggung jawab pendidikan, salah satunya adalah melengkapi fasilitas pendidikan seperti tempat belajar dan membantu kegiatan belajar anak dalam hal mengatur waktu belajar.”

Fasilitas belajar adalah semua kebutuhan sarana dan prasarana belajar berupa meja, kursi, alat tulis-menulis, buku, dan internet. Selain kemudahan dalam belajar yang didapatkan oleh anak, fasilitas belajar juga dapat menjadi pemicu dan pemacu

semangat untuk mengembangkan kreativitas mereka. Fasilitas belajar merupakan suasana yang sangat urgen mempengaruhi kegiatan belajar. Dalam pelajaran matematika secara khusus didapatkan informasi bahwa:

”Hasil studi TIMMS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) menyimpulkan bahwa jumlah buku yang dimiliki peserta didik di rumahnya berkorelasi dengan prestasi belajarnya untuk mata pelajaran matematika dan IPA.” (Hayat & Yusuf, 2011: 79).

Orangtua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan selalu berupaya memenuhi kebutuhan belajar anaknya. Bagi orangtua seperti ini selalu ada jalan atau cara sehingga anaknya terlayani kebutuhannya. Hasil wawancara dengan orangtua berikut menggambarkan bagaimana seorang orangtua merasa mampu melayani kegiatan belajar anaknya meskipun dengan fasilitas yang tergolong cukup sederhana.

”Bagaimana belajar anak ibu di rumah? Lumayan baik pak. Bagaimana kalau ada tugas yang diberikan oleh gurunya? Yah, saya bantu pak semampu saya. Jadi kalau ibu tidak mampu? Kan ada internet. Oh, jadi ibu punya fasilitas internet di rumah? Yah, dengan HP toh, saya rasa cukup murah biayanya.” (Wawancara IL, Sabtu, 26/9/2015).

Pada zaman sekarang memang tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas belajar sangat banyak tersedia. Sehingga yang diperlukan adalah keinginan kuat dari orangtua untuk mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Keinginan kuat tersebut diwujudkan dengan mencurahkan perhatian khusus kepada anak sehingga terbiasa, terlatih, dan akhirnya menjadikan kegiatan belajar sebagai karakter. Apabila karakter belajar sudah terbentuk, maka dapat dipastikan bahwa keberhasilan anak sudah semakin mendekati dirinya. Oleh karena itulah, orangtua sangat diharapkan dapat membantu dengan

meluangkan waktu sedapat mungkin mendampingi anak dalam belajar. Hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik (AG) mengatakan bahwa:

”Saya merasa betah belajar dengan bapak karena beliau bisa *nyambung* ’komunikatif’ untuk diajak berdiskusi. Saya dan bapak dapat berkomunikasi dengan lancar tentang keluhan diri saya maupun pelajaran saya.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Pernyataan ini menjelaskan bahwa orangtua sebaiknya pandai-pandai beradaptasi dengan anak. Orangtua dituntut pandai memasuki dunia anak, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anaknya. Orangtua yang sudah berada dalam dunia anak dapat diterima dengan baik sebagai teman dalam menyelesaikan masalah belajar di rumah. Menurut teori dan praksis *quantum learning* ’pembelajaran quantum’ dijelaskan oleh Given dan DePorter (2015):

”In the QL system we have a basic belief that unless we enter our students world-meet them where they live musically, technologically, or in other ways-they will be hesitant to enter our world of expected behaviors and academics. Know their world can be stated as theirs to ours, ours to theirs theirs to ours, ours to theirs.”

Dalam sistem *quantum learning* orangtua atau guru memiliki keyakinan yang kuat bahwa dengan memasuki dunia anak/peserta didik akan ditemukan siapa mereka dan dimana mereka. Untuk memasuki dunia anak/peserta didik dapat ditempuh dengan berbagai cara. Jika anak senang dengan musik, maka mereka dimasuki dengan musik. Jika mereka senang dengan aplikasi teknologi, maka mereka dapat dimasuki dengan teknologi pula. Orangtua atau guru dapat memasuki dunia anak sesuai dengan dunia yang mereka senangi. Anak/peserta didik ragu-ragu untuk memasuki dunia orangtua atau dunia guru sesuai yang diharapkan baik dalam hal perilaku maupun dalam hal

akademis. Oleh karena itulah harus dikenali dunia mereka sehingga kita dapat menyatakan bahwa mereka bersama kita dan kita bersama dengan mereka.

2) Pembantuan pekerjaan rumah

Pemberian pekerjaan rumah kepada peserta didik oleh guru merupakan instruksi dari RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Secara umum setiap akhir kegiatan pembelajaran di kelas terdapat kata-kata "guru memberikan tugas untuk mempelajari materi berikutnya" (*Sumber: RPP Amira Tanra, S.Pd*). Maksud dari pemberian pekerjaan rumah bagi peserta didik adalah: (1) agar peserta didik mengisi waktunya di rumah untuk mengulangi pelajaran yang baru diperolehnya, (2) agar peserta didik mendapatkan penguatan, (3) peserta didik dapat memiliki pengetahuan *deklaratif* sebelum mengikuti pelajaran tersebut diberikan di kelas.

Dalam rangka maksud itulah pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik membutuhkan bantuan dari orangtua peserta didik. Adapun bantuan yang diharapkan oleh guru dari orangtua peserta didik adalah: (1) orangtua mengingatkan PR anaknya, (2) orangtua memberikan fasilitas sehingga anaknya dapat mengerjakan PR, (4) orangtua membantu PR anaknya secara langsung, atau (5) orangtua mengupayakan secara langsung agar PR yang diberikan dapat terselesaikan (bantuan guru *privat*, bimbingan belajar dan semacamnya). Kelima harapan di atas minimal ada salah satu yang dilakukan oleh orangtua peserta didik. Dengan demikian peserta didik merasakan perhatian yang serius dari orangtuanya sehingga mereka memiliki asumsi bahwa pekerjaan rumah tersebut sangat penting untuk kebaikannya.

”Waktu SD orangtua saya terutama ibu, selalu menjadi teman belajar saya. Ketika ada PR dan menjelang ulangan ibu bertindak sebagai penguji, dia bertanya tentang materi pelajaran yang telah saya baca. Sekarang setelah sekolah di SMP ibu menemani ketika saya butuhkan bantuannya.” (Wawancara DS, Sabtu 1/8/2015).

Sebenarnya pendampingan dalam mengerjakan PR bagi anak merupakan dukungan moral yang sangat berharga. Jangankan dibantu secara langsung atau teknis, menemani saja anak mengerjakan PR sudah merupakan bantuan besar baginya. Seorang ibu atau ayah yang sudah bersiap-siap untuk tidur, tetapi masih melihat anaknya mengerjakan PR sebaiknya menunda dulu untuk tidur. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan menemani anak sampai PR yang dikerjakannya selesai seperti membersihkan rumah, menyulam, nonton televisi, atau membaca buku.

Kondisi dalam kesendirian belajar bagi seorang anak yang belum dewasa masih berat untuk dilakukan. Pembantuan PR bagi anak kadang-kadang keterlibatan orangtua tidak bisa dihindari. Pada waktu tertentu ada PR yang kurang jelas maksudnya sehingga tidak dipahami oleh anak. Sang anak mungkin merasa segan menghubungi gurunya lewat telepon. Dalam kondisi seperti inilah orangtua yang bisa berperan menghubungi guru yang memberikan PR tersebut. Karena sesama orang dewasa antara orangtua dan guru tentu bisa saling menelepon atau menghubungi lewat SMS. Tentunya hal seperti dapat terlaksana dengan baik jika orangtua dan guru menjalin hubungan kemitraan yang baik, atau dikuatkan oleh komitmen lisan atau regulasi yang telah dibuat bersama sebagai pijakan legalitas hukum.

Orangtua yang cerdas, tentu saja tidak hanya mengandalkan satu cara untuk membantu anaknya dalam mengerjakan PR. Orangtua selain dirinya dan guru, dalam

membantu PR anaknya juga dapat mengusahakan bantuan dari pihak kelompok masyarakat atau komunitas. Komunitas yang dilibatkan dapat berupa pribadi dalam sebuah komunitas seperti guru *privat* (komunitas belajar *privat*) atau berupa lembaga pendidikan non formal seperti lembaga bimbingan belajar. Menurut pengakuan dari kebanyakan orangtua bahwa selain di sekolah, mereka juga melibatkan anaknya dalam kegiatan bimbingan belajar, ada yang sifatnya *privat* di rumah, ada yang menambah jam pelajaran sendiri di sekolah, dan ada pula orangtua yang mendaftarkan pada lembaga bimbingan belajar non formal. Pilihan orangtua dalam mengupayakan bantuan PR didasarkan pada pertimbangan efektivitas meskipun tidak efisien.

3) Pembantuan kegiatan yang berhubungan kurikulum sekolah

Kegiatan apa yang berhubungan dengan kurikulum? Kurikulum adalah rujukan kegiatan kurikuler. Semua mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri dengan segala kelengkapannya merupakan ruang lingkup kegiatan kurikuler. Untuk seorang guru kegiatan kurikuler meliputi: (1) perencanaan (membuat perangkat pembelajaran), (2) pelaksanaan (menyajikan pelajaran), (3) penilaian (tugas, ulangan harian/UH, ulangan tengah semester/UTS, ulangan akhir semester/UAS, dan ulangan kenaikan kelas/UKK, ujian sekolah/US, dan ujian nasional/UN), (4) analisis ulangan harian, (5) tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan. Selain daripada kegiatan kurikuler disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar kurikulum.

Banyak hal menyangkut kurikulum yang membutuhkan bantuan orangtua. Adanya mata pelajaran muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri semakin

memperkaya pilihan bagi peserta didik. Mata pelajaran muatan lokal memberikan peluang kepada sekolah untuk mengoptimalkan pengembangan kompetensi peserta didik berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. Dalam penjelasan tentang model mata pelajaran muatan lokal dikatakan bahwa:

“Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.” (Depdiknas: 2006).

Keterlibatan orangtua peserta didik dalam membantu kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebuah keadaan bahwa baik orangtua peserta didik maupun guru memiliki latar belakang asal-usul daerah yang berbeda. Orangtua peserta didik yang dianggap sebagai penduduk asli dan mengenal secara mendalam tentang keunikan atau kekhasan daerah dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam memberikan masukan untuk menentukan pilihan muatan lokal. Adapun ruang lingkup muatan lokal dijelaskan:

“Muatan Lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.” (Depdiknas: 2006).

Berdasarkan ruang lingkup dan jenis muatan lokal di atas, bukan hanya orangtua yang dapat dijadikan referensi tetapi lebih luas masyarakat juga dapat dan perlu dilibatkan. Peluang kepada orangtua dan masyarakat untuk terlibat langsung sebagai referensi dalam pembuatan kurikulum misalnya dalam pembuatan silabus muatan lokal. Meskipun orangtua dan masyarakat dapat dan perlu dilibatkan namun selama ini

keterlibatannya secara langsung belum pernah dilakukan. Pihak sekolah memilih dan membuat kurikulum muatan lokal sendiri berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan oleh guru baik secara individu (karena ditugasi sebagai guru muatan lokal), maupun secara tim (karena ditugaskan oleh kepala sekolah).

e. *Decision making*

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bagaimana orangtua peserta didik telah berperan dalam lingkup rumah tangga melaksanakan pendidikan. Orangtua memerankan fungsi pendidikannya di rumah tangga tetapi berkaitan dengan kejadian sekolah. Fungsi orangtua selanjutnya dalam pendidikan adalah peran yang diemban untuk pengambilan keputusan (*decision making*). Fungsi tersebut sangat penting karena orangtua merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap masa depan anaknya. Fungsi ini terkait langsung dengan keterlibatan orangtua di sekolah.

Decision making atau pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan anak/peserta didik sebagai sasaran pendidikan. Komitmen yang telah disepakati mesti menjadi pegangan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Adapun konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambil tersebut menjadi tanggungan bersama.

Fungsi pengambilan keputusan dari orangtua peserta didik memiliki cakupan yang luas, sehingga perlu dibatasi. Adapun *decision making* sebagai fungsi orangtua dalam pendidikan yang menjadi fokus pembahasan dalam hal ini terbagi atas dua yaitu:

(1) partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan (2) partisipasi orangtua sebagai pemimpin para orangtua atau perwakilan orangtua di sekolah.

1) Partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan sekolah

Partisipasi orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah masih sangat terbatas. Kalaupun itu ada, itu hanya sebatas partisipasi pasif. Partisipasi pasif yang dimaksud adalah pihak orangtua hanya diminta menyetujui atau bertanda tangan belaka. Sebagai contoh penyusunan tata tertib dan tata krama peserta didik, orangtua hanya diberikan kesempatan membaca kemudian menandatangani sebagai tanda persetujuan.

Mengapa orangtua tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan sekolah? Jawabannya ada tiga yaitu; (1) Pihak sekolah belum memberi ruang yang luas untuk ikut terlibat, (2) Mayoritas pihak orangtua bersikap pasif dan tidak proaktif terlibat lebih jauh dengan kegiatan sekolah, dan (3) Baik pihak sekolah maupun pihak orangtua belum menemukan pentingnya bermitra dalam pengambilan keputusan sekolah. Ruang partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang diberikan oleh sekolah masih dibatasi untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kurikulum sekolah. Meskipun menurut aturan, ruang partisipasi aktif orangtua dalam pengambilan keputusan dapat menyentuh semua aktivitas sekolah termasuk kegiatan kurikulum.

Semangat otonomi daerah sebenarnya sudah dapat menjadi alasan kuat bagi sekolah untuk melibatkan orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah. Banyak hal yang dapat menguatkan kemitraan antara keluarga (orangtua) dengan sekolah, salah

satu yang paling penting adalah melibatkan orangtua dalam pengambilan keputusan secara langsung (secara aktif). Keterlibatan orangtua dalam pengambilan keputusan sekolah menjadikan pihak orangtua merasa berada dalam pusaran tanggung jawab yang setiap saat dibutuhkan oleh sekolah. Terindikasi bahwa terjadinya miskomunikasi 'kesalahpahaman' orangtua terhadap sekolah sebagai akibat dari kurangnya ruang keterlibatan orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah. Melihat kenyataan sekarang maka ada dua pertanyaan yang masih menggajal dalam hal kerjasama orangtua dan sekolah, (1) Apakah sekolah mau melibatkan orangtua secara luas dalam pengambilan keputusan?, (2) Apakah orangtua sudah siap dan mau untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Tergambar bahwa beberapa kegiatan di sekolah telah melibatkan orangtua dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterlibatan orangtua dibatasi pada partisipasi pasif. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak teknis orangtua juga dilibatkan secara aktif.

2) Partisipasi sebagai pemimpin orangtua atau perwakilan orangtua di sekolah

Jumlah orangtua peserta didik cukup banyak sehingga tidak semua dapat menduduki posisi sebagai pemimpin atau wakil orangtua di sekolah. Telah diuraikan sebelumnya bahwa ada wadah yang disiapkan oleh pemerintah bagi orangtua peserta didik untuk berkiprah atas nama orangtua peserta didik di sekolah yaitu komite sekolah.

Keterlibatan orangtua di SMP Negeri 8 Makassar bukan hanya sebagai pengurus komite sekolah tetapi juga terlibat dalam komunitas lain. Sebagai sekolah yang inovatif di SMP Negeri 8 Makassar terdapat bentukan kelas yaitu; kelas BL (*bilingual*) dan

kelas percepatan (akselerasi). Kedua program sekolah tersebut merupakan inisiatif sekolah setelah melihat potensi peserta didik yang memiliki peluang yang cukup besar untuk diadakan. Setelah mendapat restu dari pemerintah (dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan) maka ”dijuallah” program ini kepada orangtua peserta didik. Kedua program tersebut tergolong elit di sekolah sehingga baik peserta didik maupun orangtua peserta didik menunjukkan sambutan penerimaan yang baik. Banyak yang ikut dalam seleksi tetapi ruang penerimaan terbatas sehingga jadilah kedua program ini menjadi primadona dari kelas biasa.

Orangtua yang anaknya lulus pada salah satu dari kedua program tersebut dengan difasilitasi oleh sekolah membentuk sebuah paguyuban orangtua. Adapun maksud paguyuban orangtua adalah untuk memudahkan koordinasi antara pihak sekolah jika ada hal-hal yang dibutuhkan. Boleh dikatakan bahwa segala kebutuhan tambahan yang timbul akibat pelaksanaan program tersebut yang berada di luar tanggungan standar pihak sekolah merupakan tanggungan mandiri orangtua anggota paguyuban.

Itulah sebabnya jika dibandingkan dengan kelas biasa, ruang kelas akselerasi misalnya memiliki fasilitas plus. Ruangan dilengkapi dengan alat pendingin, papan tulis eksklusif, LCD proyektor yang permanen, dan fasilitas pelajaran berupa ”dinding berbicara”. Selain fasilitas fisik, mereka yang masuk dalam kelas elit tersebut juga mendapatkan fasilitas perlakuan plus yaitu guru pilihan dan tambahan pelajaran. Semua perlakuan tersebut merupakan apresiasi yang pantas dari pihak sekolah untuk sebuah prestasi dari peserta didik.

f. *Collaborating with community*

Fungsi pendidikan yang diperankan oleh orangtua berikutnya adalah *collaborating with community* (berkolaborasi dengan komunitas atau masyarakat). *Collaborating with community* yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik.

Inisiatif untuk memerankan fungsi *collaborating with community* bagi orangtua sangat penting dalam membantu program sekolah. Banyak potensi sumber daya keluarga maupun masyarakat yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka memperkuat upaya-upaya pendidikan. Sumber daya itu meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut selalu ada, baik dalam keluarga sendiri maupun tersebar dalam kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat. Kemampuan orangtua bersosialisasi dan membangun komunikasi dengan komunitas masyarakat merupakan sikap positif untuk mengenali potensi-potensi dibutuhkan dalam pendidikan. Begitu pula sebaliknya, orangtua dapat mengenal potensi-potensi negatif yang dapat menjadi penghambat atau bahkan merusak pendidikan,

Sekitar rumah dengan mudah diperoleh potensi pendukung dan penghambat pendidikan. Oleh karena itulah kemampuan orangtua dalam memanfaatkan dan menyikapi potensi tersebut sangat diharapkan. Seorang peserta didik yang memiliki prestasi dan sikap terpuji pastilah tidak lepas dari adanya pengaruh dari komunitas masyarakat yang memberi dukungan secara positif terhadap program sekolah dan kegiatan belajar. Ketika ditanyakan kepada seorang peserta didik, mengapa engkau

berprestasi dan guru menganggapmu bersikap baik? Secara diplomatis dijawab bahwa semua ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Ketika ditanyakan bagaimana kegiatan yang dilakukan di luar jam kegiatan sekolah? Dikatakan bahwa:

“Saya tidak suka ke luar kalau sudah berada di rumah. Saya senang dan betah berada di rumah, membaca buku, berbincang-bincang dengan orangtua. Walaupun saya harus ke luar itu disebabkan ada kajian keagamaan yang dilaksanakan di sekitar rumah pada hari ahad dan di sekolah pada hari jumat sore. Kalau di komplek perumahan saya bersama warga kompleks dan kalau jumat pembinanya adalah kakak-kakak dari kelompok kajian yang memang membina para pelajar seperti saya.” (Wawancara DS, Sabtu, 1/8/2015).

Kemampuan orangtua menjadikan seorang anak betah di rumah bukanlah hal yang mudah. Betahnya seorang anak ditentukan oleh tingkat kebutuhan anak yang bisa terpenuhi di rumah. Jika kebutuhan seorang anak mayoritas tersedia di rumah dan di sekitar rumah, maka dapat dipastikan area pergaulan tidak terlalu luas dan mudah dikontrol. Selain itu pula ketersediaan dukungan positif dari komunitas masyarakat sekitar rumah memegang peranan yang cukup menentukan.

Masyarakat dengan tingkat homogenitas yang tinggi lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Lingkungan seperti ini banyak terjadi pada kompleks perumahan kelas ekonomi dari tingkat menengah ke atas. Paling tidak komunitas seperti ini dihuni oleh warga yang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan tinggi. Komunitas dengan tingkat homogenitas yang memadai dapat dengan mudah menciptakan kedamaian dan keharmonisan sehingga dapat bertahan seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim:

“Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, hanya jika terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai bagi warganya. Keseragaman esensial yang dituntut

dalam kehidupan bersama tersebut, oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini pada anak-anak.” (Idi 2010:10).

Sebaliknya keluarga yang berada pada lingkungan masyarakat dengan tingkat homogenitas yang rendah lebih berpotensi terjadinya konflik horizontal. Seorang anak yang berada dalam pusaran seperti ini sesungguhnya memiliki “kekayaan interaksi” lebih dibandingkan dengan yang hidup di tempat masyarakat yang homogen. Selalu ada pilihan yang bisa diambil yaitu menjadi generasi yang tahan uji atau menjadi generasi yang mudah terprovokasi. Seorang anak didik/peserta didik dengan inisial AG, pekerjaan orangtua adalah wiraswasta dan keduanya berpendidikan sarjana. AG mengaku sudah punya pacar, sering singgah main game kalau pulang sekolah, dan tidak memiliki teman bermain sebaya di sekitar rumahnya. Ketika ditanyakan;

“Mengapa lebih memilih main game di warung dari pada di rumah, apakah di rumah tidak ada? Ada pak, bahkan alat permainan game di rumah lebih bagus. Jadi alasannya? Di warung lebih ramai, banyak teman di rumah saya sering ditegur bahkan dimarah-marahi oleh ibu, jadi lebih baik di warung.” (Wawancara AG, Sabtu, 22/8/2015).

Dukungan suasana yang membuat betah bagi anak didik untuk beraktivitas di rumah atau tidak terlalu jauh di rumah lagi-lagi menjadi syarat penting. Suasana yang tidak kondusif di rumah memaksa anak didik mencari pelarian yang justru tidak lebih aman bagi dirinya. Ketika anak didik berada di tengah-tengah komunitas yang *heterogen* dalam cara pandang pendidikan, maka anak didik tersebut berpeluang besar mengalami *ambigu* dan ketidakmapanan dalam bersikap. Terlalu beragam model yang saling kontradiksi “menggoda” untuk dijadikan teladan. Terlalu bervariasi pandangan yang berbeda terhadap satu hal yang seharusnya berada dalam satu pemahaman

kesepakatan. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan rasa tanggung jawab bersama antara orangtua, guru, anggota masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah.

2. Peran Sekolah dalam Pendidikan di Kota Makassar

Sekolah disepakati sebagai tempat pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga. Sekolah adalah tempat pendidikan legalitas formal bagi seorang anak didik atau peserta didik. Sekolah diyakini dan masih dipercaya mampu mempersiapkan setiap peserta didik untuk memiliki bekal atau paling tidak mempunyai wawasan secara kognitif, afektif, dan psikomotor sebelum menjadi anggota masyarakat dewasa. Untuk mencapai bekal tersebut sekolah harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk memerankan fungsi-fungsi yang diembannya.

Fungsi-fungsi sekolah dalam pendidikan sangat penting menjadi perhatian utama bagi sekolah. Efektivitas sebuah sekolah bergantung pada peran sekolah tersebut memenuhi fungsi-fungsi sekolah yang semestinya harus dilakukan. Oleh karena itu fungsi sekolah sangat penting diketahui secara jelas oleh setiap warga sekolah sehingga tujuan sekolah mampu diwujudkan secara pasti, jelas, dan terarah.

Ada banyak fungsi sekolah yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Pendapat para ahli tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Adapun sebagai rujukan penelitian adalah fungsi sekolah sebagai salah satu elemen dalam pendidikan menurut Inglis (dalam Danim, 2010: 166-167) terdiri atas: (1) fungsi penyesuaian (*adjustive function*), (2) fungsi pengintegrasian (*integrating function*), (3) fungsi diagnostik dan direktif (*diagnostic and directive function*), (4) fungsi diferensiasi

(*differentiating function*)., (5) fungsi selektif (*selective function*), dan (6) fungsi hubungan pembantuan dan *referral (helping and referral function)*.

a. Fungsi penyesuaian (*adjustive function*)

Fungsi sekolah yang pertama adalah fungsi penyesuaian atau disebut juga *adjustive function*. Dalam hal ini sekolah berfungsi membangun peserta didik untuk memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan. Sekolah bertindak sebagai lembaga yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat membawa dirinya di dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik siapa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat dan sebaliknya pihak masyarakat juga siap menerima kehadiran dari peserta didik tersebut.

Beradaptasi dalam kehidupan masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang situasi dan kondisi masyarakat. Banyak hal yang terjadi pada masyarakat. Ada yang baik ada pula yang buruk. Ada yang sifatnya mendidik ada pula yang merusak pendidikan. Ada yang mudah namun ada pula yang sulit bahkan sangat sulit. Keragaman keberadaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat “memaksa” setiap orang untuk pandai beradaptasi.

Adaptasi yang baik adalah adaptasi yang mampu menjadikan seseorang tetap *survive* (sanggup bertahan pada situasi yang berubah-ubah) dalam kondisi apapun. Namun siapa yang mampu seperti itu? Tentulah yang dapat bertahan hanya mereka yang memiliki banyak “bekal” kompetensi sesuai dengan tuntutan keadaan. Menurut Bloom ada tiga ranah dalam diri manusia yang dapat dikembangkan melalui

pendidikan. Ketiga ranah itu adalah kognitif, psikomotor, dan afektif. Apabila tiga ranah ini berkembang secara optimal maka manusia mampu mengatasi tantangan kehidupan yang dihadapinya. Tiga ranah inilah yang selalu menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan persekolahan. Peserta didik dilatih, dibimbing, diarahkan, dibina, diajar, dan dididik oleh guru melalui langkah-langkah sistematis untuk mengoptimalkan ketiga ranah tersebut. Langkah sistematis diawali dengan perencanaan, penyajian, pengawasan, pengujian, penilaian, perenungan, perbaikan, dan pengayaan. Langkah sistematis yang disebutkan terakhir ini merupakan tugas pokok guru di sekolah.

Fungsi penyesuaian bagi sekolah sangat memungkinkan karena dilengkapi fasilitas baik infrastruktur maupun suprastruktur yang cukup memadai. Sekolah memiliki fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik seperti prasarana ruangan kelas, ruangan laboratorium, ruangan perpustakaan dan lapangan terbuka. Fasilitas fisik berupa sarana seperti kursi, meja, komputer, alat tulis dan menulis. Fasilitas fisik sangat mendukung suksesnya fasilitas non fisik. Fasilitas non fisik seperti situasi dan kondisi sebagai akibat dari interaksi yang terjadi antara warga sekolah. Interaksi antara peserta didik dengan gurunya, peserta didik dengan pegawai, peserta didik dengan masyarakat (pemiliki kantin dan warga sekitar sekolah).

Interaksi di sekolah merupakan miniatur atau tempat simulasi bagi peserta didik untuk dilatih hidup bersama dengan individu-individu lainnya dengan berbagai macam karakter. Dalam fungsi adaptasi, sekolah berperan mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan kehidupan yang lebih realistik yaitu dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam individu, kelompok, suku, adat, bahasa, karakter, selera, dan keinginan, pasti sangat membutuhkan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk menghadapinya. Pada sisi ini, sekolah harus mampu memerankan fungsi adaptasi yang sebaik-baiknya sehingga pada saatnya nanti peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat dan masyarakat pun bisa menerimanya dengan baik.

Secara fisik (biologis) anak usia SMP sudah sampai pada usia dewasa namun dari segi psikis masih jauh dari kedewasaan. Dua sisi berbeda antara fisik dan psikis membutuhkan perlakuan pendidikan yang bijaksana. Meskipun secara alamiah atau naluriah memiliki kemampuan beradaptasi, namun adaptasinya lebih cenderung bersifat fisik/lahiriah. Jika mereka dilatih permainan olahraga maka mereka dapat melakukannya (sifat fisik), tetapi mereka belum tentu bisa bermain dengan sportif atau *fair play* (sifat psikis). Pada sisi psikis inilah sekolah memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan peserta didik sehingga fungsi adaptasi berjalan secara optimal.

Peran sekolah dalam melaksanakan fungsi adaptasi di SMP Negeri 8 Makassar dilakukan dengan berbagai macam aktivitas. Tiga ranah yang diemban oleh pendidikan formal yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor selalu dijadikan sebagai pijakan kegiatan di sekolah. Nilai kognitif (kuantitatif), nilai psikomotor (kuantitatif), dan nilai afektif (kualitatif) tergambar dari isi rapor yang dibagikan setiap selesai pembelajaran satu semester. Demikian pula dengan aktor (guru) yang diharapkan memainkan peran

sebagai penggiat dalam melaksanakan fungsi tersebut telah diatur dan dibagi sedemikian rupa sehingga semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Secara garis besar kegiatan sekolah terdiri atas kegiatan intra kurikuler (kurikuler) dan kegiatan ekstrakurikuler yang sering disingkat dengan istilah ekskul.

Kegiatan intra kurikuler (kurikuler) dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum standar nasional. Pada kegiatan intra kurikuler telah dibagi-bagi dalam mata pelajaran dan ranah yang ingin dicapai yaitu: (1) Pendidikan Agama (kognitif, psikomotor, afektif), (2) Pendidikan Kewarganegaraan (kognitif, afektif), (3) Bahasa Indonesia (kognitif, psikomotor, afektif), (4) Bahasa Inggris (kognitif, psikomotor, afektif), (5) Matematika (kognitif, afektif), (6) Ilmu Pengetahuan Alam (kognitif, psikomotor, afektif), (7) Ilmu Pengetahuan Sosial (kognitif, afektif), (8) Keterampilan (kognitif, psikomotor, afektif), (9) Teknik Informasi Komputer (kognitif, psikomotor, afektif), (10) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (kognitif, psikomotor, afektif), dan (11) Muatan Lokal (kognitif, psikomotor, afektif).

Salah satu muatan kurikulum yaitu penyajian mata pelajaran sebanyak sebelas item seperti yang telah dituliskan di atas. Secara teoretis dan filosofis sebelas mata pelajaran tersebut cukup memadai untuk bekal bagi peserta didik. Adapun kajian kebijakan tentang penetapan jenis dan macam pelajaran yang diajarkan sudah melalui uji kelayakan berdasarkan analisis kebutuhan dan keterpakaian. Dengan sebelas mata pelajaran tersebut dianggap dan dinilai cukup untuk mempersiapkan peserta didik sehingga dapat memiliki bekal dan tempat dalam beradaptasi di lingkungan pergaulan masyarakat.

Muatan kurikulum yang menekankan pada standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun standar kompetensi lulusan merupakan acuan kemampuan peserta didik untuk beradaptasi. Peserta didik dapat mengikuti apa yang menjadi tuntutan kenyataan di luar sekolah dengan kompetensi yang telah mereka raih di sekolah. Kelak kemudian hari ketika peserta didik ingin mengikuti jenjang pendidikan lanjutan maka mereka pun telah siap dengan bekal mereka. Modal dokumen berupa ijazah, NEM, dan rapor menjadi bukti fisik pengakuan lembaga pendidikan untuk diterima pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dokumen yang diperoleh peserta didik telah melalui sistem penilaian dan pengujian internal maupun eksternal. Ujian internal dibagi dalam tahapan-tahapan yang cukup beragam yaitu tugas-tugas, ulangan harian (UH), ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), ulangan kenaikan kelas (UKK), dan ujian sekolah (US). Adapun ujian nasional (UN) adalah ujian eksternal yang dilaksanakan oleh negara. Bekal kemampuan akademik dan non akademik yang telah diperoleh peserta didik membantu mereka beradaptasi dengan situasi baru yang dihadapinya.

Pada kegiatan kurikuler selalu ada dampak pengiring dari setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dampak pengiring yang muncul sebagai bawaan dari penerapan tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotor). Dampak pengiring yang lahir dapat berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dalam kegiatan diskusi di ruang kelas peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain. Ketika berpendapat, peserta didik menerima penilaian orang lain (apakah baik atau buruk) yang dapat menyadarkan mereka tentang keberadaannya. Saat kerja bersama atau kerja kelompok, peserta didik

sadar tentang pentingnya keberadaan orang lain. Saat guru membahas peristiwa sosial, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kenyataan sosial yang ada kemudian berpikir lalu menentukan sikap.

Dalam setiap interaksi pembelajaran di ruang kelas maupun di lapangan, guru di SMP Negeri 8 Makassar tidak pernah lupa dengan penanaman nilai-nilai afektif atau moral. Sebagai orang dewasa, guru sangat menyadari bahwa di luar sekolah banyak peristiwa yang membutuhkan adaptasi dari peserta didik. Di luar sekolah budaya antri masih sering dilanggar oleh sebagian orang, itulah sebabnya ketika kepala sekolah ditanya, apa keuntungannya menyambut peserta didik dengan berjejer berbaris menyalami guru?

”Selain kami menanyakan satu-persatu tentang keadaan mereka (peserta didik), kami juga melatih dengan cara membiasakan mereka untuk berjalan tertib dan antri bersama teman-temannya.” (Wawancara HM, Sabtu 29/8/2015).

Peserta didik dilatih dengan nilai-nilai religius yaitu memulai dan mengakhiri segala sesuatu dengan berdo’a yang dilatihkan dalam aktivitas kegiatan pembelajaran. Sebelum peserta didik belajar ketua kelas menyiapkan dengan meneriakkan kata, **”bersediaaaa!”**, maka semua peserta didik berdiri. Ketua kelas melanjutkan dengan kalimat, **”sebelum kita memulai pelajaran marilah kita berdo’a sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing**, maka semua peserta didik berdo’a. Ketua kelas kemudian memberi komando **”beri salam!”**, maka setiap peserta didik berseru **”assalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”**. Guru kemudian membalasnya dengan mengucapkan **”wa ’alaikum salam”**. Prosesi ini sudah menjadi budaya sekolah. Budaya ini kelihatan sangat sederhana namun sarat dengan makna. Suatu

budaya yang menggambarkan penekanan pada hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horisontal kepada sesama manusia. Jika makna dibalik yang tersurat (yang diungkapkan oleh peserta didik dan guru) diresapi, dipahami, dan dihayati dengan baik maka dapat berimplikasi besar bagi kehidupan peserta didik. Akan tetapi jika budaya ini adalah formalitas seremonial, maka dapat dipastikan bahwa prosesi tersebut tidak memiliki kesan dan pengaruh yang berarti. Diperlukan penjelasan berulang-ulang tentang prosesi ini kepada peserta didik sehingga diharapkan dalam kondisi di luar sekolahpun dapat dilaksanakan.

Selain dilatihkan mereka juga selalu diingatkan lewat papan bicara yang tertera di dinding rumah ibadah. Pesan pada papan kecil yang terpampang di dinding mushalla ini singkat tetapi menekankan pentingnya sebuah do'a. Pada saat terlihat oleh mata siapa saja, pesan tersebut kembali mengingatkan bahwa ada kekuasaan lain yang sangat besar sugestinya untuk menyukseskan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sungguh berbeda pengaruhnya, andaikata pesan ini tidak ada samasekali. Dalam teori pemasaran pesan ini merupakan iklan yang menjadikan orang akan selalu ingat jika telah dibaca berulang-ulang baik disengaja atau tidak disengaja.

Peserta didik di SMP Negeri 8 Makassar tidak diberi peluang untuk menggunakan sepeda motor sendiri ke sekolah. Meskipun sebagian besar peserta didik sudah mampu mengemudikan sepeda motor tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi). Di rumah atau di lingkungan sekitar rumah, peserta didik justru diberi kebebasan untuk mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Nilai ganda menjadikan peserta didik bingung seperti digambarkan 4.23 di bawah ini.



Gambar 4.23 Kebingungan Peserta Didik Menyikapi Nilai Ganda
Sumber: Hasil olahan Data Primer 2015

Terjadi sistem nilai ganda yang mengacaukan. Pada satu sisi dilakukan pelarangan mengendarai sepeda motor ke sekolah bagi peserta didik. Di sisi lain justru terjadi pembolehan yaitu di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Dua nilai ganda yang kontradiksi seperti ini dapat melemahkan fungsi adaptasi yang diperankan oleh pihak sekolah. Seorang peserta didik mengaku belum memiliki SIM mengatakan:

”Saya diantar oleh bapak atau jasa angkutan (ojek) ke sekolah begitupun saat saya pulang. Di rumah saya punya sepeda motor dan di luar rumah saya biasa ikut balapan dengan teman-teman.” (Wawancara AG, Sabtu 22/8/2015).

Pernyataan peserta didik di atas menggambarkan bahwa aturan boleh dilanggar pada tempat dan waktu yang berbeda. Meskipun aturan sebenarnya yang dijadikan patokan adalah aturan sekolah yang merupakan turunan dari peraturan polisi lalu lintas. Adapun pertimbangan diberlakukannya pelarangan menggunakan sepeda motor bagi peserta didik yang belum memiliki SIM adalah keselamatan jiwa pengendara sehingga

dapat meminimalkan kecelakaan lalu lintas. Sementara, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan dan dimana saja. Efektivitas diberlakukannya aturan diperlukan adanya ketegasan dari pemerintah yang didukung oleh setiap elemen.

Menurut tata tertib sekolah peserta didik dilarang merokok. Kalau ada peserta didik yang ketahuan merokok maka pasti dihukum. Tetapi tidak sedikit peserta didik sudah terbiasa merokok di luar lingkungan sekolah. Orangtua juga sudah tahu kalau anaknya sudah sering merokok. Penjual rokok sebagai unsur masyarakat juga tidak selektif menjual rokok karena tidak ada aturan untuk itu. Lagi-lagi nilai ganda terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah dilarang tetapi di luar sekolah tidak ada pelarangan. Kalau merokok bisa merusak kesehatan sebagai alasan yang bersifat umum, maka mengapa tidak ada pelarangan anak merokok dari semua elemen (keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah) pendidikan? Lagi-lagi nilai ganda pada perlakuan merokok terjadi, seperti pada gambar 4.24. di bawah ini.



Gambar 4.24 Siapa yang Saya Ikuti?
Sumber: Hasil olahan data Primer 2015

Siapa yang saya ikuti? Siapa yang semestinya saya harus dengar? Pertanyaan inilah di benak peserta didik yang baru mencari jati diri. Pertanyaan demi pertanyaan dapat bermunculan dalam benak peserta didik karena sosok orang dewasa yang mendidiknya memiliki perbedaan yang bertolak belakang antara satu dengan lainnya.

Pantaslah kalau Kihajar Dewantara sebagai seorang tokoh pendidikan menggagas sekolah berasrama. Pikiran Kihajar Dewantara adalah bahwa kerusakan perilaku peserta didik diakibatkan adanya penerapan nilai ganda yang membingungkan. Nilai ganda menjadikan peserta didik bingung karena nilai yang berlaku di sekolah lain, di rumah lain, di lingkungan masyarakat juga lain. Lalu siapa yang mesti dijadikan pegangan? Dalam kondisi seperti ini telah memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengambil keputusan sendiri, meskipun keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari orangtua maupun harapan dari gurunya. Pada saat satu orang peserta didik memilih keputusan yang salah, itu berarti bahwa pendidik (guru, orangtua, atau orang dewasa) terbebani lagi satu masalah baru.

b. Fungsi pengintegrasian (*integrating function*)

Fungsi sekolah yang kedua adalah fungsi pengintegrasian atau *integrating function*. Fungsi pengintegrasian bagi sekolah adalah bahwa sekolah berfungsi mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat. Pengintegrasian bagi peserta didik yang dimaksud adalah bahwa peserta didik memperoleh pendidikan di sekolah yang berasal dari berbagai sumber belajar yaitu guru, peserta didik, bahan ajar, dan interaksi. Semua

bekal yang mereka dapatkan selama menimba pendidikan di sekolah bisa bermanfaat sebagai modal ketika menerima amanah ataupun tanggung jawab sebagai individu atau anggota kelompok dalam masyarakat.

Pada kegiatan ekstrakurikuler peserta didik diwadahi oleh sekolah dengan berbagai macam organisasi dan kegiatannya masing-masing. SMP Negeri 8 Makassar menyadari sepenuhnya bahwa mewadahi 1229 peserta didik tentulah tidak cukup dengan satu, dua, atau tiga organisasi ekstrakurikuler. Tercatat sebanyak 12 organisasi ekstrakurikuler baik yang formal (sudah memiliki SK) maupun yang semi formal (sementara proses legalitas tetapi sudah melakukan kegiatan) siap mengakomodasi minat maupun bakat dari peserta didik. Organisasi ekstrakurikuler sebanyak ini tidak serta-merta di adakan tetapi terdesak oleh "kebutuhan dan kreativitas" dari peserta didik dan guru pembina.

Salah satu hal yang menarik dalam organisasi ekstrakurikuler adalah sistem perekrutan anggota baru. Anggota baru tidak langsung diterima begitu saja. Mereka melalui suatu tahapan orientasi misalnya LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). Dalam proses orientasi peserta atau calon anggota baru diamati dan dinilai siapa yang memiliki kecakapan untuk menjadi pengurus biasa atau pengurus inti organisasi. Proses perekrutan yang dilakukan oleh organisasi ekstrakurikuler adalah arena sungguhan dalam skala sederhana untuk memberikan pengalaman berorganisasi kelak di kemudian hari. Dalam organisasi peserta didik memperoleh pengalaman bermusyawarah. Dalam organisasi mereka belajar manajemen. Dalam organisasi mereka mengasah kompetensi *leadership*. Dalam organisasi peserta didik belajar

memimpin dan dipimpin. Dalam organisasi mereka belajar bertanggung jawab. Dalam organisasi mereka megaudit atau diaudit. Dalam organisasi mereka dilatih untuk menerima perbedaan. Dalam organisasi peserta didik menyatukan keberagaman karakter, kompetensi, bakat, maupun minat dari teman-temannya. Pengalaman yang sungguh sangat berarti untuk menjadi bekal kelak di kemudian hari.

Pada ranah kognitif guru sebagai pendidik memberikan porsi lebih banyak dibanding afektif dan psikomotor meskipun sudah menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dianggap sebagai kurikulum holistik yang ketat menjaga keseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun patut diketahui bahwa kebiasaan dari penerapan kurikulum sebelumnya tidak dapat dihilangkan secara totalitas. Pembekalan ranah kognitif memberikan bekal kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif.

Pada hakikatnya guru dapat dimaklumi bila memberikan porsi kognitif lebih dari afektif maupun psikomotor. Perlakuan pemberian porsi ranah kognitif lebih banyak oleh karena tuntutan lingkungan di luar sekolah (pengguna/penerima lulusan). Lingkungan di luar sekolah masih menjadikan nilai kognitif sebagai pertimbangan utama. Ketika seorang peserta didik mendaftar pada suatu sekolah atau perguruan tinggi, maka yang dipertimbangkan adalah nilai kognitif. Berapa nilai rata-ratanya? Apakah nilai matematika, IPA, IPS di atas nilai 7,0? Apakah tidak ada nilai di bawah 5,0? Demikian persyaratan yang selalu diberlakukan oleh pengguna *outcomes* di lingkungan masyarakat atau penerimaan pada jenjang sekolah atau perguruan tinggi sebagai lanjutan pendidikan.

Pada ranah afektif, pendidikan di SMP Negeri 8 Makassar memiliki budaya yang cukup menarik. Mulai dari sebelum awal sekolah (sebelum pukul 7.30. wita) sebagian besar peserta didik diantar oleh keluarga. Satu persatu mereka turun dari sepeda motor atau mobil sambil berpamitan pada orangtua. Mereka berpisah dengan pengantarnya yang diakhiri dengan cium tangan. Sebuah pemandangan yang mengharukan. Keluarga melepas anaknya dengan rela untuk dididik sepenuhnya oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah selanjutnya melakukan penyambutan secara bersama-sama dipimpin oleh kepala sekolah, guru dan petugas keamanan. Peserta didik disalami satu-satu, diperhatikan pakaian, rambut, dan barang bawaannya (peserta didik yang datang lebih pagi tidak sempat memperoleh perlakuan sama). Sambil salaman, tersenyum, guru pun menyapa seperlunya kepada peserta didik.

Pemandangan seperti ini merupakan acara lepas-sambut dari dua pihak yang bermitra, yakni keluarga dan sekolah. Menurut kepala sekolah budaya seperti sudah berlangsung lama, bagi guru-guru yang datang lebih awal melakukan penyambutan secara spontan terhadap peserta didik yang memasuki gerbang sekolah. Kepala Sekolah memberikan komentar tentang budaya penyambutan ini.

”Penyambutan seperti ini banyak manfaat yang bisa diperoleh, *pertama* merekatkan hubungan emosional antara guru dan peserta didik, *kedua* peserta didik dibiasakan untuk antri karena ternyata ada juga yang datang terburu-buru dan langsung ingin mendahului, *ketiga* kesempatan bagi guru untuk memeriksa kelengkapan peserta didik.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah HM, Sabtu 29/8/2015 pukul 08.15.-10.35. di ruang kepala sekolah).

Penyambutan oleh guru setelah orangtua mengantarkan dan menyerahkannya terjadi setiap pagi. Seperti terlihat pada gambar 4.25. di bawah ini.



Gambar 4.25 Penyambutan Bagi Peserta Didik oleh Guru
 Sumber: hasil olahan data primer 2015

Lebih jauh ditelusuri, ternyata tradisi "cium tangan" tidak hanya berlangsung pada saat penyambutan peserta didik di gerbang sekolah, namun setiap peserta didik bertemu dengan gurunya. Peserta didik secara spontan mendatangi gurunya, meraih tangan gurunya lalu mencium tangannya. Hal ini adalah lambang kedekatan emosi yang cukup positif yang dapat membantu setiap terjadi masalah bagi peserta didik. Kedekatan emosi dapat menghasilkan keterbukaan, kejujuran, atau keterusterangan dari pihak peserta didik, sehingga ketika terjadi masalah maka dengan cepat dapat diantisipasi dan mendapatkan jalan keluar yang sebaik-baiknya.

c. Fungsi diagnostik dan direktif (*diagnostic and directive function*)

Fungsi sekolah yang ketiga adalah fungsi diagnostik dan direktif atau *diagnostic and directive function*. Sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik. Fungsi ini juga bermanfaat untuk mengetahui

potensi peserta didik dan memberi arahan kemana nantinya meniti karir yang diprediksi paling sesuai. Sungguh besar peranan sekolah dalam hal ini.

Diagnostic artinya melakukan suatu tes untuk melakukan diagnosis (penentuan atau penetapan). Diagnosis dari hasil *diagnostic* didasarkan pada kaidah ilmiah yang sering dilakukan oleh orang-orang profesional. Sedangkan *directive* artinya memberikan petunjuk atau pengarahan. Jadi menurut Bahasa sekolah berfungsi dalam hal *diagnostic and directive* yaitu melakukan tes *diagnostic* untuk menentukan tentang siapa sebenarnya peserta didik yang dihadapi. Informasi yang diinginkan seperti bakat peserta didik, sifat peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Informasi tersebut dijadikan petunjuk dalam mengarahkan peserta didik.

Fasilitas untuk mengenali potensi diri manusia pada era ini (2015) sudah disiapkan. Banyak pakar psikologi atau semacamnya secara ilmiah telah menemukan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendiagnosis tentang potensi seseorang. Namun penerimaan tentang penggunaan dan pemanfaatan perangkat tersebut tidaklah menggembirakan.

SMP Negeri 8 Makassar sebagai sekolah pavorit berupaya optimal berperan dalam fungsi diagnostik dan direktif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di ruang BK (Bimbingan Konseling) terdapat sarana berupa satu unit komputer yang disiapkan untuk tes psikologi. *Software* ‘perangkat lunak’ penting ini dimanfaatkan untuk siapa saja yang mau. Guru BK yang mengatakan:

“Komputer ini saya siapkan untuk siapa saja yang mau tes psikologi. Tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk menggunakannya. *Software*nya saya dapatkan dari teman-teman di Jawa.” (Wawancara PJ, Selasa 17/8/2015).

Penjelasan dari guru BK di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak memprogramkan secara khusus. Semata-mata merupakan inisiatif dari pribadi guru BK yang merasakan pentingnya tes diagnosis. Menurut keterangan guru BK bahwa di SMP Negeri 8 Makassar dulu pernah ada tes diagnosis tetapi pihak orangtua peserta didik merasa tidak membutuhkan.

“Setelah hasil tes diagnosis diperoleh, kami pun menyampaikan kepada masing-masing orangtua peserta didik untuk dikonsultasikan, akan tetapi keputusannya kembali lagi kepada orangtua, mereka tetap bertahan pada keinginan-keinginan mereka.” (Wawancara PJ, Selasa 17/8/2015).

Keberterimaan hasil tes diagnosis untuk pemetaan potensi peserta didik memang belum mendapatkan tempat dari elemen mitra yaitu orangtua. Apabila orangtua peserta didik tidak memberikan dukungan maka kondisi ini menjadi hambatan bagi sekolah untuk bertahan apalagi mengembangkan upaya tersebut. Orangtua peserta didik memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan. Sementara pihak sekolah belum mampu meyakinkan pihak orangtua tentang betapa pentingnya mengetahui potensi diri seperti bakat, kepribadian, kecenderungan, dan kemampuan akademik. Sebesar apapun keinginan sekolah untuk menerapkan tes diagnostik tanpa dukungan pihak orangtua maka dipastikan hasilnya tidak optimal.

Fungsi diagnostik dan direktif di SMP Negeri 8 Makassar dilakukan dengan menggunakan seleksi alamiah terutama pada kelas VII. Sama seperti dengan sekolah lainnya, peserta didik diberikan kebebasan untuk berkompetisi dan hasilnya digunakan untuk disitribusi pada jenjang kelas berikutnya. Di SMP Negeri 8 Makassar disiapkan fasilitas tersendiri yaitu kelas bilingual (dua bahasa) dan kelas akselerasi atau kelas

percepatan (berakhir tahun pelajaran 2015/2016). Data dari hasil seleksi alamiah yang dilakukan mulai dari kelas VII digunakan untuk pengelompokan selanjutnya.

Selain fungsi diagnostik dan direktif yang dikelola pada kegiatan kurikuler juga ada yang dibina dalam kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi ekstrakurikuler yang dimotori oleh OSIS (Organisasi Siswa Intera Sekolah) melakukan diagnostik dan direktif dengan melakukan pendataan minat kepada peserta didik. OSIS dan organisasi ekstrakurikuler di bawah naungannya menyebarkan formulir pendaftaran calon anggota. Calon anggota yang terdaftar selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan atau pengkaderan calon anggota baru.

OSIS menamakan acara perekrutan calon anggota baru dengan istilah LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). Perekrutan calon anggota baru untuk PMR (Palang Merah Remaja) dan PASKIB (Pasukan Pengibar Bendera) dinamakan DIKSAR (Pendidikan Dasar). Organisasi kerohanian (Rohis) memberikan Nama untuk pengkaderannya dengan istilah LD (Latihan Da'wah). Semua proses perekrutan yang dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan calon pimpinan atau pengurus organisasi.

d. Fungsi diferensiasi (*differentiation function*)

Fungsi sekolah yang keempat adalah fungsi diferensiasi atau *differentiation function*. Menurut Bahasa, diferensiasi bermakna perbedaan. Fungsi diferensiasi berarti fungsi yang bertujuan menentukan perbedaan melalui pengaturan-pengaturan tertentu. Sedangkan bila dikaitkan dengan sekolah maka fungsi diferensiasi artinya sekolah berfungsi memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil diagnosis

kemudian menentukan urutan berdasarkan peran tersebut dan dilatih hanya sejauh dengan kesesuaian tujuan mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu. Cara ini baik untuk mengoptimalkan jenis layanan dan proyeksi harapan anak sehingga cocok dengan aneka diferensiasi atau perbedaan mereka.

Berdasarkan makna fungsi diferensiasi di atas menunjukkan bahwa fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi diagnostik. Fungsi diferensiasi di sekolah bermanfaat untuk memelihara hasil diagnostik yang telah memetakan potensi peserta didik. Potensi yang telah dipetakan lebih mudah dikembangkan karena sudah tergambar kejelasan tentang siapa dan bagaimana peserta didik.

Pemetaan potensi yang telah dilakukan di atas cukup membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara *spesifik*. Di sisi lain guru pun dapat berkonsentrasi lebih optimal melakukan pola pembinaan (mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih). Meskipun demikian upaya ini belum dilakukan dengan totalitas dan perlakuan yang istimewa bila dibandingkan dengan sekolah lain. Pemetaan potensi berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik yang meliputi tiga ranah (*kognitif, afektif, dan psikomotor*). Belum ada perlakuan khusus yang melibatkan secara ilmiah bagaimana membuat pemetaan secara akurat, sehingga tipe kecerdasan peserta didik dapat dibedakan dan dikelompokkan.

Dalam dunia pendidikan dikenal sebuah istilah *multiple inteligensi* (kecerdasan majemuk) yang dikembangkan oleh Howard Gardner. *Multiple inteligensi* pada setiap orang memiliki tingkat dan perbedaan kecenderungan. Mengenali tipe kecerdasan

peserta didik sejak dini memberikan peluang dan kesempatan perlakuan *antisipatif* lebih cepat dan tepat. Gardner (2004) berpendapat bahwa tipe kecerdasan terdiri atas:

“(1) **Verbal-linguistic intelligence** (well-developed verbal skills and sensitivity to the sounds, meanings and rhythms of words), (2) **Logical-mathematical intelligence** (ability to think conceptually and abstractly, and capacity to discern logical and numerical patterns), (3) **Spatial-visual intelligence** (capacity to think in images and pictures, to visualize accurately and abstractly), (4) **Bodily-kinesthetic intelligence** (ability to control one’s body movements and to handle objects skillfully), (5) **Musical intelligences** (ability to produce and appreciate rhythm, pitch and timber), (6) **Interpersonal intelligence** (capacity to detect and respond appropriately to the moods, motivations and desires of others), (7) **Intrapersonal** (capacity to be self-aware and in tune with inner feelings, values, beliefs and thinking processes), (8) **Naturalist intelligence** (ability to recognize and categorize plants, animals and other objects in nature), (9) **Existential intelligence** (sensitivity and capacity to tackle deep questions about human existence such as, what is the meaning of life? Why do we die? How did we get here?”

Berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh Munif Chatib tentang sekolah berbasis MI (*Multiple Intelligensi*). Chatib (2012) mengatakan bahwa sekolah yang memanusiakan manusia adalah sekolah yang mengenali tipe kecerdasan peserta didiknya. Solusi dari kendala bagi sekolah dalam memanusiakan manusia adalah aplikasi *multiple intelligensi* (kecerdasan majemuk).

Sampai saat ini dikenal sembilan tipe kecerdasan yang terdapat pada manusia termasuk peserta didik. Kesembilan kecerdasan tersebut bagi seseorang tidak dapat dibatasi. Bisa saja seseorang mampu memiliki lebih dari satu kecerdasan. Menurut Chatib (2012: 71) bahwa:

“Kecerdasan seseorang tidak dapat dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam *achievement test* (tes formal). Sebab setelah diteliti, ternyata **kecerdasan seseorang itu selalu berkembang (dinamis), tidak statis**. Tes yang dilakukan

untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apa lagi sepuluh tahun lagi.”

Pernyataan ilmiah yang dikemukakan oleh Chatib tersebut mengisyaratkan bahwa dalam perlakuan sekolah ditemukan hal-hal yang tidak manusiawi. Tidak manusiawi dalam pengertian bahwa peserta didik yang dihadapi oleh guru tidak relevan atau tidak tepat dengan tipe kecerdasannya. Indikator yang mudah dikenali dari gejala ketidaktepatan adalah tingkah “aneh” dari peserta didik sebagai reaksi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi dibutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan oleh sekolah untuk lebih detail mengenal tipe-tipe kecerdasan dari peserta didik.

e. Fungsi selektif (*selective function*)

Fungsi sekolah selanjutnya adalah fungsi selektif (*selective function*). Dalam fungsi selektif ini sekolah berperan memberikan bantuan kepada peserta didik agar secara sadar mengenal kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya. Fungsi selektif sangat berkaitan pada fungsi sekolah sebelumnya yaitu fungsi diagnostik dan fungsi diferensiasi. Ketiga fungsi sekolah yaitu diagnostik, diferensiasi, dan selektif memiliki kesamaan yaitu berfungsi memetakan atau mengelompokkan.

Dalam dunia pendidikan di sekolah terdapat dua perlakuan tindak lanjut yang berhubungan dengan hasil. Perlakuan pertama adalah penghargaan (*reward*) dan perlakuan kedua yaitu pemberian hukuman (*phunisman*). Baik penghargaan maupun

hukuman dalam pendidikan, keduanya bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar mengetahui atau mengenali akibat dari hasil perbuatannya.

Apabila ada prestasi yang tidak dihargai maka pelakunya tidak terkesan dengan prestasi yang telah diraihinya. Bila tidak ada penghargaan prestasi maka gaungnya tidak menyebar kepada orang lain di sekitarnya. Begitu pula dengan kesalahan yang tidak ditindaki dengan hukuman, maka pelakunya tidak merasakan sebagai suatu kesalahan, sehingga bisa dilakukan berulang kali. Orang di sekitarnya pun merasa tidak takut dengan pelanggaran yang sama.

Perbedaan fungsi selektif dengan fungsi diagnostik dan fungsi diferensiasi yang diperankan oleh sekolah terletak pada tujuan akhirnya. Fungsi selektif mengacu pada hasil dari sebuah proses pendidikan. Fungsi selektif menunjukkan bahwa sekolah memiliki hak yang kuat untuk membuat keputusan hasil seleksi. Hasil seleksi yang telah diputuskan harus memiliki kekuatan akuntabilitas terhadap pihak eksternal. Fungsi selektif yang diperankan oleh sekolah di Makassar tidak banyak memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Adapun yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya adalah tingkat keseriusan dan kesungguhan dalam melakukan seleksi terhadap peserta didik.

Seleksi yang dilakukan menggunakan standar tertentu sehingga hasilnya dapat berfungsi secara efektif. Hasil seleksi yang diperoleh tidak dibiarkan begitu saja sebelum teruji keandalannya. Adapun efektivitas dari fungsi selektif yang diperankan oleh sekolah teruji oleh sistem kompetisi yang diadakan baik di dalam ataupun di luar sekolah. Jika peserta didik hasil seleksi berhasil meraih prestasi dengan membawa

pulang hadiah kejuaraan (piala, piagam, atau tropi) penghargaan, berarti seleksi yang telah dilakukan dianggap efektif. Bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka hasil seleksi perlu dievaluasi ulang.

Sebagai contoh dalam kompetisi OSN (Olimpiade Sains) SMP Negeri 8 Makassar sebagai sekolah yang diunggulkan tentu tidak mengirim utusannya tanpa seleksi yang ketat dan sungguh-sungguh. Peserta didik yang menjadi delegasi dibagi dalam beberapa tingkatan. Ada utusan yang diunggulkan (utusan utama), ada utusan non unggulan, dan ada pula yang sifatnya partisipatif. Karena tidak ada batasan jumlah peserta sehingga setiap kegiatan OSN banyak peserta didik yang diutus untuk mengikutinya. Seorang guru Pembina Olimpiade Fisika yang sementara menghadapi beberapa peserta didik peserta olimpiade mengatakan:

“Beberapa peserta didik yang tinggal ini secara khusus saya bina. Mereka ini adalah calon peserta yang diunggulkan untuk mengikuti OSN, mudah-mudahan bisa membawa hasil yang menggembirakan nanti.” (Wawancara AS, Sabtu 8/8/2015)

Keseriusan guru dalam mengemban fungsi selektif memang perlu diapresiasi. Perhatian serius guru tersebut dibuktikan dengan menggunakan pembinaan di luar jam pembelajaran (saat setelah pulang sekolah). Begitu pula dengan peserta didik yang sukarela mengorbankan waktu istirahat dan waktu bermain dengan mengikuti kegiatan tambahan. Semua ini berjalan dengan baik oleh karena Kepala Sekolah sebagai pemegang kewenangan kebijakan sekolah senantiasa memberikan support yang kuat. Pada sisi lain, dukungan moral dan semangat dari orangtua peserta didik yang menjadi delegasi pun sangat membantu. Orangtua dengan suka rela memberikan kesempatan

kepada pihak sekolah dan anaknya untuk ikut menyaksikan kegiatan-kegiatan seperti OSN (Olimpiade Sains Nasional).

f. Fungsi hubungan pembantuan dan referral (*helping and referral function*)

Fungsi pendidikan yang diperankan oleh sekolah bagian terakhir dari pembahasan ini adalah hubungan pembantuan dan referral (*helping and referral function*). Dalam memerankan fungsi pendidikan *helping and referral function* sekolah berfungsi mendorong peserta didik melakukan hubungan pembantuan dengan pihak lain dan merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula.

Sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi tersebut selalu menyiapkan peserta didik. Adapun kegiatan yang berhubungan dengan *helping and referral function* terbagi atas dua yaitu, (1) kegiatan bersifat permanen dan (2) kegiatan yang sifatnya temporer atau eksidensial. Meskipun ada kegiatan yang bersifat temporer atau eksidensial, namun pihak sekolah selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Kegiatan yang berkaitan dengan *helping and referral function* di SMP Negeri 8 Makassar ada yang tergolong khusus dan tergolong umum. Kegiatan yang tergolong khusus dilakukan melalui seleksi atau penunjukan langsung berdasarkan kemampuan. Sedangkan untuk kegiatan yang tergolong umum dapat dilakukan oleh peserta didik secara keseluruhan.

Kegiatan kebersihan dan keindahan kota merupakan agenda khusus pemerintah Kota Makassar. Semua lembaga dan sektor di bawah naungan pemerintah kota masing-masing telah dibagi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan kebersihan

dan keindahan kota untuk sekolah lebih banyak terkonsentrasi di lingkungan dalam dan luar sekitar sekolah. Semua warga sekolah ikut dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menanamkan rasa kebersamaan bagi peserta didik sehingga bukan hanya aktif membersihkan tetapi juga aktif dalam menjaga kebersihan. Meskipun belum tampak jelas kegiatan ini juga memberikan contoh kepada masyarakat sekitar sekolah untuk turut membersihkan dan memelihara kebersihan, minimal tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Kegiatan diseminasi bahaya narkoba merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bekerjasama dengan pihak sekolah. Pemerintah kota melakukan sosialisasi sekaligus merekrut peserta didik yang bisa dimanfaatkan melakukan diseminasi ‘menyebarkan’ kepada teman sebayanya tentang apa dan bagaimana narkoba serta bahaya yang ditimbulkannya. Kegiatan ini dianggap efektif dengan pertimbangan bahwa kebiasaan “ikut-ikutan” yang dilakukan oleh peserta didik lebih banyak terjadi karena pengaruh dari teman-teman sebayanya.

Keragaman etnis, suku, agama, adat, kelompok, organisasi, paham, dan bahasa merupakan salah satu potensi sumber konflik dalam masyarakat. Cara pandang tentang keragaman yang terjadi sangat perlu diluruskan sehingga perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Kegiatan diseminasi pembauran merupakan kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa yang disosialisasikan lewat peserta didik di tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader pelajar dan pemuda yang mampu menyebarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kepada teman-teman sebaya

mereka. Tindakan menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perkelahian pelajar, perang antar kelompok, perilaku anarkis geng motor, dan begal motor dapat diminimalkan.

Pemerintah Kota Makassar memiliki agenda tahunan yang melibatkan peserta didik. Agenda tahunan seperti kegiatan memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan (karnaval, barisan lampion, lomba-lomba), peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Makassar. Semua kegiatan tersebut selalu dibantu oleh sekolah baik sebagai peserta utama maupun sebagai peserta partisipatif.

Kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilibatkan adalah peserta didik yang tergabung dalam organisasi PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka, dan Kelompok Pencinta Lingkungan. Kegiatan kemanusiaan berkaitan dengan kegiatan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) jika terjadi kebakaran, bencana alam (banjir, tanah longsor). Adapun partisipasi peserta didik dalam kegiatan kemanusiaan tidak terlibat langsung di lapangan tetapi dalam bentuk penggalangan dana dan bahan kebutuhan bagi korban bencana. Peserta didik yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan bertugas sebagai pelaksana kegiatan.

PIKER (Pusat Informasi Konseling Remaja) sebagaimana yang telah dijelaskan adalah sebuah terobosan kelompok guru BK. Guru BK membentuk komunitas beranggotakan peserta didik dengan kriteria tertentu. Menurut informasi dari guru bahwa anggota PIKER adalah peserta didik yang pernah bermasalah dan telah berhasil keluar dari masalahnya. PIKER bertugas menjaring, mendeteksi, dan melaporkan peserta didik bermasalah yang ditindaklanjuti penanganannya oleh kelompok guru BK.

3. Peran masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar

Secara khusus masyarakat dalam sistem pendidikan adalah komunitas manusia yang melingkupi anak didik/peserta didik di luar pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Anak didik atau peserta didik tidak mungkin terhindar dari pengaruh komunitas manusia yang bernama masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat tidak mungkin diabaikan dalam pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan harus menjadi perhatian yang serius baik berupa kebaikan ataupun keburukannya.

Masyarakat atau komunitas memiliki peran yang sangat menentukan dalam pendidikan. Kalau masyarakat baik dalam pendidikan maka pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Jika masyarakat buruk dalam pendidikan maka dampaknya juga bisa sangat buruk bagi dunia pendidikan. Masyarakat adalah lembaga yang bisa aktif sekaligus pasif terhadap pendidikan.

Masyarakat adalah salah satu lingkungan tempat anak didik berada. Lingkungan adalah suasana yang melingkupi kehidupan anak didik. Suasana yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik kepada seseorang. Seorang anak didik yang berada dalam lingkungan dengan kebiasaan religius cepat atau lambat pasti terkontaminasi dengan sifat dan sikap religius. Suasana yang buruk dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak didik. Seorang anak didik yang berada di dalam lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan, maka sedikit atau banyak sifat dan sikap kekerasan dapat tertanam dalam dirinya. Setiap orang dapat terpengaruh oleh suasana kebiasaan lingkungan. Oleh karena itu anggota masyarakat yang baik dalam sebuah komunitas idealnya berada di atas sebuah kesepakatan untuk menciptakan suasana yang baik bagi

perkembangan generasi mudanya. Setiap anggota masyarakat dewasa harus merasa berkepentingan dan memiliki kewajiban moral dalam mewujudkan terciptanya lingkungan masyarakat yang baik.

Apakah masyarakat tahu fungsi yang mesti diperankan dalam pendidikan? Kalau masyarakat tahu, apakah fungsi itu dilakukan? Kalau pun dilakukan, sejauh mana fungsi tersebut dilaksanakan? Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peranan masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar, maka berikut ini dijelaskan fungsi-fungsi pendidikan yang diperankan oleh masyarakat di Kota Makassar. Ada empat fungsi pendidikan yang diperankan oleh masyarakat yang akan dijelaskan yaitu: (1) fungsi pemberdayaan, (2) fungsi partisipasi, (3) fungsi *inklusi*, dan (4) fungsi dalam penentuan nasib sendiri.

a. Fungsi pemberdayaan

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya, memiliki daya, atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan dalam pendidikan berarti membuat anak didik atau peserta didik memiliki kekuatan dengan mendidik mereka. Apa yang diberdayakan? Potensi anak didik/peserta didik. Potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap anak didik sudah memiliki potensi tersebut yang dia dapatkan dari orangtuanya (keluarga). Setiap peserta didik sudah memiliki potensi itu yang diperolehnya dari gurunya (sekolah). Pertanyaannya adalah, apakah semua bekal potensi yang telah dimilikinya diberdayakan oleh masyarakat ketika berada di tengah-tengah mereka (masyarakat)? Ataukah masyarakat justeru menjadi “pembunuh” potensi tersebut? Hal ini sangat

tergantung pada paradigma masyarakat dalam memandang penting atau tidaknya pendidikan tersebut.

Fungsi pemberdayaan dalam pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah peran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka. Fungsi pemberdayaan oleh masyarakat memiliki arti sangat penting bagi anak didik/peserta didik oleh karena masyarakat dituntut menyiapkan suasana lingkungan kondusif yang memungkinkan bagi anak didik memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Suasana lingkungan kondusif dapat berupa fasilitas fisik dan fasilitas non fisik.

Fasilitas fisik yang disepakati oleh masyarakat berupa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebutuhan kegiatan anak didik/atau peserta didik. Hampir semua kebutuhan anak didik/peserta didik telah disiapkan oleh komunitas masyarakat. Kedatangan peserta didik atau anak didik di tempat yang dimaksud berbeda-beda. Beberapa peserta didik mengunjungi tempat tersebut langsung setelah pulang dari sekolah. Mereka tidak pulang ke rumah lebih dahulu tetapi langsung menuju tempat-tempat seperti rumah bermain (*game online* dan *play station*). Mereka pergi ke tempat tersebut dengan keadaan masih memakai seragam sekolah. Ada pula peserta didik yang pulang ke rumah, ganti baju kemudian berangkat menuju tempat yang dimaksud.

Fasilitas rumah ibadah seperti masjid sangat membantu dalam menampung kegiatan anak didik. Mereka dihimpun dalam kegiatan remaja masjid. Remaja masjid sering diberdayakan pada peringatan hari-hari besar agama dan saat bulan suci

Ramadhan. Keberadaan remaja masjid terutama pada bulan suci Ramadhan amat membantu kegiatan pengurus masjid. Pada hari-hari biasa, anak didik yang tergabung dalam remaja masjid berada di masjid pada waktu antara magrib dan isya. Mereka datang shalat berjamaah sambil menunggu masuknya waktu shalat isya. Adapun kegiatan yang mereka lakukan cukup bervariasi ada yang sekedar bercakap-cakap dengan temannya, ada yang mengaji (membaca Al-Qur'an), dan ada yang membantu kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Komunitas orangtua yang menjadi pengurus masjid dan komunitas remaja masjid menjalin hubungan mutualisme (saling membantu dan saling menguntungkan). Demikian pula dengan keberadaan gereja, banyak melibatkan anak-anak remaja seusia peserta didik SMP pada hari-hari raya seperti hari Natal, hari Paskah dan pada saat kebaktian baik di gereja ataupun pada salah satu rumah yang disepakati.

Masjid sekolah dan gedung ormas keagamaan di waktu sore hari atau di hari minggu sering digunakan oleh komunitas ormas (organisasi kemasyarakatan) agama untuk kegiatan kajian-kajian agama. Mereka yang tergabung dengan kegiatan rohis (kerohanian Islam) memanfaatkan waktu di luar jam pelajaran sekolah untuk melaksanakan program-program mereka.

“Kami sering memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah atau hari ahad untuk melakukan kajian agama. Kami banyak dibimbing oleh kakak-kakak *murabbi* (pembimbing laki-laki) dan *murabbiah* (pembimbing perempuan) pencerahan masalah-masalah keagamaan.” (Wawancara DS, Sabtu 1/8/2015).

Tempat bimbingan belajar merupakan salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh peserta didik. Frekuensi tertinggi kedatangan peserta didik pada saat-saat

menjelang ujian nasional (UN) dilaksanakan. Mereka melakukan bimbingan secara intensif. Menurut informasi, pihak penyelenggara bimbingan tidak hanya memperhatikan aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Selain mereka membimbing materi pelajaran juga selalu memberikan motivasi-motivasi sehingga semangat peserta didik untuk belajar semakin baik. Satu hal yang menarik pula dari bimbingan belajar adalah mereka menjual keterampilan menyelesaikan soal dengan cara-cara kreatif. Banyak dari peserta didik menjadi tertarik dengan “jualan” yang seperti itu. Dengan demikian, komunitas bimbingan belajar sangat efektif membantu pemberdayaan peserta didik di luar sekolah.

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan di atas memerlukan perhatian serius dari semua pihak atau secara moral didukung oleh masyarakat. Dukungan moral yang diharapkan adalah penguatan nilai-nilai religius dan norma susila sesuai dengan agama dan adat kebiasaan yang sebenarnya. Selain itu, dukungan moral tersebut memberikan kesan positif bagi anak didik atau peserta didik bahwa semua yang didapatkan di sekolah memiliki kaitan yang kuat dengan semua yang dilakukan di luar sekolah. Inilah yang dimaksud dengan fasilitas non fisik.

Fasilitas non fisik merupakan paket pendukung yang sangat menentukan bagi kegiatan anak didik atau peserta didik. Dukungan fasilitas non fisik yang diberikan bertujuan bagaimana anak didik atau peserta didik terjaga dari pengaruh buruk yang dapat merusak nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan di rumah dan di sekolah. Dukungan fasilitas non fisik berfungsi memperkuat nilai-nilai pendidikan.

Bioskop merupakan sarana dan prasarana hiburan yang digemari oleh anak didik atau peserta didik. Sebagai sarana hiburan tidak jarang pula menjadi wadah penyampaian pesan-pesan pendidikan. Keberadaan bioskop sebagai sarana hiburan diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah seperti suasana tegang atau jenuh setelah ujian di sekolah. Bioskop juga menjadi tempat bersosialisasi atau bersilaturahmi antara seseorang dengan orang lain, dan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebagai sarana hiburan, suasana bioskop juga sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik bagi anak didik/peserta didik. Hal-hal yang tidak baik seperti, berpacaran yang berlebihan, menonton film yang tidak sesuai umur, bersantai hingga lupa waktu (waktu shalat, dan waktu pulang ke rumah). Upaya dari pihak pengelola bioskop (masyarakat) untuk menjadikan bioskop sebagai tempat yang peduli dengan nilai-nilai pendidikan sudah ada tetapi belum optimal. Berdasarkan fenomena ini, menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat (dalam hal ini pengelola bioskop) rupanya sangat minimal dibandingkan dengan keuntungan finansial yang mereka peroleh.

Fasilitas selanjutnya adalah rumah bermain. Rumah bermain merupakan tempat yang menjadi kegemaran anak usia sekolah saat ini. Pengelola rumah bermain sangat paham dengan kegemaran konsumennya. Berdasarkan informasi, mereka yang mengunjungi rumah bermain pada umumnya memiliki alat permainan yang sama di rumah mereka. Tetapi mereka lebih senang mendatangi rumah bermain meskipun harus membayar. Berbagai alasan yang dikemukakan antara lain; (1) rumah bermain lebih ramai, (2) seru karena bisa berkompetisi (dalam permainan game saat ini ada peringkat yang dibukukan setiap pemain), (3) banyak supporter. Apa yang dilakukan oleh

pengelola rumah bermain untuk membantu pendidikan anak? Ini merupakan pertanyaan yang perlu diupayakan solusinya. Pertama, berapa banyak waktu yang dipakai? Kedua, siapa yang bersama mereka? Ketiga, apa manfaat yang mereka dapatkan? Keempat, berapa biaya dikeluarkan? Kelima, kegiatan apa yang dilakukan selain yang disediakan? Keenam, apa tanggung jawab moral pengelola rumah bermain. Oleh karena itu, diusulkan ada niat baik pengelola untuk membuat suasana pendidikan seperti perbandingan pada gambar 4.26 di bawah ini.



Gambar 4.26 Himbauan Moral yang Sebaiknya Ada di Tempat Rumah Bermain
Sumber: Diadaptasi dari <http://www.kaskus.co.id/>

Pertanyaan keenam yaitu apa tanggung jawab moral pengelola rumah bermain? Di tempat rumah bermain tidak ada seleksi masuk. Siapa saja boleh masuk dengan syarat siap membayar. Mereka tidak peduli apakah yang datang masih berpakaian sekolah atau tidak. Di rumah bermain tidak ada perlakuan khusus yang mengingatkan, apakah sudah minta izin orangtua atau belum, apakah sudah shalat atau belum, apakah sudah kerja PR atau belum, apakah sudah makan atau belum. Demikian pula dengan

larangan, pengelola rumah bermain tidak melarang masuk meskipun berpakaian seragam sekolah, begitu pula user 'pengguna' tidak dilarang merokok dalam ruangan. Perokok aktif dan perokok pasif beaur menghirup asap dan bau rokok bersama. Sebuah kondisi yang tidak kondusif bagi anak usia sekolah yang sangat mudah meniru dan terpengaruh. Sesuai dengan fungsi masyarakat dalam pendidikan yaitu pemberdayaan. Memberdayakan potensi yang ada pada peserta didik. Lalu apa yang telah mereka (pengelola) berdayakan pada diri anak didik/peserta didik?

Bila ditelaah lebih jauh dan bijaksana, dalam bermain *game* juga memiliki fungsi pemberdayaan. Bermain game merupakan bagian dari psikomotor. Mereka yang terbiasa melakukan (bermain game) memiliki kelincahan lebih dari orang lain dalam menggunakan produk elektronik. Pada sisi lain, rumah bermain dapat berefek kecanduan (*addiction*). Perhatian anak didik hanya terfokus pada permainan game dan menyepelekan hal lain yang penting. Porsi waktu bermain game jauh lebih banyak digunakan dari pada belajar, mengerjakan PR, kegiatan kerohanian, kegiatan keterampilan. Permainan game elektronik yang sering digunakan oleh anak didik bersifat individualistik. Setiap orang yang memainkannya hanya asyik dengan benda yang dihadapinya dan tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Jadi meskipun mereka banyak tetapi komunikasi atau interaksi di antara mereka dalam bermain hampir tidak ada. Permainan game yang dimainkan oleh pemainnya hampir-hampir tidak melibatkan orang lain. Permainan individu yang menutup pintu keterlibatan orang lain untuk merasakan hal yang sama. Permainan yang mereka mainkan sungguh jauh berbeda dengan permainan tradisional. Bandingkan dengan permainan tradisional yang

sering dimainkan oleh anak-anak dari suku Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar yang banyak melibatkan interaksi antar individu. Mereka bermain dengan gembira, ceria, berkompetisi tetapi berinteraksi, seperti yang terlihat pada gambar 4.27 berikut ini.



Gambar 4.27 Permainan Tempo Dulu yang Hampir Punah

Sumber: <http://www.kaskus.co.id/thread/55f2ac3b1cbfaabc328b456b/permainan-tempo-dulu-yang-hampir-punah/1>

Permainan game yang banyak dilakukan oleh anak didik saat ini perlu diteliti lebih jauh tentang efek buruk yang ditimbulkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sangat mungkin bahwa adanya kesenjangan atau jurang pemisah nilai-nilai sosial seperti *sipakatau* diawali dari sistem permainan anak-anak yang memaksa mereka untuk bersikap *individualistik* dalam keramaian kelompoknya.

a. Fungsi partisipasi

Fungsi masyarakat dalam pendidikan yang kedua adalah fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi yang dimaksudkan yaitu masyarakat mendukung untuk mengambil

bagian dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini mendudukan masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam kemitraan pendidikan. Masyarakat yang menyadari tentang fungsi partisipasi pastilah tidak bersikap apatis terhadap situasi dan kondisi pendidikan yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat yang meyakini fungsi tersebut menjadi “mata dan telinga” bagi mitra lainnya (keluarga, sekolah, dan pemerintah). Mereka bersikap proaktif dalam memberikan saran dan kritikan yang konstruktif bila ada kenyataan tidak sesuai dengan harapan.

Masyarakat memiliki peluang yang besar dalam berpartisipasi oleh karena dilindungi oleh undang-undang. Beberapa lembaga telah diberikan peran oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Lembaga masyarakat yang berkaitan khusus dengan pendidikan seperti; Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Kelompok Belajar, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Kelompok Majelis Taklim. Lembaga masyarakat lainnya seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), media massa, dan *Ombudsman*. Selain itu, masyarakat dalam wujud perseorangan juga diberikan kebebasan dalam menyikapi fenomena pendidikan. Kebebasan berpendapat telah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan regulasi tertinggi Negara.

Masyarakat sebagai lembaga maupun perseorangan selama ini telah banyak menjalankan fungsi partisipasi. Masyarakat tidak pernah diam menjadi penonton belaka dari adanya fenomena yang berkembang setiap saat. Suasana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan masyarakat jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Masyarakat berperan atau berpartisipasi dalam pendidikan anak dalam

berbagai cara dan bentuk. Semuanya sangat bergantung pada kondisi dan keadaan yang sedang dan akan terjadi.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengambilan keputusan di Makassar memiliki pengaruh yang besar. Partisipasi masyarakat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diputuskan. Lembaga maupun perseorangan begitu peduli dengan kebijakan sekolah atau kebijakan pendidikan yang diambil. Kepedulian masyarakat terhadap sekolah atau terhadap pendidikan dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan seperti Komite Sekolah atau menggunakan cara yang tidak langsung.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan cara yang tidak langsung yaitu menggunakan lembaga masyarakat. Di Makassar, suara masyarakat mendapat perhatian serius dari pemerintah dan dari lembaga masyarakat itu sendiri (seperti media massa). Kebijakan sekolah atau kebijakan pendidikan dapat berubah akibat tekanan masyarakat. Pada kenyataannya, masyarakat sudah menemukan jalan “baru” untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lebih memilih media massa sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi atau partisipasi. Mereka memilih media massa karena apa yang menjadi temuannya jika disampaikan ke media massa maka dapat direspon dengan cepat bahkan sangat cepat.

Selain media massa, masyarakat juga menggunakan lembaga *Ombudsman*. *Ombudsman* sudah populer di kalangan masyarakat sebagai lembaga yang efektif tempat mengadukan kebijakan yang dianggap salah. Masyarakat memilih *Ombudsman* karena selain ditindaklanjuti dengan cepat, identitas pelapor juga dirahasiakan.

Ombudsman selama ini telah menunjukkan kecepatan kerja yang memenuhi keinginan masyarakat. Laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan melakukan operasi lapangan dan jika dianggap layak maka diteruskan kepada pemegang kewenangan untuk ditindaklanjuti lagi. Laporan *Ombudsman* selama ini selalu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sudah beberapa SK Kepala Sekolah dicabut oleh pemerintah Kota sebagai tindak lanjut berdasarkan adanya laporan *Ombudsman* yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Unsur komunitas masyarakat yang lain adalah Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan Kota Makassar sangat memahami program unggulan dari pemerintah yaitu menjadikan Makassar sebagai *Smart City* ‘kota cerdas’. Harapan atau mimpi dari *Smart City* adalah mewujudkan pelayanan kota kelas dunia dengan salah satu indikatornya yaitu masyarakat mendapatkan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya.

Dewan Pendidikan Kota Makassar tidak hanya memberikan partisipasinya dalam hal penerimaan peserta didik baru. Peran lain yang dilakukannya adalah memberikan masukan dalam program perekrutan calon kepala sekolah. Dewan Pendidikan menganggap bahwa salah satu penentu kesuksesan pendidikan di Kota Makassar adalah sistem manajerial sekolah. Masukan dan saran ini ditujukan kepada keberadaan kepala sekolah.

Komunitas masyarakat selain yang disebutkan di atas, semestinya memberikan kontribusi berupa penguatan-penguatan. Sehingga bukan hanya sisi-sisi buruk yang menjadi sorotan utama tetapi sisi-sisi yang menyangkut prestasi juga perlu dibesar-

besarkan. Penempatan penilaian, kritikan, saran yang proporsional dan berimbang dari masyarakat dapat menjadi refleksi positif untuk memperbaiki kesalahan, menutupi kekurangan dan meningkatkan prestasi dan hasil pendidikan yang telah dicapai.

b. Fungsi inklusi

Fungsi yang pendidikan yang ketiga dari masyarakat adalah fungsi inklusi. Fungsi inklusi yang dimaksudkan adalah masyarakat menerima, mengakui, mendukung, dan memperjuangkan kesetaraan kesempatan dan anti diskriminasi dengan mengakui bahwa beberapa orang mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Fungsi inklusi dalam pendidikan memiliki posisi yang sangat penting mengingat bahwa dalam masyarakat terdapat kondisi heterogen yang membutuhkan pengakuan dan dukungan moral. Selain dukungan moral yang dibutuhkan dari masyarakat, maka yang tak kalah pentingnya adalah adanya dukungan material atau dukungan finansial. Peserta didik atau anak didik dari kelompok abilitas maupun kelompok disabilitas memiliki kebutuhan yang kurang lebih sama dalam menempuh pendidikan. Mereka butuh diterima dengan “tangan terbuka” oleh semua pihak sehingga dapat menjalani kehidupan dengan normal.

Keberterimaan kelompok *difabel* atau disabilitas oleh masyarakat di Makassar menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Masyarakat sudah mulai familiar dengan perbedaan-perbedaan seperti ini. Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang telah memberikan fasilitas yang seluas-luasnya kepada segenap

lapisan masyarakat dalam pendidikan inklusi. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan pendidikan inklusi meskipun masih terbatas.

Pada pendaftaran *online* SPPDB terdapat kalimat perintah “Pilih salah satu jalur penerimaan siswa baru, yaitu jalur reguler, jalur inklusi, jalur keluarga pra sejahtera, dan jalur domisili”. Penyediaan layanan pilihan jalur reguler, inklusi, keluarga pra sejahtera, dan domisili merupakan bukti kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat dari perlakuan diskriminasi. Semua lapisan masyarakat terlayani dalam memperoleh kesempatan menikmati layanan pendidikan.

Berdasarkan kondisi di lapangan, penerimaan masyarakat Kota Makassar dalam hal perbedaan seperti abilitas dan disabilitas, kemampuan ekonomi, suku, agama, dan ras, sudah menunjukkan kondisi yang baik. Selain menerima, masyarakat atau lembaga masyarakat pun sudah berada pada tahap memperjuangkan pemberian kesempatan yang sama dalam hal memperoleh hak pelayanan pendidikan. Masyarakat berjuang dengan berbagai cara maupun bentuk. Masyarakat dengan kondisi keberagaman, kemampuan, dan kemauannya dipicu oleh kenyataan yang terjadi. Bentuk perjuangan yang mereka (masyarakat) lakukan adalah dengan melakukan kritikan, masukan, sampai kepada penyediaan fasilitas-fasilitas secara swadaya dan swadana. Masyarakat Kota Makassar tidak membiarkan apabila terjadi pelanggaran kebijakan pemerintah yang menodai hal-hal yang menyangkut kesetaraan dan persamaan hak.

Kesenjangan dalam menikmati pelayanan pendidikan berkualitas berangsur-angsur sudah bukan lagi masalah di Kota Makassar. Kebijakan sistem pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota saat ini dijaga secara bersama-

sama. Tentunya, masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengawas independen dari pelaksanaan kebijakan harus menjadi unsur yang menguatkan kebijakan yang sudah baik tersebut. Dukungan moral dan dukungan material menjadi sebuah keharusan jika menginginkan kebijakan tersebut tetap terpelihara.

c. Fungsi dalam penentuan nasib sendiri

Fungsi pendidikan yang keempat yang harus diperankan oleh masyarakat adalah penentuan nasib sendiri. Fungsi dalam penentuan nasib sendiri yang dimaksudkan adalah bahwa masyarakat mendukung hak-hak orang (hak-hak anak) untuk membuat pilihan mereka sendiri. Fungsi yang keempat ini sangat terkait dengan fungsi pemberdayaan, fungsi partisipasi, dan fungsi inklusi yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila dicermati lebih jauh maka fungsi-fungsi pendidikan yang diemban oleh masyarakat (pemberdayaan, partisipasi, dan inklusi) merupakan suasana yang dibutuhkan bagi peserta didik atau anak didik dalam mengokohkan pilihan hidupnya. Pada kondisi sebaliknya atau jika fungsi pemberdayaan, fungsi partisipasi, dan fungsi inklusi tidak dilakukan oleh masyarakat, maka peserta didik atau anak didik pasti berada dalam situasi yang tidak menentu (*ambiguitas*).

Hak memilih adalah hak *prerogative* setiap individu. *Life is a choice* ‘hidup itu pilihan’ merupakan hal prinsip yang mesti dipegang oleh setiap individu dan dihormati oleh individu lainnya. Prinsip ini berlaku sepanjang tidak menciderai nilai etika dan kebenaran universal. Sebuah pepatah yang mengatakan “dimana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”, merupakan pegangan untuk menghargai nilai-nilai universal.

Dukungan masyarakat dalam memberikan pilihan nasib sendiri bagi anak didik tentu tidak dilakukan tanpa adanya perlakuan. Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan dapat berlaku sebagai “orangtua” yang hanya akan memberikan kebebasan kepada anak didik jika telah melakukan upaya-upaya pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat banyak peluang dan kegiatan yang bisa diambil sebagai pilihan.

Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dalam memerankan fungsi penentuan nasib sendiri? Peserta didik di sekolah atau anak didik di rumah dalam perjalanan proses pendidikannya pasti sudah menemukan pilihan-pilihan. Ketika seorang anak ditanya, “apa cita-citamu?” atau “mau jadi apa nanti ketika sudah dewasa?”, atau “siapa tokoh yang menjadi idolamu?”, atau “pekerjaan apa yang paling baik menurutmu?” dan sederet pertanyaan lainnya, maka kebanyakan atau mungkin semua anak dapat memberikan jawaban dengan pasti. Jawaban yang diberikan atau diungkapkan dengan sungguh-sungguh itulah pilihan hidupnya yang sebenarnya.

Bagaimana hubungannya dengan fungsi pemberdayaan? Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada penggambaran fungsi pemberdayaan (fungsi pertama masyarakat dalam pendidikan) bahwa di Kota Makassar terbagi atas dua jenis komunitas masyarakat yaitu, (1) komunitas masyarakat yang memberdayakan peserta didik dan (2) komunitas masyarakat yang melemahkan peserta didik.

Komunitas masyarakat yang melemahkan peserta didik adalah mereka yang tidak menguatkan nilai-nilai pendidikan yang telah diperoleh dari pendidikan keluarga dan sekolah. Seorang peserta didik yang sudah memilih untuk tidak merokok maka masyarakat berkewajiban menguatkan pilihan tersebut. Bukan justru menjadikan

peserta didik atau anak didik menjadi bimbang dengan pilihannya. Jika seorang anak telah memilih taat beribadah, maka masyarakat seharusnya menguatkan pilihan tersebut. Apabila ada anak didik atau peserta didik memiliki keinginan kuat mengembangkan kecerdasan kinestetik, maka idealnya masyarakat berkewajiban menguatkan pilihan itu. Sebaliknya jika ada anak didik atau peserta didik yang memilih jalan yang keliru, maka masyarakat seharusnya menutup, mengalihkan, atau mengubah jalan itu. Masyarakat mesti memberikan **suasana** yang mendukung atas pilihan-pilihan kebaikan yang telah diambil oleh peserta didik atau anak didik. Sebaliknya, masyarakat mesti menutup atau paling tidak, meminimalkan **suasana** yang memberikan peluang bertambahnya jalan sesat (yang bertentangan dengan aturan agama, adat, dan negara).

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat untuk mengokohkan pilihan hidup peserta didik? Masyarakat adalah potret keberagaman dan keberagaman merupakan keniscayaan, tidak ada yang bisa menghindarinya. Masyarakat sebagai potensi pendidikan dapat berfungsi optimal dan bisa pula sebaliknya. Masyarakat dapat berfungsi optimal apabila mengikuti pandangan teori struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional (Damsar, 2011) bahwa: (1) setiap masyarakat terdiri atas berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil, (2) elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik, (3) setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, (4) setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara anggotanya.

Sebaliknya, masyarakat bisa saja menjadi potensi konflik, sebagaimana dikemukakan dalam teori struktural konflik (Damsar, 2011: 56-59) bahwa: (1) setiap

masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan dan perubahan sosial terdapat dimana-mana, (2) setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan konflik dan konflik sosial terdapat dimana-mana, (3) setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan, (4) setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Kemana masyarakat menentukan pilihan? Apakah melaksanakan fungsinya ataukah justru menjadi sumber konflik? Semuanya sangat bergantung pada kebijakan dari penguasa (Pemerintah Kota Makassar). Apabila penguasa mampu mengelola potensi masyarakat dengan baik, maka masyarakat pasti menjadi solusi dari permasalahan pendidikan. Sebaliknya, jika penguasa tidak mampu mengelola potensi masyarakat dengan baik, maka masyarakat pasti menjadi sumber masalah dalam pendidikan. Pada posisi inilah, penguasa semestinya memperlihatkan kompetensi yang pernah diucapkan pada saat berkampanye memaparkan kelebihan-kelebihannya.

4. Peran pemerintah dalam pendidikan di Kota Makassar

Pendidikan dalam pandangan alamiah dapat terselenggara secara otomatis. Tanpa rekayasa pun pendidikan tetap dapat terlaksana. Pendidikan merupakan kodrat manusia yang lahir bersama manusia itu sendiri. Hanya saja dalam situasi yang serba *plural* ‘majemuk’ berpotensi untuk berjalan tidak teratur dan tidak terkendali. Pendidikan sudah merupakan kodrat manusia yang bertujuan untuk meneruskan budaya yang dianutnya. Adanya keberagaman yang menjadi ciri masyarakat sehingga menjadi penting bahwa pendidikan harus diintervensi oleh sebuah lembaga yang

memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan menjadikan sistem pendidikan dapat berjalan lebih baik dan lebih teratur. Pemilik kekuatan dan kekuasaan dilengkapi oleh regulasi yang dijadikan sebagai rujukan sekaligus kekuatan hukum sehingga semua elemen mengetahui batas kewenangan, hak, kewajiban, dan merasa aman terlindungi oleh aturan tersebut.

Pemerintah dan pemerintah Kota merupakan dua elemen yang mengatur secara umum dan khusus tentang pendidikan. Pemerintah pusat membuat kebijakan nasional sementara pemerintah Kota membuat kebijakan lokal. Secara nasional pendidikan telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut berisi tentang fungsi-fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani bidang pendidikan.

Visi, Misi, Pemerintah Kota Makassar dalam bidang pendidikan menyatakan dengan jelas tentang **deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah**. Ini merupakan dawujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kota untuk menyukseskan program wajib belajar. Keinginan pemerintah kota dalam hal ini adalah tidak boleh ada usia wajib belajar yang tidak sekolah hanya karena alasan tidak punya biaya. Program ini merupakan penjabaran dari salah satu misi yaitu “merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.” Program deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah meskipun belum populer sampai saat ini (2 tahun masa jabatan wali Kota), namun penjajakan ke arah itu sudah mulai ada. Pemerintah Kota rupanya telah menggandeng salah satu bank yang dianggap paling lama berkiprah dalam hal deposito. Pemerintah Kota Makassar rupanya memulai kerjasama dengan bank tersebut

dengan membuat *smart card* ‘kartu pintar’ yang saat ini baru dimanfaatkan oleh pegawai dan guru negeri yang ada di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar

Selain visi, misi, dan tujuan yang telah dibuat, Pemerintah Kota Makassar mengarahkan visi, misi, dan tujuan tersebut secara detail ke dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang mengatur dan membatasi kewenangan dibagi-bagi pendelegasiannya kepada semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Berdasarkan hasil wawancara, obesrvasi, dan dokumen telah memberikan kesan yang baik tentang upaya pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Adapun fungsi pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah memerankan fungsi pendidikan sebgai berikut: (1) penanggung jawab pendidikan, (2) pembuat, pembina, dan pengendali kebijakan pendidikan, (3) penjamin mutu dan dana pendidikan, dan (4) penyelenggara pendidikan. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan berdasarkan urutannya.

a. Penanggung jawab pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar dikatakan bahwa: “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas **tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.**” Tanggung jawab ini secara khusus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.

Sebagai penanggung jawab pendidikan, pemerintah bekerja berdasarkan tata urutan manajemen modern. Tanggung jawab yang dimaksudkan dalam hal ini adalah program

wajib belajar. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini; (1) membuat regulasi tentang wajib belajar, (2) membuat program wajib belajar, (3) melakukan sosialisasi tentang wajib belajar, (4) melakukan pendataan usia wajib belajar, (5) melaksanakan program wajib belajar, (6) melaksanakan evaluasi program wajib belajar.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dari unsur pemerintah (pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar) memberikan jawaban dengan mantap. Informan yang terdiri dari tiga orang telah menguraikan secara mendetail mulai dari pembuatan regulasi hingga pelaksanaan evaluasi program. Penjelasan yang mereka berikan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dan mengandalkan program pemerintah Kota untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter.

Salah satu yang menjadi kebanggaan pemerintah Kota Makassar di bidang pendidikan adalah SPPDB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru). Sistem ini dianggap memiliki dampak multi manfaat. *Pertama*, user diperlakukan lebih adil karena mereka dibagi dalam jalur yang berbeda tanpa saling mengganggu. Adapun jalurnya terdiri atas jalur **inklusi**, jalur **keluarga prasejahtera**, jalur **kemitraan**, jalur **domisili**, dan **reguler**. Ada orangtua yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini merasa sangat bersyukur karena adanya jalur domisili. Beliau mengatakan bahwa untuk pertama kalinya bisa masuk sekolah yang bagus dan dekat dengan rumah. *Kedua* adalah dapat mengurangi kemacetan. *Ketiga* mudah dan murah. Makna dari semua ini menunjukkan bahwa khusus pelaksanaan pendidikan formal, pemerintah kota Makassar patut diacungkan jempol. Tetapi bagaimana dengan pendidikan informal dan nonformal?

Berdasarkan data (wawancara, dokumen, dan pengamatan) yang diperoleh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar lebih banyak bertanggung jawab pada bidang pendidikan formal. Sedangkan untuk pendidikan non formal dan informal masih banyak yang luput dari jangkauan. Dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dikatakan bahwa:

”Tanggung jawab seorang guru atau pihak sekolah semestinya hanya sampai pada jam pelajaran sekolah berlangsung. Kalau sudah terlepas dari jam sekolah maka otomatis sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Penjelasan AH di atas mungkin ada benarnya dan banyak yang membenarkan. Tetapi perlu direnungkan bahwa anak didik yang dibina sehari berinteraksi dengan dunia dan lingkungan di mana saja mereka ada. Bila dikaji lebih mendalam baik Undang-undang No. 20 Tahun 2003 maupun Perda (Lembaran) Daerah No. 7 Tahun 2013 disitu sama sekali tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, tanggung jawab pendidikan tidak dibatasi oleh jam kerja. Pendidikan harus berlangsung 24 jam secara terus-menerus, dan secara interaktif dilakukan oleh pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan ketiga pihak ini jika terjadi hal-hal yang buruk menimpa peserta didik. Adapun akibat dari proses pendidikan baik ataupun buruk pasti kembali kepada siapa penanggung jawabnya.

Jika berbicara tentang kenyataan yang terjadi saat ini seperti, geng motor, begal motor, perkelahian pelajar, penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, minum minuman keras, menyepelekan ajaran agama, dan perilaku tidak santun yang dilakukan oleh anak usia sekolah maka tidak ada yang bisa luput dari adanya andil kesalahan dari

pelaku pendidikan. Tiga lembaga pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan "tersangka" bahkan "terdakwa" dari penyimpangan-penyimpangan terjadi. Kalau kejadian itu sudah terlanjur ada, dapatkah kita mengatakan bahwa "ini bukan tanggung jawab kami, sebab peristiwanya terjadi di luar jam kerja kami".

Pendidikan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebuah pernyataan yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Mungkinkah ini terwujud? Sangat mungkin. Hal yang diperlukan saat ini adalah budaya mendidik atau terciptanya budaya mendidik. Budaya mendidik saat ini belum terbentuk secara menyeluruh. Budaya mendidik belum merambah kepada masyarakat akar rumput, hanya terkonsentrasi pada kalangan terdidik dan sadar dengan pendidikan. Budaya mendidik masih berada dalam bentuk parsial yang dipisahkan oleh sekat-sekat egoisme, kepentingan, dan ketidakpedulian. Budaya mendidik adalah satu sistem nilai yang dianut bersama oleh semua pemangku kepentingan dalam pendidikan.

Satu kisah nyata yang pernah terjadi di Kabupaten Belitong sekitar tahun 1985 (diangkat ke layar lebar dalam film "Sang Pemimpi") diceritakan sebagai berikut:

"Tiga anak muda Ikal, Aray, dan Jimbron terpesona dengan poster film (film tujuh belas tahun ke atas) yang terpajang di bioskop tidak jauh di depan los kontrakan mereka. Sebagai anak muda yang sudah balig mereka merencanakan untuk menonton film tersebut meskipun anak seusia mereka dilarang masuk. Pemilik bioskop adalah seorang warga keturunan Tionghoa sangat melarang anak sekolah masuk ke bioskopnya. Hanya orang sarungan (pelaut yang baru datang) dibolehkan masuk, mereka masuk dengan menutup kepala dengan sarung. Ketiga anak ini mengikuti gaya orang sarungan sehingga pemilik bioskop dapat dikelabui. Tetapi rupanya seorang penjual jagung bakar yang menjual depan bioskop mencurigai tiga orang "sarungan" yang tidak biasa, sarungnya bercorak lain dan tidak ada bau laut dari sarung mereka. Penjual jagung itu tahu bahwa mereka adalah tiga orang murid Pak Mustar di salah satu SMA. Penjual jagung kemudian menghubungi Pak Mustar guru mereka. Pak

Mustar pun datang dan masuk ruang bioskop mencari ketiga muridnya dan seketika itu pula pemilik bioskop menghentikan tayangan film untuk membantu mencari ketiga anak tersebut. Ketiga anak itu lalu dibawa keluar diiringi ucapan marah sang guru. Keesokan harinya mereka dihukum di sekolah dengan hukuman yang membuat mereka jera, dipermalukan.”

Sumber: diadaptasi dari buku Sang Pemimpi, Andrea Hirata (2010).

Kisah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak dibatasi baik oleh ruang maupun waktu. Pendidik tidak dibatasi oleh status asalkan manusia dewasa. Siapa pun kita, siapa saja, kapan dan dimana saja pendidikan bagi anak didik tidak boleh berhenti. Jika pendidikan dibatasi oleh waktu (jam kerja) dan tempat (ruang), maka anak didik akan luput dari nilai-nilai luhur pendidikan. Jika anak didik luput dari nilai-nilai luhur pendidikan, maka pastilah diisi oleh nilai-nilai lainnya, asusila, amoral, hewaniah, dan keburukan-keburukan yang tidak manusiawi.

Kisah ini disimak dengan baik oleh informan HSB (Kabid Dikdas Kota Makassar). Setelah mendengar kisah ini, maka ditanyakanlah tentang kemitraan pendidikan yang terjadi di Kota Makassar. HSB mengungkapkan bahwa:

”Sebenarnya bagus tetapi kemitraan seperti ini tidak dikenal dalam aturan kita. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan di sekolah yang saya pahami adalah hanya terbatas pada keberadaan Komite Sekolah. Itulah sebabnya setelah saya baca proposal anda langsung teringat dengan hasil penelitian saya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu Komite Sekolah” (Wawancara HSB, Rabu 26/1/2016).

Informasi yang disampaikan oleh salah seorang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menunjukkan bahwa ada ”rongga besar” yang tidak terisi dalam kemitraan pendidikan yang sesungguhnya. Rongga besar inilah jika tidak mendapat perhatian yang serius dapat berdampak pada persoalan ”gali lubang tutup lubang” yang berkepanjangan dalam sistem pendidikan kita. Jika didapati ada istilah

”istirahat” atau ”berhenti” atau ”diam” atau ”pembiaran” atau ”bukan urusanku”, dalam sistem pendidikan maka ”rongga besar” tersebut akan terisi oleh kemudharatan. Kemudharatan bisa dalam bentuk terang-terangan seperti tindakan anarkisme geng motor, begal motor, balapan liar. Kemudharatan bisa dalam bentuk tersembunyi seperti mengonsumsi narkoba, minuman keras, merokok. Jika pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan, maka bagian manakah dari tanggung jawab tersebut yang boleh ditinggalkan. Jika ada yang boleh ditinggalkan, maka siapakah yang akan bertanggung jawab jika mengisi ”rongga besar” tersebut?

Dalam diri manusia terdapat potensi-potensi kebaikan dan keburukan dan sangat tergantung pada suasana apa yang diciptakan untuk memengaruhinya. Menurut Sigmund Freud (Natawidjaja, 2007: 62-63) bahwa dalam diri setiap individu terdapat tiga elemen yaitu: (1) *id* yang merupakan elemen biologis yang mendorong manusia untuk mendapatkan kenikmatan (dikuasai oleh prinsip kenikmatan), (2) *ego* yaitu struktur kepribadian yang berhubungan dengan realitas/logis (dikuasai oleh prinsip realitas), dan (3) *superego* yaitu tempat kesadaran dan keyakinan akan nilai-nilai berada (dikuasai oleh prinsip moral). Ketiga elemen dalam diri manusia yang dimaksudkan oleh Freud dapat dikendalikan oleh stimulus. Jika stimulus yang diberikan kepada anak didik adalah nilai-nilai kesadaran dan moral (*superego*), maka elemen *superego*lah yang memberikan respon lebih banyak. Begitupula untuk stimulus pada elemen *id* dan *ego*.

Apa yang menjadi program pendidikan pemerintah kota mencakup secara keseluruhan (pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat). Permasalahannya hanya

terletak pada keandalannya dalam menjaga dan melindungi peserta didik berkaitan dengan nilai kognitif, afektif, dan psikomotor yang telah mereka dapatkan. Terutama dalam menjaga nilai afektif. Sebagai contoh dalam hal model pakaian sekolah, patut diacungkan jempol bagi Pemerintah Kota Makassar yang memberlakukan rok panjang mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dengan alasan yang bernuansa moral. Tetapi ketika di tempat-tempat umum, peserta didik/anak didik tidak lagi dilarang memakai pakaian yang *super minim* (rok pendek, celana pendek yang memperlihatkan aurat berlebihan dan tidak santun menurut ukuran pendidikan formal). Lagi-lagi nilai ganda menjadikan semuanya tidak lagi punya arti. Apa yang diperjuangkan dalam pendidikan formal menjadi ”mentah” kembali di luar sekolah. Orangtua dan masyarakat tidak merasa berhak atau merasa tidak ada urusan dengan hal seperti ini. Walaupun mereka (orangtua dan masyarakat) memiliki rasa prihatin namun dihantui oleh perasaan takut atau segan melakukan semacam teguran karena tidak ada aturan pemerintah yang melindunginya. Oleh karena itu, semestinya tanggung jawab yang diemban pemerintah selalu mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yaitu:

“Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No. 20 Tahun 2003).

Tujuan pendidikan ini sering bias dalam implementasi. Di negeri ini (Indonesia) mulai dari *founding father* sampai pemerintah yang berkuasa saat ini memiliki cita-cita dan tujuan yang sangat luhur secara konseptual. Secara konseptual mereka selalu menempatkan, agama, ketuhanan, ketaqwaan, keimanan, dan moral berada di prioritas

utama dalam setiap tujuan Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki potensi kebaikan luar biasa yang tidak ada tandingannya di dunia. Hanya saja, dalam implementasi sering terjadi bias dan biasanya jauh menggelinding dari nilai luhur yang hendak dicapai. Kuat dalam koseptual tetapi lemah dalam aktual. Wajarlah jika seorang Mukhtar Lubis (2008) mengungkap salah satu ciri manusia Indonesia adalah *hipokrisi* sebagaimana dituliskan berikut ini:

“Ciri pertama manusia Indonesia yaitu *hipokrisi* atau munafik. Di depan umum kita mengecam kehidupan seks terbuka atau setengah terbuka, tapi kita membuka tempat mandi uap, tempat pijat, dan melindungi prostitusi. Banyak yang pura-pura alim, tapi begitu sampai di luar negeri lantas mencari *nightclub* dan pesan perempuan kepada *bellboy* hotel. Dia mengutuk dan memaki-maki korupsi, tapi dia sendiri seorang koruptor. Kemunafikan manusia Indonesia juga terlihat dari sikap asal bapak senang (ABS) dengan tujuan untuk *survive*.”

Sumber: <https://kwarta.wordpress.com/2008/10/21/mochtar-lubis-ciri-ciri-manusia-indonesia-tantangan-pendidikan-budi-pekerti-nasional/>

Kalau saja apa yang terdapat dalam konsep seperti Pancasila, UUD 1945, Tujuan Pendidika Nasional, kebijaksanaan ataupun kebijakan pendidikan lainnya satu dalam konsep dan aksi, maka bisa dibayangkan betapa hebatnya negara ini, betapa hebatnya Kota Makassar ini. Oleh karena itu, untuk mencapai ”mimpi indah” itu dibutuhkan:

1. Peninjauan kembali apa makna dari kata **tanggung jawab** pendidikan yang sebenarnya,
2. Upaya untuk selalu *mengupgrade* dan *mengupdate* fungsi tanggung jawab pendidikan yang telah diperankan oleh pemerintah selama ini,
3. Keinginan dan kesungguhan untuk berubah ke jalan yang benar.

b. Pembuat, pembina, dan pengendali kebijakan pendidikan

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran dan pengembangan dari UU No. 20 Tahun 2003 dipertegas penetapan rencana dan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.

”Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar adalah **merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan**, meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta sarana dan prasarana.”
(Sumber: *renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, 2015*).

Fungsi ini mencakup banyak hal tentang pembuatan kebijakan. Cakupan terdiri atas pembuatan: (1) kebijakan dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, (2) kebijakan dalam membimbing penyelenggaraan pendidikan, (3) kebijakan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, dan (4) kebijakan dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Empat kewenangan fungsi yang dimiliki pemerintah tersebut jika diwujudkan sebagaimana adanya, maka dapat berimplikasi pada lahirnya *oucomes* yang dapat diandalkan. Keempat fungsi ini dijelaskan oleh tiga informan didasarkan pada konsep yang sesungguhnya dan didukung oleh fakta.

Menurut penjelasan mereka (informan unsur pemerintah), dari empat fungsi sekaligus kewenangan pemerintah tersebut biasanya terkendala pada keterbatasan. Sebagai contoh kebijakan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Tetapi ada juga kebijakan yang justeru *over personal* yaitu pengawasan. Menurutny, dibanding

dengan objek pendidikan yang akan diawasi dengan banyaknya tenaga pengawas yang tersedia jauh lebih banyak tenaga pengawasnya.

Sehubungan dengan penelitian ini, kebijakan pemerintah yang dibahas meliputi: (1) kebijakan di bidang pendidikan dasar, (2) kebijakan di bidang pendidikan non formal dan informal. Kedua kebijakan ini menjadi fokus yang dibahas penelitian sebagai salah satu kasus dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Makassar. Pendidikan dasar (diwakili oleh SMPN 8 Makassar), pendidikan non formal (masyarakat), informal (keluarga).

Pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam melaksanakan kebijakannya Pemerintah Kota Makassar menetapkan tugas yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dan secara teknis operasional dijalankan oleh Bidang Pendidikan Dasar.

”Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja program dan pengembangan kurikulum pendidikan TK, SD dan SMP, menilai dan menetapkan izin operasi pendidikan dasar, menata kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dan penguatan mutu pendidikan.”

Sumber: renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 2015.

Pada ujung kalimat di atas dikatakan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melakukan **penguatan mutu pendidikan**. Mutu pendidikan meliputi mutu nilai afektif, mutu nilai kognitif, dan mutu nilai psikomotor. Ketiga mutu nilai tersebut harus seimbang satu sama lain. Totalitas dari tujuan nasional pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mencakup

ketiga nilai tersebut. Oleh karena itulah penguatan mutu pendidikan tidak bisa hanya yang terdapat dalam angka-angka raport dan ijazah tetapi yang lebih penting adalah aktualisasi dari nilai-nilai tersebut.

Penguatan mutu pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas. Mutu pendidikan mencakup proses dan hasil (*output* dan *outcomes*) pendidikan. Proses pendidikan hakikatnya berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pendidikan tidak dibatasi oleh kapan dan dimana anak didik atau peserta didik berada. Selama peserta didik belum dewasa maka tidak satupun elemen pendidikan yang boleh melepaskan diri dari tanggung jawab. Menurut Langeveld (1971), puncak perlakuan pendidikan adalah kedewasaan. Dalam arti lain bahwa pendidikan berakhir setelah seseorang sudah mencapai sifat dewasa. Jika seorang manusia sudah mencapai tingkat kedewasaan, maka dia sudah tidak membutuhkan pendidikan dari orang lain karena dia sudah mampu mendidik dirinya sendiri.

Rekrutmen calon kepala sekolah atau lebih populer disebut lelang jabatan calon kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK merupakan terobosan baru di Kota Makassar. Rekrutmen calon kepala sekolah atau lelang jabatan kepala sekolah bukanlah yang pertama terjadi, di tempat lain seperti DKI Jakarta sudah lebih dahulu melakukannya. Rekrutmen calon kepala sekolah untuk Kota Makassar dilaksanakan menjelang akhir tahun 2015 dan diharapkan rampung pada awal tahun 2016. Pemerintah Kota Makassar berkeinginan mendapatkan kepala sekolah yang memiliki komitmen membangun pendidikan berkualitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Wali Kota Makassar ”revolusi pendidikan adalah harga mati untuk menciptakan pendidikan

berkualitas serta berkarakter yang tak lama lagi berlangsung di Makassar.” (*tribunnews.com*, 2016). Wali Kota Makassar berkeinginan semua kepala sekolah yang berhasil direkrut dapat bersinergi mewujudkan program pemerintah kota yang ingin mewujudkan *smart city* ‘kota cerdas’.

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara *online* merupakan kebijakan yang mendapat banyak pujian. Sistem ini dibangun untuk memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat Kota Makassar. Sistem PPDB selain lebih mudah bagi masyarakat juga memberikan kesempatan lebih besar bagi calon peserta didik untuk bersekolah didekat tempat mereka berdomisili. Imbas lain dari PPDB yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik yang mengalami cacat atau difabel (program inklusi), keluarga pra sejahtera (keluarga miskin) dan dampaknya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan) merupakan hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Tenaga Kerja. Perogram ini bertujuan mengurangi jumlah anak yang bekerja mencari nafkah sehingga dapat bersekolah kembali. Sedangkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) sasarannya adalah orangtua pra sejahtera dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini satu paket antara pekerja anak dan orangtua yang kehidupannya tidak sejahtera sehingga memaksa anaknya untuk mencari nafkah.

Kebijakan untuk pendidikan anak usia dini, non formal dan informal. Bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal terbagi atas tiga seksi yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Pendidikan Masyarakat, dan (3) Kursus dan Pelatihan.

Dalam fungsi layanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal, dan Informal memiliki tugas:

”melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, menilai dan menetapkan izin operasional penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal.”

Sumber: renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 2015

Pada penjelasan ini, secara jelas disebutkan tentang PAUD dan pendidikan Non Formal disebutkan. Namun untuk pendidikan Informal tidak ada dituliskan. Rupanya kebijakan tentang pendidikan Informal (pendidikan keluarga) baru dikeluarkan tahun 2015. Keseriusan pemerintah pusat terhadap pendidikan keluarga ditandai dengan terbentuknya satu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015. Saat laporan penulisan laporan penelitian ini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga telah melaksanakan sosialisasi dalam jumlah terbatas dalam bentuk petunjuk teknis.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesungguhnya memiliki multi motivasi. Selain untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat juga memiliki tujuan politis. Dalam politik pendidikan dikatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut pendidikan tidak terlepas dari upaya mempertahankan status *quo*, (Sirozi, 2010). Selanjutnya beliau (Sirozi, 2010) katakan bahwa sejak jaman penjajahan Belanda sampai pada orde reformasi tidak satupun rezim penguasa yang tidak menjadikan pendidikan sebagai jualan politik untuk menarik simpati dan menjadikan kekuasaannya dapat bertahan lebih lama. Terlepas dari semua motivasi di balik kebijakan yang diputuskan, pemerintah harus

memerankan fungsinya sebagai pembina dan pengandali kebijakan. Pembina maupun pengendali kebijakan bermanfaat sebagai penjaga efektivitas kebijakan yang diambil. Apakah gunanya kebijakan yang diberlakukan secara parsial, diwajibkan di tempat A namun tidak berlaku di tempat B padahal membawa efek yang sama pada kedua tempat tersebut. Adalah suatu kesiasiaan jika suatu kebijakan diberlakukan pada waktu P tetapi tidak di waktu Q padahal membawa dampak yang sama pada waktu P dan Q. Dibutuhkan penguatan sistem sehingga kebijakan bersifat menyeluruh.

c. Penjamin dana pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Hal pendidikan merupakan amanah penting dan prioritas dari UUD 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 hasil amandemen disebutkan: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebagai langkah operasional, amanat UUD 1945 hasil amandemen kemudian dituangkan dalam Undang-undang. Menguatkan secara operasional, pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban Negara diatur dalam UU No.20 Tahun 2003.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Sumber: UU No. 20 Tahun 2003

Persoalan dana pendidikan sudah ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Angka 20% dari APBN merupakan porsi yang cukup

tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk bidang lain. Besaran persentase yang dianggarkan untuk dana pendidikan merupakan bukti bahwa bidang pendidikan merupakan prioritas pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 disebutkan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Sumber: UUD 1945 hasil amandemen

Jaminan dari Negara tentang biaya pendidikan semestinya menjadi realitas dalam implementasi di daerah. Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang dimaksudkan dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Artinya, jika terjadi kekurangan biaya yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai pendidikan di Kota Makassar maka atas nama undang-undang, Pemerintah Kota Makassar wajib menutupi kekurangan itu. Apalagi untuk daerah atau kota yang mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar dapat memberikan dana pendidikan lebih dari yang ditetapkan. Persentase yang ditetapkan dalam UUD 1945 hasil amandemen merupakan persentase minimal.

Dalam hal pembiayaan atau pendanaan pendidikan dasar sebagai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sering mengalami masalah di Kota Makassar. Meskipun pemerintah Kota hanya sebagai pihak yang menyalurkan tetapi dari keluhan pihak sekolah yang muncul mengatakan bahwa tidak jelas siapa yang dapat dijadikan tempat bertanya jika terjadi keterlambatan.

Pada akhirnya tahun 2014 timbullah gejolak di kalangan guru. Guru-guru kemudian melakukan aksi jalanan menuju DPRD Kota Makassar. Mereka memilih momen pada saat anggota DPRD Kota Makassar yang baru dilantik. Ternyata skenario ini membawa dampak yang efektif. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh guru-guru mendapat sambutan sesuai yang diharapkan. Pemerintah kota bereaksi cepat, meskipun marah tetapi permintaan guru dikabulkan. Dua hari kemudian, tunjangan itupun dibayarkan. Dengan peristiwa ini muncullah istilah dari guru-guru bahwa berdemonstrasi di jalan merupakan solusi “memaksa” pemerintah untuk mengabulkan tuntutanannya.

Pengalaman seperti yang dikutip di atas, semestinya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Makassar. Guru yang dijunjung tinggi sebagai profesi yang dimuliakan menjadi kurang pantas bila melakukan aksi jalanan (unjuk rasa). Salah satu jalan keluar dari masalah ini adalah membangun komunikasi yang jelas.

Banyak tudingan yang dialamatkan kepada Pemerintah Kota Makassar tentang keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Beberapa guru curiga, bahwa tunjangan sertifikasi sengaja diendapkan di bank untuk mendapatkan keuntungan bunga bank. Dengan adanya banyak tudingan sedemikian maka bapak Wali Kota Makassar ikut berbicara:

“Jangan pernah menyangka bahwa tunjangan sertifikasi guru sengaja diendapkan di bank supaya bunganya dapat dipakai, tidak benar itu. Semua ini terjadi semata-mata karena masalah administrasi saja, ujarnya.”

Sumber: Celebes TV Makassar, 2015.

Salah satu pemicu kemarahan guru adalah adanya informasi dari berbagai pihak. Ada guru yang mendapatkan informasi bahwa di daerah lain tunjangan sertifikasi sudah dibayarkan. Informasi-informasi itu berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Antara satu sama lain guru saling tukar informasi yang akhirnya menjadi kesimpulan bahwa pemerintah Kota Makassar tidak bersungguh-sungguh membayarkan tunjangan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar semestinya memiliki kepekaan dan menyikapi dengan cepat. Penjelasan resmi bagian humas pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu jalan keluar dari timbulnya konflik-konflik yang terjadi.

Masalah dana pendidikan lainnya yang sering dikeluhkan adalah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana Gratis. Kedua sumber dana ini sering terlambat dicairkan. Banyak item program sekolah yang sudah harus dilaksanakan sementara dana belum ada. Kalau ada dana talangan maka tidak ada masalah. Namun jika dana talangan tidak tersedia maka jadilah program tersebut tertunda. Tidaklah mengherankan bila beberapa item program dilaksanakan di luar jadwal yang semestinya. Program tahun 2015 dilaksanakan pada awal tahun 2016.

Sebagai imbas dari kekakuan penggunaan dana BOS dan dana Gratis adalah banyak item pembiayaan program yang harus ditutupi, tetapi tidak dapat dilakukan. Kepala sekolah sebagai pemegang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) harus mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Jalan keluar yang paling dekat adalah menggandeng kerjasama dengan orangtua peserta didik. Tetapi apakah itu mudah?

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa meminta bantuan dalam bentuk uang dari orangtua peserta didik merupakan hal yang sangat sensitif. Apabila salah

kata, salah kelola pastilah membahayakan nasib kepala sekolah. Jika kepala sekolah salah dalam melangkah maka menjadi “bumerang” yang dapat menggoyahkan kedudukannya. Orangtua melakukan demonstrasi menuntut semua biaya sekolah dibebaskan seperti yang terjadi pada gambar berikut ini.

Terjadinya miskomunikasi antara orangtua dan guru (keluarga dan sekolah) terletak pada teknik pendekatan. Kepala sekolah sebagai manajer tertinggi dalam sekolah harus pandai-pandai dalam mengetahui semua peserta didik dan latar belakangnya. Pengetahuan yang mendalam terhadap peserta didik ini mesti dibagi-bagi kepada setiap guru mitra terutama wali kelas. Sehingga semua peserta didik dapat dipetakan berdasarkan kompetensi, kegemaran, bakat, suku, agama, ras dan tingkat kemapanan ekonomi mereka. Menurut AH, seorang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan kepala sekolah mengatakan bahwa:

“Seorang kepala sekolah harus tahu sampai sekecil-kecilnya tentang sekolah. Oleh karena itu dia harus datang paling awal dan pulang paling akhir. Setiap hari mesti datang pagi-pagi mendahului semua orang. Dengan cara ini, ia dapat mengetahui siapa anak penguasa dan siapa anak pengusaha. Kepala sekolah bukan kepala ruangan yang hanya tinggal di ruangnya tetapi setelah selesai menjemput peserta didik harus berkeliling memantau proses pembelajaran di semua kelas. Cara ini sekaligus mengetahui siapa guru yang rajin dan yang malas. Sebenarnya masalah bantuan biaya operasional sekolah sangat mudah diperoleh dari orangtua peserta didik jika kepala sekolah dan guru (wali kelas) memiliki data yang lengkap tentang siapa peserta didiknya. Guru dan kepala sekolah tidak perlu mengekspos secara terbuka hal-hal sensitif seperti itu. Karena persoalan bantuan orangtua dapat diwujudkan dengan cara-cara kekeluargaan.” (Wawancara AH, Rabu 26/1/2016).

Pernyataan dari informan AH sesungguhnya perlu dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di sekolah. Banyak sumber-sumber dana yang bisa dikelola di luar dana BOS dan dana Gratis. Hal ini sangat tergantung bagaimana menyiasati cara

memperolehnya. Sebagai salah contoh di Kota Makassar, ada sekolah menengah atas yang membangun masjid dan hanya ditanggulangi oleh satu orang dari orangtua peserta didik, padahal masjidnya tergolong mewah dan besar. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kekeluargaan.

Sebagai penyedia dana pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab sepenuhnya berarti semua pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Apabila dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan sekolah (pendidikan) maka pemerintah daerah harus membuat kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan yang diambil bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Apakah dengan menanggulangi sendiri dengan mengandalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dengan menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan, para pemerhati pendidikan, semua elemen masyarakat baik milik negara maupun milik swasta.

Menyikapi kondisi ketidakcukupan dana pendidikan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sekolah, Pemerintah Kota Makassar memilih bermitra dengan orangtua peserta didik. Melalui diskusi yang terkesan panjang, Pemerintah Kota Makassar akhirnya mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB). Sumbangan sukarela dimaksudkan untuk membiayai program yang bersifat rutin dan tidak termasuk dalam peruntukan penggunaan dana BOS dan dana Gratis. Dengan adanya kebijakan SSPB tersebut, maka pihak sekolah mendapat payung hukum untuk menarik dana masyarakat atau orangtua. Sekalipun demikian, di

SMP Negeri 8 Makassar tempat penelitian ini dilakukan, belum memberlakukannya. Artinya, di SMP Negeri 8 Makassar tidak ada pungutan dana SSPB.

Pembiayaan lain yang juga sering bermasalah adalah penyediaan atau pengadaan bahan dan alat kebutuhan sekolah yang tidak sesuai keperluan. Bahan dan alat seperti kebutuhan laboratorium dan perpustakaan seringkali diberikan pemerintah tanpa melalui analisis kebutuhan. Bahan dan alat didatangkan begitu saja tanpa adanya kompromi dengan sekolah sebelum dikirim. Bahan dan alat tersebut hanya membebani tempat penyimpanan dan bisa rusak tak terpakai. Seperti yang diungkapkan oleh guru pengelola laboratorium SMP Negeri 8 Makassar.

“Biasa kita bingung dengan sumbangan yang datang tiba-tiba. Alat-alat dan bahan laboratorium yang diberikan itu sebenarnya masih banyak di sekolah, kami tidak membutuhkannya tetapi dikasih. Mestinya pihak sekolah dikonfirmasi dulu apa yang dibutuhkan baru bahan dan alatnya dikirim kemari.” (Wawancara AS, Kamis 22/10/2015).

Bantuan pemerintah seperti yang dikatakan di atas mencerminkan bahwa tidak ada perencanaan yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berdasarkan data faktual. Adalah menjadi kelaziman bahwa bantuan yang dilakukan atas dasar pertemanan. Hubungan pribadi antara aparat pemerintah dengan warga sekolah tidak bisa dipungkiri sebagai alasan memilih dalam memberi bantuan kepada sekolah. Penyaluran bantuan yang tidak berbasis data berakibat pada penumpukan pada sekolah tertentu dan kekurangan pada sekolah lain. Tidak ada pemerataan.

Berdasarkan teori *transaktif* menganggap bahwa setiap kebijakan yang diputuskan perlu melalui musyawarah atau didiskusikan oleh setiap elemen yang berkepentingan (*stakeholder*). Menurut Hasbullah (2015: 72) bahwa:

”Teori *transaktif* sangat menghargai harkat individu untuk dipertimbangkan dengan saksama apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai individu dalam perumusan kebijakan (termasuk kebijakan pendidikan).”

Hubungan pribadi yang menjadi alasan di atas tidak diragukan lagi bagaimana saling menghargai satu sama lain. Hanya saja penghargaan sebagai teman (hubungan pribadi) itu tidak proporsional atau tidak pada tempatnya. Efektivitas dan efisiensi tidak lagi menjadi pertimbangan. Akibatnya uang Negara terbuang sia-sia dan tidak peruntukannya tidak memenuhi azas manfaat. Berdasarkan teori *transaktif* sebaiknya pemerintah memerhatikan pendapat atau keinginan dari pihak sekolah dan itu melalui komunikasi antara kedua belah pihak.

d. Penyelenggara pendidikan bermutu

Pendidikan bermutu adalah target yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengelola pendidikan. Pendidikan bermutu merupakan amanat dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Pendidikan bermutu terkait dengan akreditasi. Pada pendidikan formal akreditasi dilakukan dengan menilai delapan standar pendidikan. Adapun delapan standar pendidikan yaitu; (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Delapan standar ini menjadi indikator mutu yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu, akreditasi A

(tertinggi), akreditasi B, dan akreditasi C (terendah). Adapun tujuannya seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 bahwa:

“Akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu: (1) memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.”

Sumber: Kepmen Pendidikan Nasional No.087/U/2002

Akreditasi regular dilakukan oleh Badan Akreditasi setiap empat tahun atau kurang dari empat tahun (minimal dua tahun) untuk akreditasi atas permintaan sendiri dari sekolah. Sedangkan pada pendidikan non formal yang baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta juga dikenal dengan istilah akreditasi PNF (Pendidikan Non Formal). Badan atau lembaga yang melakukan akreditasi untuk PNF disebut BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal).

Hasil penilaian melalui akreditasi menandakan kualitas dari sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya secara komersial dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna (masyarakat) untuk memilih lembaga pendidikan sesuai standar yang diinginkannya. Kalau sebuah lembaga pendidikan terakreditasi dengan nilai A maka dapat dikatakan bahwa semua standar sudah sempurna atau mendekati sempurna (nilai A memiliki rentang atau interval). Demikian seterusnya untuk akreditasi dengan nilai B dan C.

Sebuah lembaga yang telah terakreditasi semestinya berbanding lurus *output* yang dihasilkan. Sekolah atau lembaga pendidikan non formal yang memiliki akreditasi A patut diduga bahwa *output* dari sekolah tersebut memiliki kualifikasi A juga. Sehingga ketika pihak pengguna *output* membutuhkan *input* maka cukuplah mempertimbangkan nilai akreditasi sekolah asalnya. Tetapi hal seperti ini belum

diberlakukan di Kota Makassar oleh karena pertimbangan ketidakpercayaan pihak pengguna *output*. Sebagai contoh SMP yang berakreditasi A belum tentu dipercaya bahwa alumninya juga memiliki kualifikasi A dan boleh langsung diterima tanpa tes oleh pihak SMA (sekolah pengguna). Hal ini sungguh ironi jika dikaitkan dengan delapan standar pendidikan yang telah dinilai oleh tim akreditasi.

Delapan standar pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya merupakan elemen penentu bermutu atau tidak bermutunya sebuah lembaga pendidikan. Hasil akreditasi sebagai cerminan mutu lembaga tersebut. Jadi, kalau akreditasi tidak mencerminkan mutu yang sesungguhnya berarti ada hal yang keliru dan perlu dibenahi. Beberapa kemungkinan yang terjadi sekaitan dengan tidak relevannya antara nilai akreditasi sebuah lembaga dengan mutu lembaga yaitu:

a. Tim Asesor (petugas akreditasi) tidak valid dalam memberikan penilaian

Tidak valid artinya tidak sesuai antara instrumen penilaian dengan apa yang dinilai. Apabila dicermati instrumen penilaian dari Badan Akreditasi, maka dipastikan bahwa intrumennya sudah memenuhi kriteria valid. Oleh karena itu, jika terjadi ketidakvalidan dalam penilaian, maka hal itu disebabkan oleh faktor manusia dan bukan faktor instrumen. Tim penilai yang menilai tidak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk memberikan penilaian yang objektif atau mendekati keadaan yang sebenar-benarnya.

b. Tim Asesor (petugas akreditasi) bersikap subjektif dalam memberikan penilaian

Faktor subjektivitas atau pemihakan dalam menilai memang tidak dapat dihilangkan seratus persen. Manusia bukanlah mesin tetapi makhluk yang diliputi oleh rasa dan rasio. Banyak faktor yang bisa memaksa seseorang menjadi memihak dan tidak lagi menggunakan rasio tetapi rasa yaitu; (1) kedekatan emosional seperti pertemanan, hubungan keluarga, utang budi, dan rasa empati, (2) pengaruh finansial (uang) dan materi (kebendaan). Beberapa pengalaman asesor (penilai akreditasi) mengatakan bahwa ketika mereka mendatangi sebuah sekolah yang akan dinilai mereka disambut dengan berlebihan.

Ternyata bukan hanya penyambutan yang diterima dengan begitu semarak, pelayanan makan pun terkesan mewah. Pada saat berpamitan, kepala sekolah beserta jajarannya mengantarkan sampai kami tidak terlihat oleh mata dari kejauhan. Tidak jarang pula, pihak sekolah “memaksa” untuk memberikan uang dan barang-barang bawaan yang bernilai. Perlakuan seperti yang diceritakan oleh asesor seperti ini mampu memengaruhi sikap para asesor sehingga tidak lagi memberi nilai objektif. Nilai akreditasi yang diperoleh dengan cara yang tidak objektif sebenarnya “menipu” semua pihak. Menipu pihak sekolah, lebih-lebih masyarakat yang menggunakan jasa sekolah.

Perkembangan manfaat dari nilai akreditasi sebuah sekolah saat ini belum banyak dipahami dan dirasakan baik internal sekolah maupun pihak eksternal. Namun yang patut dicatat bahwa akreditasi sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar. Meskipun baru sekedar wacana tetapi sudah merupakan kabar gembira

bahwa nilai akreditasi sekolah (lembaga formal) akan dijadikan dasar mendaftar pada sekolah tingkat lanjutan.

“Dalam rangka menjaga mutu pendidikan yang ditandai oleh nilai akreditasi, kedepan nantinya di Kota Makassar ini akan diusulkan supaya penerimaan peserta didik baru berbasis nilai akreditasi, maksudnya sekolah yang berakreditasi A hanya bisa menerima peserta didik dari alumni sekolah yang berakreditasi A pula.”

Sebuah menggembirakan bahwa besaran persentase realisasi program kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2013-2014 mencapai 98,48%. Keadaan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Bila ditelisik satu persatu capaian setiap tahun maka kondisinya cenderung selalu mengalami peningkatan untuk item positif. Sedangkan item yang sifatnya negatif juga setiap tahun selalu cenderung mengalami penurunan. Capaian ini tentu saja harus diimbangi dengan kondisi real yang dirasakan dalam realitas kehidupan. Artinya adalah **jika semakin tinggi capaian prestasi dalam pendidikan maka semakin sedikit masalah yang dirasakan oleh masyarakat.**

5. Kemitraan pendidikan di Kota Makassar

Sampai tulisan laporan penelitian ini sementara dalam proses akhir, ternyata pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang kemitraan pendidikan. Draf buku petunjuk teknis dibuat tanggal 1 Oktober 2015 yang meliputi tiga buku yakni: (1) Penguatan Kemitraan Keluarga Satuan Pendidikan dan Masyarakat di Satuan PNF, (2) Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat di SD, dan (3) Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Bagi Orang Tua Peserta Didik. Ketiga buku petunjuk teknis tersebut telah disosialisasikan pada awal tahun 2016.

Masalah kemitraan sangat penting dalam pendidikan. Karena tempat dan waktu berlangsungnya pendidikan tidaklah tunggal. Setiap tempat memiliki visi dan misi pendidikan yang sama yaitu mengemban tiga ranah pendidikan yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor, meskipun dengan sistem dan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu fungsi kemitraan diharapkan dapat menjaga dan merawat apa yang dimitrakan.

”Kemitraan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat wajib adanya. Makanya saat ini, pemerintah membentuk sebuah direktorat yang mengurus tentang pendidikan keluarga, bapak perlu cari itu bukunya di situ lengkap tupoksinya. Bayangkan bahwa dari 24 jam sehari semalam seorang anak hanya berada kurang lebih 7 sampai 8 jam di sekolah. berarti selama 16 sampai 17 jam mereka berada di luar sekolah, dan itu merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersinergi ini ”barang” (keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah).” (Wawancara AH, Selasa 26/1/2016).

Kemitraan yang diemban oleh tri pusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka di antara ketiganya pendidikan keluargalah yang belum mendapat porsi perhatian memadai dari pemerintah. Padahal pendidikan keluarga merupakan tempat pertama dan memiliki durasi waktu paling lama bagi anak didik atau peserta didik berada dibandingkan dengan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 membentuk Direktorat Pembinaan Keluarga di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas).

Berbicara tentang kemitraan pendidikan, maka terdapat tiga pertanyaan tentang paradigma kemitraan pendidikan, yaitu: (1) *What can parents, community members, and organizations do for us?* (apa yang orangtua, warga masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat lakukan untuk kami (sekolah)?, (2) *How can parents, community*

members, organizations helps us do our job better? (bagaimana orangtua, warga masyarakat, organisasi sosial dapat membantu kita untuk melaksanakan tugas secara lebih baik?), (3) *What can all of us together do to educate all children well?* (apa yang kita dapat kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan baik?). Menurut Anne Wescott dan Jean L. Konzal (2002), pertanyaan pertama di atas merupakan paradigma lama, pertanyaan kedua adalah paradigma transisional, dan pertanyaan ketiga merupakan paradigma baru dalam kemitraan pendidikan. Lebih lanjut dan sistematis diuraikan oleh Anne Wescott dan Jean L. Konzal (2002) bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh ketiga paradigma tersebut, seperti yang tertera pada tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.41 Tiga Paradigma Kemitraan Pendidikan

No.	Paradigma Lama	Paradigma Transisi	Paradigma Baru
1	2	3	4
1.	Menitikberatkan pada kecakapan akademik dan pengetahuan	Menitikberatkan pada penguasaan akademik dan perkembangan individual peserta didik	Menitikberatkan perhatian pada peserta didik secara keseluruhan, baik aspek akademis maupun perkembangan individualnya
2.	Hubungan sekolah terkontrol, komunikasi satu arah	Hubungan sekolah diarahkan	Tidak ada batas hubungan antar keluarga, sekolah, dan masyarakat
3.	Birokratis, impersonal, dan terjadi komunikasi satu arah	Kurang birokratis, lebih manusiawi, dan telah terjadi hubungan dua arah	Terjadi budaya menemukan, belajar, melindungi, dan membimbing; guru dan orangtua melaksanakan penelitian tindakan bersama-sama
4.	Saling melindungi diri, defensive	<i>Proaktif</i>	Keikutsertaan secara personal

1	2	3	4
5.	<i>Hirarkis</i> , tidak semua orang dipandang sama	Lebih <i>inklusif</i>	Tidak <i>hirarkis</i> , sepenuhnya <i>inklusif</i> , setiap orang merasa dirangkul
6.	Perbedaan kultural dan sosial tidak mendapatkan perhatian secara wajar	Perbedaan kultural dan sosial sudah memperoleh perhatian	Perbedaan budaya dan sosial dihargai dan dipelihara dengan baik
7.	Beberapa keluarga dan siswa termarginalisasi	Kerja sama dengan orangtua sudah terbentuk secara terbatas	Terdapat kerjasama antara orangtua dan masyarakat
8.	Orangtua dipandang sebagai sumber masalah dan kritik	Menjalin hubungan dengan masyarakat jika bermanfaat kepada sekolah	Orangtua dan warga masyarakat sebagai partner
9.	Masyarakat dipandang sebagai orang lain, kecuali diperlukan	Guru mulai mengadakan penelitian tentang kegiatan belajar mengajar tetapi belum melibatkan orangtua dalam proses ini	Menemukan manfaat bersama sebagai tujuan
10.	_____	_____	Pilihan banyak dan cara untuk mencapainya juga banyak.

Sumber: How Communities Build Stronger Schools, Stories, by Dodd, Anne W & Konzal, Joan L. 2002.

Kemitraan yang ingin diterapkan adalah kemitraan pendidikan menurut paradigma baru. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma baru tersebut masih membutuhkan tambahan berupa penguatan-penguatan. Penguatan-penguatan yang dimaksud adalah adanya kehadiran kekuasaan negara (pemerintah) sebagai pengayom kemitraan yang dapat menyikapi dengan bijaksana. Bahkan dalam situasi yang memaksa, demi menjaga keharmonisan kemitraan, pemerintah wajib turun tangan

sebagai pemain aktif yang langsung terlibat menjadi pihak pemberi penguatan kemitraan.

Kemitraan pendidikan di Kota Makassar menjelaskan bagaimana keempat lembaga mitra yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memerankan fungsi-fungsi pendidikan dalam sistem kemitraan. Berdasarkan uraian penjelasan dari fungsi yang diperankan oleh keempat lembaga tersebut diperoleh kenyataan bahwa, (1) setiap lembaga pendidikan tidak mungkin untuk menjalankan fungsinya dengan baik tanpa bermitra dengan lembaga mitra lainnya (*single fighter*), (2) peran dari masing-masing lembaga yang bermitra dalam pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangan yang ada diharapkan dapat tertutupi oleh adanya tindakan proaktif dari masing-masing mitra lainnya.

Kemitraan yang terjadi selama ini oleh para ahli dibedakan atas beberapa tipe. Kuswidanti (2008) membagi tipe kemitraan atas lima istilah yaitu: (1) *Full collaboration*, (2) *Coalition*, (3) *Partnership*, (4) *Alliance*, dan (5) *Network*. Kelima istilah tersebut diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya.

Dalam perkembangan analisis dan pembahasan selanjutnya memungkinkan lahirnya tipe baru. Tipe baru kemungkinannya ada dua yaitu: (1) tipe baru dalam pengertian belum pernah ada sebelumnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri, (2) tipe baru dalam pengertian kombinasi dua, tiga, empat atau lima dari tipe kemitraan yang sudah ada. Semuanya sangat tergantung pada kondisi kekinian yang terjadi di Kota Makassar. Berikut ini adalah tabel 4.42 yang menggambarkan tentang tipe-tipe kemitraan beserta ciri-cirinya.

Tabel 4.42 Tipe Kemitraan dan Ciri-cirinya

No.	<i>Full collaboration</i>	<i>Coalition</i>	<i>Partnership</i>	<i>Alliance</i>	<i>Network</i>
1.	<i>Written agreement</i>	<i>Formal agreement</i>	<i>Formal contract</i>	<i>Semi formal</i>	<i>Loose association</i>
2.	<i>Shared vision</i>	<i>All member involved in</i>	<i>New resources</i>	<i>Some new resources</i>	<i>No significant demands</i>
3.	<i>Consensus decision</i>	<i>New resources</i>	<i>Shared risk and reward</i>	<i>Coordination of task</i>	_____
4.	<i>Formal work assignment</i>	<i>Joint budget</i>	_____	_____	_____

Sumber: Kuswidanti, 2008

Tabel 4.41 di atas dijadikan acuan untuk mengidentifikasi tipe-tipe kemitraan pendidikan yang terjadi di Kota Makassar. Melengkapi pembahasan tentang peran lembaga yang bermitra dalam pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah), berikut ini akan dianalisis secara berpasangan yaitu; (1) kemitraan pendidikan keluarga dan sekolah, (2) kemitraan pendidikan keluarga dan masyarakat, dan (3) kemitraan pendidikan sekolah dan masyarakat.

a. Kemitraan pendidikan keluarga dan sekolah

Keluarga dan sekolah telah lama bermitra dalam pendidikan. Kemitraan antara keluarga dan sekolah sudah merupakan kebutuhan. Kedua belah pihak bertemu pada satu titik yang dijadikan sebagai sasaran pendidikan yaitu anak didik/peserta didik. Kemitraan pendidikan antara keluarga dan sekolah berlangsung alamiah. Setiap orangtua dalam sebuah keluarga senantiasa memerhatikan usia anak jika sudah saatnya untuk didaftarkan pada sebuah sekolah. Peristiwa pendaftaran dan penerimaan peserta

didik baru sudah merupakan budaya kehidupan bermasyarakat. Justeru merupakan sikap yang dianggap menyimpang jika pada zaman moderen ini ada orangtua yang tidak menyekolahkan anak. Urusan mengenai sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah pertama sudah diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah lama mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah memberikan fasilitas sekolah gratis (minus pakaian, sepatu, tas, alat tulis-menulis, dan transportasi) sehingga tidak lagi membebani orangtua lebih banyak dari sebelumnya.

Jika kemitraan antara keluarga dan sekolah sudah terjalin sejak lama bahkan sudah menjadi budaya, maka dapat dipastikan bahwa keluarga dan sekolah ibarat dua sahabat yang telah menjalin keakraban sangat lama. Hanya saja, baik keluarga maupun sekolah secara dinamis dan terus-menerus berganti aktor pemeran. Akibatnya, jalinan persahabatan mereka secara berganti pula diperankan oleh orang yang berbeda sehingga persahabatan keduanya senantiasa diperbaharui.

Kemitraan pendidikan bagi keluarga dan sekolah di Kota Makassar (SMP Negeri 8 Makassar) sudah terbina sejak lama. Kehidupan perkotaan yang menuntut warga untuk hidup begitu cepat, dinamis, dan sibuk telah menggiring sebagian besar orangtua (keluarga) menjadikan sekolah sebagai mitra dalam mendidik anaknya. Kesibukan dari orangtua pula, sehingga sekolah mengalami perubahan fungsi lain. Kalau selama ini, sekolah dijadikan sebagai tempat pendidikan kedua, maka di kota Makassar sekolah juga berfungsi sebagai tempat penitipan anak.

Banyak orangtua (suami-isteri) yang berkarir sebagai pegawai atau karyawan berangkat bersama anaknya mengantar setiap pagi ke sekolah, rumah menjadi kosong,

kemudian anak dijemput setelah pulang kantor atau saat kantor istirahat dan bertemu kembali di rumah menjelang sore hari. Orangtua merasa senang karena sekolah telah mengambil alih tanggung jawab mendidik sekaligus menjaga anaknya sampai sekolah usai. Pihak guru sebagai wakil dari sekolah juga merasa senang dengan kehadiran peserta didik. Mereka bangga dengan kepercayaan yang diberikan orangtua kepadanya. Bukti kasih sayang guru kepada peserta didik adalah peserta didik disambut, dihargai, disayangi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pendidik berdedikasi pada profesi dan negara. Bukti kasih sayang guru kepada peserta didik, jika peserta didik tidak disiplin atau melanggar aturan, maka guru tidak tinggal diam. Guru tampil sebagai hakim yang bijaksana dalam rangka mengemban misi kebaikan yaitu pendidikan. Hubungan keluarga dan sekolah sudah merupakan simbiosis mutualisme.

Apa yang dituntut dari pihak orangtua dalam menjalin kemitraan pendidikan dengan pihak sekolah? Tentu saja sekolah mengharapkan orangtua bersikap peduli dan proaktif membantu sekolah. Dalam pendidikan, orangtua adalah pihak yang memiliki kepentingan utama karena objek pendidikan merupakan anak kandungnya. Oleh karena itulah, dalam menjalin kemitraan pendidikan seorang orangtua harus mengenal secara detail tentang sekolah.

”Sangat disayangkan bila orangtua tidak peduli dengan sekolah tempat anaknya dididik. Orangtua semestinya dari awal mengetahui tentang kondisi sekolah. Pukul berapa anaknya masuk dan pukul berapa pulang dari sekolah. Kegiatan apa yang ada di sekolah selain belajar. Sehingga ketika anaknya terlambat pulang, maka orangtua seharusnya bertanya mengapa terlambat. Atau paling tidak setiap anaknya pulang dari sekolah menanyakan tentang pelajaran yang telah didapatkan hari itu. Ini merupakan sikap orangtua yang diharapkan dalam bermitra, bagaimana orangtua memberi perhatian yang serius terhadap pentingnya pendidikan di sekolah.” (Wawancara AH, Selasa 26/1/2016).

Dalam menguatkan kemitraan pendidikan antara keluarga dan sekolah, Kepala Sekolah sebaiknya mengupayakan agar peserta didik yang dihadapi dapat dikenali dengan sangat detail. Untuk itulah Kepala Sekolah mewajibkan kepada setiap Wali Kelas memiliki buku wali kelas. Buku ini berfungsi sebagai data yang akurat mengenai siapa peserta didik yang dibina. Semua informasi penting yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan ada dalam buku wali kelas. Data yang akurat seperti ini dikatakan oleh AH (Wawancara AH, Selasa 26/1/2016), bahwa dapat meminimalkan kesalahan dalam memberikan *treatment* 'perlakuan' yang tepat kepada peserta didik.

1) Tipe kemitraan pendidikan keluarga dan sekolah di Kota Makassar

Setiap kemitraan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih ditandai dengan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat tersebut ada yang dibuat secara tertulis dan ada pula secara lisan. Kemitraan antara keluarga dan sekolah selama ini diwadahi oleh Komite Sekolah. Dalam Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2010 Komite Sekolah memiliki status sebagai lembaga mandiri, sebagaimana disebutkan bahwa:

“Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.” (PP No. 66 Tahun 2010)

Sebagai lembaga mandiri, pemerintah menetapkan fungsi yang mesti diperankan oleh komite sekolah. Adapun fungsi dari komite sekolah disebutkan bahwa:

“Komite sekolah atau madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah atau kepala madrasah.” (PP No. 66 Tahun 2010 pasal 58B ayat (1b)).

Kemitraan keluarga dan sekolah dalam pendidikan diikat oleh dokumen perjanjian yaitu; (1) tata tertib sekolah, dan (2) program sekolah. Pada dokumen tata tertib dan tata krama yang ditampilkan sebelumnya terdapat tiga unsur penandatanganan sebagai pembuat yaitu Kepala Sekolah mewakili sekolah, Ketua Komite mewakili orangtua/masyarakat, dan Pengawas Sekolah mewakili pemerintah. Tata tertib dan tata krama yang telah dibuat tersebut secara efektif penggunaannya dimulai setelah orangtua membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan.

Pada implementasinya, tata tertib dan tata krama yang ditandatangani hanya dibaca sepintas oleh orangtua, tepatnya saat wawancara dalam penerimaan peserta didik baru/peserta didik pindahan. Naskah tata tertib dan tata krama tidak meminta dan tidak membutuhkan respon balik dari pihak orangtua meskipun terdapat item yang tidak disetujui. Jadi yang dibutuhkan oleh sekolah dari pihak orangtua adalah membaca tata tertib dan tata krama dan harus menyetujuinya (menandatangani). Pada intinya sekolah sudah menganggap bahwa persetujuan pihak Komite Sekolah telah mewakili persetujuan orangtua. Dalam sistem kemitraan persetujuan seperti ini disebut dengan istilah *formal agreement* (perjanjian resmi) yang merupakan salah satu ciri dari *coalition*.

Demikian juga halnya untuk program sekolah yang dituangkan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) ditandatangani oleh ketiga unsur (Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Pengawas Sekolah). Untuk RKT yang dibuat oleh sekolah dilakukan lebih formal dari pada penyusunan tata tertib dan tata karma. RKT melalui proses permufakatan yang dihadiri oleh orangtua peserta didik secara keseluruhan. Pelibatan

orangtua secara keseluruhan, dalam sistem kemitraan disebut dengan *all member involved in* (semua anggota terlibat) yang merupakan ciri dari tipe kemitraan yaitu *coalition* ‘koalisi’.

Dalam perjalanan waktu, *formal agreement* (perjanjian resmi) yang ditandatangani bersama di atas meterai sebagai simbol kekuatan hukum sering mengalami perubahan. Lebih tepatnya sering terjadi ketidakberterimaan secara sepihak. Aturan yang menyangkut sanksi atau berhubungan dengan hukuman tidak berjalan mulus sesuai yang disepakati. Tidak sedikit orangtua yang sulit menerima kenyataan jika anaknya harus diberi hukuman meskipun sifatnya mendidik. Sebagai contoh yang paling sering terjadi adalah peristiwa **tinggal kelas**.

Ketika ada peserta didik yang tinggal kelas, lebih banyak orangtua yang memilih jalan salah atau jalan pintas. Sudah menjadi modus (kecenderungan) tindakan dari orangtua bahwa masalah tinggal kelas bisa diatasi dengan mudah. Orangtua cukup melakukan kompromi dengan pihak sekolah dan pihak sekolah lain yang siap menampung. Hasil komprominya adalah ”pindah naik” atau ”naik pindah” (peserta didik yang semestinya tinggal kelas jadi naik kelas tetapi harus pindah ke sekolah lain).

Peristiwa kompromi antara orangtua dan pihak sekolah seperti yang terjadi selama ini merupakan kesepakatan di atas kesepakatan. Kompromi tersebut dianggap sebagai kesepakatan baru dari sebuah kemitraan. Kesepakatan baru yang terjadi antara pihak yang bermitra dalam teori kemitraan ini disebut dengan istilah *new resources* (rujukan baru). *New resources* merupakan ciri dari kemitraan tipe *coalition*.

Selanjutnya, antara dua atau lebih pihak yang bermitra juga dibicarakan tentang pembiayaan. Demikian pula halnya dengan kemitraan pendidikan antara orangtua dan pihak sekolah. Dalam hal pembiayaan, kemitraan antara keluarga (orangtua) dengan sekolah sudah mengalami banyak perubahan. Sebelum lahirnya program dana gratis dan program dana BOS pembiayaan pendidikan ditanggung bersama antara pihak keluarga (orangtua) dan pihak sekolah. Terdapat dua program pemerintah yang diperuntukkan membantu pembiayaan pendidikan yaitu BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) dan Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan pengganti dari program BP3. Kedua program tersebut sebagai wadah bagi orangtua untuk membicarakan tentang pembiayaan pendidikan.

Komite Sekolah masih bertahan sampai sekarang meskipun bidang garapannya tidak lagi seperti dulu. Komite Sekolah saat ini hanya menjadi mediator dalam hal kebijakan *non budgeting*. Sementara itu baik dana gratis maupun dana BOS masih menyisakan bagian yang tidak termasuk dalam tanggungannya. Oleh karena itulah dengan dimediasi oleh Pemerintah Kota Makassar lahirlah SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) sebagai wadah untuk keluarga dalam membantu pembiayaan pendidikan. Secara teknis SSPB dimusyawarahkan oleh pihak orangtua dan sekolah.

Sistem pembiayaan menunjukkan bahwa ada kesepakatan tentang pembiayaan pendidikan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Dalam teori kemitraan pembiayaan bersama antara pihak yang bermitra disebut dengan istilah *joint budget* (anggaran ditanggung bersama). *Joint budget* merupakan ciri dari kemitraan tipe *coalition*.

Berdasarkan uraian tentang tipe kemitraan pendidikan di atas maka tipe kemitraan pendidikan antara keluarga (orangtua) dan sekolah di Kota Makassar menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: (1) *formal agreement*, (2) *all member involved in*, (3) *new resources*, dan (4) *joint budget*. Walaupun ciri-ciri tersebut tidak secara total dimiliki namun di antara lima tipe kemitraan yang telah dijelaskan yaitu: (1) *full collaboration*, (2) *coalition*, (3) *partnership*, (4) *alliance*, dan (5) *network*, kemitraan pendidikan antara keluarga (orangtua) dan sekolah di Kota Makassar lebih cenderung disebut *coalition* atau koalisi. **Jadi kemitraan pendidikan yang telah dibangun oleh keluarga dan sekolah di Kota Makassar adalah tipe koalisi (*coalition*).**

Kemitraan pendidikan tipe *full collaboration* (kolaborasi penuh) merupakan impian ideal sebuah kemitraan. Tipe koalisi yang telah dicapai oleh kemitraan keluarga-sekolah, berarti tinggal membenahi sedikit lagi sehingga di Kota Makassar dapat mewujudkan kemitraan tipe *full collaboration*. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diuraikan bahwa ada beberapa kendala sehingga *full collaboration* tersebut belum dapat dicapai yakni:

1. Pihak keluarga hanya membutuhkan kemitraan pada saat-saat mengalami kesulitan dialami oleh anaknya di sekolah. Keadaan seperti ini sudah berlangsung lama sehingga upaya *prefentif* 'pencegahan' dan *antisipatif* kurang diperhatikan. Kalau dibuatkan perumpamaan, masalah yang sering diahitu seperti "api yang membakar". Ketika apinya masih kecil dibiarkan begitu saja membakar tanpa berusaha dipadamkan, sehingga ketika apinya sudah berkobar barulah terjadi kepanikan orangtua untuk memadamkannya.

2. Pihak sekolah mengalami situasi jenuh dalam mengajak pihak keluarga dalam membangun kemitraan. Kejenuhan tersebut terjadi sebagai akibat dari respon yang diberikan oleh pihak keluarga (orangtua) peserta didik yang masih sulit bersikap serius dalam program-program kemitraan.
3. Pemerintah sebagai penengah dalam kemitraan belum bersikap secara totalitas dalam merekatkan hubungan kemitraan antara keluarga dan sekolah. Secara konseptual program-program pemerintah sudah memadai sebagai pijakan untuk menguatkan kemitraan pendidikan sehingga yang dibutuhkan hanya aktualisasi program tersebut seoptimal mungkin.

2) Sintesis kemitraan keluarga dan sekolah

Fungsi pendidikan yang telah diperankan oleh keluarga dan sekolah telah diuraikan secara deskriptif dan argumentatif. Di Kota Makassar, kedua lembaga ini meskipun dengan segala keterbatasan masing-masing telah memainkan peran yang sangat berarti bagi pencapaian tujuan pendidikan. Banyak sudah generasi berprestasi dan berakhlak mulia yang lahir dari kemitraan antara keluarga dan sekolah. Di sisi lain tak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit peristiwa bias dan menyimpang dari harapan proses perjalanan kemitraan pendidikan.

Hasil kemitraan pendidikan yang menyimpang dari harapan adalah suatu keniscayaan. Keberhasilan total seratus persen hanyalah fatamorgana. Capaian yang hampir mustahil. Akan tetapi, meminimalkan penyimpangan tersebut merupakan hal yang semestinya diperjuangkan. Tidak ada kata lelah, tidak kata bosan, dan tidak ada

kata berhenti untuk memperbaiki. Pada sisi inilah dibutuhkan perlakuan ilmiah dan rekayasa sehingga hasil pendidikan semakin mendekati harapan ideal.

Kemitraan keluarga dan sekolah dalam pendidikan merupakan kemitraan yang paling jelas di antara kemitraan tri pusat pendidikan lainnya. Keduanya dipaksa oleh sistem yang sudah menjadi budaya yang dibangun sejak lama. Hanya saja ditemukan banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius untuk dilakukan pembenahan-pembenahan. Pembenahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kemitraan dari tipe koalisi menjadi tipe yang lebih tinggi lagi yaitu *full collaboration* (kolaborasi penuh atau kolaborasi total).

Penjelasan pada bagian a) di atas telah disimpulkan bahwa tipe kemitraan pendidikan yang telah dibangun antara pihak keluarga dan sekolah adalah tipe koalisi. Ditinjau dari paradigma kemitraan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa kemitraan pendidikan belum sepenuhnya menggunakan paradigma baru. Koalisi ini merupakan tipe kemitraan yang menduduki urutan kedua bila ditinjau dari ciri-ciri pembagian peran tanggung jawab. Masih ada tipe kemitraan yang lebih bersifat totalitas yaitu *full collaboration* (kolaborasi penuh atau kolaborasi total). Terciptanya *full collaboration* antara keluarga dan sekolah dalam pendidikan sangat tergantung pada (1) seberapa besar arti penting anak didik/peserta didik di mata keluarga dan di mata gurunya, (2) seberapa tinggi tingkat pemahaman mereka tentang pentingnya kemitraan pendidikan.

Kemitraan pendidikan antara keluarga dan sekolah sangat besar manfaatnya dalam meraih kualitas proses maupun kualitas hasil pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai kedua kualitas tersebut sebaiknya menjadi perhatian utama bagi setiap

elemen kemitraan. Kedua lembaga ini (keluarga dan sekolah) masing-masing memiliki fungsi yang tidak bisa diperankan secara parsial. Ketika sekolah memerankan fungsinya maka pihak keluarga (orangtua) tidak boleh pasif bila peserta didik sudah berada di rumah. Ketika keluarga memerankan fungsinya maka pihak sekolah harus aktif menjadi penguatnya di sekolah. Jika peserta didik diberikan tugas PR di sekolah, maka orangtua di rumah sebaiknya berperan membantu anak didik sehingga PR tersebut terselesaikan dengan baik. Jika anak didik telah dididik taat menjalankan ibadah di rumah, maka guru seharusnya memberikan penguatan di sekolah sehingga di sekolahpun peserta didik bisa taat menjalankan ibadah.

Mewujudkan harapan kemitraan pendidikan yang ideal antara keluarga dan sekolah diperlukan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut dapat diperankan baik oleh keluarga, sekolah, atau pihak lain yang dapat menjadi penguat dan perekat kemitraan. Sehubungan dengan penguatan yang menjadi perlakuan dalam kemitraan, ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan. Baik yang dilakukan oleh keluarga maupun pihak sekolah.

”Adalah sangat disayangkan ketika orangtua tidak tahu nomor HP kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru yang mengajar anaknya. Bagaimana mereka melakukan komunikasi. Demikian juga dengan guru semestinya tahu bagaimana menghubungi orangtua dari peserta didiknya.” (Wawancara AH, Selasa 26/1/2016).

Fungsi-fungsi yang diperankan oleh keluarga dalam mendidik anaknya dengan sabar, telaten dan susah payah, tentunya tidak rela jika hilang tergerus oleh pengaruh luar. Demikian pula dengan sekolah, bahwa apa yang telah diwariskan kepada peserta didiknya di sekolah terkontaminasi tak terkendali ketika berada di luar sekolah. Oleh

karenanya baik keluarga maupun sekolah, masing-masing harus berkomitmen secara internal bagi lembaganya dan juga berkomitmen antar lembaga.

Keluarga dan sekolah memiliki hubungan *reciprocal* (melakukan aksi yang sama satu sama lain). Keluarga mengharapkan ketika anaknya ke sekolah, maka semua hasil pendidikannya di rumah mendapat suasana kundusif di sekolah. Sekolah mesti serius dalam mengamankan dan melindungi bekal-bekal pendidikan hasil transmisi dari ibu dan bapak di rumah. Sebaliknya, sekolah mengharapkan ketika peserta didiknya sampai di rumah, pihak keluarga mampu memberikan ruang yang dapat mengembangkan semua pelajaran yang telah disampaikan guru di sekolah. Keduanya harus sama-sama tahu peran masing-masing.

Menindaklanjuti hubungan *reciprocal* antara keluarga dan sekolah, perlu adanya sikap yang sama untuk menguatkan kemitraan. Sikap yang sama tersebut merupakan komitmen yang mengikat mereka. Namun demikian sikap bersama tersebut tidak dapat berfungsi optimal jika tidak dilindungi oleh kekuatan legalitas formal yaitu pemerintah. Baik keluarga maupun sekolah masih merasa gamang bersikap tegas dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan jikalau pemerintah tidak hadir dalam kemitraan pendidikan. Kehadiran pemerintah dapat menjadi pengayom keduanya, pihak keluarga tanpa ragu-ragu melaksanakan fungsinya dan pihak sekolahpun demikian.

Berdasarkan analisis dari fungsi-fungsi yang diperankan oleh masing-masing elemen maka tidak bisa tidak bahwa pemerintah harus hadir dan terlibat langsung maupun tidak langsung. Kehadiran pemerintah bukan hanya dalam bentuk regulasi

tetapi juga dalam tindakan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka disarankan untuk berpedoman pada tabel 4.43 di bawah ini.

Tabel 4.43 Sintesis Kemitraan Keluarga dan Sekolah (SI MITRA KELOLA)

Fungsi	Sekolah					
	<i>Adaptasi</i>	<i>Integrasi</i>	<i>Diagnostik & Direktif</i>	<i>Diferensiasi</i>	<i>Selektif</i>	<i>Helping & Referral</i>
Keluarga	<i>Parenting</i>	Mengulangi	Mengulangi	Mengulangi	Mengulangi	Mengulangi
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	<i>Community</i>	Menanggapi	Menanggapi	Menanggapi	Menanggapi	Menanggapi
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	<i>Volunteer</i>	Tindaklanjuti	Tindaklanjuti	Tindaklanjuti	Tindaklanjuti	Tindaklanjuti
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	<i>Learning to home</i>	Konsultasi	Konsultasi	Konsultasi	Konsultasi	Konsultasi
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	<i>Decision making</i>	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	<i>Collaborating with community</i>	Legalitas	Legalitas	Legalitas	Legalitas	Legalitas
		Menerapkan	Memfasilitasi	Mengakui	Memberikan	Menolong
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan

Sumber: Hasil olahan analisis data primer dan data sekunder 2016

SI MITRA KELOLA (Sintesis Kemitraan Keluarga dan Sekolah) adalah sebuah akronim yang disesuaikan dengan prinsip dan tujuan kemitraan pendidikan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Berikut penjelasan-penjelasan:

1) Penjelasan akronim

1. Kata "SI" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menunjuk pada kata yang dipakai di depan nama diri pada ragam akrab. Kata "SI" diharapkan

disandang oleh elemen kemitraan sehingga mereka bersinergi dalam suasana yang mendidik yang disemangati oleh keakraban di antara mereka. Kata “SI” cenderung lebih bersifat kekeluargaan dengan nuansa emosi yang sangat dekat tak berjarak tak bersekat.

2. Kata ”MITRA” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Jadi, kata “mitra” yang dimaksudkan adalah teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah kemitraan pendidikan.
3. Kata ”KELOLA” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan. Kata “kelola” yang dimaksudkan adalah upaya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan suatu kemitraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sehingga jika digabungkan dalam akronim “SI MITRA KELOLA” maka dapat diartikan bahwa para pelaku kemitraan pendidikan yang mengelola pendidikan anak dilandasi oleh perilaku yang akrab dan semangat kekeluargaan.

2) Penjelasan matriks SI MITRA KELOLA

Matriks SI MITRA KELOLA berisi 5 baris dan 6 lajur, sehingga banyaknya kotak adalah 36 buah. Setiap kotak berisi tiga harapan dari hubungan kemitraan keluarga, sekolah yang diintervensi oleh pemerintah. Sebagai contoh: pada kotak baris

pertama, lajur pertama bertuliskan: mengulangi (repetisi), menerapkan (aplikasi), dan kebijakan (*policy*).

1. **Mengulangi** (repetisi) yang dimaksudkan adalah harapan dari keluarga yang telah memerankan fungsi *parenting* di rumah. Harapannya ditujukan kepada pihak sekolah agar hasil dari fungsi *parenting* tetap diulang di sekolah. Sebagai contoh, jika seorang anak diperlakukan dengan lemah lembut di rumahnya, maka pihak guru di sekolah jangan memperlakukan dengan kasar, tetapi dengan lemah lembut.
2. **Menerapkan** (aplikasi) yang dimaksudkan adalah harapan pihak sekolah kepada pihak keluarga. Harapannya adalah bahwa pihak keluarga membantu pihak sekolah untuk mengaplikasikan fungsi adaptasi di rumah. Sebagai contoh, pihak sekolah telah susah payah mendidik anak tentang budaya antri maka harapannya adalah pihak orangtua di rumah membantu menerapkan di rumah atau pada acara-acara keluarga.
3. **Kebijakan** yang dimaksudkan adalah sikap legal dari pemerintah untuk mengikat baik secara formal maupun secara moral bagi hubungan *reciprocal* harapan-harapan yang dibangun oleh kedua belah pihak (keluarga-sekolah). Sebagai contoh pemerintah atau pemerintah Kota membuat regulasi atau konsekuensi hukum apabila kedua atau salah satu pihak melanggar kesepakatan.

Sekolah hakikatnya bekerja untuk dan atas nama pemerintah. Kebijakan yang diterapkan di sekolah merupakan kebijakan pemerintah. Keluarga dan masyarakat

harus tahu itu. Tetapi mengapa kebijakan sekolah tidak semua dapat diterima oleh orangtua peserta didik? Karena orangtua tidak percaya sepenuhnya kepada sekolah. Mengapa orangtua tidak percaya kepada sekolah? Karena keduanya tidak memahami hakikat kemitraan dalam pendidikan. Jika keadaannya seperti ini maka pemerintah harus mengintervensi.

Intervensi pemerintah yang diharapkan adalah yang dapat mengisi ruang-ruang ketidakpercayaan orangtua terhadap sekolah. Pemerintah benar-benar ditunggu kehadirannya baik oleh sekolah maupun bagi orangtua peserta didik. Perjalanan waktulah yang akan mendidik keduanya untuk kembali bermitra atas dasar saling percaya.

b. Kemitraan pendidikan keluarga dan masyarakat

Keluarga dan masyarakat adalah dua kelompok yang tidak terpisahkan. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan keluarga pula merupakan penentu "warna" dari masyarakat. Masyarakat yang baik terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kebaikan suatu masyarakat dapat terwujud apabila keluarga-keluarga dalam masyarakat tersebut bersepakat dalam suatu sistem nilai (budaya) yang cenderung homogen. Sistem nilai yang dibangun didasarkan pada kepentingan bersama. Oleh karena itulah, setiap keluarga idealnya selalu menjaga apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Seperti halnya dalam pendidikan anak, masyarakat memiliki andil yang besar sebagai keluarga besar yang merangkul keluarga-keluarga yang lebih kecil.

Keberadaan masyarakat terhadap keluarga tergantung pada seberapa jauh masyarakat memahami kebutuhan-kebutuhan keluarga dalam mendidik anaknya. Keluarga dapat dengan mudah melepas anaknya bergabung di tengah-tengah masyarakat apabila sistem yang berlaku dalam masyarakat memberikan rasa aman.

Bisa dibayangkan betapa cemasnya orangtua yang berada dalam lingkungan masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan. Suasana yang terbangun dalam masyarakat adalah perilaku yang tidak santun baik cara berbicara maupun dalam cara bertingkah laku. Beberapa kawasan di Makassar yang terkenal dengan kebiasaan perang antar kelompok atau perang massal membuat suasana kehidupan selalu dalam kecemasan. Bagi orangtua, karena keemasannya maka setiap anaknya keluar dari rumah selalu berpesan, "nak, kalau urusanmu sudah selesai langsung pulang ya!"

Dapat dibayangkan betapa leganya perasaan orangtua yang berada dalam lingkungan masyarakat yang sangat *care* 'peduli' dengan anak-anak mereka. Mereka dengan leluasa dapat bermain, mengembangkan potensi diri, akrab, bahagia, saling kenal-mengenal dan senantiasa memandang bahwa setiap anak yang berada di lingkungannya adalah anaknya sendiri. Masyarakat dengan kondisi seperti inilah yang mampu bertahan menghadapi perubahan-perubahan. Emile Durkheim mengungkapkan bahwa:

"Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, hanya jika terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai bagi warganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut, oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini pada anak-anak." (Idi 2010:10).

Mengantisipasi situasi lingkungan komunitas yang tidak menjanjikan keamanan dan kenyamanan, maka masyarakat di Kota Makassar sudah punya pilihan. Pilihan untuk hidup dalam komunitas yang lebih homogen telah didukung oleh fasilitas yang dibangun oleh para pengembang perumahan. Bahkan di beberapa tempat, kompleks perumahan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas vital seperti rumah ibadah, dan sekolah untuk pendidikan dasar. Kompleks-kompleks perumahan dibuat sesuai luas lahan yang tersedia (ada yang besar ada yang kecil) dan jenis komunitas tertentu (biasanya berdasarkan profesi dan lingkup pekerjaan).

Kehidupan kompleks-kompleks perumahan tertentu cenderung bersifat eksklusif. Penjagaan keamanan diperketat satu kali dua puluh empat jam. Ruas-ruas jalan dibuat pengamanan seperti polisi tidur, portal dan bahkan ada yang dilengkapi dengan kamera pengintai (CCTV). Warga yang hidup dalam kompleks tersebut cenderung lebih mudah diatur dan melakukan konsolidasi. Bahkan yang hidup dalam kompleks perumahan kecil lebih memiliki hubungan sosial lebih rukun dan hubungan emosi yang lebih akrab sehingga memudahkan upaya-upaya konsolidasi.

1) Tipe kemitraan pendidikan keluarga dan masyarakat di Kota Makassar

Secara garis besar sebuah kemitraan ditandai oleh beberapa ciri, yaitu: subjek, objek, dan bentuk atau tipe kemitraan. Dalam rujukan pembahasan ini, ada lima tipe kemitraan yaitu: (1) *full collaboration*, (2) *coalition*, (3) *partnership*, (4) *alliance*, dan (5) *network*. Sedangkan kemitraan menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015) akan terjalin dengan baik jika: (1) ada kesamaan hak, kesejajaran, dan

saling menghargai, (2) semangat gotong-royong dan kebersamaan, (3) saling melengkapi dan memperkuat, (4) saling asah, saling asih, dan saling asuh, (5) semua upaya ditujukan untuk kepentingan terbaik peserta didik.

Kemitraan pendidikan antara keluarga dan masyarakat di Kota Makassar sebenarnya sudah dirancang bersama dalam pendidikan formal di sekolah. Komite sekolah yang salah satu unsurnya berasal dari elemen tokoh masyarakat bersepakat dalam mengelola kemitraan. Adapun peranan Komite Sekolah dalam program penguatan kemitraan pendidikan menurut Direktorat Pendidikan Keluarga (2015) adalah sebagai berikut: (1) mendukung kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan sekolah, (2) melaksanakan kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan bersama pihak sekolah dengan penuh tanggung jawab, (3) bersama dengan kepala sekolah dan guru mengevaluasi pelaksanaan program penguatan kemitraan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Tiga peranan Komite Sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah di atas sesungguhnya sudah sangat memadai dalam kemitraan pendidikan. Ketiga peran komite tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengikat terutama kepada pihak masyarakat. Hanya saja ikatan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak dapat memaksa ataupun memberikan sanksi hukum jika tidak dilaksanakan. Jadi perjanjian tersebut hanya mengikat secara moral yang menunggu kerelaan dari pihak masyarakat apakah mau atau ikhlas melaksanakannya. Jika pihak masyarakat mau maka pihak keluarga bersyukur dan berterima kasih. Jika pihak masyarakat tidak mau, maka pihak keluarga hanya bisa bersabar. Perjanjian semacam ini merupakan

perjanjian yang bersifat semi formal (tipe *alliance* atau aliansi). Komite Sekolah hanya kuat di sekolah tetapi kurang berfungsi di luar sekolah.

Komite Sekolah sendiri bukanlah merupakan sebuah keharusan, sehingga di beberapa sekolah dengan kebijakan otonomi daerah tidak difungsikan sebagaimana seharusnya. Komite Sekolah hanya memiliki kekuatan koordinatif dan tidak memiliki kekuatan garis komando, baik dengan keluarga maupun dengan sekolah (Padahal menurut Direktorat Pendidikan Keluarga (2015) peran Komite Sekolah mengacu pada lima prinsip yaitu: (1) fokus pada mutu, (2) *bottom-up planning and decision making*, (3) manajemen yang transparan, (4) pemberdayaan masyarakat, dan (5) peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kelima prinsip acuan ini, maka semestinya Komite Sekolah mampu menggiring masyarakat menjadi mitra yang bersinergi dengan keluarga dalam pendidikan.

Kalau saja Komite Sekolah sebagai perpanjangan tangan masyarakat mampu berbuat secara optimal, maka setiap permasalahan pendidikan dapat terselesaikan dengan baik. Komite Sekolah belum sanggup menciptakan sebuah sistem nilai yang dapat melibatkan masyarakat secara mayoritas. Ini adalah kondisi yang sangat ironi dan memprihatinkan mengingat bahwa di setiap sekolah memiliki Komite Sekolah.

Kalau dihitung secara matematis lebih banyak orang yang sekolah dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Hal ini berarti bahwa lebih banyak keluarga yang bersentuhan langsung dengan Komite Sekolah. Tetapi, mengapa Komite Sekolah mengalami ketidakmampuan menggiring masyarakat untuk merasa perlu terlibat dalam kemitraan pendidikan. Dengan kondisi mayoritas itu, semestinya secara mayoritas pula

masyarakat sudah satu dalam penerapan kemitraan pendidikan. Oleh karena itu salah satu jalan keluar yang efektif adalah pemerintah harus menjadikan Komite Sekolah sebagai lembaga *super body* (memiliki kewenangan besar) dalam pendidikan. Komite Sekolah bertugas memberdayakan semua elemen masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pendidikan peserta didik. Ini tidak mudah dan tidak sederhana.

Apabila Komite Sekolah menjadi lembaga *super body*, maka anggota Komite Sekolah direkrut dengan cara-cara khusus dan diberi insentif yang besar. Dengan kewenangan yang besar Komite Sekolah baru bisa berdiri di atas lima prinsip yaitu: (1) fokus pada mutu, (2) *bottom-up planning and decision making*, (3) manajemen yang transparan, (4) pemberdayaan masyarakat, dan (5) peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kondisi saat ini, pemerintah mendudukkan Komite Sekolah sebagai pelaku kemitraan dengan tugas yang besar tetapi dengan kewenangan yang kecil dan kerja sukarela (ikhlas beramal tanpa imbalan finansial).

Pemberian kewenangan besar Komite Sekolah menjadi lokomotif yang menghubungkan keluarga dan masyarakat dengan sekolah. Komite Sekolah menjadi penghubung elemen-elemen masyarakat baik dengan keluarga maupun dengan sekolah. Sebaliknya, elemen-elemen masyarakat menjadikan Komite Sekolah sebagai tempat satu-satunya yang dapat menghubungkan kepentingan-kepentingannya dengan pihak keluarga dan sekolah. Dapat dibayangkan bahwa dengan kewenangan besar yang diberikan oleh pemerintah, Komite Sekolah akan menyisir semua potensi-potensi, baik yang menguatkan pendidikan dan potensi-potensi buruk dalam masyarakat yang dapat

melemahkan pendidikan. Sebuah ilustrasi tugas masa depan Komite Sekolah jika diberikan kewenangan besar dari pemerintah.

”Komite Sekolah melakukan penyisiran terhadap unsur yang berkaitan dengan peserta didik di luar sekolah. Membuat pemetaan waktu dan tempat berkaitan dengan potensi-potensi (baik/buruk). Menyusun kerjasama dengan elemen pemerintah dan masyarakat yang sesuai. Memberikan laporan kepada semua elemen kemitraan, kemudian melakukan tindakan berdasarkan analisis data.”

Ilustrasi ini hanyalah gambaran sederhana bagaimana sekiranya Komite Sekolah memiliki kewenangan besar sesuai dengan tugas dan fungsinya yang besar. Akan tetapi Komite Sekolah sebagai unsur yang mewakili masyarakat dalam melaksanakan fungsinya tidak sesuai harapan. Bukan karena ketidakmauan, tetapi karena Komite Sekolah dibebani tugas dan fungsi besar tetapi tidak dibekali kewenangan besar pula.

Kemitraan antara keluarga dan masyarakat dapat berubah sesuai mekanisme yang diinginkan oleh pemerintah atau pun masyarakat. Tepatnya, tidak ada yang abadi. Perkembangan berdasarkan analisis kebutuhan selalu menuntut adanya konsensus-konsensus baru. Karena kewenangannya bersifat koordinatif, maka kemitraan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan. Perkembangan sewaktu-waktu adalah salah satu unsur kemitraan yang disebut dengan *new resources* (sumber daya baru atau rujukan baru). *New resources* merupakan ciri dari kemitraan tipe *coalition*, *partnership*, dan *alliance*. Berdasarkan analisis ini, **kemitraan pendidikan yang dibangun oleh keluarga dan masyarakat cenderung merupakan kemitraan tipe *alliance*.**

Tipe *alliance* 'aliansi' menempati urutan keempat dari keeratan sebuah kemitraan, dan inilah yang terjadi antara keluarga dan masyarakat di Kota Makassar.

Padahal, ditinjau dari keluasan area, masa yang dibutuhkan, dan tingkat kompleksitas masalah maka kemitraan keluarga dan masyarakat menempati posisi pertama. Area kemitraan keluarga-masyarakat begitu luas sehingga membutuhkan banyak orang yang terlibat. Masa kemitraan keluarga dan masyarakat begitu lama sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar. Kompleksitas masalah yang rumit memerlukan kesabaran dari banyak pihak. Hal ini berarti bahwa peluang terjadinya pengaruh positif dan negatif terdapat pada kemitraan keluarga dan masyarakat.

Kondisi masalah yang demikian kompleks yang terjadi dalam masyarakat merupakan kenyataan yang sudah terjadi. Sudah barang tentu tidak lantas menjadi sebuah penghalang untuk berbuat melakukan pembenahan-pembenahan. Oleh karena itulah hal pertama yang mesti diidentifikasi adalah faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Berdasarkan analisis data yang didapatkan, maka diperoleh beberapa hambatan sehingga tipe kemitraan pendidikan antara keluarga dan masyarakat tidak optimal yaitu:

1. Keadaan masyarakat yang sangat tinggi keragamannya sehingga tingkat persamaan (*homogenitas*) nilai-nilai yang bersifat universal menjadi kecil. Salah satu faktor yang jelas terlihat sebagai penyebabnya adalah tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Makassar yang dihuni oleh berbagai macam suku, agama, dan ras.
2. Sosialisasi tentang hal-hal yang perlu dimitrakan tidak berjalan optimal sehingga banyak terjadi ketidaktahuan meskipun ada kemauan untuk bermitra.

3. Peran Komite Sekolah sebagai unsur masyarakat yang senantiasa menjadi penghubung tidak efektif karena kewenangan yang diberikan masih kecil.
4. Pemerintah Kota Makassar dalam hal membangun kemitraan secara konseptual sudah melakukan dengan optimal tetapi secara faktual dan aktual belum. Pemerintah Kota Makassar memiliki perangkat SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas yang memadai tetapi belum difungsikan dengan sebaik-baiknya.

2) Sintesis kemitraan pendidikan keluarga dan masyarakat

Saat ini di Kota Makassar pihak Komite Sekolah mengalami kesulitan dalam menggandeng pihak keluarga dalam bermitra. Indikator yang paling jelas adalah tarik-ulur lahirnya SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) oleh Pemerintah Kota. SSPB adalah bentuk turun-tangan Pemerintah Kota Makassar untuk membantu Komite Sekolah dan sekolah agar orangtua peserta didik secara sukarela membantu pembiayaan pendidikan. SSPB telah menuai polemik yang cukup panjang saat perancangan sampai pelaksanaannya. Adanya polemik berkepanjangan sehingga beberapa sekolah tidak menerapkan, salah satunya adalah SMP Negeri 8 Makassar.

Hubungan keduanya (Komite Sekolah-Keluarga) tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip kemitraan. Pihak keluarga menganggap bahwa Komite Sekolah merupakan juru lobi sekolah untuk memuluskan program-program sekolah yang berkaitan dengan finansial. Di sisi lain, anggapan dari pihak orangtua tersebut terhadap Komite Sekolah dipahami sama oleh pihak sekolah. Tabel 4.4 berikut ini sebagai tawaran solusi yang diberi nama SI MITRA KEMAS.

Tabel 4.44 Sintesis Kemitraan Keluarga dan Masyarakat (SI MITRA KEMAS)

	Fungsi	Masyarakat			
		Pemberdayaan	Partisipasi	Inklusi	Penentuan nasib sendiri
Keluarga	Parenting	Menjaga	Menjaga	Menjaga	Menjaga
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Communicating	Komitmen	Komitmen	Komitmen	Komitmen
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Volunteering	Menghargai	Menghargai	Menghargai	Menghargai
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Learning to home	Mengawasi	Mengawasi	Mengawasi	Mengawasi
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Decision making	Menjembatani	Menjembatani	Menjembatani	Menjembatani
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Collaborating with community	Konsolidasi	Konsolidasi	Konsolidasi	Konsolidasi
		Memfasilitasi	Melibatkan	Menerima	Menyemangati
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan

Sumber: Hasil olahan analisis data primer dan data sekunder 2016

SI MITRA KEMAS (Sintesis Kemitraan Keluarga dan Masyarakat) adalah sebuah akronim yang disesuaikan dengan prinsip dan tujuan kemitraan pendidikan antara pihak keluarga dan masyarakat. Berikut penjelasan-penjelasanannya:

1) Penjelasan akronim SI MITRA KEMAS

1. Kata "SI" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menunjuk pada kata yang dipakai di depan nama diri pada ragam akrab. Kata "SI" diharapkan

disandang oleh elemen kemitraan sehingga mereka bersinergi dalam suasana yang mendidik yang disemangati oleh keakraban di antara mereka. Kata “SI” cenderung lebih bersifat kekeluargaan dengan nuansa emosi yang sangat dekat tak berjarak tak bersekat.

2. Kata ”MITRA” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Jadi, kata “mitra” yang dimaksudkan adalah teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah kemitraan pendidikan.
3. Kata ”KEMAS” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti teratur (terbungkus) rapi, bersih, rapi, beres, atau kuat. Jadi, kemitraan pendidikan yang dibangun idealnya diatur dengan rapi dan kuat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sehingga jika digabungkan dalam akronim “SI MITRA KEMAS” maka dapat diartikan bahwa para pelaku kemitraan pendidikan yang mengelolanya melakukan secara teratur dan serapi mungkin sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki sikap atau perilaku peserta didik/anak didik. Kemitraan pendidikan dibuat sedemikian rupa melalui perencanaan sampai evaluasi hasil.

2) Penjelasan matriks SI MITRA KEMAS

Matriks SI MITRA KEMAS berisi 6 baris dan 4 lajur, sehingga banyaknya kotak adalah 24 buah. Setiap kotak berisi tiga harapan dari hubungan kemitraan keluarga,

masyarakat yang diintervensi oleh pemerintah. Sebagai contoh: pada kotak baris pertama, lajur pertama bertuliskan: **menjaga**, **memfasilitasi**, dan **kebijakan** (*policy*).

1. **Menjaga** yang dimaksudkan adalah harapan dari pihak keluarga kepada pihak masyarakat. Harapannya adalah fungsi *parenting* yang telah diperankan oleh keluarga agar dijaga dengan baik oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika seorang anak dilarang merokok di rumah, maka pihak masyarakat dapat menjaga agar si anak tersebut juga tidak merokok ketika berada di luar rumah.
2. **Memfasilitasi** yang dimaksudkan adalah harapan masyarakat kepada pihak keluarga. Harapannya adalah bahwa pihak keluarga membantu memfasilitasi anaknya jika telah dididik atau dilatih dengan berbagai pelajaran atau pelatihan yang telah diberikan oleh pihak masyarakat. Sebagai contoh, pihak masyarakat telah melatih anak bermain futsal atau musik, maka pihak orangtua idealnya menyiapkan atau memberikan fasilitas yang dibutuhkan anaknya.
3. **Kebijakan** yang dimaksudkan adalah sikap legal dari pemerintah untuk mengikat baik secara formal maupun secara moral bagi hubungan *reciprocal* harapan-harapan dari kedua belah pihak (keluarga-masyarakat). Sebagai contoh pemerintah atau pemerintah Kota membuat regulasi atau konsekuensi hukum apabila kedua atau salah satu pihak melanggar kesepakatan.

Keluarga dan masyarakat adalah dua sosok komunitas yang tak terpisahkan. Tidak ada jalan lain untuk menghindari interaksi di antara keduanya. Keluarga dapat menguatkan atau melemahkan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Jika keduanya tidak sanggup saling menguatkan, bersinergi, dan bekerja sama dalam mengelola

pendidikan, maka pemerintahlah yang harus turun-tangan menjadi perekat. Pendidikan kewajiban pemerintah dan pemerintah memiliki kemampuan yang istimewa.

Pemerintah punya kewenangan (hak legal untuk mengeksekusi), kekuasaan (kemampuan untuk memerintahkan), dan kekuatan (fasilitas untuk memaksakan konsekuensi regulasi dan hukum). Dengan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan pemerintah dapat membujuk dan juga mampu memaksa. Pemerintah tidak boleh kalah.

c. Kemitraan pendidikan sekolah dan masyarakat

Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat melingkupi keberadaan sekolah. Dengan misi pendidikan, kehadiran sekolah ibarat cahaya yang menerangi kegelapan di tengah-tengah masyarakat. Perumpamaan sekolah yang baik seperti petunjuk jalan yang mengarahkan peserta didik mendapatkan harapan-harapan hidupnya. Sekolah memiliki aura positif yang menebar ke segenap rumah-rumah di sekitarnya.

Kehadiran sekolah di tengah-tengah masyarakat menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat di sekelilingnya. Kehadiran sekolah menjadikan kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cukup berarti. Banyak sisi kehidupan yang tiba-tiba menjadi ada dari sebelumnya tidak pernah ada. Tiba-tiba ada tempat foto copy, kantin, jasa transportasi, jasa tempat jual-beli, pendidikan non-formal, jalanan diperbaiki atau dibuat baru, alat penerangan dilengkapi, jasa pengembang perumahan tertarik membangun di sekitarnya, harga jual tanah di sekitar sekolah menjadi mahal, dan masih banyak lagi efek dari berdirinya sebuah sekolah di tengah-tengah masyarakat.

Apabila sekolah merupakan berkah bagi masyarakat maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memberi dukungan kepada sekolah. Baik dukungan material maupun dukungan moral. Masyarakat sebagai *user* tentu sangat paham dengan kebaikan-kebaikan sekolah. Sehingga jika masyarakat mau, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukannya untuk membantu lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Lalu siapa masyarakat itu? Dan apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu sekolah?

Masyarakat adalah anggota-anggota perseorangan, lembaga masyarakat, dan komunitas-komunitas manusia. Masyarakat bisa saja bernama majelis taklim, kelompok pengajian, kelompok remaja atau pemuda atau karang taruna, kelompok hobi, kelompok olahraga, pekerja media informasi (wartawan media cetak dan media elektronik), LSM, pemilik usaha barang maupun jasa, dan lembaga independen (seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan).

Masyarakat dalam berbagai status seperti yang dikemukakan di atas memiliki potensi untuk memberikan andil dalam membantu sekolah mengelola pendidikan. Masyarakat dapat berperan sesuai dengan fungsi-fungsi pendidikan yang semestinya dilakukan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa fungsi pendidikan yang diemban oleh masyarakat adalah, pemberdayaan, partisipasi, inklusi, dan penentuan nasib sendiri. Fungsi-fungsi pendidikan yang tersebut telah diperankan oleh masyarakat, meskipun masih ada yang belum optimal. Ditinjau dari teori kemitraan masih ada yang perlu diperbaiki. Bukan hanya itu, di Kota Makassar masih didapati

adanya sikap-sikap masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan pihak sekolah.

1) Tipe kemitraan pendidikan sekolah dan masyarakat di Kota Makassar

Segala kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam kemitraan yang dibangun antara sekolah dan masyarakat menjadi bahan evaluasi. Baik kelebihan maupun kekurangan yang terjadi dalam kemitraan pendidikan tidak terlepas dari jenis atau tipe kemitraan yang disepakati. Tipe kemitraan dalam pendidikan menunjukkan tingkat komitmen yang mengikat pihak-pihak yang bermitra.

Menurut Direktorat Pendidikan Keluarga, dalam kemitraan pendidikan masyarakat diwakili oleh Komite Sekolah. Adapun keterlibatan Komite Sekolah telah diatur baik secara nasional maupun lokal internal sekolah. Secara nasional keterlibatan Komite Sekolah diatur dalam (1) PP No. 66 Tahun 2010 yang disebutkan bahwa:

“Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.” (PP No. 66 Tahun 2010).

dan (2) Permen No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.” (Pasal 38, ayat 2).

dan (3) kedudukan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah diikat oleh surat keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Legalitas formal yang mengikat antara sekolah dengan pihak Komite Sekolah dalam jangka waktu tertentu disebut *formal contract* (sistem kontrak yang bersifat resmi) merupakan salah satu ciri dari kemitraan tipe *partnership*. Dengan *formal contract* antara sekolah dan pengurus Komite Sekolah dapat melakukan perubahan-perubahan termasuk pengurus Komite Sekolah. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi selama dalam masa kemitraan. Adanya perubahan-perubahan kebijakan yang disepakati dalam teori kemitraan disebut *new resources* (sumber daya baru). *New resources* adalah ciri kemitraan tipe *coalition*, *partnership*, atau *alliance*.

Sekolah dan Komite Sekolah sudah lama bahu-membahu menjalin kerjasama. Keduanya telah bermitra dengan baik karena dilandasi oleh semangat rasa kekeluargaan. Hal ini terlihat dari rutinitas mereka setiap tahun. Keduanya bersilaturahmi pada hari-hari raya agama. Setiap tahun pelajaran baru dijadikan sebagai waktu untuk membicarakan agenda-agenda penting dengan duduk bersama para orangtua peserta didik. Agenda penting yang dimaksud adalah mengevaluasi program kerja yang telah diputuskan satu tahun lalu dan memaparkan program satu tahun ke depan. Apa yang telah dicapai satu tahun lalu menjadi pemikiran bersama dan berusaha memperbaiki untuk tahun berikutnya. Peristiwa seperti ini dalam teori kemitraan disebut *shared risk and reward* (ciri dari kemitraan tipe *partnership*).

Kemitraan antara sekolah dan Komite Sekolah adalah kemitraan yang bersifat legal yang diakui oleh regulasi. Kemitraan ini meskipun sudah terjalin lama namun perkembangannya tidak sesuai yang diharapkan. Kemitraan yang terjalin selama ini

berdasarkan hasil analisis berada pada tipe *partnership*. *Partnership* merupakan tipe yang menduduki peringkat ketiga setelah tipe *full collaboration* dan tipe *coalition*.

Kemitraan secara totalitas (*full collaboration*) merupakan impian yang ingin diwujudkan. Oleh karena itulah terlebih dahulu yang harus diidentifikasi adalah hambatan atau masalah yang dihadapi untuk mewujudkan impian tersebut. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan hasil analisis keterkaitan dari data-data tersebut, maka yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kemitraan tipe *full collaboration* antara sekolah dan masyarakat di Kota Makassar adalah:

1. Mayoritas masyarakat belum menyadari dan memahami tentang fungsi-fungsi pendidikan yang harus diperankan dalam mendukung pendidikan di sekolah. Kenyataan yang terjadi adalah masyarakat atau komunitas masyarakat memandang sekolah sebagai objek yang dapat “diserang” setiap saat karena dianggap bahwa sekolah bukan bagian dari pemerintah dan sekolah bukan bagian dari masyarakat itu sendiri.
2. Sekolah belum mampu secara mandiri membangun komunikasi efektif dengan masyarakat secara luas sehingga masyarakat tidak terlibat secara aktif membantu sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung sekolah. Salah satu indikator yang terjadi di Kota Makassar adalah lahirnya SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) sebagai buah dari polemik “pungutan liar” yang terjadi di sekolah-sekolah. SSPB merupakan kebijakan langsung Pemerintah Kota Makassar untuk “mendamaikan” sekolah dan masyarakat.

3. Komite Sekolah sebagai unsur masyarakat yang paling dekat dengan sekolah belum berperan optimal. Sebagai agen dari masyarakat, Komite Sekolah diharapkan menjadi pusat informasi, pusat pengaduan, dan pengembang dalam mencari jaringan kemitraan.
4. Pemerintah dan Pemerintah Kota tidak memberikan kewenangan besar kepada Komite Sekolah sehingga tidak dapat berbuat banyak sesuai fungsinya.

2) Sintesis kemitraan sekolah dan masyarakat

Kemitraan pendidikan antara sekolah dan masyarakat mengalami pasang surut bahkan akhir-akhir ini cenderung surut. Banyak sikap-sikap di luar prediksi dan harapan yang dilakukan oleh masyarakat. Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang independen tidak berhasil merangkul elemen masyarakat menjadi mitra yang efektif dalam pendidikan. Seakan tidak ada yang mengikat bagi masyarakat bahwa peserta didik perlu senantiasa berada dalam suasana pendidikan. Seperti tidak ada tanggung jawab moral dari masyarakat bahwa peserta didik amat penting dilindungi dari setiap faktor-faktor yang dapat merusak kebaikan-kebaikan mereka.

Menyikapi semua fenomena tersebut baik sekolah maupun masyarakat perlu dijadikan pemikiran serius bagi semua pihak terutama pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab keterlaksanaan pendidikan harus mengoptimalkan semua potensi yang disandangnya. Pemerintah dengan tanggung jawab besar itu, harus pula didukung secara besar-besaran. Pemerintah harus menjaga bahwa proses pendidikan tidak boleh berjalan secara parsial sekalipun berbeda tempat dan waktu. Pemerintah harus

melindungi hasil pendidikan yang telah dicapai oleh ketiga elemen. Sangat disayangkan ketika terjadi bahwa hasil pendidikan di sekolah dirusak oleh masyarakat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itulah fenomena-fenomena buruk yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. Dibutuhkan sikap dan tindakan yang memberikan solusi sehingga kemitraan pendidikan dapat berjalan efektif dan sedapat mungkin efisien. Berdasarkan analisis data yang telah diungkapkan maka tabel 4.45 berikut ini ditawarkan sebagai langkah optimalisasi kemitraan.

Tabel 4.45 Sintesis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat (SI MITRA SELAMAT)

	Fungsi	Masyarakat			
		Pemberdayaan	Partisipasi	Inklusi	Penentuan nasib sendiri
Sekolah	Adaptasi	Mengawasi	Mengawasi	Mengawasi	Mengawasi
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Integrasi	Menerapkan	Menerapkan	Menerapkan	Menerapkan
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Diagnostik & Direktif	Memahami	Memahami	Memahami	Memahami
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Diferensiasi	Meyakinkan	Meyakinkan	Meyakinkan	Meyakinkan
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Selektif	Menerima	Menerima	Menerima	Menerima
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
	Helping & Referral	Menyalurkan	Menyalurkan	Menyalurkan	Menyalurkan
		Menguatkan	Menampung	Memfasilitasi	Mengarahkan
		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan

Sumber: Hasil olahan analisis data primer dan data sekunder 2016

SI MITRA SELAMAT (Sintesis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat) adalah sebuah akronim yang disesuaikan dengan prinsip dan tujuan kemitraan pendidikan antara pihak sekolah dan masyarakat. SI MITRA SELAMAT adalah harapan dari kemitraan sekolah dan masyarakat. Memahami makna SI MITRA SELAMAT maka berikut ini penjelasan-penjelasanannya:

a) Penjelasan akronim

1. Kata "SI" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menunjuk pada kata yang dipakai di depan nama diri pada ragam akrab. Kata "SI" diharapkan disandang oleh elemen kemitraan sehingga mereka bersinergi dalam suasana yang mendidik yang disemangati oleh keakraban di antara mereka. Kata "SI" cenderung lebih bersifat kekeluargaan dengan nuansa emosi yang sangat dekat tak berjarak tak bersekat.
2. Kata "MITRA" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Jadi, kata "mitra" yang dimaksudkan adalah teman, sahabat, atau kawan kerja, pasangan kerja, rekan dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah kemitraan pendidikan.
3. Kata "SELAMAT" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) terbebas dari; bahaya, malapetaka, bencana, (2) terhindar dari; bahaya, malapetaka, bencana; (3) tidak kurang suatu apa, (4) tidak mendapat; gangguan, kerusakan, (5) tercapai maksud, tidak gagal, doa (ucapan, pernyataan, dsb) yang mengandung harapan supaya sejahtera (beruntung, tidak kurang suatu apa,

dsb). Harapan dari kata “SELAMAT” adalah bahwa hubungan *reciprocal* antara sekolah dan masyarakat dalam rangka membebaskan, menghindarkan anak didik dari bahaya, malapetaka, atau bencana. Jika digabungkan dalam akronim “SI MITRA SELAMAT” maka dapat diartikan bahwa para pelaku kemitraan yang mengelola pendidikan berupaya bersinergi dalam rangka menyelamatkan anak didik agar terbebas dan terhindar dari bahaya, malapetaka, dan bencana. Sebaliknya diharapkan mereka dapat meraih keberuntungan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

2) Penjelasan matriks SI MITRA SELAMAT

Matriks SI MITRA SELAMAT berisi 6 baris dan 4 lajur, sehingga banyaknya kotak adalah 24 buah. Setiap kotak berisi tiga harapan dari hubungan kemitraan sekolah, masyarakat yang diintervensi oleh pemerintah. Sebagai contoh: pada kotak baris pertama, lajur pertama bertuliskan: **mengawasi**, **menguatkan**, dan **kebijakan**.

1. **Mengawasi** yang dimaksudkan adalah harapan dari pihak sekolah kepada pihak masyarakat. Harapannya adalah pihak masyarakat menjadi pengawas dari semua aktivitas yang dilakukan oleh anak didik, sehingga hasil dari fungsi *parenting* dapat dikomunikasikan setiap saat. Sebagai contoh, jika seorang anak didik ada yang berkeliaran pada saat jam pembelajaran sekolah, maka anggota masyarakat menjadi mata dan telinga dari pihak sekolah.
2. **Menguatkan** yang dimaksudkan adalah harapan dari pihak masyarakat kepada pihak sekolah. Harapannya adalah bahwa pihak sekolah membantu pihak

masyarakat menguatkan hasil-hasil dari fungsi pemberdayaan yang telah diraih. Sebagai contoh, pihak masyarakat (komunitas agama) melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, pelatihan) di luar sekolah, maka diharapkan pihak sekolah melakukan penguatan-penguatan dengan memberikan dukungan moral untuk tetap aktif mengikuti dan berkomunikasi.

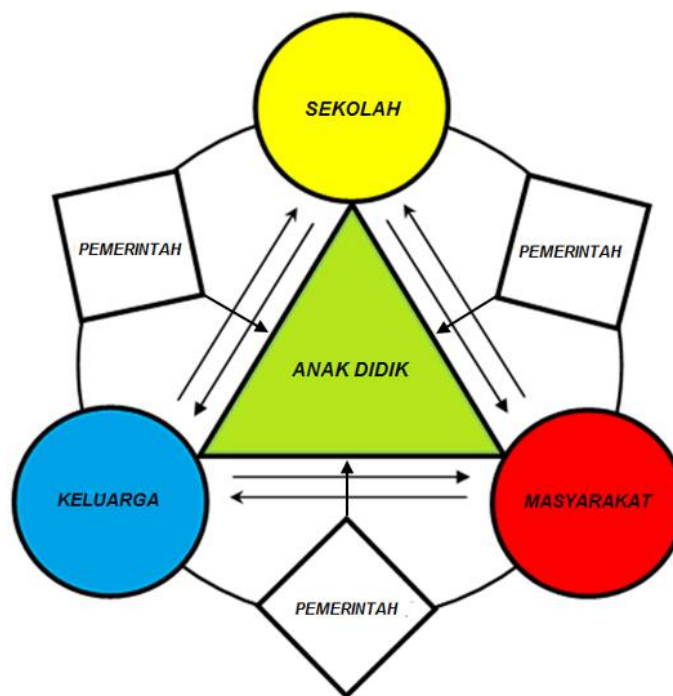
3. **Kebijakan** yang dimaksudkan adalah sikap legal dari pemerintah untuk mengikat baik secara formal maupun secara moral bagi hubungan *reciprocal* harapan-harapan dari kedua belah pihak (sekolah-masyarakat). Sebagai contoh pemerintah atau pemerintah Kota membuat regulasi atau konsekuensi hukum apabila kedua atau salah satu pihak melanggar kesepakatan.

6. Usulan model kemitraan pendidikan di Kota Makassar

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas kuncinya adalah kemitraan pendidikan. Kemitraan pendidikan bukan sekedar pembagian peran. Kemitraan pendidikan lebih dari pembagian peran. Peran yang diemban oleh pihak-pihak yang bermitra tidak berdiri sendiri. Adanya pembagian peran dalam kemitraan pendidikan karena dilandasi perbedaan fungsi. Fungsi yang diperankan sangat terkait dengan *goal* yang telah ditetapkan. Perumpamaan pembagian peran dalam kemitraan pendidikan seperti pembagian peran dalam sebuah tim sepak bola. Sebuah permainan tim sepak bola tidak ada pemain yang "jago" sendirian. Setiap pemain harus berpikir bagaimana caranya sehingga tercipta sebuah gol sebagai hasil kerja sama. Dalam sebuah tim sepak

bola setiap pemain dan posisi pemain memiliki arti penting dan mempunyai andil yang besar dalam mengantar timnya mencetak gol.

Mempelajari setiap peran elemen kemitraan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah maka untuk mencapai hasil pendidikan optimal dibutuhkan kemitraan yang kuat. Keluarga diperankan oleh orangtua. Sekolah diperankan oleh guru. Masyarakat diperankan oleh anggota atau lembaga masyarakat. Pemerintah diperankan oleh aparat pemegang kewenangan. Keempat elemen ini bersinergi secara integral bukan parsial. Kemitraan empat elemen dalam pendidikan membutuhkan model untuk dipedomani sehingga efektif, efisien, dan produktif. Efektif dalam proses dan hasil. Efisien dalam waktu, biaya, dan sumber daya. Model kemitraan yang dimaksud sebagaimana disajikan pada gambar 4.28 berikut ini.



Gambar 4.28 Usulan Model MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT

b. Penjelasan model MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT

Gambar 4.40 di atas merupakan model kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang diusulkan. Model ini lahir melalui proses analisis data berdasarkan studi lapang yang dilaksanakan di SMP Negeri 8 Makassar dan setiap pemangku kepentingan yang terkait. Model ini diandalkan mampu meminimalkan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka tidak berarti bahwa berlaku untuk semua tempat di Kota Makassar meskipun tidak mustahil dapat pula digunakan di tempat lain. Dalam rangka memudahkan dipahami dan dioperasionalkan maka model ini perlu disertai dengan penjelasan-penjelasan sederhana sebagai berikut:

1) Istilah yang digunakan

Berdasarkan gambar 4.40 digunakan istilah (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, (4) pemerintah, dan (5) anak didik. Istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah "anak didik". Istilah "anak didik" diadaptasi dari kata "*children*" yang berarti anak seperti dikemukakan pakar pendidikan Epstein (2002: 7) bahwa:

"If educators view children simply as students, they are likely to see the family as separate from the school. That is, the family is expected to do its job and leave the education of children to the schools. If educators view students as children, they are likely to see both the family and the community as partners with the school in children's education and development. Partners recognize their shared interests in and responsibilities for children, and they work together to create better programs and opportunities for students."

Apabila guru memandang anak didik sebagai *student* maka pendidikan sekolah cenderung terpisah dengan pendidikan keluarga. Apabila guru memandang anak didik

sebagai *children*, maka guru menganggap keluarga dan masyarakat sebagai tim kerja dalam suatu kemitraan. Istilah "anak" dalam teori kemitraan lebih layak digunakan dari pada "siswa, murid, atau peserta didik". Jika istilah "anak" yang dipakai maka dapat berlaku tanpa batas waktu, akan tetapi jika yang dipakai adalah "siswa, murid, atau peserta didik", maka terkesan hanya milik guru di sekolah. Jika istilah "anak" saja yang dipakai juga memiliki masalah yaitu terlalu umum karena bisa saja ada anak yang tidak bersekolah. Oleh karena itulah sebagai jalan keluar yang dianggap paling tepat adalah penggunaan istilah "anak didik" karena dapat tercakup dalam tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat).

Pendidikan adalah persoalan yang sangat penting artinya bagi manusia. Oleh karena itu, kemitraan pendidikan yang diinginkan adalah kemitraan yang bersifat totalitas. Kemitraan totalitas yang dimaksud adalah kemitraan tipe *full collaboration* 'kolaborasi penuh'. Kemitraan tipe *full collaboration* memiliki ciri-ciri: (1) *written agreement* 'perjanjian dilakukan secara tertulis', (2) *shared vision* 'visi dirancang dan dibuat bersama', (3) *consensus decision* 'keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan' dan (4) *formal work assignment* 'penugasan kerja bersifat formal'. Dengan kemitraan yang totalitas, objek yang dimitrakan yaitu "anak didik" tidak boleh dibatasi oleh sekat pada elemen mitra tertentu dan pada waktu tertentu pula.

2) Arti bentuk dan warna gambar

1. Bentuk **lingkaran** berwarna **biru**, **kuning**, dan **merah** merupakan warna *primer* 'warna utama'. Dalam teori warna, warna biru, kuning, dan merah

menunjukkan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan elemen utama yang berhadapan langsung dengan anak didik dan memiliki kedudukan yang sama dalam kemitraan.

2. Bentuk **segiempat** warna dasar **putih** menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan, kemampuan, dan kekuatan untuk diterapkan dalam kemitraan tetapi tetap harus netral dan hanya berpihak pada kebaikan, kebenaran, dan tujuan kemitraan.
3. Bentuk **lingkaran besar** menghubungkan semua elemen kemitraan menunjukkan bahwa kemitraan pendidikan harus satu visi dan misi mengikat yang melindungi objek mitra yaitu **anak didik**.
4. Gambar **anak panah tunggal** dari **segiempat** menunjukkan bahwa pemerintah (*goverment*) harus senantiasa hadir dan terlibat dalam proses kemitraan pendidikan. Semua potensi yang dimiliki oleh pemerintah dioptimalkan untuk dimanfaatkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
5. Sepasang **anak panah** dengan arah berlawanan menunjukkan hubungan *reciprocal* yaitu masing-masing elemen mitra utama (keluarga, sekolah, dan masyarakat) melakukan aksi yang sama antara satu elemen mitra dengan elemen mitra lainnya. Aksi tersebut adalah *save the children* 'menyelamatkan anak'. Adapun hubungan *reciprocal* telah diuraikan pada hasil sintesis yaitu: (1) **Si Mitra Kelola** (Sintesis Kemitraan Kelurga dan Sekolah), (2) **Si Mitra Kemas** (Sintesis Kemitraan Keluarga dan Masyarakat, dan (3) **Si Mitra Selamat** (Sintesis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat).

6. Gambar **segitiga** berwarna **hijau** menunjukkan bahwa **anak didik** berada dalam tri pusat pendidikan yang menjadi objek kemitraan pendidikan. Warna hijau dalam teori warna disebut warna *sekunder* atau warna kedua (hasil campuran warna kuning dan merah) yang menunjukkan **anak didik** adalah anak muda yang masih hijau yang memerlukan pendidikan dari orang-orang dewasa.

b. Implikasi model kemitraan pendidikan di Kota Makassar

Implikasi adalah istilah dalam pelajaran logika yang ditandai dengan kata "Jika P, maka Q". Pernyataan P disebut sebab dan pernyataan Q disebut akibat. Nilai kebenaran implikasi dalam logika ditentukan oleh empat kondisi yaitu: (1) implikasi bernilai **benar** jika pernyataan P benar, dan pernyataan Q benar, (2) implikasi bernilai **benar** jika pernyataan P salah, dan pernyataan Q benar, (3) implikasi bernilai **benar** jika pernyataan P salah, dan pernyataan Q salah, (4) Satu-satunya kondisi membuat implikasi menjadi **salah** adalah jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah.

Kebenaran ilmiah adalah kebenaran berdasarkan logika. Kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak melainkan bersifat relatif dan empiris. Oleh karena itu, keandalan dari model kemitraan pendidikan yang ditawarkan di atas juga bersifat relatif dan empiris. Hal ini bermakna bahwa keandalan dari model tersebut juga mengikuti kaidah-kaidah kebenaran logika. Berdasarkan analisis kebenaran logika, maka model kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang ditawarkan di atas mengandung implikasi-implikasi

yang sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Keempat implikasi logika tersebut akan diuraikan secara terbalik yaitu dimulai dari yang keempat.

1) Jika model kemitraan diterapkan dengan benar, maka pendidikan gagal

Dalam aturan logika, implikasi ini bernilai **salah**. Dunia ilmiah sangat yakin dengan keandalan proses. Artinya keberhasilan proses sudah merupakan separuh dari kesuksesan hasil. Apabila telah dirancang dengan sungguh-sungguh, teliti, hati-hati, dan holistik melalui prosedur ilmiah maka hasil yang akan diperoleh relatif lebih baik. Hukum sebab akibat tidak akan melenceng jauh dari hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini teori-teori yang digunakan untuk berfungsi sebagai *prediktor* 'peramal' hasil yang akan dicapai.

2) Jika model kemitraan diterapkan dengan salah, maka pendidikan gagal

Dalam aturan logika, implikasi ini bernilai **benar**. Seperti halnya pada bagian a) di atas bahwa suatu proses yang diandalkan efektivitasnya akan membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Sebaliknya jika semua prosedur dari model kemitraan diabaikan atau tidak dilaksanakan maka hasil optimal pastilah sulit diperoleh. Jadi merupakan sebuah hukum sebab akibat bahwa jika model kemitraan tersebut diaplikasikan dengan salah, maka akibatnya kemungkinan besar mengalami kegagalan.

3) Jika model kemitraan diterapkan dengan salah, maka pendidikan berhasil

Dalam aturan logika, implikasi ini bernilai **benar**. Bandingan implikasi bagian c) ini adalah implikasi bagian b). Jika pada bagian b) di atas sangat wajar terjadi apabila

prosesnya salah maka hasilnya juga gagal. Tetapi bagaimana mungkin bisa terjadi, jika prosesnya salah tetapi justru hasilnya baik. Pertanyaan yang muncul adalah, ”mengapa hal seperti itu bisa terjadi?”

Menjawab pertanyaan ini dapat dilakukan dengan contoh implikasi yang sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa alam, misalnya peristiwa hujan turun. Contoh ”Jika hari hujan, maka halaman rumah basah”. Berdasarkan pernyataan ini, hujan menjadi **sebab** dan halaman rumah basah sebagai **akibat**. Berarti jika benar terjadi hujan, maka pastilah berakibat halaman menjadi basah. Tetapi mungkinkah halaman rumah basah meskipun hujan tidak turun? Jawabannya mungkin saja bila ada orang yang menyiram halaman dengan air.

Berdasarkan contoh sederhana di atas telah menjelaskan implikasi bagian c) bahwa dalam pendidikan tidak ada rumus pasti. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Keberhasilan sebagai akibat boleh saja disebabkan oleh faktor lain. Salah satu contoh penyebab yang lain adalah objek kemitraan yaitu **anak didik**. Potensi kebaikan **anak didik** merupakan faktor internal yang tidak bisa dianggap sepele. Faktor internal yang biasa disebut *variabel intrinsik* merupakan faktor yang tidak bisa diduga. Bisa saja terjadi bahwa keberhasilan bukan karena perlakuan tetapi lebih banyak ditentukan oleh potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak didik sebagai objek perlakuan.

4) Jika model kemitraan diterapkan dengan benar, maka pendidikan berhasil

Implikasi ini bernilai **benar**. Implikasi dari penerapan model seperti inilah menjadi harapan semua pihak. Logika manusia pasti dapat menerima dengan baik

bahwa jika suatu model sudah melalui analisis-analisis ilmiah yang didukung oleh data-data yang akurat maka hasilnya akan tepat pada target yang diharapkan. Bahwa dengan menerapkan model kemitraan tersebut maka hasil yang optimal dapat dicapai. Hal paling penting adalah bahwa dengan menerapkan model MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT dengan baik dapat berimplikasi kepada; (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, (4) pemerintah, (5) anak didik, dan (6) lahirnya budaya bermitra.

a) Keluarga

Keluarga sebagai pihak yang paling berkepentingan harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat kemitraan pendidikan. Kepada keluarga, penerapan model kemitraan pendidikan di Kota Makassar berimplikasi pada apa yang diharapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yaitu: (1) terjalinnya komunikasi yang sehat antara orangtua dan anak, (2) terlaksananya pola asuh positif di keluarga yang memotivasi anak untuk rajin bersekolah, (3) terlaksananya dukungan orangtua terhadap kegiatan sekolah anaknya secara berkelanjutan, (4) terlaksananya pembinaan karakter anak secara konsisten di lingkungan keluarga, (5) terciptanya kondisi yang nyaman dan dukungan pada saat anak sedang belajar, (6) terjalinnya komunikasi dengan wali kelas pada saat anaknya tidak masuk sekolah dan hal penting lainnya, (7) terjaganya hubungan yang harmonis dengan anak, (8) terlibat aktif dalam kegiatan paguyuban orangtua tingkat kelas, (9) keikutsertaan orangtua dalam kegiatan sekolah, (10) dukungan orangtua terhadap kegiatan sekolah.

b) Sekolah

Sekolah sebagai lembaga resmi dan ujung tombak pemerintah sangat membutuhkan jalinan kemitraan pendidikan. Dengan kemitraan tersebut sekolah menjadi tidak sendiri dalam membina dan menjaga proses maupun hasil pendidikan. Implikasi yang dihasilkan oleh penerapan model kemitraan dapat dengan mudah terwujud dalam aktivitas keseharian anak didik sebagai objek kemitraan pendidikan.

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 24), dengan penerapan model kemitraan pendidikan di Kota Makassar dapat berimplikasi bagi sekolah pada: (1) terlaksananya penyambutan kedatangan anak didik di sekolah, (2) kehadiran orangtua pada hari pertama masuk sekolah, (3) terlaksananya kegiatan berdo'a sebelum dan sesudah hari pembelajaran, (4) terlaksananya kegiatan menyanyikan lagu wajib atau membaca puisi perjuangan sesudah berdo'a sebelum memulai hari pembelajaran, (5) terlaksananya kegiatan menyanyikan lagu daerah sebelum berdo'a mengakhiri hari pelajaran, (6) terlaksananya pembiasaan beribadah bersama sesuai agamanya, (7) terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan, (8) terlaksananya upacara bendera setiap hari senin, (9) terlaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional, (10) terlaksananya pertemuan dengan orangtua pada hari pertama masuk sekolah, (11) terlaksananya kelas orangtua (*parenting class*) minimal dua kali dalam satu tahun pembelajaran, (12) terlaksananya pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran, (13) turut berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga, minimal ucapan selamat hari keluarga melalui SMS atau media lain kepada seluruh orangtua *anak didik*, (14) terlaksananya budaya senyum, salam, dan/atau sapa antar

warga sekolah saat bertemu, (15) terlaksananya kerja bakti kebersihan lingkungan sekolah minimal tiga bulan sekali, (16) tersedia tempat sampah di setiap ruang kelas, (17) tersedia sanitasi air bersih dan fasilitas MCK secara cukup dengan kondisi bersih dan layak pakai, (18) terlaksananya piket kebersihan kelas oleh *anak didik* secara bergilir, (19) terciptanya budaya antri bagi semua warga sekolah, (20) kepemilikan halaman hijau atau taman yang terawat, (21) terlaksananya pembiasaan membaca buku atau kegiatan jurnal minimal selama 15 menit sebelum hari pembelajaran, (22) ketersediaan fasilitas dan alat bermain bebas pada saat transisi kelas atau waktu istirahat, (23) memiliki prosedur keselamatan dalam kondisi darurat, (24) terselenggaranya tabungan anak didik, (25) terbangunnya budaya bertanya dan sikap kritis, (26) terlaksananya kepemimpinan kelas secara bergilir, minimal saat memimpin do'a dan menyanyikan lagu, (27) terlaksananya ceramah singkat setelah upacara bendera dari narasumber luar minimal satu bulan sekali, (28) diterapkannya sanksi yang tegas terhadap kasus kekerasan pada anak didik, (29) berperannya Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah, (30) terbentuknya paguyuban orangtua setiap kelas, (31) terlaksananya komunikasi intensif antara wali kelas dengan orangtua, (32) tersedianya aturan tata tertib sekolah yang diketahui semua warga sekolah, (33) tersedianya akses bagi anak didik berkebutuhan khusus, (34) tersedianya sudut keluarga di perpustakaan yang berisi buku-buku bacaan tentang pola pengasuhan yang baik (*positive parenting*), (35) terjalinnya komunikasi dan kemitraan dengan lingkungan sekolah.

c) Masyarakat

Komunitas masyarakat yang paling dekat dengan sekolah adalah Komite Sekolah. Komite Sekolah selama ini lebih banyak berperan sebagai mediator sekolah dengan orangtua. Kemitraan pendidikan yang dibangun oleh tri pusat pendidikan plus pemerintah akan berdampak pada optimalisasi keberadaan peran Komite Sekolah.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2015: 27) mengharapkan kemitraan tri pusat pendidikan berimplikasi positif pada Komite Sekolah, yaitu: (1) independennya Komite Sekolah dari pengaruh pihak luar, (2) terlaksananya fungsi Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah, (3) terlaksananya pertemuan internal Komite Sekolah secara mandiri untuk membahas program kerja Komite Sekolah minimal dua kali setahun, (4) hadirnya Komite Sekolah pada rapat pembahasan rencana kerja sekolah, (5) hadirnya Komite Sekolah pada acara-acara besar sekolah.

d) Pemerintah

Kemitraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintahlah yang seharusnya bersikap proaktif dalam mewujudkan kemitraan pendidikan yang baik. Kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara, penanggung jawab, penyandang dana, dan penjamin pendidikan bermutu menjadi terbantu dengan sinergitas yang terjadi dalam kemitraan. Kemitraan yang solid, efektif, dan produktif merupakan harapan dari pemerintah. Implikasinya, hasil optimal dari kemitraan pendidikan pasti akan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan pemerintah Kota.

e) Anak didik

Anak didik merupakan variabel yang paling merasakan manfaat langsung dari kemitraan pendidikan. Salah satu yang paling dibutuhkan oleh anak dan sangat bermanfaat dalam pertumbuhan jiwa dan raganya adalah perhatian. Perhatian seringkali menjadi salah satu biang yang menjadi penentu baik dan buruknya seorang anak. Perhatian yang tidak cukup bagi anak dapat berakibat anak berperilaku nakal bahkan menjadi jahat. Kekurangan perhatian atau tidak adanya perhatian menjadi pemicu anak mencari perhatian dengan cara lain. Cara lain yang ditempuh oleh anak dalam rangka ingin mencuri perhatian orangtua kerap kali berbahaya bagi dirinya dan orang lain seperti balapan liar di jalan umum, minum minuman keras, narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Tetapi dengan adanya kemitraan pendidikan yang total maka perhatian yang dibutuhkan oleh anak akan tercukupi.

f) Lahirnya budaya bermitra

Kemitraan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab cepat atau lambat pasti membuahkan hasil. Jika hasilnya belum terlihat, maka paling tidak semangat kebersamaan akan menimbulkan rasa puas bagi setiap elemen kemitraan (keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah). Kebersamaan yang memberikan kepuasan lahir dan batin senantiasa memotivasi untuk diulang dan diulang terus-menerus sampai akhirnya menjadi suatu budaya yang baik bagi pendidikan. Jika kemitraan pendidikan secara total menjadi budaya, maka pasti pengaruhnya amat besar terhadap kualitas pendidikan. Kualitas yang tidak hanya menonjolkan kehebatan

kognitif dan kemahiran psikomotor tetapi disempurnakan oleh kesejukan afektif. Jika kualitas pendidikan baik, maka tujuan pendidikan nasional pasti dapat diwujudkan.

”Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No. 20 Tahun 2003).

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai ini sangat mulia namun sangat berat untuk diraih. Bila upaya yang dilakukan selama ini terkesan tambal-sulam atau ibarat seorang yang menenun kain dari pagi hingga malam kemudian dari malam hingga pagi benang dari kain tersebut dibongkar satu persatu demikian seterusnya tanpa hasil apa-apa, yang ada hanya kelelahan.

Kemitraan pendidikan model **Mitra Kemas Kelola Selamat** yang ditawarkan, kiranya tujuan pendidikan seperti yang tertera dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut tidak menjadi sekedar *utopia* yang hanya bisa dibayangkan tetapi sulit untuk diwujudkan. Menerapkan Model Mitra Kemas Kelola Selamat dapat mewujudkan tujuan pendidikan menjadi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan dan dilihat dengan kasat mata sebelum ajal datang menjemput. Model Mitra Kemas Kelola Selamat dimaksudkan bahwa pendidikan ini mesti dimitrakan dengan **kemasan** yang rapi, kemudian **dikelola** dengan sebaik-baiknya demi **menyelamatkan** anak-anak bangsa.

Efektivitas implementasi model **Mitra Kemas Kelola Selamat** tergantung pada sistem yang dibangun oleh semua elemen kemitraan. Adapun sistem yang dimaksud adalah ***Integrative Collaborative Systems***. Penjabaran *Integrative Collaborative Systems* sebagai berikut:

1. Setiap elemen harus memiliki persepsi yang sama bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Hanya dengan pendidikanlah hidup akan memiliki makna.
2. Setiap elemen kemitraan memandang objek pendidikan sebagai *children* (anak) bukan *student* (murid atau siswa). Konotasi *children* melebihi *student* dalam hubungan emosional bagi setiap elemen kemitraan.
3. Sistem dibuat dalam suasana pendidikan yang disebut *all in an atmosphere of education* (semua berada dalam suasana pendidikan). Setiap waktu dan setiap ruang suasana pendidikan selalu ada.
4. Sistem yang dibangun memiliki konsekwensi hukum bagi setiap elemen kemitraan.
5. Target akhir sistem adalah terwujudnya **budaya pendidikan** yang mampu bertahan meskipun situasi berubah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Liku-liku peran tri pusat pendidikan *plus* pemerintah dan potret kemitraan pendidikan di Kota Makassar telah banyak diuraikan di Bab IV. Meskipun tidak diuraikan semua, tetapi paling tidak mendekati kondisi yang sesungguhnya. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Peran keluarga dalam pendidikan di Kota Makassar dalam menjalankan fungsi-fungsi pendidikan memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Peran orangtua dalam fungsinya sebagai *parenting*, dan *learning to home* menunjukkan keterlibatan yang menggembirakan. Sedangkan peran orangtua untuk fungsi *communicating*, *volunteering*, *decision making*, dan *collaborating with community* masih perlu mendapat pencerahan sehingga berjalan dengan baik. Orangtua di Kota Makassar masih banyak bersikap apatis karena tergiring oleh opini publik dan kesibukan profesi suasana perkotaan sehingga fungsi-fungsi pendidikan yang semestinya diperankan menjadi terabaikan.
2. Peran sekolah dalam pendidikan di Kota Makassar untuk kondisi SMP Negeri 8 Makassar menunjukkan prestasi yang membanggakan. Secara umum fungsi-fungsi pendidikan telah dijalankan dengan baik. Adapun kekurangannya adalah hal yang terkait kemitraan dengan orangtua dan masyarakat.

3. Peran masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar sangat beragam. Ada yang mendukung suasana pendidikan tetapi banyak pula yang justru merusak pendidikan. Mengurangi hal-hal yang merusak pendidikan diperlukan adanya ikatan. Baik ikatan kemitraan dalam tri pusat pendidikan maupun campur tangan langsung dari pembuat kebijakan. Keberadaan Komite Sekolah sebagai komunitas terdekat dengan sekolah perlu dioptimalkan baik fungsi maupun kewenangannya. Peran masyarakat merupakan kekuatan yang sangat besar apabila bisa diubah menjadi sesuatu yang bernilai positif. Sebaliknya masyarakat dapat menjadi ancaman terbesar dalam merusak hasil-hasil pendidikan jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya.
4. Peran pemerintah dalam pendidikan di Kota Makassar secara konseptual sudah mencakup keseluruhan cita-cita mulia dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun secara aktual beberapa hal masih perlu ditinjau ulang dan dioptimalkan. Banyak yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi anak didik dari perusak-perusak pendidikan.
5. Kemitraan pendidikan di Kota Makassar dalam tri pusat pendidikan belum mencapai peringkat totalitas. Kemitraan secara totalitas adalah kemitraan peringkat pertama yang disebut *full collaboration* 'kolaborasi penuh'. Tipe kemitraan pendidikan antara keluarga dan sekolah adalah tipe *coalition* 'koalisi' (peringkat II). Tipe kemitraan pendidikan antara keluarga dan masyarakat adalah *alliance* 'aliansi' (peringkat IV). Tipe kemitraan pendidikan antara sekolah dan masyarakat adalah tipe *partnership* 'partnersip' (peringkat III).

6. Model implementasi kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang menjadi hasil sintesis berdasarkan analisis peran pendidikan dan peran kemitraan pendidikan adalah MODEL MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT.

B. Saran

Peran tri pusat pendidikan di Kota Makassar yang telah diuraikan didapati kelebihan dan kekurangan. Baik kelebihan maupun kekurangan merupakan dinamika yang tidak mungkin dihindari. Oleh karena itulah upaya perbaikan dan peningkatan tidak boleh berhenti. Paling tidak selalu ada upaya mempertahankan yang baik dan menutupi yang kurang. Mempertahankan kelebihan-kelebihan yang telah diraih dan menutupi kekurangan-kekurangan yang didapati diperlukan masukan-masukan bersifat konstruktif, efektif dan praktis. Sehubungan dengan optimalisasi peran-peran pendidikan dan kemitraan pendidikan di Kota Makassar maka:

1. Kepada pihak keluarga disarankan untuk meningkatkan peran pada fungsi-fungsi *communicating*, *volunteering*, dan *collaborating with community* dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan dalam komunitas-komunitas dalam masyarakat.
2. Kepada pihak sekolah disarankan untuk memprakarsai paguyuban orangtua tingkat kelas sehingga memudahkan komunikasi terkait dengan kemitraan pendidikan yang disepakati.
3. Kepada pihak masyarakat untuk mematuhi dan mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan bidang pendidikan. Secara khusus kepada Komite Sekolah untuk

berupaya meningkatkan peran-peran strategis dengan menjadi pelopor dalam memediasi komunitas masyarakat lainnya membantu pendidikan.

4. Kepada pihak pemerintah agar meninjau ulang regulasi pendidikan mulai dari UUD 1945 sampai kepada turunan terkecil regulasi tersebut. Mengoptimalkan upaya-upaya pendidikan sesuai dengan besarnya kewenangan dalam mengatur proses pendidikan. Salah satu yang perlu disadari oleh pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan adalah bahwa pendidikan anak berlangsung 24 jam sehari semalam dan tidak dibatasi oleh ruang.
5. Pihak elemen kemitraan untuk; (1) mengoptimalkan kemitraan pendidikan di Kota Makassar antara keluarga dan sekolah disarankan untuk mengikuti SI MITRA KELOLA (Sintesis Kemitraan Keluarga dan Sekolah), (2) mengoptimalkan kemitraan pendidikan di Kota Makassar antara keluarga dan masyarakat disarankan mengikuti SI MITRA KEMAS (Sintesis Kemitraan Keluarga dan Masyarakat), dan (3) mengoptimalkan kemitraan pendidikan di Kota Makassar antara sekolah dan masyarakat disarankan mengikuti SI MITRA SELAMAT (Sintesis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat).
6. Model implementasi kemitraan pendidikan di Kota Makassar yang dilaksanakan selama ini belum optimal. Sehingga berdasarkan hasil analisis data, maka untuk mencapai hasil yang optimal disarankan untuk menggunakan MODEL MITRA KEMAS KELOLA SELAMAT. Kesemuanya ini dapat terlaksana dengan efektif jika didukung oleh sistem kolaborasi yang terintegrasi (*integrative collaborative systems*).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2006. *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 2013. *Enam Geng Motor Tebar Teror di Makassar*. <http://m.koran-sindo.com/node/314202>. Diakses pada tanggal 29 November 2013.
- _____. 2013. *2 Pelajar SMP Pentolan Geng Motor "Mappakowe" Diringkus*. <http://beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/14942-2-pelajar-smp-pentolan-geng-motor-qmappakowe-q-diringkus.html>. Diakses 29 November 2013.
- _____. 2014. *Puluhan anggota geng motor membunuh seorang mahasiswa di Tamalanrea*. Makassar: Harian Fajar
- _____. 2015. *Dewan Pendidikan Dukung Lelang Jabatan*. Makassar: Berita Kota Makassar.
- _____. 2016. *Disdik Makassar Minta Dewan Pendidikan Tak Asal Ngomong, Buktikan!* Makassar: pojoksulsel.com (online). Kamis, 14 Januari 2016.
- _____. 2016. *Pendaftaran PPDB Online Makassar 2015/2016*. (online). <http://www.pendaftaranonline.web.id/2015/06/pendaftaran-ppdb-online-makassar.html>. Diakses 9 Februari 2016.
- _____. 2016. *Calon Kepsek Makassar yang Main Sogok Langsung Gugur* (online). <http://makassar.tribunnews.com/2016/02/13/calon-kepsek-makassar-yang-main-sogok-langsung-gugur>. Diakses 16 Februari 2016.
- _____. 2014. *Stop Pekerja Anak*. <http://makassarkota.go.id/berita-201-pemkot-makassar-stop-pekerja-anak.html>. Diakses 16 Februari 2016
- Abdullah, Abdul Ghani dan Ngang, Tang Keow. 2006. *Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus Pendidikan Wanita*. Pusat pengajian ilmu pendidikan Universiti sains Malaysia 11800 Minden. Pulau Pinang. Jurnal Pendidikan 31 97-105.
- Abernethy, David dan Coombe, Trevor 1965. *Education and Politics in Developing Countries*, dalam *Harvard Educational Review*, Vol. 35, No. 3. Hlm. 287-302.

- Ahdiat, Dadang dkk. 2009. *Pengembangan Model Ruang Belajar Berdasarkan Model Mengajar dan Perilaku Siswa di sekolah dasar*. UPI, Jurnal Penelitian. Vol. 10. No. 2.
- Anwar, Wan. 2008. *Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan: Sekelumit Pembicaraan*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 13. No.3.
- Arcaro, JS. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chang, Mido; Park, Boyoung; & Kim, Sunha. 2009. *Parenting Classes, Parenting Behavior, and Child Cognitive Development in Early Head Start: A Longitudinal Model*. (Hasil Penelitian). The School Community Journal, 2009, Vol. 19, No. 1.
- Chatib, Munif.2012. *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: Kaifa.
- Chatib, Munif.2012. *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia*. Bandung: Kaifa
- Dahlan, Mohammad Djawad. 2007. *Landasan Agama*. (Bunga Rampai Rujukan Filsafat, Teori dan Praksis Ilmu Pendidikan). Bandung: UPI Press.
- Damsar, 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Pengantar Kependidikan, Landasan Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Daud, Amir. 2014. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Mutu Pendidikan (Studi di Lima Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan)*. Artikel hasil penelitian. Makassar: LPMP Sulawesi Selatan. Diakses pada tanggal 13 Mei 2016.
- Dewantara, Ki Hajar.1977. *Karya Ki Hajar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. 2015. *Petunjuk Teknis Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat di SD*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Dodd, Anne W. dan Konzal, Joan L. 2002. *How Communities Build Stronger Schools, Stories, Strategies and Promising Practices for Education Every Child*. New York: Palgrave Macmillan
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Epstein, Joyce L. 2002. *School, Family, and Community Partnerships: Caring for the Children We Share*. USA: Corwin Press.
- Fakhruddin, Asef Umar. 2008. *Pendidik Dinamis dan Inovasi dalam Dunia Pendidikan*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 13. No.2.
- Fatkhulloh, Moh. 2009. *Sang Inspirator Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pesantren di Indonesia*. UPI, Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1.
- Given, Barbara K, and DePorter, Bobbi. 2015. *Excellence in Teaching and Learning*. USA: Learning Forum Publications.
- Gnjatović, Dragana. 2015. *Stories in Different Domains of Child Development*. (Hasil Penelitian). Child care facility University of Malta. Original scientific paper UDK: 37.022 DOI: 10.17810/2015.07.
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hayat, Bahrul & Yusuf, Suhendra. 2011. *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heningtyas, Murdiana Asih dkk. 2016. *Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi "Kampung Inggris" Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 264-268
- Ibrahim, Ruslan. 2007. *Pendidikan Nilai dalam Era Pluralitas: Upaya Membangun Solidaritas Sosial*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 12. No. 3.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwan. 2011. *Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create and Share (SSCS) dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Matematika (Suatu Kajian Eksperimen Pada Jurusan Matematika*

- FMIPA Universitas Negeri Padang (UNP). UPI, Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 12. No.1.
- Iskandar. 2008. *Kecerdasan Emosi dan Komitmen Pekerjaan Dosen di Jambi*. Jurnal Psikologi. Vol.1, No. 2.
- Jalaluddin dan Idi, Abdullah. 2011. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartadinata, Sunarya. *Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa*. Artikel. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PSIKOLOGI PEND DAN BIMBINGAN/195003211974121-SUNARYO KARTADINATA/MENCARI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/195003211974121-SUNARYO_KARTADINATA/MENCARI_BENTUK_PENDIDIKAN_KARAKTER_BANGSA.pdf). Diakses 10 Desember 2011.
- Khalid, Gulson Begum dkk. 2012. *Collaboration and individual education practices among secondary schools with special education in Peninsular, Malaysia*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47 (2012) 1348 – 1352.
- Khotimah, Khusnul. 2008. *Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 13. No. 3.
- Kiswoyowati, Amin. 2011. *Pengaruh Motivasi Belajar Dan Kegiatan Belajar Siswa Terhadap Kecakapan Hidup Siswa (Studi Tentang Pembelajaran Berorientasi Kecakapan Hidup Di Smk Negeri 1 Losarang Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura-Budidaya Cabe Hibrida)*. UPI Jurnal Edisi Khusus No. 1.
- Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Krmeta, Dragoljub & Šević, Aleksandra. 2015. *Problem Behaviour at Early Age - Basis for Prediction of Asocial Behaviour*. (Hasil Penelitian), University of East Sarajevo Faculty of Philosophy Pale Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Original scientific paper Norway UDK: 37.015.3 DOI: 10.17810/2015.01.
- Kuswidanti. 2008. *Gambaran Kemitraan*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Langeveld, M.J. 1971. *Paedagogiek Teoritis/Sistematic*. Jakarta: FIP-IKIP Jakarta

- Luthfiyah. 2007. *Urgensi Pendidikan dalam Budaya Politik*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 12. No. 3.
- Makbuloh, Deden. 2008. *Model Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat*. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.3. No.1. hlm. 5.
- Margaret S. Astoyants, dkk. 2016. *Family Dysfunctions and Ways of their Overcoming by Means of Social Work*. International Journal of Environmental & Science Education. Originally published by Look Academic Publishers in IJESE (ISSN: 1306-3065) Vol. 11 Issue 7.
- Masitoh dkk. 2009. *Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kecakapan Hidup (Life Skills) pada Jenjang Sekolah Dasar*. Penelitian, Jurnal. Vol. 10. No. 2.
- Mochtar Lubis. 2008. *Ciri-ciri Manusia Indonesia, Tantangan Pendidikan (Budi Pekerti) Nasional*. (online) <https://kwarta.wordpress.com/2008/10/21/mochtar-lubis-ciri-ciri-manusia-indonesia-tantangan-pendidikan-budi-pekeriti-nasional/> diakses 16 Februari 2016.
- Muflihini, Muh. Hizbul. 2008. *Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan terhadap Teori Sifat dan Tingkah-laku*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 13. No. 1.
- Munandar, Utami. 1999. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud dan Rineka Cipta.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, Yuni Setia. 2008. *Peranan Keluarga dalam Pendidikan Emosional Anak*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vo. 13. No. 3.
- Novianti, Ida. 2008. *Fenomena Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*. Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vol. 13. No. 2.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurnaningsih. 2011. *Bimbingan kelompok untuk meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa*. UPI, Jurnal Edisi Khusus No.1.
- Nur, Muhammad. 2013. *Dua Kelompok Pemuda Bentrok di Jalan Pampang Makassar*. <http://news.okezone.com/read/2013/11/02/340/890860/dua->

kelompok-pemuda-bentrokan-di-jalan-pampang-makassar.Diakses pada tanggal 29 November 2013.

Permen 22 Th. 2006 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. 2006. Jakarta.

Prawitasari, Johana E. 2012. *Psikologi Terapan: Melintas Batas Dsiplin Ilmu*. Jakarta: Erlangga.

Purwanto, M. Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahman, Agus Abdul. 2013. *Psikolog Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengatahuan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal dan Murni, Sylviana. 2010. *Education Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rohman, Arif. 2013. *Guru dalam Pusaran Kekuasaan: Potret Konspirasi dan Politisasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Schunk, Dale H. 2012. *Learning Theories an Educational Perspective*. (Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setiawan, Deni. 2011. *Siswa SMKN 5 Makassar Raih Perunggu di World Mobile Robotic Competition 2011*. <http://indonesiaproud.wordpress.com/2011/10/31/siswa-smkn-5-makassar-raih-perunggu-di-world-mobile-robotic-competition-2011>. Diakses pada tanggal 29 November 2013.

Sirozi, M. 2010. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetriono dan Hanafie, SRDm Rita. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.

Saman, Abdul dan Hariastuti, Retno Tri. 2007. *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. Pendidikan, Jurnal Vol. 8 No. 1.

- Silalahi, Rensus. 2011. *Kontribusi Model Pembelajaran Kontekstual Tipe Inkuiri dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. UPI, Jurnal Edisi Khusus. No.2.
- Suhardita, Kadek. 2011. *Efektivitas Penggunaan Teknik Permainan Dalam Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa (Penelitian Quasi Eksperimen Pada Sekolah Menengah Atas Laboratorium (Percontohan) Upi Bandung Tahun Ajaran 2010/2011)*. UPI, Jurnal Edisi Khusus. No. 1.
- Suryanta, Sri. 2006. *Manajemen Kepribadian: Proses Menjadi*. Albayan, Jurnal Vol. 12. No. 13. Hlm. 13-22.
- Thalib, Syamsul Bachri. 2010. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. 2003. *Total Quality Management (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Umar, Supyan. 2013. *SMA 13 Makassar benamkan wakil Thailand 80*. <http://soccer.sindonews.com/read/2013/10/18/58/795828/sma-13-makassar-benamkan-wakil-thailand-8-0>. Diakses 29 November 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ulfah. *Program bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa terhadap keragaman budaya*.UPI Jurnal.
- Utari, Rahmania. 2010. *Tantangan Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat*. FIP UNY, Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th VI.
- Venera G. Zakirova & Ekaterina L. Nikitina. 2016. *Developing the Pedagogical Culture of Parents by Means of Social Partnership with a Supplementary Education Institution*. International Journal of Environmental & Science Education. Vol. 11, No. 8, 2099-2111 doi: 10.12973/ijese.2016.581a.
- Wahab, A.Azis. 2007. *Pendidikan Nasional, Daerah dan Lokal*. (Bunga Rampai Rujukan Filsafat, Teori dan Praksis Ilmu Pendidikan). Bandung: UPI Press.

- Wahyudi. 2013. *Kampus Universitas Negeri Makassar dibakar Mahasiswa*. <http://news.okezone.com/read/2013/11/25/340/902533/kampus-unm-dibakar-mahasiswa>. Diakses pada tanggal 29 November 2013.
- Witarsa. 2011. *Pengaruh Kinerja Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Nilai Terhadap Pengembangan Budaya Sekolah di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Studi di SD, SMP, dan SMK Kabupaten Sanggau)*. UPI, Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 12. No. 1.
- Zagir A. Latipov, dkk. 2016. *The Family Club Activities for Organizing a Social Partnership of the Pre-School Educational Institution and the Family*. International Journal of Environmental & Science Education. Originally published by Look Academic Publishers in IJES (ISSN: 1306-3065) Vol. 11 Issue 5.
- Zhao,Yong. 2010. *Preparing Globally Competent Teachers: A New Imperative for Teacher Education*. American Association of College for Teacher Education Journal of Teacher Education 61(5) 422–431.
- Zulkifli L. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 KISI-KISI INSTRUMEN PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi/posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M, 1998:286).

Friedman, Marilyn M (1992). *Family Nursing, Theory & Practice*.3/E. Debora Ina R.L (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
1. Bagaimana peran keluarga dalam pendidikan di Kota Makassar?	a. <i>Parenting</i>	1) Memberikan bimbingan	a) Arti penting pembimbingan anak	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik	• Penampilan fisik peserta didik di sekolah	• Raport peserta didik • Catatan kehadiran peserta didik • Bukti keaktifan orangtua menghadiri undangan sekolah
			b) Intensitas pembimbingan	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		2) Merawat	c) Cara orangtua membimbing anak a) Pemahaman orangtua tentang merawat anak b) Intensitas perawatan anak	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		• Bukti bantuan orangtua baik fisik maupun nonfisik terhadap sekolah • Tanda tangan atau paraf orangtua • Kartu/identitas keikutsertaan anak didik dalam kegiatan • Daftar hadir dalam rapat komite • SK Struktur organisasi Komite sekolah

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		3) Memotivasi	c) Cara orangtua merawat anak a) Arti penting motivasi bagi anak b) Intensitas motivasi	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		Bukti keterlibatan dalam aktivitas keagamaan, organisasi, lembaga nonformal

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		4) Menegakkan disiplin	c) Cara orangtua memotivasi a) Arti disiplin anak bagi orangtua b) Cara orangtua menegakkan disiplin	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	b. <i>Communicating</i>	Berkomunikasi secara teratur dengan staf sekolah tentang: 1) Program-program sekolah	a) Perhatian orangtua terhadap program sekolah b) Sumbangan orangtua terhadap program sekolah	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
		2) Kemajuan anak	a) Perhatian orangtua terhadap kemajuan anak	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	<i>c. Volunteering</i>		b) Respon orangtua terhadap kemajuan anak	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
		3) Urusan sekolah lainnya	Perhatian orangtua terhadap urusan sekolah	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
		Kesukarelaan membantu	a) Kesukarelaan membantu dalam seluruh kegiatan sekolah	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	d. <i>Learning to home</i>	1) Belajar di rumah	b) Kesukarelaan membantu dalam membantu seluruh kegiatan kelas Perhatian orangtua dalam kegiatan belajar anak di rumah.	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
		2) Membantu anak belajar mengerjakan PR	a) Tanggapan orangtua terhadap PR anak	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		3) Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum	b) Upaya orangtua dalam membantu PR anak a) Upaya pengembangan diri anak didik b) Pengembangan pelajaran yang diperoleh di sekolah	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	e. <i>Decision making</i>	1) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah	a) Keaktifan dalam kegiatan komite sekolah atau semacamnya	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
			b) Keaktifan memberikan saran dan masukan	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		
		2) Menjadi pemimpin orangtua atau perwakilannya	Keterlibatan sebagai anggota komite sekolah atau semacamnya	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	f. <i>Collaborating with community</i>	Berkolaborasi dengan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar peserta didik yaitu: 1) Mengidentifikasi sumber daya keluarga 2) Mengidentifikasi sumber daya masyarakat	Identifikasi sumber daya dalam keluarga seperti: a) Tingkat pendidikan b) Bakat c) Pembiayaan d) Jenis pekerjaan e) Aktivitas Identifikasi sumberdaya masyarakat seperti: a) Tingkat pendidikan b) Bakat c) Pendidikan nonformal	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		3) Mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat	d) Jenis pekerjaan e) Aktivitas f) Organisasi agama atau kemasyarakatan Kerjasama keluarga/orangtua dengan masyarakat dalam hal: a) Dukungan material terhadap anak didik b) Dukungan moral terhadap anak didik c) Dukungan kondisional	Orangtua, guru, masyarakat, pemerintah, dan anak didik		

Lampiran 2 KISI-KISI INSTRUMEN PERAN SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman,M, 1998:286).

Friedman, Marilyn M (1992). *Family Nursing, Theory &Practice.3/E*.Debora Ina R.L (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

PERAN SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
2. Bagaimana peran sekolah dalam pendidikan di Kota Makassar?	a.Penyesuaian	Kemampuan beradaptasi dalam: 1)Masyarakat	Upaya sekolah dalam pemasyarakatan peserta didik	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik	• Kegiatan intra kurikuler • Kegiatan ekstra kurikuler • Budaya sekolah	• RKM sekolah • RKT sekolah • Proker BK • Perangkat KBM • Proker OSIS • Proker organisasi ekskul

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		2) Keseluruhan dinamika kehidupan	Upaya sekolah dalam mengadaptasi peserta didik dalam dinamika kehidupan	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		
	b. Pengintegrasian	Mendidik agar kelak peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat	Upaya sekolah dalam menyelaraskan tiga aspek pendidikan sekolah yakni: a) kognitif, b) psikomotor, dan c) afektif dalam kehidupan masyarakat	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		
	c. Diagnostik dan direktif	Menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing peserta didik	Mendiagnosis peran sosial peserta didik berdasarkan a) Minat b) Bakat c) Prestasi	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	d. <i>Diferensiasi</i>	Memprediksi peran sosial peserta didik berdasarkan hasil <i>diagnosis</i> , menentukan urutan berdasarkan peran sosial tersebut, dan melatih berdasarkan kesesuaian peran sosial yang menjadi tujuan	a) Melakukan tes diagnostik b) Menganalisis hasil tes diagnostik c) Memutuskan rencana yang tepat bagi peserta didik dalam memilih jalur lanjutan d) Melakukan pendekatan kepada peserta didik dan orangtua	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	e. <i>Selektif</i>	Membantu peserta didik secara sadar berupaya menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukuman dan sebagainya	a) Penilaian afektif b) Penilaian kognitif c) Penilaian psikomotor d) Program perbaikan e) Program pengayaan f) Pemberian reward g) Pemberian hukuman	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		
	f. Hubungan pembantuan dan <i>referral</i>	Mendorong peserta didik melakukan hubungan seperti hubungan pembantuan dengan pihak lain sekaligus merujuk peserta didik untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu pula	a) Mengenalkan pihak-pihak terkait yang berhubungan kebutuhan peserta didik b) Memberikan tugas proyek untuk meperoleh pengalaman lapangan sesuai kebutuhan kurikulum	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
			c) Memberikan arahan teknis peserta didik untuk mencapai tujuan	Pemerintah, guru, orangtua, masyarakat, peserta didik		

Lampiran 3 KISI-KISI INSTRUMEN PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi/posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman,M, 1998:286).

Friedman, Marilyn M (1992). *Family Nursing, Theory &Practice*.3/E.Debora Ina R.L (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar?	a. Pemberdayaan	1) Meningkatkan kemampuan individu untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka	a) Identifikasi anak usia sekolah di lingkungan tempat tinggal	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik	Aktivitas/kegiatan	Program kegiatan
			b) Membuat program pemberdayaan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
			c) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	b.Partisipasi	2) Meningkatkan kemampuan kelompok untuk memberdayakan diri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada pada komunitas mereka	a) Identifikasi kelompok-kelompok pelajar di lingkungan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		Kelompok organisasi/komunitas pelajar
			b) Membentuk kelompok pelajar	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
			c) Melakukan pembinaan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
		1) Mendukung dalam pengambilan keputusan	a) Mendukung pengambilan kebijakan pendidikan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
		2) Mengambil bagian dalam pengambilan keputusan	b) Mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan a) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan b) Turut menjaga/menyukseskan keputusan c) Turut mengawasi pelaksanaan keputusan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	c. Penentuan nasib sendiri	1) Mendukung hak orang untuk membuat pilihan mereka sendiri	a) Memberikan alternatif pilihan kepada peserta didik b) Melindungi peserta didik dalam menentukan pilihan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
		2) Memberikan masukan dalam menentukan pilihan	a) Memberikan pertimbangan tentang kelebihan dan kekurangan pilihan b) Turut bertanggung jawab dengan pilihan yang dilakukan peserta didik	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	d. <i>Inklusi</i>	1) Mendukung kesetaraan kesempatan	a) Memberikan dukungan moral kesetaraan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
			b) Memberikan dukungan material kesetaraan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
		2) Memperjuangkan anti diskriminasi	a) Mendukung anti diskriminasi dalam pendidikan	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
			b) Mengawasi praktik diskriminasi	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
			c) Melaporkan praktik diskriminasi	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		
			d) Menolak praktik diskriminasi	Masyarakat, pemerintah, orangtua, guru, peserta didik		

Lampiran 4 KISI-KISI INSTRUMEN PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi/posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman,M, 1998:286).

Friedman, Marilyn M (1992). *Family Nursing, Theory &Practice.3/E*.Debora Ina R.L (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
4. Bagaimana peran pemerintah dalam pendidikan di Kota Makassar?	a. Penanggung jawab	Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah	Bertanggung jawab dalam: a) Membuat regulasi tentang wajib belajar b) Membuat program wajib belajar	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		Dokumen program wajib belajar Regulasi tentang wajib belajar

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
			c) Melakukan sosialisasi tentang wajib belajar	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		
			d) Melakukan pendataan usia wajib belajar	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		
			e) Melaksanakan program wajib belajar	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		
			f) Melaksanakan evaluasi program wajib belajar	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	a. Pembuat kebijakan	Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Hak pemerintah membuat kebijakan dalam: a) Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan b) Membimbing penyelenggaraan pendidikan c) Membantu penyelenggaraan pendidikan d) Mengawasi penyelenggaraan pendidikan	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		Regulasi pendidikan di Kota Makassar

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data		
				Wawancara	Observasi	Dokumentasi
	b. Penjamin mutu	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi	a) Pemerintah memberikan layanan terselenggaranya pendidikan b) Pemerintah memberikan kemudahan terselenggaranya pendidikan c) Pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		
	c. Penyelenggara	Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat	Pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan: a) Jalur pendidikan b) Jenjang pendidikan c) Jenis pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan	Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik Pemerintah, orangtua, guru, masyarakat, peserta didik		

Lampiran 5

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Unsur yang Diobservasi	Kode Data	Instrumen Pelengkap
1	2	3	4
1.	LOKASI PENELITIAN a. Kondisi Fisik SMP Negeri 8 Makassar 1) Ringkasan Sejarah SMP Negeri 8 Makassar 2) Civitas Akademika SMP Negeri 8 Makassar 3) Prasarana dan Sarana SMP Negeri 8 Makassar b. Budaya SMP Negeri 8 Makassar 1) <i>Artefak (hard culture)</i> di SMP Negeri 8 Makassar 2) <i>Budaya Non Artefak (soft culture)</i> SMP Negeri 8 Makassar	DO-LP-1 DO-LP-2 DO-LP-3 DO-LP-4 DO-LP-5	• Perekam gambar • Perekam suara • Catatan harian
2.	INFORMAN PENELITIAN a. Peserta Didik 1) Kegiatan kurikuler 2) Kegiatan ekstra kurikuler 3) Kegiatan di luar sekolah b. Orangtua Peserta Didik 1) Fungsi <i>parenting</i> 2) Fungsi <i>communicating</i>	DO-IP-1 DO-IP-2 DO-IP-3 DO-IP-4 DO-IP-5	• Perekam gambar • Perekam suara • Catatan harian

1	2	3	4
	3) Fungsi <i>volunteering</i> 4) Fungsi <i>learning to home</i> 5) Fungsi <i>decision making</i> 6) Fungsi <i>collaborating with community</i> c. Kepala SMP Negeri 8 Makassar 1) Aktivitas harian 2) Kebijakan sekolah d. Guru SMP Negeri 8 Makassar 1) Fungsi Penyesuaian 2) Fungsi Pengintegrasian 3) Fungsi Diagnostik dan Direktif 4) Fungsi Diferensiasi 5) Fungsi Selektif e. Masyarakat 1) Fungsi Pemberdayaan 2) Fungsi Partisipasi 3) Fungsi Inklusi 4) Fungsi dalam Penentuan Nasib Sendiri f. Pemerintah 1) Penanggung Jawab Pendidikan 2) Pembuat, Pembina, dan Pengendali Kebijakan Pendidikan 3) Penjamin Dana Pendidikan 4) Penyelenggara Pendidikan	DO-IP-3 DO-IP-4 DO-IP-5 DO-IP-6 DO-IP-7 DO-IP-8 DO-IP-9 DO-IP-10 DO-IP-11 DO-IP-12 DO-IP-13 DO-IP-14 DO-IP-15 DO-IP-16 DO-IP-17 DO-IP-18 DO-IP-19 DO-IP-20 DO-IP-21 DO-IP-22	

1	2	3	4
	4) Penyelenggara Pendidikan Bermutu	DO-IP-23	
3	MEDIA INFORMASI a. Televisi b. Website Pemerintah Kota Makassar c. Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar d. Media Cetak (Koran Harian) e. Media <i>Online</i> (Koran <i>Online</i>)	DO-MI-1 DO-MI-2 DO-MI-3 DO-MI-4 DO-MI-5	• Perekam gambar • Perekam suara • Catatan harian

No.	Uraian Hasil Wawancara	Kode Data & Catatan Pinggir
1.	Pertanyaan: Jawaban:	WWC-IP-1

Lampiran 7

BUKU HARIAN (LOG BOOK)
PENGALAMAN LAPANGAN

Hari/Tanggal :

Kode Latar :

No.	Jam	Uraian Catatan	Kode Data
1.			

Lampiran 8



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 23 Juli 2015

Kepada

**Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070/2060-II/BKBP/VII/2015
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 11198/P2T-BKPM/19.36P/VII/07/2015, Tanggal 13 Juli 2015, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **Drs. Islahuddin, M.Pd**
NIM / Jurusan : 11A17040/ Ilmu Pendidikan
Pekerjaan : Mahasiswa (S3) UNM
Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Makassar
Judul : **"KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR)"**

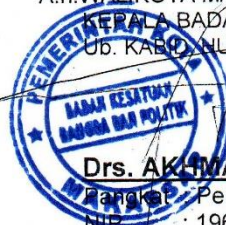
Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Disertasi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **29 Juli s/d 29 Oktober 2015**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UD. KALO, NUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.**

Kepala Penata

NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Direktur PPs UNM Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran 9



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Letjen Hertasning Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: <http://www.dikbud-makassar-info> ; e-mail : dikbudmakassar@yahoo.com



IZIN PENELITIAN

NOMOR:070/2452/DPK/VII/2015

Dasar : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
Nomor: 070/2860-II/BKBP/VII/2015 Tanggal 23 Juli 2015
Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : **Drs. Islahuddin, M.Pd**
NIM/Jurusan : 11A17040 / Ilmu Pendidikan
Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Makassar

Untuk : Mengadakan **Penelitian** di **SMP Negeri 8 Makassar** dalam rangka
Penyusunan Disertasi di **UNM** di Makassar dengan judul penelitian:

**"KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS
DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
- Tidak Mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah
- Harus mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah
- Hasil penelitian 1 (satu) exemplar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 24 Juli 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kasubag Umum & Kepegawaian



Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19621231 198003 1 258

Lampiran 10



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letjen Hertasning Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
 Website: <http://www.dikbud-makassar-info> ; e-mail : dikbudmakassar@yahoo.com



IZIN PENELITIAN

NOMOR:070/2751/DPK/X/2015

Dasar : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
 Nomor: 070/5344 -II/BKBP/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015
 Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : **Drs. Islahuddin, M.Pd**
 NIM/ Jurusan : 11A17040/ Ilmu Pendidikan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S3)
 Alamat : Jl.Bonto Langkasa, Makassar

Untuk : Mengadakan **Penelitian** di **SMP NEGERI 8 MAKASSAR** dalam
 rangka **Penyusunan Disertasi** di **UNM Makassar** di Makassar
 dengan judul penelitian :

**"KEMITRAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS
 DI SMP NEGERI 8 MAKASSAR)"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
- Tidak Mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah
- Harus mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah
- Hasil penelitian 1 (satu) exemplar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2015
 A.n Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan
 Kasubag Umum & Kepegawaian



R . L
Penata Tk. I
NIP. 19621231 198603 1 258

Lampiran 12

RIWAYAT HIDUP

Nama : **Islahuddin**
 Tempat/tanggal lahir : Pattallassang/7 Januari 1969
 Alamat Rumah : Jl. Mesjid Muhajirin III Blok C/3
 Mallengkeri Makassar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Guru Matematika SMA Negeri 9
 Makassar
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV.b
 Jabatan Fungsional : Guru Madya

Ayah : Muhammad Thahir Daeng Tiro (Almarhum)
 Ibu : Sitti Daera Daeng Te'ne
 Isteri : Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.
 Anak : (1) Fadhil Maliky Islah, (2) Yassir Sabily Islah

A. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Centere No. 1 Pattallassang Kab. Takalar SulSel (1981)
2. SMP Negeri 1 Takalar Kab. Takalar SulSel (1984)
3. SMA Negeri 1 Takalar Kab. Takalar SulSel (1987)
4. S1 Pendidikan Matematika Fakultas FPMIPA IKIP Ujung Pandang (1993)
5. S2 Pendidikan Matematika Pascasarjana UNM Makassar (2009)
6. S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNM Makassar

B. Riwayat Organisasi

1. Pramuka sebagai Pratama (Pemuka Regu Utama) (1979 – 1981)
2. OSIS SMP Negeri 1 Takalar (Wakil Ketua) (1983)
3. OSIS SMA Negeri 1 Takalar (Ketua) (1986)
4. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)/IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) (Ketua Umum) (1993 – 1995)
5. DPD II KNPI Kabupaten Takalar (Anggota) (1994)
6. Muhammadiyah Takalar (Wakil Sekretaris (1995 – 2000), Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (2010 – 2015)
7. MGMP Matematika SMA/MA Kota Makassar (Ketua) (2012 – 2014)
8. PGRI Ranting SMA Negeri 9 Makassar (Sekretaris) (2014 – 2018)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Matematika SMP Swasta Islam Istiqlal Gowa (1991 – 1993)
2. Guru Matematika SMA Negeri 3 Takalar (1993)
3. Guru Matematika SMA Negeri 13 Makassar (1993 – 2000)

4. Guru Matematika SMA Negeri 9 Makassar (2000 – sekarang)
5. Dosen Luar Biasa Pendidikan Matematika FKIP Unismuh Makassar (2010 – 2012)
6. Dosen Luar Biasa Pendidikan Matematika Faktar UIN Alauddin Makassar (2012 – 2014)
7. Dosen Luar Biasa PGSD STKIP Hasanuddin Gowa (2014 – sekarang)
8. Direktur Yayasan Media Ilmiah Center

D. Karya Ilmiah (Penelitian dan Publikasi)

1. Sekolah sebagai ajang kompetisi meraih prestasi (Karya Tulis Ilmiah)
2. Pengetahuan konsep, deklaratif, prosedural, dan kondisional sebagai syarat penting dalam mempelajari matematika (Jurnal)
3. Kreativitas siswa dalam menjawab soal matematika (Jurnal Hasil Penelitian)
4. Mengajar di kelas: wewenang atau hak? (Artikel Harian Tribun Timur)
5. Pendidikan di sekolah: jadikan semua berbicara (Artikel Harian Tribun Timur)
6. Pendidikan karakter sejak usia dini (Artikel Harian Tribun Timur)
7. Guru dewasa, pemerintah dewasa, masyarakat dewasa (Artikel Harian Tribun Timur)
8. Kreativitas sebagai salah satu syarat guru professional (Artikel Harian Tribun Timur)

Lampiran 11

Tata Tertib dan Tata Krama Siswa

A. Ketentuan Umum

Pasal 1

WAKTU

1. Siswa hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai pukul 07.25 wita
2. Siswa yang terlambat datang kurang dari 5 menit harus seizin guru BK baru diizinkan ke kelas
3. Siswa yang terlambat lebih dari 5-10 menit harus seizin guru mata pelajaran (setelah mendapat izin BK)
4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian pelajaran siswa dilarang berada diluar kelas
5. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di kelas
6. Siswa boleh meninggalkan sekolah setelah jam pelajaran selesai (kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler) dan langsung ke rumah, dilarang duduk-duduk di pinggir jalan, singgah di rumah teman kecuali seizin orangtua
7. Meninggalkan pelajaran yang sedang berlangsung harus seizin guru mata pelajaran atau guru BK
8. Izin 1 hari melalui wali kelas, guru BK dan harus ada penyampaian langsung orangtua
9. Izin 2-3 hari melalui guru pembimbing, lebih dari 3 hari melalui kepala sekolah, harus ada keterangan langsung dari orangtua (tidak dengan surat atau telepon).
10. Siswa meninggalkan sekolah selama 7 hari berturut-turut atau dalam satu bulan akan dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan).

Pasal 2

PAKAIAN SEKOLAH

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan:

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Hari Senin dan Selasa seragam PUTIH-BIRU
- 3) Hari Rabu dan Kamis pakaian seragam BATIK
- 4) Hari Jumat pakaian MUSLIM (putih-biru) bagi muslim
- 5) Sepatu hitam polos, kaos putih polos (3/4), ikat pinggang hitam polos
- 6) Memakai badge OSIS, lokasi sekolah, tingkat/kelas, papan nama
- 7) Hari Sabtu pakaian PRAMUKA, sepatu, dan kaos kaki hitam polos
- 8) Pakaian olahraga hanya dipakai pada saat jam pelajaran
- 9) Hari Senin dan upacara, memakai topi dan dasi (seragam lengkap)
- 10) Kaki baju dimasukkan ke dalam celana dan rok
- 11) Lengan baju tidak sempit dan dilarang digulung

- b. Khusus laki-laki
@) Celana panjang sampai mata kaki
- c. Khusus perempuan
 - 1) Rok panjang sampai mata kaki
 - 2) Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab putih/disesuaikan dengan baju/rok, baju putih jilbab putih, baju batik jilbab biru, baju pramuka jilbab coklat.

Pasal 3

SIKAP DAN SOPAN SANTUN

1. Siswa wajib menghormati kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang lain
2. Siswa wajib menghormati tamu sekolah
3. Siswa berkewajiban memelihara sopan santun, bersapa yang baik serta berlaku sewajarnya terhadap personal sekolah dan sesama siswa
4. Siswa boleh menerima tamu setelah mendapat izin dari guru piket/kepala sekolah di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 4

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Siswa wajib memelihara lingkungan hidup/kebersihan sekolah (lingkungan kelas, halaman, kebun sekolah).
2. Setiap kelas memiliki petugas kelas yang bertanggungjawab terhadap kebersihan dan ketertiban kelas serta perlengkapan kelas
3. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya
4. Siswa dilarang membawa/makan/minum di kelas/luar kelas kecuali di area kantin sekolah
5. Setiap perpindahan ruang, siswa wajib jalan beriringan/berbaris

B. Penjelasan

PELANGGARAN DAN SANKSI

PELANGGARAN	SANKSI
1. Terlambat ke sekolah a. 1-5 menit 1 kali b. 5-10 menit c. > 10 menit	a. Dicatat dan masuk kelas b. Mengikuti PBM atas izin guru mata pelajaran c. Panggilan orangtua dan dipulangkan
2. Tidak hadir di sekolah tanpa keterangan a. < 3 hari b. > 4 hari c. > 7 hari	a. Ditangani wali kelas b. Ditangani BK/kepala sekolah c. Dikembalikan ke orangtua (dikeluarkan)
3. Siswa di kelas pada jam istirahat	Ditegur dan dapat dipulangkan

PELANGGARAN	SANKSI
4. Ke luar kelas saat: a. Pelajaran berlangsung (tanpa izin) b. Pergantian jam pelajaran	Poin a) dan b) dibina dapat dipulangkan
5. Tidak memakai seragam sekolah a. Badge OSIS, lambing lokasi, tingkat kelas, papan nama b. Tidak memakai seragam lengkap saat upacara c. Pakaian dicoret-coret/robek d. Celana dan rok tidak sesuai • Celana 1 cm di atas lutut • Panjang rok menyentuh mata kaki e. Ikat pinggang bukan hitam f. Kaos kaki tidak polos/kurang dan 3/4 g. Sepatu tidak hitam polos h. Baju ke luar	a. Dibina dan dapat dipulangkan b. Poin b), c), d) dibina dan disuruh memakai sesuai aturan c. Poin e), f), g), h) disita (dikembalikan atas permintaan orangtua d. Poin h) dibina dan lebih 3 kali dipulangkan
6. Tidak memelihara sikap dan sopan santun	Dibina dan dapat diberi sanksi
7. a. Tidak membuang sampah pada tempatnya b. Membawa/memakan makanan/minuman di luar area kantin (dalam kelas/luar kelas)	a. Dibina dan diberi sanksi b. Tidak diperkenankan mengikuti 2 jam pelajaran dan atau pemberian sanksi khusus
8. Rambut, kuku dan tatto a. - Rambut lebih dari 2, 1, ½ cm - Rambut dicat/diukir/dimodel b. Kuku panjang/dicat c. Memakai tattoo	a. Tidak diperkenankan mengikuti proses belajar b. Langsung dipotong c. Panggil orangtua/dihapus/skorsing (3 hari)
9. Memakai aksesoris a. Gelang, cincin, kalung, anting (putra) b. Topi, sandal, jaket	Poin a) dan b) disita dan tidak dikembalikan
10. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan	Dibina dan disuruh mengikuti
11. Membawa barang tanpa rekomendasi a. Kaset, CD, VCD/DVD b. Gitar, walkman c. Buku/gambar porno d. Kartu e. Senjata tajam f. HP/headset	• Poin a) dan b) disita • Poin c), d), e) disita/panggilan orangtua/skorsing • Poin f) jika mengaktifkan di kelas/memakai pada saat pelajaran berlangsung, disita, Panggilan orangtua (dikembalikan atas permintaan orangtua secara langsung satu bulan kemudian • Jika membawa / memakai headset, disita dan tidak dikembalikan

Penjelasan

12. Membawa, menyimpan, menggunakan a. Rokok b. Minuman beralkohol c. Narkoba	@ Poin a) s/d b) • Barang disita • Panggilan orangtua • Skorsing, dikembalikan ke orangtua (dikeluarkan) • Pada kondisi tertentu dapat diserahkan ke pihak berwajib
13. Merusak fasilitas sekolah/mencoret	Sanksi khusus dan mengganti barang yang rusak dan mencari sendiri
14. Judi dan main kartu	Panggilan orangtua dan skorsing (1 minggu)
15. Membolos	• Sanksi khusus • Penyampaian orangtua 2 kali dipulangkan/skorsing (1 minggu)
16. Membuat keonaran	• Panggilan orangtua/skorsing (3-6 hari)
17. Mencuri/memajak	• Panggilan orangtua/skorsing (7 hari s.d 1 bulan)
18. Memukul/berkelahi	• Panggilan orangtua/skorsing (7 hari s.d 1 bulan) • Lebih dari 1 kali dikeluarkan
19. Pelanggaran yang belum diatur akan diatur kemudian melalui rapat dewan guru	Dapat diberi sanksi pembinaan

Keterangan:

1. @ poin = diberikan sesuai dengan poin @ = sanksi diberikan khusus
2. Jumlah skor pelanggaran mencerminkan nilai perilaku (rapor) dan dijadikan kriteria kenaikan kelas sbb:
 - a. Skor 0 – 0 = A (amat baik)
 - b. Skor 0,1 – 20,00 = B (baik)
 - c. Skor 20,01 – 100 = C (cukup)
 - d. Skor 100,01 = D (kurang)/tinggal kelas
3. Jika skor pelanggaran lebih dari 100 maka siswa bersangkutan dinyatakan tidak naik kelas atau dapat dikembalikan ke orangtua (dikeluarkan)
- C. Lain-lain
 1. Tata karma/tata tertib mengikat sejak berangkat dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah
 2. Tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
 3. Orangtua wajib memenuhi panggilan/undangan dari pihak sekolah baik tertulis maupun lisan, dan apabila tidak memenuhinya maka siswa/anak dari orangtua bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai panggilan/undangan tersebut dipenuhi termasuk panggilan penerimaan raport.
 4. Segala permasalahan yang timbul di sekolah, orangtua wajib mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah dan tidak mengambil tindakan sendiri. Apabila mengambil tindakan sendiri berarti orangtua siswa bersangkutan telah mengeluarkan anaknya secara tidak langsung dari sekolah (dikeluarkan).

5. Orangtua siswa wajib mengontrol anaknya di sekolah minimal 1 (satu) kali sebulan sebagai partisipasi PBM.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan di Makassar

Tanggal: Juli 2014

Penandatanganan

1. Kepala Sekolah (Hikmah Manganni, S.Pd. M.Pd.)
2. Wakil Dewan Guru (Hidayati Massaud, S.Pd.)
3. Komite Sekolah (Drs. Mustakim)